

KAJIAN EKONOMI DAN KEUANGAN REGIONAL

PROVINSI BALI



**MEI
2017**

**Kantor Perwakilan Bank Indonesia
Provinsi Bali**



BANK INDONESIA
BANK SENTRAL REPUBLIK INDONESIA



KAJIAN EKONOMI
DAN KEUANGAN
REGIONAL

PROVINSI BALI

MEI 2017

Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi :

Tim Advisory Ekonomi dan Keuangan

Divisi Advisory dan Pengembangan Ekonomi

Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali

Jl. Letda Tantular No. 4

Denpasar – Bali, 80234

Tel. (0361) 248982

Fax. (0361) 222988

Email :

t_setiadi@bi.go.id

umran_u@bi.go.id

dea_wr@bi.go.id

putriana_n@bi.go.id

trio_pa@bi.go.id



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga kami dapat menyusun Laporan Kajian Ekonomi dan Keuangan Regional (KEKR) Provinsi Bali Mei 2017. Laporan ini disusun untuk memenuhi kebutuhan *stakeholders* internal maupun eksternal Bank Indonesia mengenai informasi perkembangan ekonomi, moneter, perbankan, keuangan, dan sistem pembayaran di Provinsi Bali.

Bank Indonesia berpandangan bahwa perekonomian daerah khususnya Bali mempunyai posisi dan peran yang strategis terhadap pembangunan ekonomi nasional serta dalam upaya menjaga kestabilan nilai rupiah. Hal ini didasari oleh fakta pembangunan nasional merupakan agregasi dari pembangunan daerah dan semakin meningkatnya proporsi inflasi daerah dalam menyumbang inflasi nasional. Oleh sebab itu Bank Indonesia, sebagai Bank Sentral Republik Indonesia, menaruh perhatian yang besar terhadap upaya-upaya mendorong pertumbuhan ekonomi daerah guna semakin mendorong pertumbuhan ekonomi nasional termasuk dalam upaya pengendalian inflasi daerah guna mencapai target inflasi nasional.

Salah satu wujud dari kepedulian Bank Indonesia terhadap dinamika perekonomian daerah adalah melakukan berbagai kajian dan diseminasi hasil-hasil kajian kepada *stakeholders*.

Salah satunya melalui KEKR yang berisikan kajian dan informasi mengenai perekonomian daerah dan dipahami secara luas oleh seluruh pihak terkait. Selanjutnya, *stakeholders* dapat memanfaatkan informasi dari KEKR ini sesuai dengan kepentingan masing-masing dalam upaya perbaikan kinerja ekonomi Bali di masa depan. Kami juga berharap akan muncul ide-ide konstruktif yang dapat memberikan nilai tambah serta menjadi stimulus upaya-upaya pengembangan ekonomi daerah melalui kebijakan maupun kajian – kajian lanjutan.

Pada kesempatan ini, kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu dalam penyediaan data dan informasi yang kami perlukan antara lain Pemerintah Daerah Provinsi Bali, Badan Pusat Statistik (BPS), perbankan, akademisi, dan instansi pemerintah lainnya. Kami menyadari bahwa cakupan dan analisis dalam KEKR masih belum sepenuhnya sempurna, sehingga saran, kritik dan dukungan informasi/data dari Bapak/Ibu sekalian sangat diharapkan guna peningkatan kualitas dari kajian tersebut.

Akhir kata, kami berharap semoga KEKR ini bermanfaat bagi para pembaca.

Denpasar, 23 Mei 2017

KANTOR PERWAKILAN BANK INDONESIA
PROVINSI BALI

TTD

Causa Iman Karana
Kepala Perwakilan

Daftar Isi

Kata Pengantar	3
Ringkasan Eksekutif	14
Tabel Indikator Ekonomi Provinsi Bali	18
Bab I Perkembangan Ekonomi Makro Daerah	23
1.1. KONDISI UMUM	25
1.2. SISI PERMINTAAN	25
1.2.1. Konsumsi	26
1.2.2. Investasi	31
1.2.3. Neraca Perdagangan	33
1.3. SISI PENAWARAN	39
1.3.1. Lapangan Usaha Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	41
1.3.2. Lapangan Usaha Transportasi dan Pergudangan	43
1.3.3. Lapangan Usaha Konstruksi	44
1.3.4. Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	45
1.3.5. Lapangan Usaha Industri Pengolahan	48
1.3.6. Lapangan Usaha Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	49
Bab II Keuangan Pemerintah	55
2.1. GAMBARAN UMUM	53
2.2. REALISASI APBD PROVINSI BALI TAHUN 2016	55
2.2.1. Pagu Pendapatan Tahun 2016	56
2.2.2. Realisasi Belanja APBD Provinsi Bali Tahun 2016	59
2.3. REALISASI APBD KABUPATEN/KOTA PROVINSI BALI TAHUN 2016	61
2.3.1. Realisasi Pendapatan APBD Kabupaten/Kota Provinsi Bali Tahun 2016	61
2.3.2. Realisasi Belanja APBD Kabupaten/Kota Provinsi Bali Tahun 2016	64
2.4. REALISASI APBN PROVINSI BALI TAHUN 2016	66
2.4.1. Realisasi Belanja APBN Provinsi Bali Tahun 2016	66
Bab III Perkembangan Inflasi Daerah	73
3.1. PERKEMBANGAN UMUM INFLASI	75
3.2. ANALISIS PERKEMBANGAN INFLASI	76
3.2.1. Inflasi Menurut Kelompok Barang dan Jasa	76

3.2.2. Inflasi Menurut Kota	81
3.3. DISAGREGASI INFLASI	84
a) <i>Volatile Food</i>	84
b) <i>Administered Prices</i>	84
c) <i>Core Inflation</i>	85
3.4. INFLASI PERDESAAN	86
Bab IV Stabilitas Keuangan Daerah, Pengembangan Akses Keuangan dan UMKM	91
4.1. ASESMEN SEKTOR RUMAH TANGGA	91
4.2. ASESMEN SEKTOR KORPORASI	99
4.3. ASESMEN INSTITUSI KEUANGAN (PERBANKAN)	103
4.4. AKSES KEUANGAN	105
Bab V Penyelenggaraan Sistem Pembayaran dan Pengelolaan Uang Rupiah	113
5.1. PERKEMBANGAN SISTEM PEMBAYARAN	115
Bab VI Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan	121
6.1. KONDISI KETENAGAKERJAAN	123
6.2. PERKEMBANGAN KESEJAHTERAAN	127
6.3. KESEJAHTERAAN MASYARAKAT PEDESAAN	128
6.4. INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA	129
Bab VII Prospek Perekonomian Daerah	131
7.1. MAKRO EKONOMI REGIONAL	127
7.2. IINFLASI BALI TAHUN 2017	130
7.3. UPAYA PENGENDALIAN INFLASI BALI	130
Daftar Singkatan	132

Daftar Grafik

Grafik 1. 1 Pertumbuhan Ekonomi Bali dan Nasional Triwulanan	25
Grafik 1. 2 Indeks Keyakinan Konsumen	25
Grafik 1. 3 Indeks Tendensi Konsumen	27
Grafik 1. 4 Pendaftaran Kendaraan	27
Grafik 1. 5 Suku Bunga Kredit Konsumsi	27
Grafik 1. 6 Kredit Konsumsi	27
Grafik 1. 7 Survei Penjualan Eceran	28
Grafik 1. 8 Perkembangan Belanja APBN Provinsi Bali	28
Grafik 1. 9 Perkembangan Belanja APBD Provinsi Bali	29
Grafik 1. 10 Perkembangan Penjualan Kendaraan	30
Grafik 1. 11 Realisasi Belanja Modal APBD Provinsi Bali	30
Grafik 1. 12 Realisasi Belanja Modal APBN	32
Grafik 1. 13 Realisasi Konsumsi Semen	32
Grafik 1. 14 Realisasi Belanja Modal APBN	32
Grafik 1. 15 Perkembangan Impor <i>Capital Goods</i>	33
Grafik 1. 16 <i>Likert</i> Investasi, <i>Liaison</i>	33
Grafik 1. 17 SBT Investasi (SKDU)	33
Grafik 1. 18 Nilai Ekspor Luar Negeri Bali	34
Grafik 1. 19 Volume Ekspor Luar Negeri Bali	34
Grafik 1. 20 Pangsa Nilai Ekspor Komoditas Utama Tw I 2017	34
Grafik 1. 21 Pertumbuhan Nilai Ekspor Komoditas Utama	34
Grafik 1. 22 Pangsa Ekspor Berdasarkan Negara Tujuan	35
Grafik 1. 23 Pertumbuhan Nilai Ekspor berdasarkan Negara Tujuan	35
Grafik 1. 24 Tingkat Penghunian Kamar	35
Grafik 1. 25 Kunjungan Wisman ke Bali Triwulanan	37
Grafik 1. 26 <i>Average Room Rate</i> Bali	37
Grafik 1. 27 Perkembangan Nilai Impor Luar Negeri Bali	38
Grafik 1. 28 Perkembangan Volume Impor Luar Negeri Bali	38
Grafik 1. 29 Pangsa Impor Berdasarkan Klasifikasi BEC (Tw I 2017)	38
Grafik 1. 30 Perkembangan Impor Berdasarkan Klasifikasi BEC	39
Grafik 1. 31 Perkiraan Kegiatan Dunia Usaha Triwulan II 2017	39
Grafik 1. 32 Pangsa Kategori Ekonomi terhadap PDRB Provinsi Bali Triwulan I 2017	39
Grafik 1. 33 Sumbangan Kategori terhadap Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Bali Triwulan I 2017	39
Grafik 1. 34 Perkiraan Kegiatan Dunia Usaha Triwulan II 2017	40
Grafik 1. 35 Rata-Rata Lama Menginap Hotel Bintang dan Non Bintang	41
Grafik 1. 36 Kunjungan Wisman ke Bali Triwulanan	41

Grafik 1. 37 Perkembangan Kunjungan Wisman Berdasarkan Negara	41
Grafik 1. 38 Asal Wisman yang Berkunjung ke Bali Pada Triwulan I 2017	42
Grafik 1. 39 Arus Penumpang Laut Provinsi Bali	42
Grafik 1. 40 Jumlah Penumpang Pesawat Udara Bandara Ngurah Rai	42
Grafik 1. 41 Perkembangan Belanja Modal Provinsi Bali	43
Grafik 1. 42 Perkembangan KPR	43
Grafik 1. 43 Perkembangan Produksi Padi di Bali	43
Grafik 1. 44 Prakiraan Perkembangan Produksi Padi di Bali Tahun 2017	44
Grafik 1. 45 Prakiraan Perkembangan Produksi Ternak 2017	44
Grafik 1. 46 Perkembangan Volume Produksi Perikanan	45
Grafik 1. 47 Perkembangan Nilai Produksi Perikanan	45
Grafik 1. 48 Prakiraan Perkembangan Produksi Cabe Merah Besar di Bali Tw II 2017	45
Grafik 1. 49 Prakiraan Perkembangan Produksi Cabe Rawit Merah di Bali Tw II 2017	45
Grafik 1. 50 Kegiatan Dunia Usaha Sektor Pertanian	45
Grafik 1. 51 Indikator Industri Besar Sedang (IBS) dan Industri Manufaktur Mikro dan Kecil (IMK)	45
Grafik 1. 52 Kredit Kategori Industri	45
Grafik 1. 53 Perkembangan Komoditas Utama Ekspor Bali	45
Grafik 1. 54 Perkembangan Total Penjualan	45
Grafik 1. 55 Perkembangan Penjualan Kelompok Komoditas	45
Grafik 1. 56 Kredit Konsumsi	45
Grafik 2. 1 Pangsa Realisasi Anggaran Komponen Pendapatan Daerah	57
Grafik 2. 2 Struktur Realisasi PAD	58
Grafik 2. 3 Pangsa Belanja APBN Provinsi Bali 2015	66
Grafik 2. 4 Pangsa Belanja APBN Provinsi Bali 2016	67
Grafik 3. 1 Inflasi Kota di Bali (%yoy)	71
Grafik 3. 2 Perkembangan Inflasi Nasional dan Provinsi Bali (% yoy)	71
Grafik 3. 3 Inflasi Triwulanan Kelompok Bahan Makanan di Prov. Bali	72
Grafik 3. 4 Inflasi Tahunan Kelompok Bahan Makanan di Prov. Bali	73
Grafik 3. 5 Perkembangan Harga Cabai Rawit Merah (Rp/kg) di Provinsi Bali	73
Grafik 3. 6 Produksi Cabai Rawit Merah di Provinsi Bali	73
Grafik 3. 7 Inflasi Triwulanan Kelompok Makanan Jadi, Minuman, Rokok dan Tembakau di Prov. Bali	74
Grafik 3. 8 Inflasi Tahunan Kelompok Makanan Jadi, Minuman, Rokok dan Tembakau di Prov. Bali	74
Grafik 3. 9 Inflasi Triwulanan Kelompok Perumahan, Air, Listrik, Gas dan Bahan Bakar di Prov. Bali	74
Grafik 3. 10 Inflasi Tahunan Kelompok Perumahan, Air, Listrik, Gas dan Bahan Bakar di Prov. Bali	74
Grafik 3. 11 Inflasi Triwulanan Kelompok Sandang di Prov. Bali	75
Grafik 3. 12 Inflasi Tahunan Sandang di Prov. Bali	75
Grafik 3. 13 Inflasi Triwulanan Kelompok Kesehatan di Prov. Bali	75
Grafik 3. 14 Inflasi Tahunan Kelompok Kesehatan di Prov. Bali	75
Grafik 3. 15 Inflasi Triwulanan Kelompok Pendidikan, Rekreasi dan Olah Raga di Prov. Bali	76

Grafik 3. 16 Inflasi Tahunan Kelompok Pendidikan, Rekreasi dan Olah Raga di Prov. Bali	76
Grafik 3. 17 Inflasi Triwulanan Kelompok Transpor, Komunikasi dan Jasa Keuangan di Prov. Bali	76
Grafik 3. 18 Inflasi Tahunan Kelompok Transpor, Komunikasi dan Jasa Keuangan di Prov. Bali	76
Grafik 3. 19 Bobot Tahun Dasar (2012=100) Kelompok Pengeluaran Kota Denpasar	77
Grafik 3. 20 Bobot Tahun Dasar (2012=100) Kelompok Pengeluaran Kota Singaraja	77
Grafik 3. 21 Perkembangan Inflasi Berdasarkan Penyebabnya (% yoy)	79
Grafik 3. 22 Perkembangan Inflasi Berdasarkan Penyebabnya (% mtm)	80
Grafik 3. 23 Interaksi Permintaan dan Penawaran	82
Grafik 3. 24 Ekspektasi Konsumen	82
Grafik 3. 25 Perkembangan Inflasi Perdesaan (mtm) dan Nilai Tukar Petani (NTP)	82
Grafik 3. 26 Perkembangan Inflasi Perdesaan (ytd)	82
Grafik 4. 1 Kontribusi Konsumsi Rumah Tangga Terhadap PDRB Bali	91
Grafik 4. 2 Persepsi Rumah Tangga Bali Terhadap Ekonomi Saat Ini	91
Grafik 4. 3 Ekspektasi Perubahan Harga Oleh Rumah Tangga 3 Bulan Mendatang	92
Grafik 4. 4 Ekspektasi Perubahan Harga 3 Bulan Mendatang Berdasarkan Komoditi	92
Grafik 4. 5 Komposisi Pengeluaran Rumah Tangga Bali	92
Grafik 4. 6 Komposisi DPK Bali	93
Grafik 4. 7 Pertumbuhan Dana Pihak Ketiga Perseorangan Bali	94
Grafik 4. 8 Komposisi DPK Perseorangan di Bali	94
Grafik 4. 9 Pertumbuhan DPK Perseorangan Bali Tiap Jenis Penempatan	94
Grafik 4. 10 Komposisi Kredit Perseorangan dan Non Perseorangan	95
Grafik 4. 11 Komposisi Kredit Konsumsi dan Komposisi Kredit	95
Grafik 4. 12 Pertumbuhan Kredit Perseorangan di Bali	96
Grafik 4. 13 NPL dan Suku Bunga Kredit Rumah Tangga & Kredit Konsumsi di Bali	96
Grafik 4. 14 Komposisi Ekspor Bali Triwulan IV 2016	99
Grafik 4. 15 Kondisi Kegiatan Usaha di Bali	100
Grafik 4. 16 Kinerja Korporasi di Bali Berdasarkan <i>Liaison</i> Triwulan IV 2016	100
Grafik 4. 17 Perkembangan Kondisi Likuiditas Keuangan Korporasi di Bali	101
Grafik 4. 18 Kondisi Likuiditas Keuangan Korporasi Berdasarkan Sektoral	101
Grafik 4. 19 Pangsa Penggunaan Kredit Korporasi	103
Grafik 4. 20 Pertumbuhan Kredit Korporasi	103
Grafik 4. 21 NPL Kredit Korporasi	103
Grafik 4. 22 Pertumbuhan Kredit UMKM	106
Grafik 4. 23 Pangsa Kredit UMKM terhadap Total Kredit	106
Grafik 4. 24 Pangsa Nominal Kredit UMKM	106
Grafik 4. 25 Pangsa Kredit UMKM Berdasarkan Kota/Kabupaten	106
Grafik 4. 26 Rasio Rekening DPK per Penduduk Bekerja	107
Grafik 4. 27 Rasio Rekening Kredit per Penduduk Bekerja	107
Grafik 5. 1 Perkembangan Kliring	113

Grafik 5. 2 Perkembangan Tolakan Cek/BG kosong	113
Grafik 5. 3 Perkembangan Uang Kartal di Bali	114
Grafik 5. 4 Perkembangan Kegiatan Kas Keliling	114
Grafik 5. 5 Perkembangan Transaksi Jual – Beli Valas di Provinsi Bali	115
Grafik 5. 6 Perkembangan Jumlah Kunjungan Wisman di Provinsi Bali	115
Grafik 5. 7 Jumlah KUPVA BB Berizin di Provinsi Bali	115
Grafik 5. 8 Perkembangan Transaksi Penyelenggara KUPVA BB yang Berlokasi di Hotel	116
Grafik 6. 1 Perkembangan Tingkat Pengangguran di Provinsi Bali	121
Grafik 6. 2 Penambahan Tenaga Kerja (Hasil SKDU)	122
Grafik 6. 3 Perkembangan Indikator Survei Konsumen	122
Grafik 6. 4 Indikator Ekspektasi Survei Konsumen	123
Grafik 6. 5 Perkembangan Kemiskinan di Provinsi Bali	123
Grafik 6. 6 Perkembangan Gini Ratio di Provinsi Bali	123
Grafik 6. 7 NTP Bali, Indeks yang Diterima (IT), dan Indeks yang Dbayar (IB)	123
Grafik 6. 8 Perbandingan NTP Bali dan Nasional	123
Grafik 6. 9 Perkembangan IPM Provinsi Bali	123
Grafik 6. 10 Perbandingan IPM Bali dan Nasional	123
Grafik 7. 1 Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Bali Triwulanan	127
Grafik 7. 2 Ekspektasi Penghasilan	127
Grafik 7. 3 Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Bali Tahunan	129
Grafik 7. 4 Proyeksi Inflasi Bali	130

Daftar Tabel

Tabel 1. 1 Pertumbuhan PDRB Provinsi Bali di Sisi Permintaan (% , yoy)	26
Tabel 1. 2 Pertumbuhan PDRB Provinsi Bali dari Sisi Penawaran (% , yoy)	36
Tabel 2. 1 Pagu Belanja Pemerintah di Bali 2015-2016 (Rp Miliar)	53
Tabel 2. 2 Pagu Pendapatan Pemerintah di Bali 2015-2016 (Rp Miliar)	53
Tabel 2. 3 Realisasi Belanja Pemerintah di Bali 2015-2016 (Rp Miliar)	54
Tabel 2. 4 Realisasi Pendapatan Pemerintah di Bali 2015-2016 (Rp Miliar)	54
Tabel 2. 5 Persentase Realisasi Belanja Pemerintah Terhadap Pagu di Bali 2015-2016	55
Tabel 2. 6 Pagu & Realisasi APBD Provinsi Bali 2015-2016 (Rp Miliar)	55
Tabel 2. 7 Pagu dan Realisasi Pendapatan Daerah Provinsi Bali 2015-2016 (Rp Miliar)	56
Tabel 2. 8 Pagu dan Realisasi APBD P Provinsi Bali 2015-2016	59
Tabel 2. 9 Pagu APBD P Untuk 9 Kab/Kota di Wilayah Provinsi Bali 2015-2016	62
Tabel 2. 10 Realisasi Nominal Pendapatan 9 Kab/Kota di Wilayah Provinsi Bali Tahun 2015-2016	62
Tabel 2. 11 Persentase Realisasi Pendapatan Pendapatan 9 Kab/Kota di Wilayah Provinsi Bali Terhadap Pagu APBD P (2015-2016)	63
Tabel 2. 12 Pagu Belanja APBD P 9 Kab/Kota di Wilayah Provinsi Bali Periode Tahun 2015-2016	64
Tabel 2. 13 Realisasi Belanja APBD P untuk 9 Kab/Kota di Wilayah Provinsi Bali Periode 2015-2016	65
Tabel 2. 14 Realisasi Persentase Belanja Terhadap Pagu APBD P untuk 9 Kab/Kota di Wilayah Provinsi Bali Periode 2015-2016	65
Tabel 2. 15 Pagu dan Realisasi APBN P Provinsi Bali Tahun 2015-2016	66
Tabel 3. 1 Perkembangan Inflasi Kota Denpasar Per Kelompok Pengeluaran	73
Tabel 3. 2 Ranking Komoditas Berdasarkan Andil Inflasi/Deflasi di Kota Denpasar Tw I 2017	77
Tabel 3. 3 Perkembangan Inflasi Kota Singaraja Per Kelompok Pengeluaran	78
Tabel 3. 4 Ranking Komoditas Berdasarkan Andil Inflasi/Deflasi di Kota Singaraja Tw I 2017	78
Tabel 3. 5 Kegiatan TPID Hingga Mei 2017	79
Tabel 4. 1 Komposisi Pengeluaran Rumah Tangga Berdasarkan Kategori Pengeluarannya Per Bulan	92
Tabel 4. 2 Dana Rumah Tangga Untuk Membayar Cicilan dan Perubahannya Berdasarkan Pendapatan	93
Tabel 4. 3 Dana Rumah Tangga Untuk Menabung dan Perubahannya Berdasarkan Pendapatan	93
Tabel 4. 4 Komposisi Jumlah Rekening Perseorangan Per Nilai Penempatan di Bali	95
Tabel 4. 5 Penyaluran Kredit Perseorangan Secara Spasial Posisi Triwulan IV 2016	96
Tabel 4. 6 Pertumbuhan dan NPL KPR di Bali	97
Tabel 4. 7 Pertumbuhan dan NPL KKB di Bali	98
Tabel 4. 8 Komposisi Kredit Multiguna Posisi Triwulan IV 2016	98
Tabel 4. 9 NPL Kredit Multiguna	98
Tabel 4. 10 Perkiraan Beban Angsuran Terhadap Pendapatan Korporasi 6 Bulan Mendatang	102
Tabel 4. 11 Perkembangan Jumlah Bank dan Jaringan Kantor Bank di Bali	104

Tabel 4. 12 Penghimpunan Dana dan Penyaluran Kredit Bank Umum di Bali	104
Tabel 4. 13 Perkembangan Indikator BPR di Bali	105
Tabel 5. 1 Perkembangan Perputaran Kliring	113
Tabel 5. 2 Perkembangan Transaksi Uang Kartal di Bali	114
Tabel 6. 1 TPT menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan	122
Tabel 6. 2 Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas Menurut Jenis Kegiatan Utama (Ribuan Orang)	124
Tabel 6. 3 Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan	124
Tabel 6. 4 Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Menurut Jumlah Jam Kerja	124
Tabel 6. 5 Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Menurut Lapangan Usaha	124
Tabel 6. 6 Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Menurut Status Pekerjaan Utama	124
Tabel 6. 7 Jumlah Penduduk Miskin	124
Tabel 7. 1 Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Negara Tujuan Ekspor Utama Bali	129

Daftar Boks

BOKS A SURVEI HARGA PROPERTI TRIWULAN IV-2016: HARGA RUMAH DI PASAR PRIMER MENUNJUKKAN PENINGKATAN, NAMUN HARGA RUMAH DI PASAR SEKUNDER MENUNJUKKAN PENURUNAN	46
BOKS B <i>GROWTH DIAGNOSTIC</i> PROVINSI BALI	83
BOKS C MEMBANGUN OPTIMISME PEREKONOMIAN BALI	108

PERKEMBANGAN PEREKONOMIAN

Tw I 2017
5,75
%(yoy)

Tw IV 2016
5,47
%(yoy)

Nilai Kliring
18,22 Rp Triliun
16,68 Rp Triliun

■ Tw I 2017
■ Tw IV 2016

Jumlah Warkat
671 Ribu Lembar
627 Ribu Lembar

Non Tunai

Tunai

4,16
Rp Triliun

Inflow
4,57
Rp Triliun

4,97
Rp Triliun

Outflow
3,97
Rp Triliun

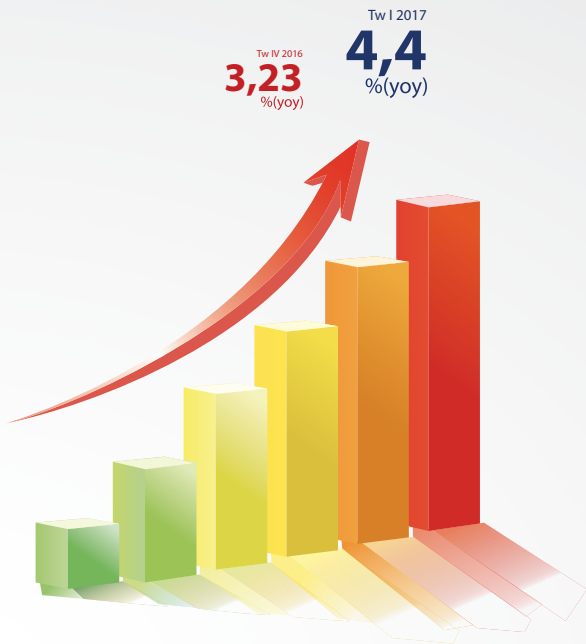
Net Inflow
812
Rp Miliar

Net Inflow
601
Rp Miliar

PERKEMBANGAN SISTEM PEMBAYARAN

AN BALI TRIWULAN I 2017

PERKEMBANGAN INFLASI



KETENAGAKERJAAN & KESEJAHTERAAN



Pengangguran Terbuka

1,89%
Agustus 2016

1,28%
Februari 2017

Angkatan Kerja

Juta Orang
2,32
Agustus 2015

Juta Orang
2,46
Agustus 2016



KEUANGAN
PEMERINTAH



PROSPEK
PEREKONOMIAN

Ringkasan Eksekutif

Perkembangan ekonomi Bali di triwulan I-2017 tumbuh lebih tinggi dibandingkan triwulan IV-2016, namun cenderung melambat bila dibandingkan triwulan I-2016. Ekonomi Bali tercatat tumbuh 5,75% (yoy) di triwulan I-2017, lebih tinggi dibanding triwulan sebelumnya yang sebesar 5,47% (yoy), dengan output riil mencapai Rp 34,83 triliun. Kinerja ekonomi Bali di triwulan I-2017, juga lebih tinggi dibanding pertumbuhan ekonomi nasional di periode yang sama, yang tercatat sebesar 5,01% (yoy). Peningkatan kinerja ekonomi Bali pada triwulan I 2017, dari sisi permintaan didorong oleh meningkatnya kinerja konsumsi dan ekspor luar negeri. Dari sisi penawaran, peningkatan kinerja ekonomi Bali di triwulan I 2017, didorong oleh peningkatan kinerja di hampir semua lapangan usaha utama. Peningkatan terjadi di lapangan usaha penyediaan akomodasi makan dan minum, pertanian, perdagangan besar dan eceran, dan industri pengolahan.

Prakiraan kinerja ekonomi Bali pada triwulan II-2017, berdasarkan berbagai prompt indikator ekonomi regional dan hasil survei serta liaison, mengindikasikan tendensi peningkatan kinerja perekonomian Provinsi Bali pada triwulan II 2017. Kinerja ekonomi Bali di triwulan II 2017, diprakirakan akan berada pada kisaran 5,87% - 6,27% (yoy). Dari sisi permintaan, prakiraan peningkatan kinerja ekonomi Bali bersumber oleh perbaikan kinerja konsumsi baik rumah tangga maupun konsumsi pemerintah dan perbaikan kinerja ekspor luar negeri (barang dan jasa) serta meningkatnya kinerja investasi seiring dengan mulai dilaksanakannya beberapa proyek infrastruktur pemerintah serta investasi swasta. Sementara itu, peningkatan kinerja konsumsi didorong oleh faktor musiman perayaan hari keagamaan di triwulan II-2017 yaitu Galungan, Kuningan, Ramadhan dan Idul Fitri, pembayaran gaji ke 13 dan 14 pegawai negeri sipil (PNS), serta persiapan tahun ajaran baru sekolah. Kinerja ekspor yang meningkat, didorong oleh mulai masuknya periode pariwisata di triwulan II-2017, yang akan mencapai puncaknya di triwulan III-2017. Peningkatan kinerja ekonomi di triwulan II-2017, juga didorong oleh terus meningkatnya kinerja ekonomi mitra dagang Bali, sehingga akan mendorong permintaan ekspor barang dari Bali.

Secara keseluruhan, realisasi belanja pemerintah di tahun 2016 tumbuh sebesar 6,95% (yoy) atau meningkat dari Rp 27,65 triliun di tahun 2015 menjadi sebesar Rp 29,57 triliun di 2016. Secara nominal, porsi terbesar realisasi belanja dikontribusikan oleh APBD tingkat Kab/Kota, kemudian belanja APBN dan APBD Provinsi. Realisasi belanja APBD Kab/Kota di tahun 2016 tercatat sebesar Rp 16,19 triliun atau sebesar 54,75% dari total realisasi belanja Pemerintah di Provinsi Bali, meningkat sebesar 14,94% (yoy) dibandingkan tahun 2015. Sementara itu, realisasi belanja APBN di Provinsi Bali di sepanjang tahun 2016 mencapai Rp 7,96 triliun atau sebesar 26,91%

Perekonomian Bali triwulan I 2017 meningkat menjadi sebesar 5,75% (yoy)

Perekonomian Bali triwulan II 2017 diperkirakan mengalami peningkatan pada kisaran 5,87% - 6,27% (yoy)

Persentase realisasi Belanja Pemerintah di Provinsi Bali pada tahun 2016 tercatat lebih rendah dibandingkan dengan tahun 2015.

dari total realisasi belanja pemerintah di Provinsi Bali. Komponen belanja ini mengalami penurunan sebesar 7,06% (yoy) dibandingkan 2015. Sedangkan realisasi belanja APBD Provinsi Bali di tahun 2016, tercatat sebesar Rp 5,42 triliun atau sebesar 18,33% dari total realisasi belanja pemerintah, meningkat 8,44% (yoy) dibandingkan tahun 2015. Sejalan dengan penurunan kinerja pertumbuhan konsumsi pemerintah di tahun 2016, yang kontraksi sebesar 4,47% (yoy), jauh lebih rendah dibandingkan dengan tahun 2015 yang tumbuh sebesar 6,56% (yoy), persentase realisasi belanja pemerintah terhadap pagu anggaran di tahun 2016 juga menunjukkan penurunan dibandingkan 2015. Persentase realisasi anggaran belanja pemerintah di tahun 2016 tercatat sebesar 89,74%, lebih rendah dibandingkan dengan tahun 2015 yang sebesar 89,85%.

Inflasi Bali pada triwulan I 2017 tercatat sebesar 4,4% (yoy), lebih tinggi dibandingkan dengan triwulan sebelumnya (3,23%) dan lebih tinggi dari inflasi nasional 4,17% (yoy).

Inflasi Bali pada triwulan I 2017 kembali mengalami peningkatan dibandingkan dengan triwulan sebelumnya sehingga berada pada kisaran atas proyeksi Bank Indonesia. Pada triwulan I 2017 inflasi Bali tercatat sebesar 4,4% (yoy), lebih tinggi dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang sebesar 3,23% (yoy). Meskipun demikian, angka tersebut masih dalam kisaran proyeksi Bank Indonesia. Inflasi Bali triwulan I 2017 juga lebih tinggi dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya yang tercatat sebesar 3,59% (yoy). Tekanan inflasi tertinggi dialami kota Singaraja dengan laju inflasi sebesar 5,41% (yoy), sedangkan kota Denpasar mengalami inflasi yang lebih landai sebesar 4,18% (yoy). Berdasarkan disagregasinya, peningkatan tekanan inflasi pada triwulan laporan terutama didorong oleh kelompok *administered prices* dan *volatile food*. Sementara itu kelompok inti menunjukkan pergerakan pada level moderat. Meski tercatat meningkat, pencapaian inflasi Bali pada triwulan I 2017 masih sejalan dengan sasaran inflasi berdasarkan PMK No.93/PMK.011/2014 sebesar $4\% \pm 1\%$. Terjaganya inflasi di Provinsi Bali didukung dengan semakin solidnya upaya pengendalian inflasi yang dilakukan Bank Indonesia dan Pemerintah Daerah melalui forum Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID). Namun demikian, ke depan masih perlu diperhatikan beberapa potensi risiko seiring penyesuaian harga pada kelompok *administered prices* dan peningkatan permintaan terhadap komoditas pangan strategis. Pada April 2017, Provinsi Bali mengalami deflasi sebesar -0,14% (mtm) atau sebesar 4,44% (yoy). Pencapaian ini lebih baik dibandingkan dengan nasional yang mengalami inflasi sebesar 0,09% (mtm). Meskipun demikian, secara tahunan pencapaian inflasi Bali masih lebih tinggi dibandingkan dengan kondisi Nasional yang mengalami inflasi sebesar 4,17% (yoy). Pada triwulan laporan rata-rata Nilai Tukar Petani (NTP) mengalami penurunan dari 106,98 pada triwulan IV 2016 menjadi 105,59 pada triwulan I 2017. Kondisi tersebut mencerminkan kesejahteraan petani yang sedikit menurun seiring dengan penurunan pendapatan petani sejalan dengan kondisi inflasi perdesaan yang relatif rendah.

Pada triwulan IV 2016, stabilitas sistem keuangan Bali masih cukup terjaga, terutama dari ketahanan sektor rumah tangga. Tingkat konsumsi masyarakat yang masih cukup tinggi, perilaku berutang yang masih normal, dan risiko kredit yang masih terjaga, berdampak minimal pada kerentanan sistem keuangan. Dari sisi sektor korporasi, meskipun eskposur kredit perbankan pada sektor ini hanya sebesar 31,7% dari total kredit di Bali, kerentanan yang terjadi pada sektor korporasi tetap perlu diwaspadai. Hal tersebut mengingat, kondisi keuangan sektor rumah tangga yang menjadi eskposur dominan kredit perbankan di Bali juga dipengaruhi oleh kinerja sektor korporasi. Meskipun demikian, masih kuatnya ekonomi domestik masih mendukung ketahanan stabilitas keuangan di Bali. Perkembangan penyaluran kredit UMKM menunjukkan peningkatan terlihat dari laju pertumbuhan kredit UMKM tercatat mengalami peningkatan, dari yang semula tumbuh sebesar 16,31% (yoy) pada triwulan IV 2016 menjadi sebesar 16,79% (yoy) di periode laporan. Peningkatan laju penyaluran kredit UMKM didorong oleh peningkatan penyaluran kredit di kategori jasa-jasa seiring dengan peningkatan kinerja industri pariwisata yang semula tumbuh 26% (yoy) pada triwulan sebelumnya menjadi sebesar 38,3% (yoy). Perkembangan tersebut juga diiringi oleh masih terjaganya kualitas kredit UMKM (NPL) dibawah threshold 5% yaitu sebesar 3,4%. Meskipun demikian, nilai NPL UMKM pada periode laporan menunjukkan peningkatan dari triwulan sebelumnya (2,1%), sehingga ke depan perlu diwaspadai peningkatan resiko kredit UMKM.

Aktivitas transaksi sistem pembayaran tunai Provinsi Bali pada triwulan I 2017 berada pada posisi *net inflow* (Rp 601 miliar) setelah pada triwulan sebelumnya terjadi *outflow* (Rp 812 miliar) terkait dengan musim libur akhir tahun 2016. Aliran uang keluar yang tinggi pada triwulan sebelumnya diperkirakan kembali masuk ke perbankan dan bermuara ke Bank Indonesia (*inflow*) sehingga menyebabkan net inflow. Sejalan dengan kondisi tersebut, transaksi pembayaran non tunai (dengan mekanisme kliring) tercatat mengalami perlambatan baik secara nominal maupun volume. Perlambatan tersebut merupakan dampak lanjutan dari kebijakan penurunan batas minimal nilai transaksi melalui BI-RTGS dari Rp500 juta kembali menjadi Rp100 juta sejak Juli 2016. Selain itu, dikeluarkannya PBI 18/43/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/29/PBI/2006 tentang Daftar Hitam Nasional Penarik Cek dan/atau Bilyet Giro Kosong pada Desember 2016 diperkirakan ikut mempengaruhi kegiatan transaksi kliring debit (Cek dan/atau Bilyet Giro), dimana transaksi kliring debit menjadi lebih ketat.

Aktivitas transaksi sistem pembayaran tunai Provinsi Bali pada triwulan I 2017 berada pada posisi *net inflow* (Rp 601 miliar) setelah pada triwulan sebelumnya terjadi *outflow* (Rp 812 miliar) terkait dengan musim libur akhir tahun 2016. Aliran uang keluar yang tinggi pada triwulan sebelumnya diperkirakan kembali masuk ke perbankan dan bermuara ke Bank Indonesia (*inflow*) sehingga menyebabkan net inflow. Sejalan

Kinerja kredit korporasi dan rumah tangga Provinsi Bali triwulan I 2017 masih cukup terjaga. Penyaluran kredit UMKM pada triwulan I 2017 menunjukkan peningkatan. Namun demikian, perlu diwaspadai peningkatan resiko kredit UMKM ke depan seiring meningkatnya NPL pada periode laporan.

Sistem pembayaran non tunai tercatat mengalami net inflow pada triwulan I 2017.

Perkembangan transaksi jual-beli valas di Provinsi Bali mengalami peningkatan pada periode Januari-Februari 2017.

dengan kondisi tersebut, transaksi pembayaran non tunai (dengan mekanisme kliring) tercatat mengalami perlambatan baik secara nominal maupun volume. Perlambatan tersebut merupakan dampak lanjutan dari kebijakan penurunan batas minimal nilai transaksi melalui BI-RTGS dari Rp500 juta kembali menjadi Rp100 juta sejak Juli 2016. Selain itu, dikeluarkannya PBI 18/43/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/29/PBI/2006 tentang Daftar Hitam Nasional Penarik Cek dan/atau Bilyet Giro Kosong pada Desember 2016 diperkirakan ikut mempengaruhi kegiatan transaksi kliring debit (Cek dan/atau Bilyet Giro), dimana transaksi kliring debit menjadi lebih ketat.

Perkembangan transaksi jual – beli valas di Provinsi Bali pada Januari-Februari 2017 mencapai Rp 5,2 triliun, tumbuh 9,0% (yoy) dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang mencapai Rp 4,8 triliun. Dari total transaksi valas pada Januari-Februari 2017 tersebut, transaksi pembelian dan penjualan valas masing-masing tercatat sebesar Rp 2,6 triliun. Peningkatan jumlah transaksi Kupva pada Januari-Februari 2017 diperkirakan dipicu oleh peningkatan jumlah wisman yang berkunjung ke Bali pada periode yang sama.

Jumlah angkatan kerja Bali pada Februari 2017 tercatat sebesar 2,47 juta orang atau meningkat 4,5% (yoy) dibandingkan Februari 2016 dan meningkat sebesar 0,9% dibandingkan bulan Agustus 2016

Secara umum perkembangan ketenagakerjaan Provinsi Bali pada Februari 2017 menunjukkan perbaikan. Berdasarkan data BPS, jumlah angkatan kerja di Februari 2017 tercatat sebesar 2,47 juta orang atau meningkat 4,5% (yoy) dibandingkan Februari 2016 dan meningkat sebesar 0,9% dibandingkan bulan Agustus 2016. TPAK di Februari 2017 tercatat sebesar 76,87%, lebih tinggi dibandingkan dengan periode Februari 2016 (75,28%), namun lebih rendah dibandingkan Agustus 2016 (77,24%). Peningkatan angkatan kerja dan TPAK pada Februari 2017 juga diiringi oleh peningkatan kesempatan bekerja. Perbaikan kondisi tenaga kerja pada Februari 2017 juga dikonfirmasi oleh hasil SKDU dan SK. Berdasarkan hasil SKDU, nilai Saldo Bersih Tertimbang (SBT) penggunaan tenaga kerja pada triwulan I 2017 tercatat sebesar -2,75%, lebih tinggi dibanding triwulan IV 2016 dan triwulan I 2016 yang masing-masing sebesar -17,02% dan -7,89%. Sejalan dengan hasil SKDU, SK triwulan I 2017 menunjukkan tendensi perbaikan terkait kondisi tenaga kerja. Hal ini tercermin dari tingkat kepercayaan konsumen terhadap indikator ketersediaan lapangan kerja saat ini yaitu sebesar 90,3, lebih tinggi dibandingkan dengan triwulan IV 2016 yang sebesar 88,3.

Jumlah penduduk miskin¹ di Wilayah Bali menurun pada September 2016 jika dibandingkan dengan jumlah penduduk miskin di periode Maret 2016, maupun pada periode yang sama tahun lalu. Jumlah penduduk miskin tercatat sebesar 174,94 ribu orang atau 4,15% dari jumlah penduduk Bali di September 2016. Sementara itu, pada Maret 2016 jumlah penduduk miskin tercatat sebesar 178,18 ribu orang atau 4,25% dari jumlah penduduk Bali di periode tersebut. Apabila dibandingkan dengan periode

¹ Untuk mengukur kemiskinan, BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (basic needs approach). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Dengan pendekatan ini, dapat dihitung Headcount Index, yaitu persentase penduduk miskin terhadap total penduduk

yang sama tahun lalu, jumlah penduduk miskin turun cukup besar yaitu sebesar 218,79 ribu orang atau sekitar 5,25% dari jumlah penduduk Bali di September 2015. Menurunnya jumlah penduduk miskin, didorong oleh penurunan penduduk miskin pada wilayah perkotaan. Jumlah penduduk miskin pada wilayah perkotaan pada September 2016 tercatat sebesar 93,74 ribu orang, menurun dari Maret 2016 yang tercatat sebesar 96,98 ribu orang. Meskipun jumlah penduduk miskin mengalami penurunan, Indeks Nilai Tukar Petani (NTP) Provinsi Bali di triwulan I 2017 (105,6) menunjukkan penurunan dibandingkan dengan triwulan IV 2016 (107). Penurunan NTP menggambarkan adanya penurunan kesejahteraan petani dan daya beli petani khususnya di daerah pedesaan.

Pertumbuhan ekonomi Provinsi Bali pada triwulan III 2017, diperkirakan mengalami akan peningkatan dalam kisaran 6,19%-6,59% (yoy). Dari sisi permintaan, peningkatan terutama didorong oleh sebagian besar komponen, terutama konsumsi, investasi dan ekspor luar negeri. Sementara itu dari sisi penawaran, peningkatan didorong oleh peningkatan kinerja sebagian besar lapangan usaha utama yaitu lapangan usaha penyediaan konstruksi, akomodasi makan dan minum, perdagangan besar dan eceran, serta transportasi dan pergudangan. Dengan perkembangan terakhir, perekonomian Provinsi Bali untuk keseluruhan tahun 2017 diperkirakan akan mengalami perlambatan dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi Bali tahun 2016, yang akan berada dalam kisaran 6,10%-6,50% (yoy). Dari sisi permintaan, prakiraan perlambatan kinerja disebabkan oleh melambatnya kinerja beberapa komponen yaitu konsumsi rumah tangga dan investasi.

Inflasi Bali triwulan III 2017 diperkirakan melandai pada kisaran 3,3%±1% (yoy). Optimisme terjaganya inflasi pada periode tersebut seiring dengan relatif minimnya hari raya keagamaan pada triwulan III 2017. Meskipun demikian, masih terdapat potensi tekanan inflasi yang bersumber dari potensi peningkatan permintaan mengingat triwulan III 2017 merupakan periode peak season pariwisata. Dengan demikian, inflasi Bali tahun 2017 diperkirakan akan berada dalam kisaran 4%±1% (yoy), lebih tinggi dibandingkan dengan inflasi Bali tahun 2016 yang sebesar 3,23% (yoy). Berdasarkan disagregasinya, tendensi peningkatan inflasi pada tahun 2017 terutama bersumber dari *administered prices* dan *volatile food*. Sementara itu tekanan kelompok *core inflation* relatif stabil. Berdasarkan disagregasinya, secara tahunan meningkatnya inflasi pada tahun 2017 terutama bersumber dari kelompok *administered prices* dan *volatile food*. Sementara itu tekanan kelompok *core inflation* diperkirakan masih stabil.

Jumlah penduduk miskin di Bali, tercatat sebesar 174,94 ribu orang atau 4,15% pada September 2016, menurun dibandingkan Maret 2016 yang tercatat sebesar 178,18 ribu orang atau 4,25%.

Perekonomian Bali triwulan III 2017 diperkirakan tumbuh kisaran 6,19%-6,59% (yoy)

Perekonomian Bali tahun 2017 diperkirakan tumbuh pada kisaran 6,1%-6,5% (yoy)

Inflasi Bali 2017 diperkirakan berada dalam kisaran 4%±1% (yoy).

Tabel Indikator

PDRB DAN INFLASI

INDIKATOR	2015				2015	2016				2016	2017
	I	II	III	IV		I	II	III	IV		
EKONOMI MAKRO REGIONAL											
Produk Domestik Regional Bruto (%)											
Berdasarkan Kategori:	5.94	5.86	6.21	6.10	6.03	6.38	6.54	6.61	5.47	6.24	5.75
- Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2.59	4.40	1.45	2.45	2.72	2.03	0.34	6.23	3.78	3.10	4.34
- Pertambangan dan Penggalian	(4.19)	(6.53)	(9.81)	(6.57)	(6.83)	5.01	6.31	5.71	0.35	4.28	2.54
- Industri Pengolahan	6.73	8.57	6.88	6.34	7.13	4.68	2.15	3.30	2.99	3.26	5.32
- Pengadaan Listrik dan Gas	8.58	(2.50)	(0.57)	1.48	1.59	10.58	15.68	9.90	(1.63)	8.31	0.52
- Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0.93	1.10	0.76	5.12	1.99	9.64	6.82	6.14	3.05	6.34	1.82
- Konstruksi	2.67	3.61	6.06	7.59	5.01	7.62	8.07	6.98	6.43	7.26	6.32
- Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	7.92	6.85	9.12	7.86	7.94	8.57	6.49	5.22	6.31	6.61	7.37
- Transportasi dan Pergudangan	4.02	3.82	5.11	5.15	4.54	6.89	8.18	10.22	5.55	7.72	5.21
- Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	7.42	6.18	5.73	5.19	6.11	6.15	6.78	7.48	6.31	6.69	7.78
- Informasi dan Komunikasi	9.79	9.05	10.77	10.12	9.94	8.23	8.91	8.06	9.15	8.59	7.30
- Jasa Keuangan dan Asuransi	6.49	4.03	10.36	5.78	6.66	8.45	7.67	7.05	9.08	8.06	4.14
- Real Estate	5.86	4.95	4.92	5.09	5.20	5.79	5.53	4.52	2.77	4.63	2.63
- Jasa Perusahaan	5.23	6.91	7.15	8.54	6.99	10.14	6.39	6.27	4.87	6.85	6.02
- Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	7.28	7.92	9.40	8.31	8.27	5.48	15.19	2.32	0.05	5.44	(0.39)
- Jasa Pendidikan	8.75	8.85	8.24	9.91	8.94	9.50	9.37	8.72	8.15	8.91	7.30
- Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	8.06	7.90	9.77	9.26	8.76	9.96	9.50	8.57	8.06	9.00	7.58
- Jasa lainnya	8.96	7.41	7.60	8.01	7.99	7.70	8.34	9.09	8.92	8.52	8.53
Berdasarkan Pengeluaran:											
- 1. Pengeluaran Konsumsi	7.81	6.44	6.13	8.56	7.24	7.58	8.49	4.46	0.19	4.99	4.32
- 1 a. Konsumsi Rumah Tangga	8.42	7.33	6.60	7.55	7.46	7.88	8.22	6.11	4.70	6.69	4.80
- 1 b. Konsumsi LNPR	(1.90)	(1.31)	1.30	14.80	3.17	6.72	12.17	11.76	4.07	8.58	5.85
- 1 c. Konsumsi Pemerintah	4.43	2.86	4.42	12.20	6.56	4.91	9.49	(4.46)	(18.27)	(4.47)	(0.64)
- 2. Investasi	5.32	4.91	4.17	5.62	5.00	9.66	9.51	9.14	7.22	8.86	5.81
- 2 a. PMTB	7.43	7.61	6.09	5.76	6.69	9.52	9.49	9.00	7.21	8.78	5.79
- 2 b. Perubahan Inventori	(83.08)	(85.16)	(80.77)	(17.02)	(77.76)	45.99	16.15	44.21	10.03	27.45	9.50
- 3. Neraca Perdagangan Bersih	(5.17)	3.97	32.42	(122.32)	(5.34)	(18.14)	(56.05)	23.92	(1,241.19)	5.18	20.95
- 3 a. Ekspor Luar Negeri	12.97	17.54	(3.58)	0.50	6.02	13.16	12.75	16.39	16.78	14.80	17.49
- 3 b. Impor Luar Negeri	(19.84)	13.26	(14.29)	(15.94)	(10.89)	23.02	12.82	21.57	31.82	22.49	19.38
- 3 c. Net Ekspor Antar Daerah	42.82	20.95	(3.81)	11.40	14.06	20.86	22.16	13.93	2.10	13.94	15.99
Ekspor											
Nilai Ekspor Nonmigas (USD Juta)	137.56	122.35	107.74	128.22	495.87	121.61	128.39	106.53	125.96	482.49	35.88
Volume Ekspor Nonmigas (ribu ton)	27.80	29.05	25.81	93.17	175.84	87.68	30.00	21.23	25.95	164.87	21.46
Impor											
Nilai Impor Nonmigas (USD Juta)	32.14	30.69	21.55	25.49	109.87	46.13	25.53	22.54	39.16	133.35	18.31
Volume Impor Nonmigas (ribu ton)	30.87	2.00	3.10	7.99	43.97	17.94	1.65	1.70	2.16	23.44	1.58
Laju Inflasi Provinsi Bali (% yoy)	6.42	6.97	6.56	2.75	2.75	3.59	2.96	3.18	3.23	3.23	4.40

KREDIT RUMAH TANGGA (BANK UMUM - LOKASI PROYEK)

Triliun Rp

INDIKATOR	2014				2015				2016				2017
	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I
DANA													
Total (Rp triliun)	0,05	46,31	48,28	49,86	48,68	49,54	50,66	52,62	49,96	51,84	51,98	53,98	52,94
Giro (Rp triliun)	3,15	3,17	3,37	3,36	2,98	3,15	3,18	3,31	3,05	3,08	3,08	3,04	2,75
Tabungan (Rp triliun)	0,03	27,51	28,78	29,40	28,42	28,38	29,36	30,74	29,31	30,92	31,07	32,75	31,93
Deposito (Rp triliun)	14,69	15,63	16,13	17,09	17,29	18,02	18,12	18,56	17,60	17,84	17,83	18,20	18,27

Triliun Rp

INDIKATOR	2014				2015				2016			
	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV
Kredit RT. Total	22,147	22,852	23,820	24,772	25,292	25,974	26,820	27,479	27,871	28,441	28,969	29,619
KPR	10,694	11,263	11,380	11,743	11,875	12,012	12,227	12,435	12,448	12,408	11,739	11,699
RT. KPR sd 21	3,115	3,235	3,253	3,259	3,200	3,180	3,174	3,127	3,088	3,007	2,621	2,443
RT. KPR sd 70	3,274	3,423	3,513	3,598	3,636	3,711	3,799	3,946	3,992	3,963	3,794	3,898
RT. KPR 70+	3,652	3,856	3,980	4,216	4,372	4,428	4,570	4,665	4,669	4,717	4,574	4,628
RT. KPA sd 21	55	51	49	48	48	46	43	44	48	44	41	39
RT. KPA sd 70	133	130	123	124	121	117	114	119	119	117	108	107
RT. KPA 70+	86	92	72	69	67	71	66	62	54	51	48	46
RT. Ruko	378	476	389	428	432	459	461	473	478	510	552	540
KKB	1,870	2,013	2,139	2,259	2,376	2,451	2,556	2,289	2,266	2,253	2,299	2,270
RT. KKB Roda 4	1,682	1,799	1,916	2,040	2,158	2,236	2,354	2,096	2,084	2,080	2,114	2,107
RT. KKB Roda 2	102	118	127	140	136	138	135	112	105	120	114	102
RT. KKB Roda 6	40	47	52	46	52	51	44	56	52	27	46	37
RT. KKB Lainnya	46	49	44	33	31	26	23	24	25	25	25	24
RT. Multiguna	7,404	7,745	8,281	8,923	9,187	9,599	10,020	10,624	10,991	11,495	12,373	12,866
NPL (Gross %)	0.53	0.52	0.55	0.63	0.63	0.70	0.74	0.76	1.09	1.13	1.18	1.03

KREDIT KORPORASI (BANK UMUM - LOKASI PROYEK)

Miliar Rp

INDIKATOR	2014				2015				2016				2017
	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I
Kredit Korporasi (Rp triliun)	18,65	20,35	21,71	23,77	24,08	24,84	25,75	26,64	27,46	27,53	28,05	28,13	28,21
Modal Kerja (Rp triliun)	7,38	8,56	9,21	10,01	9,97	10,14	10,42	10,58	11,09	11,58	11,44	10,55	10,65
Investasi (Rp triliun)	11,19	11,70	12,41	13,67	14,02	14,61	15,24	15,98	16,29	15,87	16,53	17,50	17,47
NPL (Gross, %)	2,46	2,24	2,47	2,55	1,64	3,37	3,46	3,97	4,85	5,29	5,85	4,93	0,08

PERBANKAN – BANK UMUM (LOKASI BANK)

Indikator	2014				2015				2016				2017
	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I
PERBANKAN													
Total Asset (Rp Triliun)	75,05	79,5	83,83	85,78	85,39	88,52	92,28	92,84	91,46	94,37	98,1	100,31	101,03
DPK (Rp Triliun)	63,9	66,5	70,54	70,51	72,01	73,58	76,54	75,5	75,56	77,61	79,39	79,53	81,57
- Giro (Rp Triliun)	12,23	13,83	14,11	11,96	12,86	13,7	15	13,06	13,89	13,99	14,92	13,13	14,41
- Tabungan (Rp Triliun)	31,17	30,96	32,9	33,9	32,46	32,35	34,09	35,8	33,85	35,56	36,3	38,29	36,83
- Deposito (Rp Triliun)	20,49	21,71	23,53	24,72	26,69	27,51	27,44	26,54	27,81	28,04	28,16	28,07	30,33
Kredit (Rp Triliun) - lokasi bank	50,33	52,83	55,09	57,2	57,96	59,77	60,97	62,8	63,07	65,5	67,03	68,91	69,60
- Modal Kerja	19,99	21,29	22,26	22,75	22,94	23,76	24,01	24,5	24,41	25,85	26,28	28,61	26,85
- Investasi	11,35	11,9	12,55	13,4	13,62	13,87	14,14	14,58	14,44	15,04	15,53	16,18	16,32
- Konsumsi	18,99	19,64	20,28	21,05	21,4	22,13	22,81	23,76	24,21	24,7	25,21	25,87	26,43
Loan to Deposit Ratio (%)	78,77	79,44	78,1	81,14	80,49	81,24	79,66	83,24	83,47	84,53	84,44	86,66	85,32
NPL gross (%)	0,7	1,66	0,95	0,91	1,34	1,91	1,89	2,06	2,38	2,35	2,67	2,09	2,73

INDIKATOR PERBANKAN KABUPATEN/KOTA - BANK UMUM

Triliun Rp

Kabupaten/Kota	Indikator	2014				2015				2016				2017
		I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I
Jembrana	Kredit	1,32	1,39	1,45	1,52	1,57	1,66	1,73	1,84	1,90	2,04	2,09	2,18	2,26
	DPK	0,88	0,97	1,05	1,04	1,07	1,06	1,12	1,19	1,17	1,19	1,26	1,20	1,24
Tabanan	Kredit	2,62	2,75	2,82	2,88	2,94	3,03	3,12	3,27	3,46	3,63	3,71	3,81	3,38
	DPK	1,80	0,00	1,91	1,87	1,99	2,01	2,15	2,12	2,22	2,22	2,29	2,24	2,24
Badung	Kredit	4,71	4,91	5,11	6,87	0,01	7,36	0,01	0,01	7,68	8,04	8,44	8,76	8,79
	DPK	7,83	8,29	8,51	11,31	11,72	11,83	0,01	12,06	12,10	12,73	0,01	13,10	13,12
Gianyar	Kredit	2,22	0,00	2,47	0,00	2,63	2,75	2,86	3,00	3,15	3,34	3,44	3,51	3,56
	DPK	2,22	2,23	2,39	2,34	2,40	2,49	2,72	2,64	2,68	2,77	2,97	2,79	2,83
Klungkung	Kredit	1,11	1,16	1,21	1,26	0,00	1,32	1,37	1,40	1,45	0,00	1,57	1,59	1,63
	DPK	0,84	0,94	0,98	0,96	1,04	1,10	1,16	1,08	1,11	0,00	1,23	1,12	1,18
Bangli	Kredit	1,11	1,16	1,20	1,24	0,00	1,35	1,39	1,44	1,49	1,55	1,57	1,61	1,65
	DPK	0,70	0,74	0,84	0,83	0,83	0,85	0,92	0,87	0,86	0,93	1,02	0,85	0,86
Karangasem	Kredit	1,64	1,75	1,84	1,90	0,00	2,10	2,21	0,00	0,00	2,58	2,68	2,75	2,80
	DPK	1,21	1,30	1,46	1,47	1,50	1,49	1,57	0,00	1,66	1,66	1,65	1,60	1,62
Buleleng	Kredit	3,06	3,28	3,39	3,47	3,54	3,75	3,93	0,00	4,24	4,59	4,79	4,96	5,05
	DPK	2,82	2,91	3,10	3,04	3,04	3,04	3,27	3,38	3,42	3,65	3,54	3,49	3,33
Denpasar	Kredit	32,54	34,06	35,60	35,50	35,56	36,45	36,83	37,71	37,28	38,31	38,74	0,04	39,99
	DPK	45,60	47,26	50,32	47,66	48,43	49,72	51,04	50,61	50,35	51,41	52,21	53,14	55,16

KREDIT UMKM (LOKASI PROYEK)

Triliun Rp

Kredit UMKM	2014				2015				2016				2017
	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I
Kredit UMKM (Rp Triliun)	20,86	22,26	22,92	23,80	24,83	25,80	26,44	27,36	27,88	29,80	30,69	31,83	32,56
<i>g Kredit UMKM (%.yoy)</i>	<i>24,74</i>	<i>20,28</i>	<i>18,09</i>	<i>17,52</i>	<i>19,07</i>	<i>15,89</i>	<i>15,35</i>	<i>14,97</i>	<i>12,27</i>	<i>15,49</i>	<i>16,06</i>	<i>16,31</i>	16,79
Mikro (Triliun)	3,03	3,35	3,35	3,45	3,58	3,72	3,90	4,40	4,94	5,35	5,48	5,67	5,56
Kecil (Triliun)	7,50	7,78	8,23	8,64	8,84	9,30	9,57	10,02	10,18	11,03	11,55	11,96	12,17
Menengah (Triliun)	10,33	11,13	11,34	11,71	12,42	12,77	12,97	12,94	12,76	13,42	13,65	14,20	14,83
NPL (%)	1,0	1,1	1,3	1,1	1,3	1,3	1,4	1,3	2,0	1,9	2,1	2,1	3,4

SISTEM PEMBAYARAN

Indikator	2014				2015				2016				
	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I
SISTEM PEMBAYARAN													
Transaksi Tunai													
<i>Inflow</i> (Rp Triliun)	3,33	2,6	3,26	2,39	4,08	2,81	3,66	2,5	5,07	3,39	5,28	4,15	4,5
<i>Outflow</i> (Rp Triliun)	2,38	2,66	4,42	3,63	2,08	3,46	4,89	4,01	2,93	5,1	5,12	4,96	3,9
Kliring :													
Nom. Kliring (Rp triliun)	12,85	12,83	13,75	14,5	13,54	10,09	14	18,37	19,86	21,42	18	18,22	16,68
Vol. Kliring (ribu lembar)	543	540	553	574	551	408	562	614	633	678	637	671	627
Nom. Tolakan Cek/BG Kosong (Rp miliar)	321	314	522	640	356	354	343	1.323	430	422	268	269	421
Vol Tolakan Cek/BG Kosong (ribu lembar)	8,06	9,09	8,56	7,6	8,05	7,95	8,4	7,8	8,3	7,9	7,3	7,4	7,9

PERKEMBANGAN EKONOMI MAKRO DAERAH



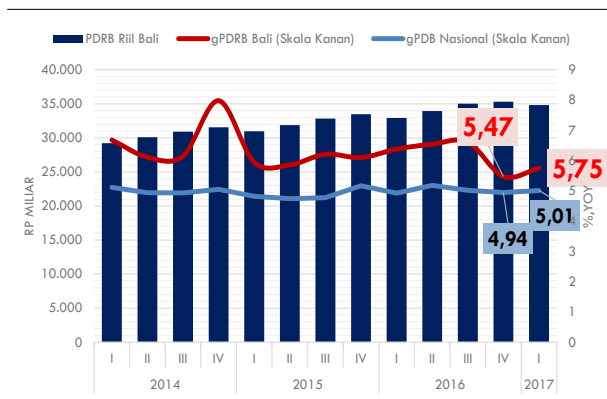
Ekonomi Bali tercatat tumbuh 5,75% (yoy) di triwulan I-2017, lebih tinggi dibanding triwulan sebelumnya yang sebesar 5,47% (yoy), dengan output riil mencapai Rp 34,83 triliun.

BAB I

*Tenun Ikat Putrimas (Bali)



1.1. KONDISI UMUM



Sumber : Badan Pusat Statistik, diolah

Grafik 1.1 Pertumbuhan Ekonomi Bali dan Nasional Triwulanan

Perkembangan ekonomi Bali sepanjang triwulan I-2017, dipengaruhi oleh beberapa faktor yang meliputi: i) perubahan struktur organisasi pemerintah daerah (OPD) yang dilaksanakan di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota di Bali; ii) mulai masuknya musim panen untuk produk tabama di akhir triwulan I-2017; iii) intensitas hujan yang cukup tinggi dan angin yang kencang, berdampak pada penurunan produksi tanaman hortikultura, adanya beberapa lahan persawahan yang terendam air serta mempengaruhi tangkapan nelayan; iv) pertumbuhan signifikan kunjungan wisman, khususnya dari Tiongkok; v) kenaikan tarif listrik untuk konsumen 900 volt pada periode Maret 2017; vi) adanya faktor musiman berupa perayaan hari keagamaan meliputi Imlek, Nyepi, persiapan Kuningan dan Galungan; vii) kunjungan rombongan Raja Salman selama 9 hari. Selain faktor domestik tersebut, faktor global berupa peningkatan kinerja ekonomi beberapa negara mitra dagang Bali antara lain Amerika Serikat dan Tiongkok di triwulan I-2017 juga ikut mempengaruhi perkembangan ekonomi Bali di triwulan I-2017.

Kinerja perekonomian Bali meningkat di triwulan I-2017, dibandingkan triwulan IV-2016, namun cenderung melambat bila dibandingkan triwulan I-2016. Ekonomi Bali tercatat tumbuh 5,75% (yoy) di triwulan I-2017, lebih tinggi dibanding triwulan sebelumnya yang sebesar 5,47% (yoy), dengan

output riil mencapai Rp 34,83 triliun. Kinerja ekonomi Bali di triwulan I 2017, juga lebih tinggi dibanding pertumbuhan ekonomi nasional di periode yang sama, yang tercatat sebesar 5,01% (yoy). Capaian kinerja ekonomi Bali yang meningkat di triwulan laporan, sejalan dengan hasil proyeksi Kantor Perwakilan Bank Indonesia.

Pangsa ekonomi Bali terhadap Kawasan Timur Indonesia di triwulan I 2017 menunjukkan peningkatan yaitu menjadi 7,86%, dari 7,72% di triwulan IV 2016. Sementara terhadap pangsa nasional di periode yang sama sedikit menurun dari 1,55% di triwulan IV 2016 menjadi 1,54 di triwulan I 2017. Secara umum, kondisi ekonomi Bali masih menunjukkan perkembangan ke arah yang lebih baik.

Dari sisi permintaan, peningkatan kinerja ekonomi tersebut didorong oleh membaiknya kinerja hampir seluruh komponen permintaan (kecuali investasi) yaitu konsumsi rumah tangga, konsumsi pemerintah, konsumsi Lembaga Non Profit Rumah Tangga (LNPRT) dan ekspor luar negeri. Sementara itu, dari sisi penawaran, peningkatan kinerja ekonomi Bali di triwulan laporan, didorong oleh meningkatnya kinerja beberapa lapangan usaha utama, yaitu pertanian, kehutanan, dan perikanan; penyediaan akomodasi makan dan minum dan perdagangan besar dan eceran. Sedangkan dua lapangan utama lainnya, yaitu konstruksi dan transportasi & pergudangan tetap tumbuh signifikan di triwulan laporan, namun sedikit melambat dibandingkan triwulan sebelumnya.

1.2. SISI PERMINTAAN

Peningkatan kinerja ekonomi Bali pada triwulan I 2017, dari sisi permintaan didorong oleh meningkatnya kinerja konsumsi dan ekspor luar negeri. Peningkatan kinerja konsumsi, terjadi pada semua komponen konsumsi, yang didorong oleh faktor musiman berupa perayaan hari keagamaan (Nyepi dan persiapan Galungan serta Kuningan di bulan April); peningkatan Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum

Tabel 1.1 Pertumbuhan PDRB Provinsi Bali di Sisi Permintaan (% , yoy)

Komponen	2015				2015	2016				2016	2017
	I	II	III	IV		I	II	III	IV		
Konsumsi	7,81	6,44	6,13	8,56	7,24	7,58	8,49	4,46	0,19	4,99	4,32
Kons.RT	8,42	7,33	6,60	7,55	7,46	7,88	8,22	6,11	4,70	6,69	4,80
Kons.LNPRT	(1,90)	(1,31)	1,30	14,80	3,17	6,72	12,17	11,76	4,07	8,58	5,85
Kons. Pemerintah	4,43	2,86	4,42	12,20	6,56	4,91	9,49	(4,46)	(18,27)	(4,47)	(0,64)
Investasi	5,32	4,91	4,17	5,62	5,00	9,66	9,51	9,14	7,22	8,86	5,81
PMTB	7,43	7,61	6,09	5,76	6,69	9,52	9,49	9,00	7,21	8,78	5,79
Perubahan Inv	(83,08)	(85,16)	(80,77)	(17,02)	(77,76)	45,99	16,15	44,21	10,03	27,45	9,50
Ekspor LN	12,97	17,54	(3,58)	0,50	6,02	13,16	12,75	16,39	16,78	14,80	17,49
Impor LN	(19,84)	13,26	(14,29)	(15,94)	(10,89)	23,02	12,82	21,57	31,82	22,49	19,38
Net Ekspor antar daerah	42,82	20,95	(3,81)	11,40	14,06	20,86	22,16	13,93	2,10	13,94	15,99
PDRB	5,94	5,86	6,21	6,10	6,03	6,38	6,54	6,61	5,47	6,24	5,75

Sumber : Badan Pusat Statistik, diolah

Kabupaten/Kota (UMK) sebesar 8,25% (yoy) yang mulai berlaku pada triwulan I-2017; terjaganya harga bahan bakar minyak (BBM)-Tarif Tenaga Listrik (TTL) dan harga gas elpiji sepanjang triwulan I-2017, mendorong peningkatan kinerja konsumsi rumah tangga di triwulan laporan. Tumbuh lebih tingginya ekonomi negara mitra dagang Bali ditriwulan laporan dibandingkan prakiraan sebelumnya (Amerika Serikat dan Tiongkok), juga ikut mendorong peningkatan kinerja ekspor barang. Selain itu, dampak lanjutan kebijakan bebas visa dan adanya perayaan imlek di triwulan I-2017, menjadi pendorong peningkatan signifikan terhadap jumlah kunjungan wisatawan mancanegara (wisman), khususnya dari Tiongkok, yang pada gilirannya mendorong peningkatan kinerja ekspor jasa.

Sementara itu, prakiraan kinerja ekonomi Bali pada triwulan II-2017 berdasarkan berbagai prompt indikator ekonomi regional dan hasil survei serta *liaison*, mengindikasikan tendensi peningkatan kinerja perekonomian Provinsi Bali pada triwulan II 2017. Kinerja ekonomi Bali di triwulan II 2017, diprakirakan akan berada pada kisaran 5,87% - 6,27% (yoy). Dari sisi permintaan, prakiraan peningkatan kinerja ekonomi Bali bersumber oleh perbaikan kinerja konsumsi baik

rumah tangga maupun konsumsi pemerintah dan perbaikan kinerja ekspor luar negeri (barang dan jasa) serta meningkatnya kinerja investasi seiring dengan mulai dilaksanakannya beberapa proyek infrastruktur pemerintah serta investasi swasta. Sementara itu, peningkatan kinerja konsumsi didorong oleh faktor musiman perayaan hari keagamaan di triwulan II-2017 yaitu Galungan, Kuningan, Ramadhan dan Idul Fitri, pembayaran gaji ke 13 dan 14 pegawai negeri sipil (PNS), serta persiapan tahun ajaran baru sekolah. Kinerja ekspor yang meningkat, didorong oleh mulai masuknya periode pariwisata di triwulan II-2017, yang akan mencapai puncaknya di triwulan III-2017. Peningkatan kinerja ekonomi di triwulan II-2017, juga didorong oleh terus meningkatnya kinerja ekonomi mitra dagang Bali, sehingga akan mendorong permintaan ekspor barang dari Bali.

1.2.1. Konsumsi

Konsumsi Rumah Tangga

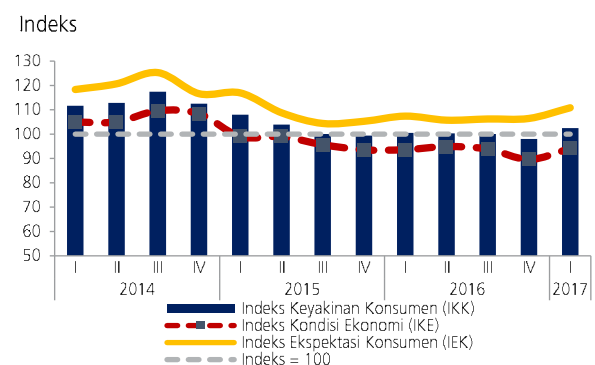
Kinerja konsumsi rumah tangga yang merupakan komponen terbesar pendorong pertumbuhan ekonomi Bali (dengan *share* 48,27%), menunjukkan kinerja yang lebih baik di triwulan I-2017, yaitu tumbuh sebesar 4,80% (yoy), lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya yang sebesar 4,70% (yoy).

Peningkatan kinerja konsumsi rumah tangga, terutama didorong oleh meningkatnya kinerja subkomponen konsumsi rumah tangga, yaitu konsumsi makanan, konsumsi pakaian dan alas kaki, konsumsi restoran dan hotel, serta konsumsi lainnya. Peningkatan kinerja beberapa sub komponen konsumsi rumah tangga tersebut, sejalan dengan adanya peningkatan UMP dan UMK di tahun 2017 sebesar 8,25%, yang direalisasikan pada triwulan I 2017. Faktor musiman, berupa perayaan hari keagamaan yaitu Nyepi dan persiapan galungan, kuningan serta adanya beberapa periode libur ikut mendorong peningkatan kinerja sub komponen rumah tangga tersebut di triwulan laporan, khususnya ketiga sub komponen di atas. Tingkat harga TTL, BBM dan gas elpiji yang masih terjaga stabil di sepanjang triwulan I-2017 juga, juga merupakan faktor pendorong meningkatnya kinerja komponen konsumsi rumah tangga.

Meningkatnya kinerja konsumsi rumah tangga di triwulan laporan, juga tercermin oleh meningkatnya optimisme konsumen tercermin oleh peningkatan seluruh indikator dari hasil Survei Konsumen Kantor Perwakilan Bank Indonesia Bali di sepanjang triwulan I 2017. Hal ini tercermin oleh peningkatan Indeks Keyakinan Konsumen (IKK), yaitu rata-rata indeks dari 98,03 pada triwulan IV 2016, menjadi rata-rata 102,45. Sejalan dengan peningkatan IKK tersebut, rata-rata Indeks Kondisi Ekonomi (IKE) juga menunjukkan peningkatan, yaitu dari 89,61 pada triwulan IV 2016 menjadi 94,06 pada triwulan I 2017. Peningkatan optimisme konsumen, juga terkonfirmasi oleh peningkatan Indeks Ekspektasi Konsumen yang pada triwulan I 2017 tercatat sebesar 110,83, lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya yang sebesar 106,44. Kuatnya tingkat konsumsi rumah tangga, juga tercermin dari Indeks Tendensi Konsumen (ITK) yang mengalami peningkatan, yaitu dari 103,91 pada triwulan I 2017, menjadi sebesar 100,57. Peningkatan ini menunjukkan meningkatnya level

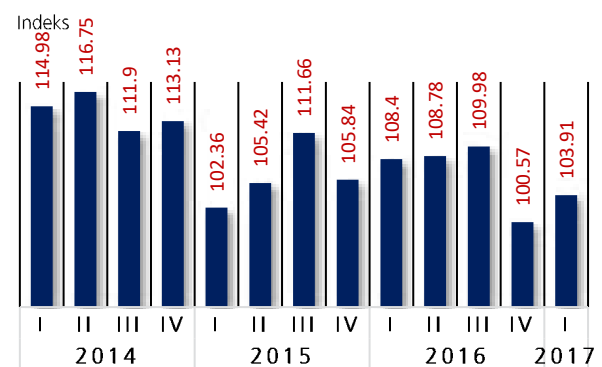
optimisme konsumen terhadap kondisi ekonominya. Peningkatan ini terutama didorong oleh peningkatan tingkat konsumsi konsumen, sejalan dengan adanya beberapa perayaan hari keagamaan ditriwulan laporan.

Kuatnya tingkat konsumsi rumah tangga, juga tercermin dari Indeks Tendensi Konsumen (ITK) yang mengalami peningkatan, yaitu dari 103,91 pada triwulan I 2017, menjadi sebesar 100,57. Peningkatan ini menunjukkan meningkatnya level optimisme konsumen terhadap kondisi ekonominya. Peningkatan ini terutama didorong oleh peningkatan tingkat konsumsi konsumen, sejalan dengan adanya beberapa perayaan hari keagamaan ditriwulan laporan.



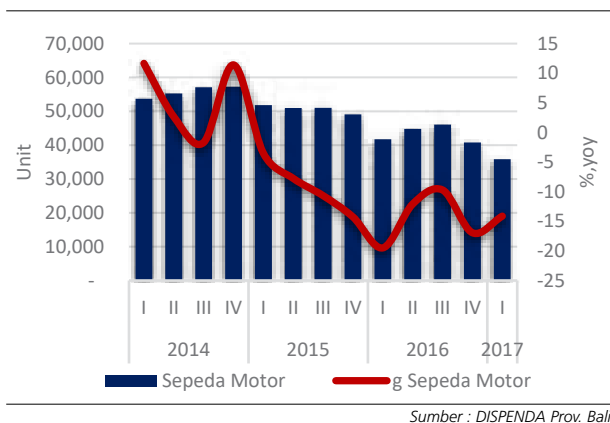
Sumber : Survei Konsumen Bank Indonesia

Grafik 1.2 Indeks Keyakinan Konsumen



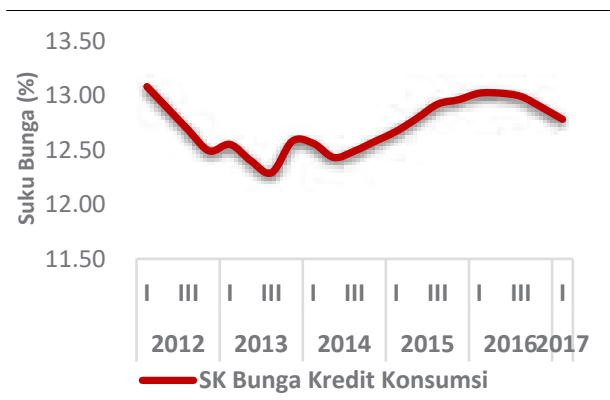
Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Bali

Grafik 1.3 Indeks Tendensi Konsumen



Grafik 1.4 Pendaftaran Kendaraan

Sumber : DISPENDA Prov. Bali

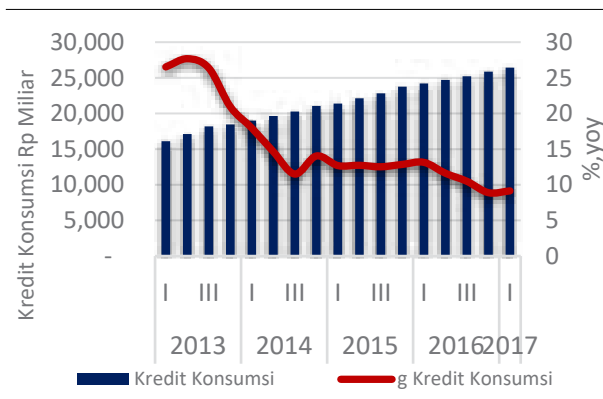


Grafik 1.5 Suku Bunga Kredit Konsumsi

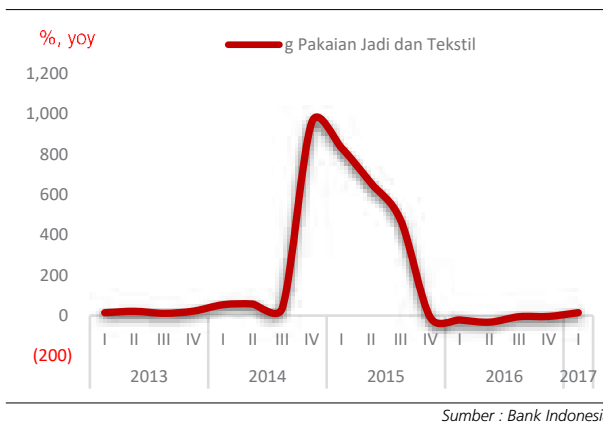
Peningkatan kinerja konsumsi rumah tangga di triwulan I 2017, juga dapat dilihat pada membaiknya kontraksi pertumbuhan penjualan sepeda motor baru, yang dicerminkan oleh pendaftaran kendaraan baru untuk sepeda motor yang tumbuh lebih baik pada triwulan laporan. Pertumbuhan sepeda motor baru kontraksi sebesar -14,13% (yoy) di triwulan I 2017, lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya yang terkontraksi sebesar -16,94% (yoy) pada triwulan IV 2016. Seiring dengan itu, peningkatan pertumbuhan penjualan untuk beberapa kelompok komoditas rumah tangga, yang meliputi suku cadang kendaraan; makanan, minuman dan tembakau; pakaian jadi dan tekstil serta peralatan rumah tangga di triwulan I 2017 dibandingkan triwulan sebelumnya berdasarkan hasil survei penjualan eceran (SPE) Bank

Indonesia, mencerminkan masih kuatnya kinerja konsumsi rumah tangga di triwulan laporan.

Konsumsi rumah tangga yang tumbuh lebih baik ditriwulan laporan, juga dapat dicermati dari pertumbuhan Kredit Konsumsi yang lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya. Pertumbuhan kredit konsumsi di triwulan I 2017 tercatat tumbuh sebesar 9,14% (yoy), lebih dalam dari triwulan IV 2016 yang tercatat sebesar 8,89% (yoy). Perkembangan tersebut sejalan dengan peningkatan variabel indeks dalam ITK, yaitu indeks tingkat konsumsi bahan makanan, makanan dan non makanan dengan nilai indeks tercatat 110,88 di triwulan I 2017, lebih tinggi bila dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yaitu sebesar 106,15.



Grafik 1.6 Kredit Konsumsi



Grafik 1.7 Survei Penjualan Eceran

Sumber : Bank Indonesia

Prakiraan di triwulan II 2017 berdasarkan perkembangan terakhir, kinerja konsumsi rumah tangga menunjukkan tendensi peningkatan. Hal ini didorong oleh adanya beberapa stimulus yang dapat meningkatkan kinerja konsumsi rumah tangga meliputi: i) adanya beberapa perayaan hari keagamaan yaitu Galungan, Kuningan, Ramdhan dan Idul Fitri; ii) pembayaran gaji ke 13 dan ke 14 untuk PNS; iii) pembayaran tunjangan hari raya; iv) persiapan menghadapi tahun ajaran baru pada awal triwulan III-2017. Prakiraan perbaikan kinerja konsumsi rumah tangga di triwulan II-2017, juga terkonfirmasi oleh Kondisi tersebut terkonfirmasi dari hasil Survei Konsumen Bank Indonesia yang menunjukkan peningkatan nilai untuk rata-rata indeks keyakinan konsumen (IKK) dari 102,45 di triwulan I 2017, menjadi 102,8 pada April 2017. Sejalan dengan itu, semakin kuatnya optimisme konsumen rumah tangga juga terkonfirmasi oleh peningkatan nilai Indeks ekspektasi konsumen (IEK), yaitu dari rata-rata 110,83 di triwulan I 2017, menjadi sebesar 111,8 pada April 2017.

Prakiraan peningkatan kinerja konsumsi rumah tangga di triwulan II 2017, juga terlihat oleh prakiraan peningkatan Indeks Tendensi Konsumen (ITK) oleh BPS Provinsi Bali yang sebesar 106,82 pada triwulan II 2017, terutama diprakirakan didorong oleh membaiknya kondisi pendapatan. Selain itu, peningkatan optimisme konsumen juga sejalan dengan terus berlanjutnya penurunan suku bunga kredit konsumsi dan implementasi ketentuan relaksasi LTV untuk kredit pemilikan rumah (KPR), diprakirakan akan mendorong kinerja konsumsi rumah tangga. selanjutnya, berdasarkan hasil survei penjualan eceran (SPE) oleh Bank Indonesia, menunjukkan peningkatan yang signifikan dari pertumbuhan penjualan kelompok komoditas pakaian jadi dan tekstil yang tumbuh sebesar 41,51% (yoy) pada April 2017 (triwulan II 2017), dibandingkan dengan rata-rata

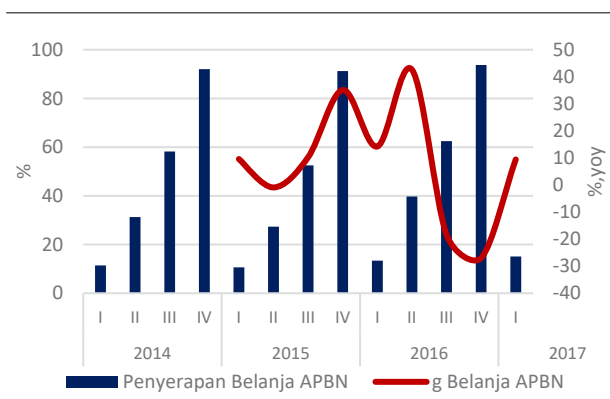
pertumbuhan triwulan I 2017 yang sebesar 14,41% (yoy), sehingga semakin memperkuat peningkatan kinerja konsumsi rumah tangga di triwulan laporan.

Konsumsi LNPRT dan Konsumsi Pemerintah

Komponen Konsumsi Lembaga Non Profit yang melayani Rumah Tangga (LNPRT) dan konsumsi pemerintah turut mengalami peningkatan kinerja pada triwulan I 2017. Kinerja Konsumsi LNPRT mengalami peningkatan dari sebesar 4,07% (yoy) pada triwulan IV 2016 menjadi sebesar 5,85% (yoy) di triwulan I 2017, seiring dengan meningkatnya kegiatan organisasi kemasyarakatan, termasuk aktivitas partai politik.

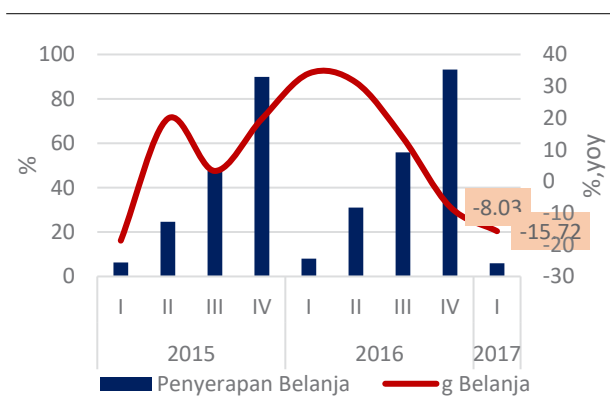
Konsumsi Pemerintah

Sementara itu, perkembangan kinerja konsumsi Pemerintah (dengan pangsa sebesar 5,41%) di triwulan I 2017, menunjukkan perbaikan kinerja, meskipun tetap mengalami kontraksi sebesar -0,64% (yoy), lebih baik bila dibandingkan kontraksi triwulan IV 2016, yang sebesar -18,27% (yoy). Peningkatan kinerja komponen ini, didorong oleh meningkatnya kinerja sub komponen konsumsi kolektif pemerintah dan sub komponen konsumsi individu pemerintah, yang masing-masing tumbuh sebesar -2,08% (yoy) dan 2,17% (yoy), lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya yang masing-masing tumbuh sebesar -19,27% (yoy) dan -16,69% (yoy). peningkatan kinerja ini, terutama didorong oleh meningkatnya realisasi belanja oleh Kementerian dan Lembaga Vertikal di Bali yang menggunakan dana APBN. Capaian ini didorong oleh, upaya percepatan realisasi belanja di Kementerian dan Lembaga, setelah pada tahun 2016 terjadi beberapa penundaan realisasi belanja. Penyelesaian tender dan proses pengadaan sebelum tahun 2017, mempercepat dimulainya realisasi proyek dan realisasi belanja sejak awal tahun 2017. Upaya ini mendorong peningkatan persentase realisasi belanja APBN dari sebesar 13,41% di triwulan I 2016, menjadi 15,10% pada triwulan I 2017.



Grafik 1.8 Perkembangan Belanja APBN Provinsi Bali

Masih terkontraksinya pertumbuhan konsumsi pemerintah ditriwulan laporan, disebabkan oleh dampak dari reorganisasi Pemerintah Daerah (Provinsi dan Kabupaten Kota) sebagai implementasi Undang-Undang Otonomi Daerah No. 23 tahun 2014. Reorganisasi tersebut menjadi penyebab mundurnya proses pelelangan proyek dan proses pengadaan barang di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Kondisi tersebut, juga menjadi penyebab mundurnya pembayaran gaji Pegawai Negeri Sipil di bulan Januari 2017. Di samping itu, berkurangnya pagu anggaran belanja modal tahun 2017, khususnya untuk belanja infrastruktur, turut menjadi faktor penahan peningkatan kinerja komponen Konsumsi Pemerintah. Pagu anggaran Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bali menurun cukup signifikan, yaitu dari Rp 692,06 miliar pada tahun 2016 menjadi sebesar Rp 229,7 miliar untuk tahun 2017. Realisasi belanja Pemrov. Bali pada triwulan I 2017 yang hanya mencapai 5,94%, jauh lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun

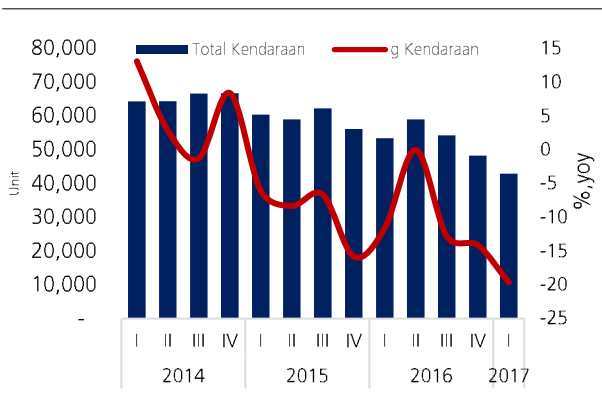


Grafik 1.9 Perkembangan Belanja APBD Provinsi Bali

2016 yang mencapai 8,06%. Penurunan realisasi belanja terjadi pada hampir seluruh komponen, baik untuk belanja operasional dan transfer, belanja modal maupun untuk belanja tak terduga.

Pada triwulan II 2017, kinerja komponen Konsumsi Pemerintah diperkirakan akan tumbuh meningkat dibandingkan dengan triwulan I 2017. Peningkatan tersebut, dari sisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) didorong oleh upaya percepatan realisasi belanja barang dan jasa yang dilakukan pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota untuk mengejar keterlambatan yang terjadi pada triwulan sebelumnya. Selain itu, telah selesainya penyesuaian struktur birokrasi dan nomenklatur anggaran akibat perubahan struktur organisasi pemerintahan daerah (OPD), diperkirakan menjadi salah satu faktor pendorong peningkatan kinerja konsumsi pemerintah di triwulan II 2017. Selain itu, perkiraan peningkatan juga didorong oleh upaya Pemerintah Provinsi Bali untuk mengoptimalkan pendapatan asli daerah dari retribusi berbagai objek pajak baru di sepanjang 2017, seperti pengenaan retribusi untuk penggunaan lahan pemasangan *billboard* reklame. Sementara itu, dari sisi APBN peningkatan kinerja konsumsi pemerintah di triwulan II-2017 diperkirakan akan didorong oleh peningkatan persentase pengerjaan proyek infrastruktur dan upaya akselerasi percepatan realisasi belanja oleh Kementerian dan Lembaga Vertikal untuk mencapai target realisasi belanja yang lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya.

Meskipun demikian, komponen konsumsi pemerintah triwulan berjalan masih menghadapi resiko perlambatan, terutama resiko pemangkasan anggaran akibat potensi tidak tercapainya target pendapatan pemerintah pusat. Selain itu, resiko tidak tercapainya target pendapatan asli daerah (PAD) di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota akibat penjualan kendaraan bermotor yang masih menunjukkan tendensi penurunan, berpotensi menjadi penyebab tidak tercapainya target penerimaan.

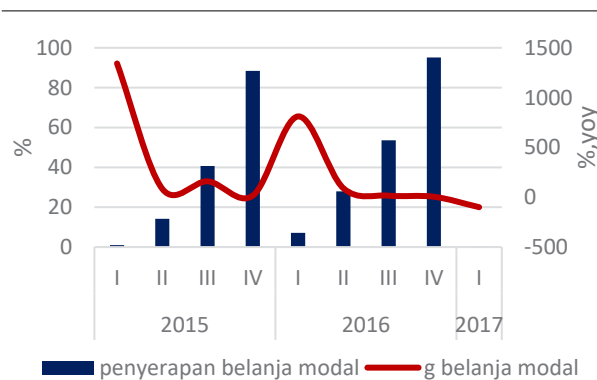


Grafik 1.10 Perkembangan Penjualan Kendaraan

1.2.2. Investasi

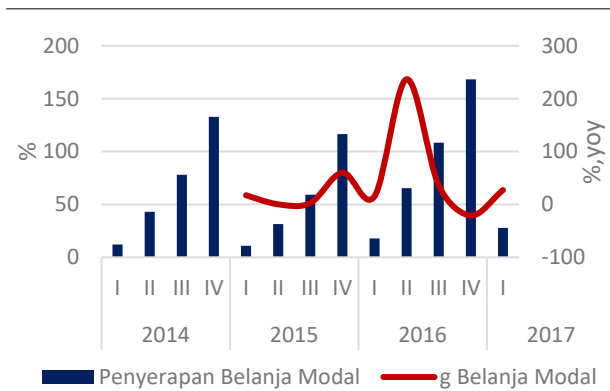
Komponen investasi di triwulan I 2017 mencatat pertumbuhan sebesar 5,81% (yoy), tumbuh melambat dibanding triwulan IV 2016 yang tumbuh sebesar 7,22% (yoy). Perlambatan tersebut, terutama disebabkan oleh penurunan kinerja investasi bangunan yang pada triwulan laporan mengalami kontraksi sebesar -0,06% (yoy), jauh lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 5,19% (yoy), sementara itu investasi non bangunan tumbuh signifikan sebesar 15,89% (yoy), lebih tinggi dibandingkan 10,81% (yoy) di triwulan sebelumnya, sehingga dapat menahan laju penurunan kinerja investasi. Melambatnya kinerja investasi bangunan, disebabkan oleh tertundanya realisasi belanja modal pemerintah baik di tingkat Provinsi maupun kabupaten/kota akibat perubahan struktur organisasi OPD di tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota di Provinsi Bali yang baru terlaksana pada pertengahan Januari 2017. Kondisi tersebut menyebabkan realisasi belanja modal APBD Provinsi di triwulan I 2017 baru mencapai 0,03%, jauh lebih rendah dibandingkan dengan realisasi belanja modal di triwulan I 2016 yang sebesar 7,12%. Sementara itu, peningkatan kinerja investasi non bangunan berdasarkan hasil survei dan *liaison* didorong oleh masih aktifnya pelaku usaha untuk menambah investasi pada triwulan laporan berupa pembelian mesin-mesin dan peralatan, untuk menyempurnakan dan melanjutkan investasi yang telah dikeluarkan pada periode triwulan sebelumnya.

Perlambatan yang terjadi pada kinerja investasi ditriwulan laporan, dapat tertahan oleh peningkatan kinerja realisasi belanja modal dari APBN oleh Kementerian dan Lembaga di Provinsi Bali. Realisasi belanja investasi tercatat telah mencapai 27,80% di triwulan I 2017, lebih tinggi dibandingkan triwulan I 2016 yang sebesar 17,87%. Peningkatan pertumbuhan penyaluran kredit investasi yang juga ikut menahan perlambatan kinerja investasi di triwulan laporan. Seperti pada triwulan sebelumnya, kredit investasi melanjutkan peningkatannya yang sebesar 12,98% (yoy) di triwulan ini, lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan triwulan sebelumnya yang mencapai 10,92% (yoy). Peningkatan pertumbuhan tersebut diperkirakan seiring dengan perbaikan optimisme pelaku usaha di triwulan I 2017. Optimisme tersebut didukung oleh penurunan *BI 7 days Reverse Repo Rate* menjadi 4,75% serta relaksasi ketentuan LTV yang diikuti oleh tren penurunan suku bunga perbankan, yang terus berlanjut hingga triwulan I 2017. Peningkatan konsumsi semen di triwulan laporan, juga ikut menahan perlambatan kinerja investasi di triwulan laporan dan menunjukkan masih besarnya optimisme pelaku usaha terhadap perkembangan ekonomi ke depan. Konsumsi semen pada triwulan I 2017, tumbuh signifikan sebesar 14,95% (yoy), lebih tinggi bila dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang kontraksi sebesar -18,76% (yoy).



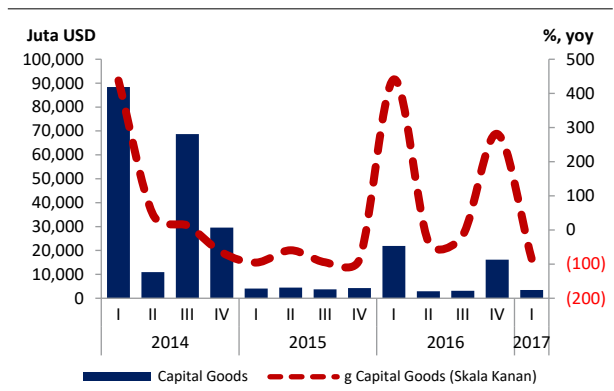
Sumber : BPKAD Prov. Bali

Grafik 1.11 Realisasi Belanja Modal APBD Provinsi Bali



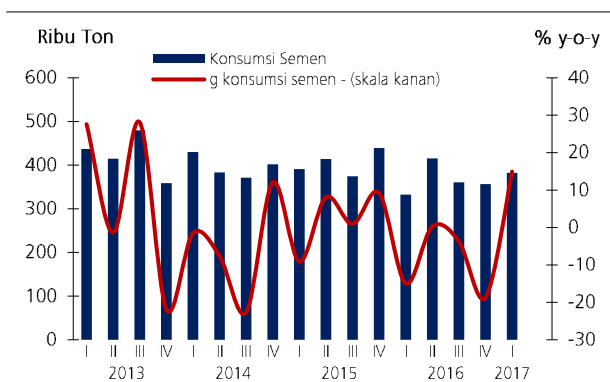
Grafik 1.12 Realisasi Belanja Modal APBN

Sumber : DJPBN



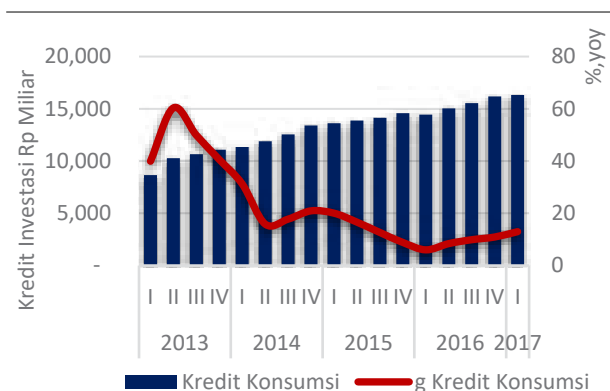
Grafik 1.15 Perkembangan Impor Capital Goods

Sumber : Bea Cukai



Grafik 1.13 Realisasi Konsumsi Semen

Sumber : Asosiasi Semen

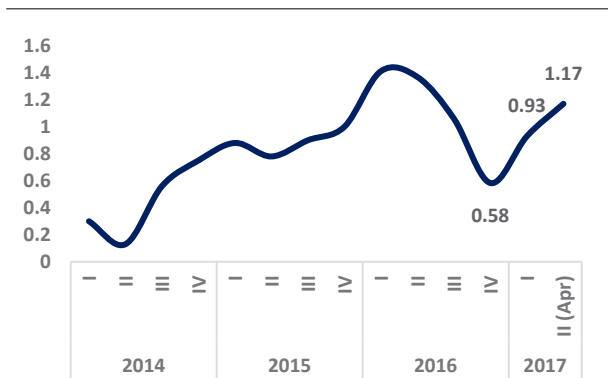


Grafik 1.14 Realisasi Belanja Modal APBN

Sumber : DJPBN

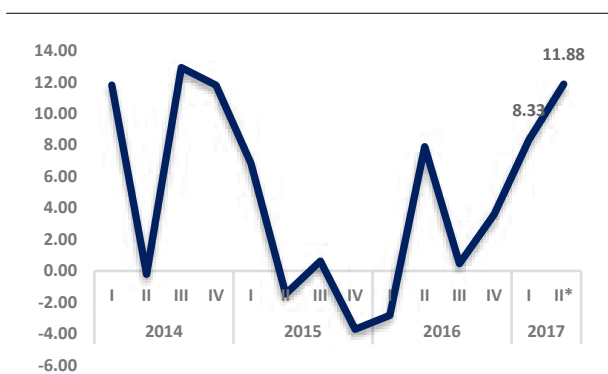
Perkembangan kinerja investasi pada triwulan II 2017, diperkirakan akan tumbuh lebih tinggi sejalan dengan akselerasi percepatan belanja modal untuk APBD di provinsi maupun kabupaten/kota, setelah tertunda pada triwulan sebelumnya. Peningkatan pengerjaan proyek infrastruktur dan percepatan realisasi belanja modal APBN diprakirakan juga akan mendorong peningkatan kinerja investasi di triwulan II 2017.

Sementara itu, dari sisi investasi swasta, diprakirakan peningkatan kinerja didorong oleh peningkatan optimisme pelaku usaha terhadap membaiknya kinerja ekonomi dan terus berlanjutnya penurunan tingkat suku bunga kredit serta kondisi ekonomi global yang mendukung sejalan dengan membaiknya ekonomi negara mitra dagang Bali sebagai tujuan Ekspor (AS dan Tiongkok). Prakiraan peningkatan kinerja investasi swasta terkonfirmasi dari hasil *liaison* yang menunjukkan peningkatan nilai *likert* investasi pada triwulan II 2017 (April) yaitu sebesar 1,17 poin, lebih tinggi dibanding triwulan sebelumnya yang tercatat mencapai 0,93 poin. Sejalan dengan itu, kuatnya kinerja investasi swasta di triwulan II 2017, juga tergambar dari prakiraan peningkatan nilai saldo bersih tertimbang (SBT), yang tercatat sebesar 11,88, lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya yang sebesar 8,33.



Sumber : Bank Indonesia, diolah

Grafik 1.16 Likert Investasi, Liaison



Sumber : Bank Indonesia, diolah

Grafik 1.17 SBT Investasi (SKDU)

1.2.3. Neraca Perdagangan

Neraca perdagangan Provinsi Bali triwulan I 2017, mencatat peningkatan yang diindikasikan oleh meningkatnya nilai surplus perdagangan, yaitu dari sebesar Rp 3,7 triliun di triwulan IV 2016, menjadi Rp 6 triliun. Peningkatan nilai surplus tersebut, didorong oleh peningkatan nilai net ekspor perdagangan luar negeri dari sebesar Rp 15,99 triliun pada triwulan IV 2016, menjadi sebesar Rp 17,03 triliun pada triwulan I 2017. Sementara itu, diperiode yang sama, net perdagangan antar daerah mencatatkan penurunan nilai surplus dari Rp 12,21 triliun di triwulan IV 2016, menjadi sebesar Rp 11,02 triliun pada triwulan I 2017.

Net Ekspor antar Daerah

Komponen Net Ekspor Antar Daerah pada triwulan I 2017 tumbuh signifikan sebesar 16% (yoy), lebih

tinggi dibandingkan dengan triwulan IV 2016 yang tumbuh sebesar 2,10% (yoy). Tingginya pertumbuhan komponen ini, terutama disebabkan oleh lebih dalamnya kontraksi pertumbuhan Ekspor antar daerah yaitu sebesar -16,18% (yoy) dari -10,25% (yoy) di triwulan sebelumnya, dibandingkan dengan Impor antar daerah yang tumbuh sebesar -5,48% (yoy) pada triwulan I 2017 dari -5,45% (yoy) di triwulan sebelumnya. Kondisi tersebut antara lain dipengaruhi oleh produksi khususnya untuk komoditas bahan pokok, difokuskan untuk memenuhi pasokan Regional Bali dan kebutuhan pada awal tahun ini, tidak sebesar pada triwulan sebelumnya.

Pada triwulan II-2017, komponen ini diperkirakan akan tumbuh lebih tinggi, seiring dengan peningkatan permintaan karena faktor musiman, yaitu perayaan hari keagamaan Galungan, Kuningan, Ramadhan dan Idul Fitri yang pemenuhannya di penuhi antara lain dari impor antar daerah.

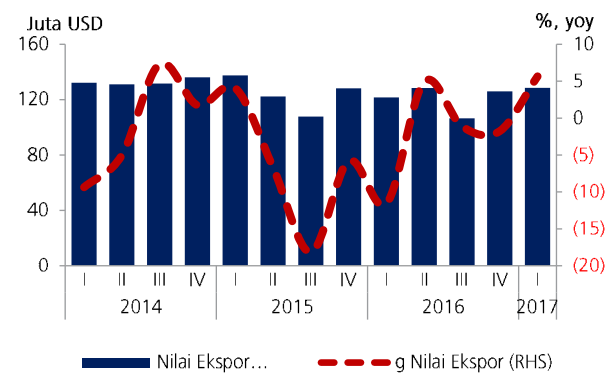
Ekspor Luar Negeri

Ekspor luar negeri (barang dan jasa) pada periode triwulan I 2017, tercatat tumbuh signifikan mencapai 17,49 (yoy), lebih tinggi dibandingkan dengan triwulan IV 2016 yang tumbuh sebesar 16,78% (yoy). Peningkatan kinerja yang signifikan tersebut, terutama didorong oleh peningkatan yang signifikan kinerja ekspor barang yang tumbuh sebesar 16,14% (yoy), lebih tinggi dibanding triwulan sebelumnya yang tercatat 7,15% (yoy). Membaiknya kinerja ekspor barang pada triwulan I 2017, terutama didorong oleh membaiknya kinerja ekonomi negara-negara yang menjadi mitra dagang Bali yaitu AS dan Tiongkok, sehingga mendorong peningkatan permintaan barang ekspor dari Bali, setelah sebelumnya mengalami penurunan. Selain itu, berdasarkan hasil *liaison* peningkatan kinerja ekspor barang tersebut, seiring dengan upaya pelaku ekspor untuk melakukan diversifikasi pasar tujuan ekspor melalui pengembangan alternatif

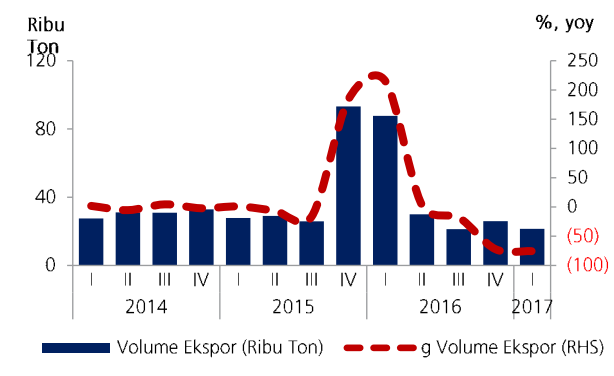
segmen pasar baru dan peningkatan promosi produk yang dilakukan antara lain dengan keikutsertaan dalam pameran di luar negeri. Dari sisi ekspor jasa, perkembangannya menunjukkan sedikit perlambatan dengan tumbuh sebesar 17,63% (yoy), dibandingkan triwulan sebelumnya 17,94% (yoy), namun masih tetap tumbuh dalam level yang tinggi. Kinerja ekspor jasa yang tetap tumbuh tinggi sejalan dengan terus meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan mancanegara (wisman), seiring dengan membaiknya ekonomi asal wisman (antara lain Tiongkok) dan pengembangan produk, penerapan strategi pemasaran baru, perbaikan pelayanan kepada tamu dan peningkatan promosi melalui keikutsertaan dalam pameran internasional merupakan beberapa faktor pendorong yang dikemukakan oleh responden *liaison*, yang merupakan pelaku usaha industri pariwisata.

Berdasarkan data dari Bea dan Cukai, kinerja ekspor barang Provinsi Bali selama triwulan I 2017 menunjukkan peningkatan secara nilai, namun dari sisi volume menunjukkan berlanjutnya penurunan yang cukup signifikan. Kondisi ini disebabkan produk yang diekspor lebih didominasi oleh produk dengan kuantitas volume yang kecil seperti perhiasan dan olahan kayu, dibandingkan sebelumnya yang memiliki bobot yang besar seperti olahan batu (patung). Nilai ekspor barang Provinsi Bali tercatat sebesar US\$ 128,49 juta pada triwulan I 2017 atau tumbuh sebesar 5,66% (yoy), lebih tinggi dibanding triwulan IV 2016 yang sebesar US\$ 125,96 juta (-1,76% yoy). Peningkatan tersebut terutama didorong oleh membaiknya kinerja ekonomi negara-negara mitra dagang Bali, sehingga mendorong peningkatan permintaan ekspor. Selain itu adanya, pemberlakuan lisensi *Forest Law Enforcement, Governance, and Trade* atau *FLEGT License* pada 15 November 2016 sebagai bentuk kerjasama antara Indonesia dan Uni Eropa sehingga produk kayu dan turunannya asal Indonesia yang masuk ke Uni Eropa akan mendapat

perlakuan *green lane* atau tidak perlu lagi melalui proses uji tuntas (*due-diligence*), ikut mendorong peningkatan kinerja ekspor Bali, khususnya produk olahan kayu dan *furniture*.



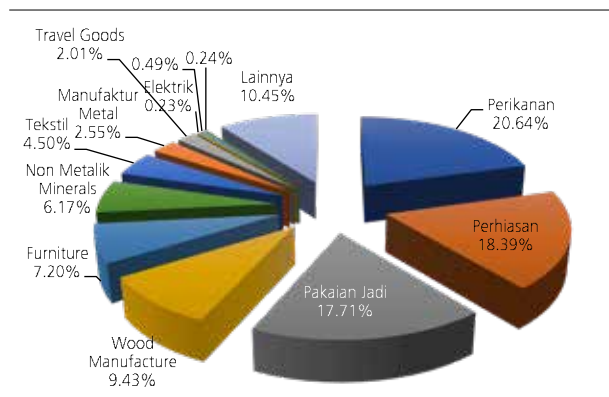
Grafik 1.18 Nilai Ekspor Luar Negeri Bali



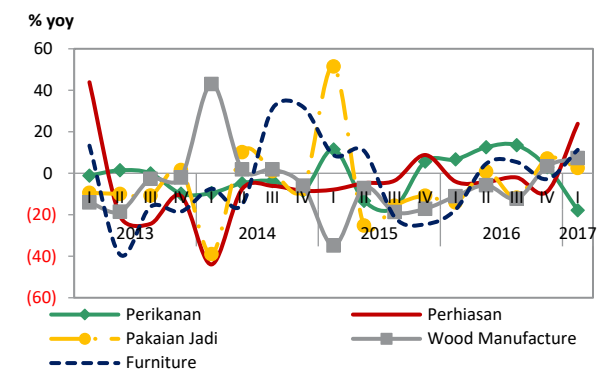
Grafik 1.19 Volume Ekspor Luar Negeri Bali

Peningkatan ekspor barang Provinsi Bali didorong oleh peningkatan nilai ekspor beberapa komoditas ekspor utama Provinsi Bali yaitu perhiasan, produk olahan kayu dan *furniture*. Komoditas ekspor perhiasan yang memiliki *share* sebesar 18,39%, mengalami peningkatan pertumbuhan nilai ekspor ditriwulan laporan dengan tumbuh sebesar 23,87% (yoy), lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan nilai ekspor pada triwulan IV 2016 yang kontraksi -8,83% (yoy). Sementara itu, komoditas produk olahan kayu yang memiliki *share* sebesar 9,43%, mengalami peningkatan nilai ekspor dari sebesar 3,36% (yoy) pada triwulan IV 2016, menjadi sebesar 7,35% (yoy)

pada triwulan I 2017. Selain itu, komoditas *furniture* (*share* 7,20%), yang juga menunjukkan peningkatan nilai ekspor menjadi 11,29% (yoy), dari triwulan sebelumnya yang sebesar -2,78% (yoy) menjadi salah satu pendorong peningkatan kinerja ekspor pada triwulan ini. Peningkatan kinerja ekspor barang pada periode triwulan laporan, berdasarkan hasil survei dan *liaison*, juga didorong oleh upaya pelaku usaha eksportir untuk meningkatkan akses pasar melalui pengembangan alternatif segmen pasar baru dan pembukaan pasar baru, menjalin kerjasama pemasaran dengan perusahaan lain serta peningkatan program promosi, antara lain dengan mengikuti berbagai kegiatan pameran internasional. Selain itu, harga produk ekspor Bali yang semakin bersaing dan kompetitif juga ikut mendorong peningkatan ekspor Bali di triwulan laporan.

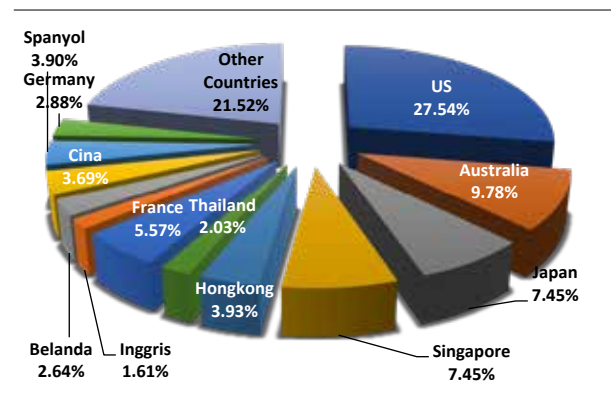


Grafik 1.20 Pangsa Nilai Ekspor Komoditas Utama Tw I 2017

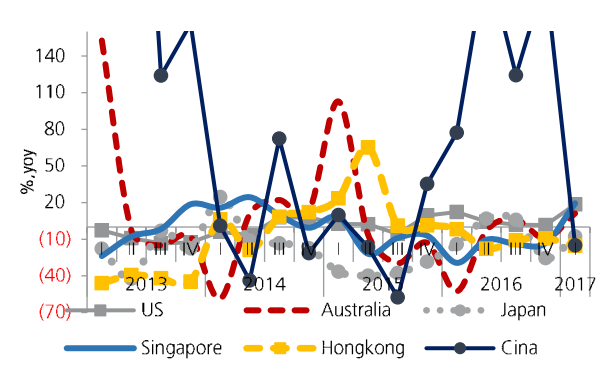


Grafik 1.21 Pertumbuhan Nilai Ekspor Komoditas Utama

Sementara itu berdasarkan negara yang menjadi tujuan ekspor (berdasarkan nilai), komposisi ekspor Bali masih komposisinya masih sama dengan periode triwulan sebelumnya, yaitu dengan rincian sebagai berikut: Amerika Serikat, Australia, Singapura, Jepang, dan Prancis, dengan *share* masing-masing sebesar 27,54%, 9,78%, 7,45%, 7,45%, dan 5,57%. Perkembangan ekspor ke beberapa negara tujuan utama ekspor Bali, secara umum menunjukkan peningkatan terutama untuk ekspor ke Amerika Serikat, Australia, Singapura, Jepang dan Prancis pada triwulan I 2017, dibandingkan periode triwulan sebelumnya. Membaiknya kinerja ekonomi di beberapa negara yang menjadi mitra dagang Bali tersebut dan juga seiring dengan upaya beberapa pelaku usaha ekspor untuk melakukan diversifikasi pasar ekspor. Sebagaimana terlihat dari peningkatan pertumbuhan ekspor barang Bali ke Prancis, Spanyol dan Jerman yang terus menunjukkan peningkatan.

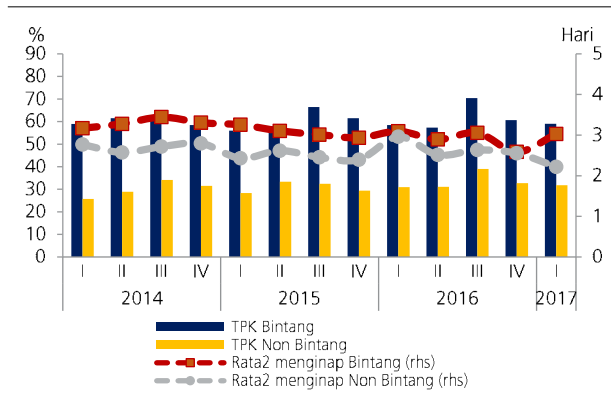


Grafik 1.22 Pangsa Ekspor Berdasarkan Negara Tujuan



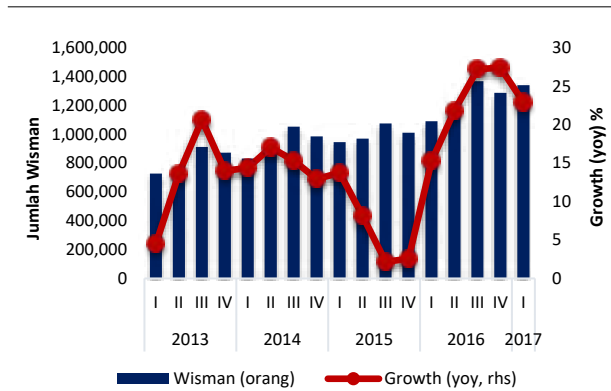
Grafik 1.23 Pertumbuhan Nilai Ekspor berdasarkan Negara Tujuan

Di sisi lain, kinerja ekspor jasa luar negeri Bali pada periode triwulan I 2017 mencatat sedikit perlambatan dibandingkan triwulan IV 2016. Ekspor jasa luar negeri Bali mencatat angka pertumbuhan sebesar 17,63% (yoy), sedikit lebih rendah dibandingkan dengan triwulan IV 2016 yang tercatat sebesar 17,94% (yoy). Perayaan Imlek dan tumbuh tingginya wisman Tiongkok di periode triwulan laporan (tumbuh diatas 50% yoy), ternyata tidak dapat mendorong tumbuh lebih tingginya ekspor jasa pada triwulan laporan dibandingkan triwulan sebelumnya. Perlambatan tersebut dapat dilihat dari penurunan Tingkat Penghunian Kamar (TPK) hotel bintang dan non bintang. TPK hotel berbintang mengalami penurunan dari sebesar 60,66% pada triwulan IV 2016 menjadi sebesar 59% di triwulan I 2017. Sementara TPK hotel non bintang mengalami penurunan dari sebesar 32,71% pada triwulan IV 2016, menjadi sebesar 31,82% pada triwulan I 2017. Sejalan dengan kondisi tersebut, rata-rata lama tinggal juga turut mengalami penurunan khususnya pada hotel tipe non bintang. Rata-rata lama tinggal pada hotel non bintang tercatat mencapai 2,22 hari lebih rendah dibandingkan 2,55 hari di triwulan sebelumnya. Sementara pada sisi yang lain, perkembangan rata-rata lama tinggal hotel berbintang mengalami sedikit peningkatan, sehingga dapat menahan laju penurunan kinerja ekspor jasa, yaitu dari sebesar sebesar 2,59 hari pada triwulan IV 2016, menjadi 3,03 hari di triwulan I 2017. Melambatnya kinerja ekspor jasa, sejalan dengan dengan pertumbuhan kunjungan wisman yang cenderung melambat dari sebesar 27,42% (yoy) pada triwulan IV 2016 menjadi sebesar 22,91% (yoy) di triwulan laporan. Hasil survei Perolehan data Properti Komersial Bank Indonesia, juga turut menunjukkan hal serupa seiring dengan penurunan permintaan kamar. Pelaku usaha pariwisata dalam hal ini hotel secara umum melakukan penurunan *average room rate* untuk dapat menarik dan meningkatkan jumlah *occupancy rate*.



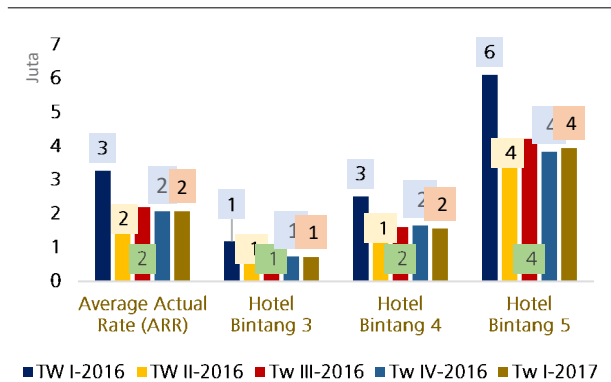
Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Bali

Grafik 1.24 Tingkat Penghunian Kamar



Sumber : BPS Provinsi Bali, diolah

Grafik 1.25 Kunjungan Wisman ke Bali Triwulanan



Sumber: Survei PPKom Bank Indonesia

Grafik 1.26 Average Room Rate Bali

Perkembangan kinerja ekspor luar negeri pada triwulan II 2017, diperkirakan akan mengalami peningkatan, didorong oleh meningkatnya kinerja ekspor barang luar negeri maupun ekspor jasa luar negeri. Meningkatnya kinerja ekspor barang luar negeri ditriwulan II 2017, diperkirakan didorong oleh terus berlanjutnya perbaikan kinerja ekonomi

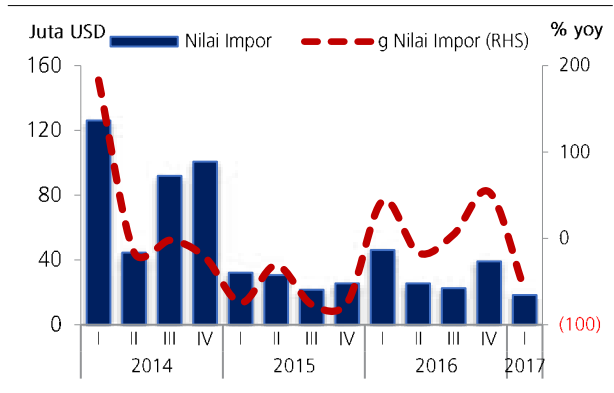
dari negara-negara mitra dagang Bali yaitu Amerika Serikat, Australia dan Tiongkok, serta upaya untuk meningkatkan pengembangan pasar baru antara lain untuk pasar di kawasan Timur Tengah. Peningkatan kinerja ekspor barang juga didorong, oleh akan masuknya liburan musim panas, sehingga beberapa produk olahan kayu, pakaian jadi maupun perhiasan diprakirakan akan meningkat permintaannya karena akan dipergunakan untuk kegiatan liburan tersebut. Sementara itu, peningkatan kinerja ekspor jasa luar negeri di triwulan II 2017, diprakirakan akan didorong oleh meningkatnya jumlah kunjungan wisman sejalan dengan mulai masuknya periode musim pariwisata, yang akan mencapai puncaknya pada triwulan III 2017 (Agustus). Peningkatan kinerja ekspor jasa, juga didorong oleh peningkatan promosi yang dilakukan oleh pelaku usaha industri pariwisata dan pengembangan produk serta segmen pasar baru, termasuk terus mengembangkan Bali *and beyond*. Adanya pembukaan rute penerbangan baru disepanjang triwulan II 2017 (Batik Air Denpasar - Kuala Lumpur dan Denpasar - Pert; Citilink Denpasar - Dili; Air Asia X Denpasar - Narita) juga merupakan faktor pendorong peningkatan komponen ekspor di triwulan II 2017.

Impor Luar Negeri

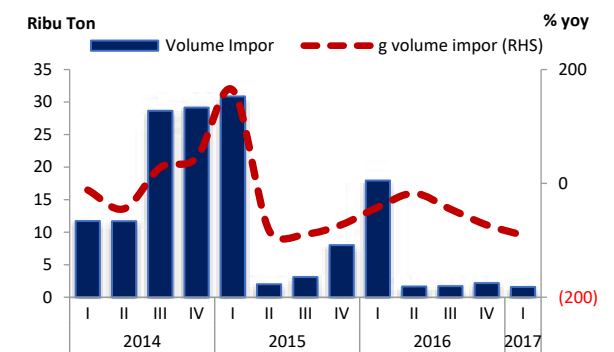
Kinerja impor luar negeri Bali pada triwulan I 2017 di Provinsi Bali tumbuh sebesar 19,38% (yoy), lebih rendah (melambat) dibanding triwulan IV 2016 yang sebesar 31,82% (yoy). Perlambatan tersebut, disebabkan oleh penurunan yang signifikan terhadap impor barang luar negeri, yang mengalami kontraksi sebesar -64,65% (yoy), jauh lebih rendah bila dibandingkan dengan pertumbuhan triwulan sebelumnya yang sebesar 22,36% (yoy). Sementara itu, impor jasa mengalami peningkatan dari sebesar 33,60% (yoy) pada triwulan IV 2016, menjadi sebesar 40,50% (yoy) pada triwulan I 2017.

Perlambatan impor Bali pada triwulan I 2017 tersebut, terkonfirmasi oleh penurunan nilai impor barang Provinsi Bali yang signifikan dari sebesar

22,36% (yoy) pada triwulan IV 2016, turun signifikan menjadi sebesar -64,65%(yoy) pada triwulan I 2017. Penurunan signifikan terhadap nilai impor tersebut, disebabkan oleh penurunan yang signifikan pada nilai impor untuk jenis *consumption goods, raw material goods* dan *capital goods*. Sementara itu, volume impor barang juga mengalami penurunan yang signifikan di triwulan laporan, yang berkontraksi sangat dalam sebesar -91,22% (yoy), dibandingkan triwulan sebelumnya -73,04% (yoy).



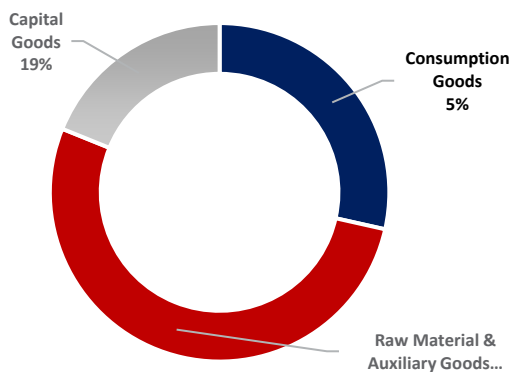
Grafik 1.27 Perkembangan Nilai Impor Luar Negeri Bali



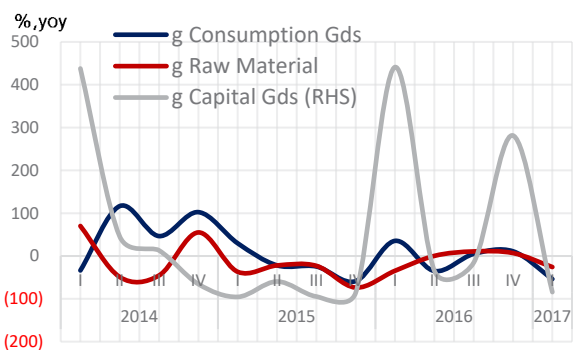
Grafik 1.28 Perkembangan Volume Impor Luar Negeri Bali

Pada triwulan laporan, nilai impor untuk jenis *capital goods* (dengan *share* sebesar 28,51%) tercatat sebesar \$USD 5,22 juta, berkontraksi sebesar -53,71% (yoy), menurun signifikan bila dibandingkan dengan pertumbuhan triwulan IV 2016 yang tercatat sebesar 10,98% (yoy). Sementara itu, nilai impor *Capital goods* yang memiliki (*share* 18,88%), mencatat kontraksi terdalan di triwulan laporan, yaitu sebesar -84,21% (yoy) dengan nilai mencapai \$USD 3,45 juta,

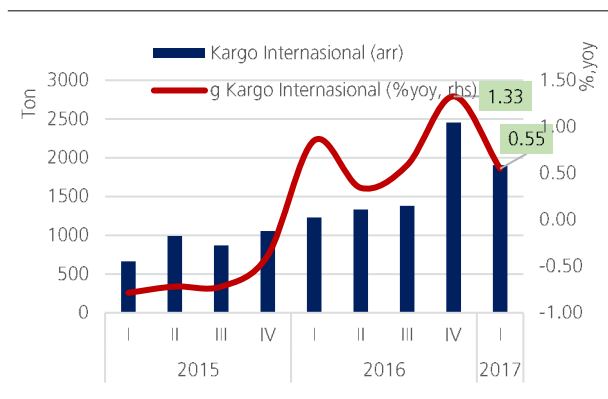
pertumbuhan ini jauh lebih rendah bila dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang sebesar 281,34% (yoy), karena adanya impor kapal. Disisi lain, nilai impor *raw material* yang memiliki *share* terbesar 52,61%, juga mengalami penurunan kinerja dan kontraksi di triwulan laporan, tercatat sebesar -25,67%, lebih rendah dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang sebesar 6,88%. Perlambatan kinerja impor, juga terkonfirmasi oleh volume kedatangan kargo internasional di Bandara I Gusti Ngurah Rai, yang pada triwulan I 2017, tumbuh sebesar 1,92% (yoy), lebih rendah bila dibandingkan dengan pertumbuhan triwulan sebelumnya yang mencapai 2,19% (yoy).



Grafik 1.29 Pangsa Impor Berdasarkan Klasifikasi BEC (Tw I 2017)



Grafik 1.30 Perkembangan Impor Berdasarkan Klasifikasi BEC



Grafik 1.31 Perkiraan Kegiatan Dunia Usaha Triwulan II 2017

Kinerja impor jasa Provinsi Bali di triwulan I 2017, mencatat peningkatan pertumbuhan, yaitu dari sebesar 33,60% (yoy) pada triwulan IV 2016 menjadi sebesar 40,50% (yoy) pada triwulan IV 2016. Peningkatan tersebut antara lain seiring dengan peningkatan jumlah tenaga kerja asing (TKA) pasca implementasi MEA pada tahun 2016. Selain itu, seiring bertambahnya jumlah hotel baru, khususnya yang merupakan jaringan internasional, juga ikut mendorong peningkatan TKA, terutama untuk tenaga *chef*, serta *top level manager*.

Sementara itu, kinerja impor pada triwulan II 2017, diperkirakan akan mengalami peningkatan kinerja, seiring dengan telah mulai masuknya periode pariwisata sehingga akan mendorong peningkatan jumlah wisman, yang pada gilirannya akan mendorong peningkatan kebutuhan untuk jenis komoditas yang dibutuhkan sebagai bahan *food and beverages* di hotel, seperti keju, daging, salmon dan *wine*. Selain itu, akan mulai meningkatnya investasi swasta ditriwulan II 2017, akan mendorong peningkatan untuk jenis barang modal antara lain berupa mesin-mesin.

1.3. SISI PENAWARAN

Dari sisi penawaran, peningkatan kinerja ekonomi Bali di triwulan I 2017, didorong oleh peningkatan kinerja di hampir semua lapangan usaha utama. Peningkatan terjadi di lapangan usaha penyediaan akomodasi makan dan minum, pertanian, perdagangan besar dan eceran, dan industri pengolahan. Beberapa faktor yang mendorong peningkatan kinerja lapangan usaha ini, antara lain meliputi: 1) mulai masuknya periode panen komoditas tabama di periode triwulan laporan; 2) peningkatan kunjungan wisman Tiongkok, seiring dengan adanya perayaan imlek di triwulan laporan; 3) adanya kunjungan rombongan Raja Arab Saudi selama 9 hari di Bali; 4) adanya faktor musiman berupa perayaan hari keagamaan, yaitu Nyepi, persiapan

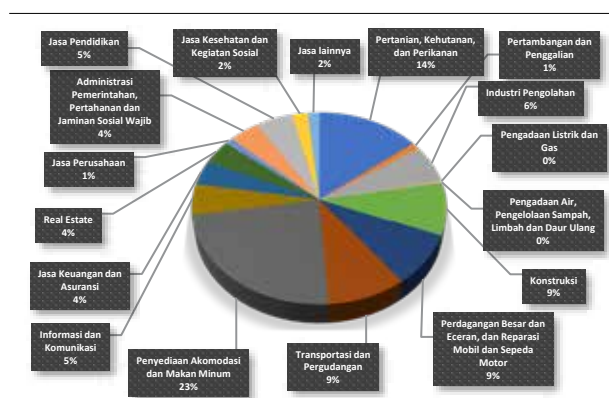
galungan dan kuningan, mendorong peningkatan permintaan konsumsi rumah tangga; 5) membaiknya kinerja ekonomi beberapa negara yang menjadi mitra dagang Bali, mendorong peningkatan kinerja industri pengolahan. Peningkatan kinerja lapangan usaha utama tersebut, mendorong meningkatnya kinerja ekonomi Bali di triwulan laporan. Sementara itu, kinerja konstruksi mengalami perlambatan disebabkan oleh perubahan struktur OPD pada tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota di Bali, sehingga menahan laju belanja modal, yang berdampak kontraksi lapangan usaha ini, sementara itu disisi yang lain, berdasarkan hasil *liaison*, investasi swasta untuk konstruksi masih tumbuh terbatas di triwulan laporan.

Tabel 1.2 Pertumbuhan PDRB Provinsi Bali dari Sisi Penawaran (% , yoy)*

Komponen	2015				2015	2016				2016	2017
	I	II	III	IV		I	II	III	IV		
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2,59	4,40	1,45	2,45	2,72	2,03	0,34	6,23	3,78	3,10	4,34
Pertambangan dan Penggalian	(4,19)	(6,53)	(9,81)	(6,57)	(6,83)	5,01	6,31	5,71	0,35	4,28	2,54
Industri Pengolahan	6,73	8,57	6,88	6,34	7,13	4,68	2,15	3,30	2,99	3,26	5,32
Pengadaan Listrik, Gas	8,58	(2,50)	(0,57)	1,48	1,59	10,58	15,68	9,90	(1,63)	8,31	0,52
Pengadaan Air	0,93	1,10	0,76	5,12	1,99	9,64	6,82	6,14	3,05	6,34	1,82
Konstruksi	2,67	3,61	6,06	7,59	5,01	7,62	8,07	6,98	6,43	7,26	6,32
Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	7,92	6,85	9,12	7,86	7,94	8,57	6,49	5,22	6,31	6,61	7,37
Transportasi dan Pergudangan	4,02	3,82	5,11	5,15	4,54	6,89	8,18	10,22	5,55	7,72	5,21
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	7,42	6,18	5,73	5,19	6,11	6,15	6,78	7,48	6,31	6,69	7,78
Informasi dan Komunikasi	9,79	9,05	10,77	10,12	9,94	8,23	8,91	8,06	9,15	8,59	7,30
Jasa Keuangan	6,49	4,03	10,36	5,78	6,66	8,45	7,67	7,05	9,08	8,06	4,14
Real Estate	5,86	4,95	4,92	5,09	5,20	5,79	5,53	4,52	2,77	4,63	2,63
Jasa Perusahaan	5,23	6,91	7,15	8,54	6,99	10,14	6,39	6,27	4,87	6,85	6,02
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	7,28	7,92	9,40	8,31	8,27	5,48	15,19	2,32	0,05	5,44	(0,39)
Jasa Pendidikan	8,75	8,85	8,24	9,91	8,94	9,50	9,37	8,72	8,15	8,91	7,30
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	8,06	7,90	9,77	9,26	8,76	9,96	9,50	8,57	8,06	9,00	7,58
Jasa lainnya	8,96	7,41	7,60	8,01	7,99	7,70	8,34	9,09	8,92	8,52	8,53
PDRB	5,94	5,86	6,21	6,10	6,03	6,38	6,54	6,61	5,47	6,24	5,75

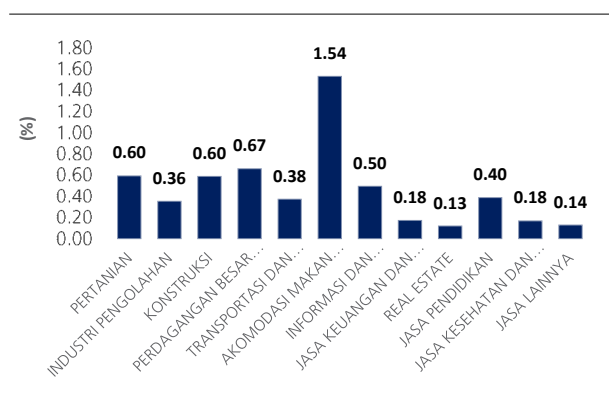
Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Bali
* Tahun Dasar 2010

Perkembangan struktur ekonomi Bali pada triwulan I 2017, masih didominasi oleh 5 komponen lapangan usaha utama yaitu: (1) penyediaan akomodasi makan dan minum (23,46%), (2) pertanian, kehutanan dan perikanan (14,34%), (3) transportasi dan pergudangan (9,22%), (4) konstruksi (8,81%), dan (5) perdagangan besar dan eceran (8,65%). Dominasi lapangan usaha yang terkait dengan industri pariwisata, terlihat dari total pangsa yang mencapai 32,10% (akomodasi makan minum dan transportasi dan pergudangan). Sementara itu, berdasarkan sumbangan pertumbuhannya, lapangan usaha penyediaan akomodasi makan dan minum serta lapangan usaha perdagangan besar dan eceran menjadi lapangan usaha dengan sumbangan tertinggi di triwulan laporan, masing-masing sebesar



Sumber : Badan Pusat Statistik, diolah

Grafik 1.32 Pangsa Kategori Ekonomi terhadap PDRB Provinsi Bali Triwulan I 2017

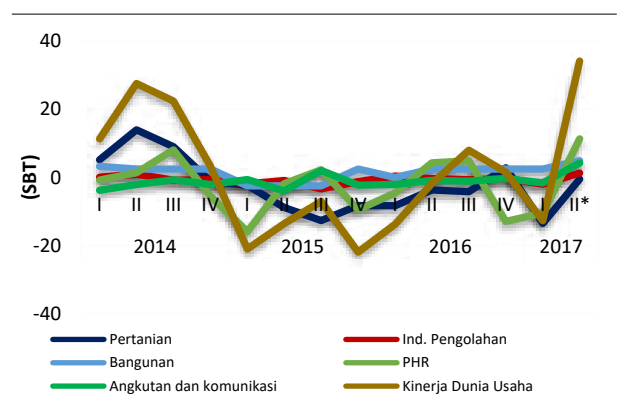


Sumber : Badan Pusat Statistik, diolah

Grafik 1.33 Sumbangan Kategori terhadap Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Bali Triwulan I 2017

1,54% dan 0,67%. Sementara lapangan usaha pertanian yang merupakan lapangan usaha utama terbesar kedua, mengalami peningkatan sumbangan pertumbuhan dari 0,55% pada triwulan IV 2016 menjadi 0,6% di triwulan laporan.

Memasuki triwulan II 2017, sebagian besar lapangan usaha diperkirakan akan menunjukkan peningkatan, khususnya lapangan usaha yang terkait langsung dengan industri pariwisata (akomodasi makan-minum dan transportasi) sejalan dengan telah masuknya periode pariwisata. Sementara itu disisi yang lain, peningkatan kinerja beberapa lapangan usaha di triwulan II-2017, juga diperkirakan didorong oleh adanya faktor musiman berupa perayaan hari keagamaan yaitu galungan, kuningan, ramadhan dan idul fitri. Sejalan dengan hal tersebut, adanya pembayaran gaji ke-13 dan THR (gaji 14) Pegawai Negeri Sipil (PNS), diperkirakan ikut mendorong peningkatan kinerja beberapa lapangan usaha ditriwulan II-2017. Peningkatan kinerja beberapa lapangan usaha pada triwulan II-2017, juga terkonfirmasi dari hasil Survei Kegiatan Dunia Usaha (SKDU). Berdasarkan hasil survei tersebut, seluruh lapangan usaha utama, diperkirakan menunjukkan peningkatan kinerja di triwulan II-2017, sehingga akan mendorong peningkatan kinerja dunia usaha di triwulan tersebut.



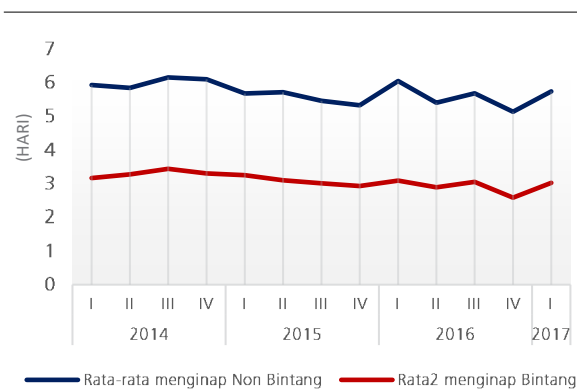
Sumber : Survei Kegiatan Dunia Usaha

Grafik 1.34 Perkiraan Kegiatan Dunia Usaha Triwulan II 2017

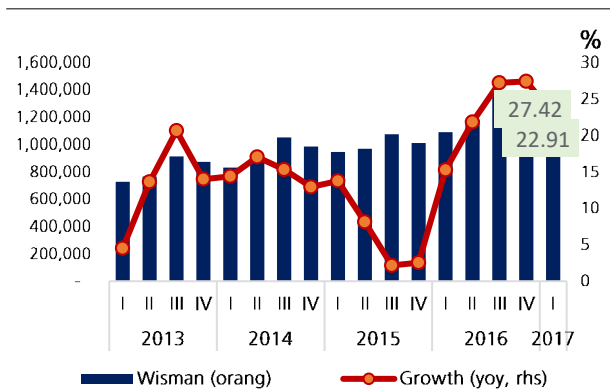
1.3.1. Lapangan Usaha Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum

Kinerja lapangan usaha penyediaan akomodasi dan makan minum di triwulan laporan, tercatat tumbuh sebesar 7,78% (yoy), tumbuh lebih tinggi bila dibandingkan dengan pertumbuhan pada triwulan sebelumnya yang mencapai 6,31% (yoy). Peningkatan kinerja lapangan usaha ini, didorong oleh tetap tingginya jumlah kunjungan wisman, khususnya asal Tiongkok. Selain itu, kunjungan rombongan raja Salman di triwulan laporan, juga ikut mendorong peningkatan kinerja lapangan usaha ini. Berdasarkan hasil survei dan *liaison* dengan beberapa pelaku usaha di industri pariwisata, peningkatan kinerja lapangan usaha akomodasi makan dan minum di triwulan laporan ini, didorong oleh: 1) upaya yang dilakukan oleh pelaku usaha untuk meningkatkan akses pasar, melalui pengembangan alternatif segmen pasar baru dan menjalin kerjasama dengan perusahaan lain; 2) pengembangan produk dan strategi pemasaran baru serta perbaikan pelayanan yang terus dilakukan; 3) adanya faktor musiman yaitu perayaan imlek mendorong peningkatan kunjungan wisman Tiongkok; 4) meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan domestik yang berkunjung ke Bali, baik liburan perorangan/keluarga (FIT) maupun *group*; 5) mulai berkembangnya beberapa segmen pasar baru, yaitu Timur Tengah, Rusia dan Finlandia; 6) upaya promosi yang dilakukan oleh pelaku usaha untuk menarik konsumen domestik dan asing, selain itu upaya pelaku usaha untuk selalu mengikuti *event* promosi pariwisata di luar negeri diantaranya *Travel Market* dan *Trade Fair* (London), *Internationale Tourismus Borse* (ITB) Berlin dan *Asia Travel Fair*; 7) terus *me-maintain* kerjasama dengan business partner melalui program *membership*; 8) adanya beberapa kegiatan *Meeting, Incentive, Convention dan Exhibition (MICE)* yang berjalan sepanjang periode triwulan laporan, yaitu Kunjungan Raja Arab Saudi dan Parlemen Thailand ke Bali.

Peningkatan kinerja lapangan usaha ini, juga terkonfirmasi dari hasil SKDU yang dilakukan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali di triwulan I 2017, yang menunjukkan peningkatan nilai Saldo Bersih Tertimbang (SBT), dari sebesar -12,86% (SBT) di triwulan IV 2016, menjadi sebesar -10,42% (SBT) di triwulan I 2017 untuk sektor perdagangan hotel dan restoran (PHR). Pada sisi yang lain, jumlah kunjungan wisman yang tetap tumbuh tinggi, turut mendorong peningkatan kinerja lapangan usaha ini. Pada periode triwulan I 2017, jumlah kunjungan wisman tercatat mencapai 1,34 juta orang atau tumbuh sebesar 22,91% (yoy), meskipun lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya (27,42%yoy), namun pertumbuhan jumlah wisman di triwulan I 2017, merupakan pertumbuhan tertinggi dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir di triwulan I, bahkan lebih tinggi dibandingkan rata-rata pertumbuhan tahunan wisman dalam kurun waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir di periode triwulan I yang sebesar 17,04% (yoy). Peningkatan kinerja akomodasi makan minum di triwulan laporan, juga terkonfirmasi oleh rata-rata lama menginap hotel berbintang dan non bintang, yang turut mengkonfirmasi terjadinya peningkatan di lapangan usaha ini, selaras dengan tetap tingginya jumlah kunjungan wisman di periode triwulan laporan, meskipun sedikit melambat.



Sumber : Dinas Pariwisata Provinsi Bali, diolah
Grafik 1.35 Rata-Rata Lama Menginap Hotel Bintang dan Non Bintang

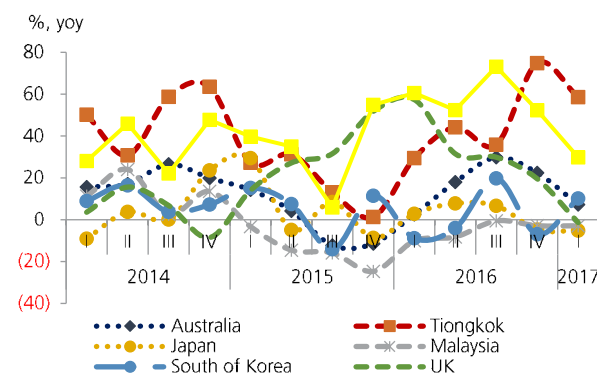


Sumber : Dinas Pariwisata Provinsi Bali, diolah

Grafik 1.36 Kunjungan Wisman ke Bali Triwulanan

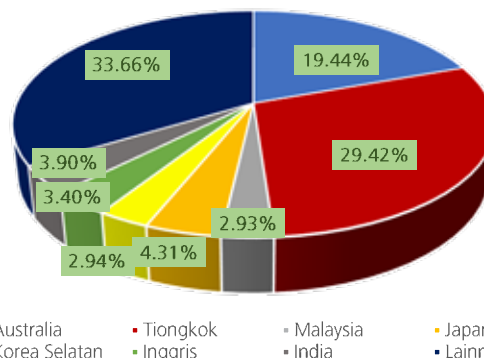
Berdasarkan asal negaranya, seiring dengan peningkatan yang signifikan terhadap pertumbuhan jumlah wisman tiangkong pada triwulan I 2017, komposisi wisman Bali mengalami perubahan yang signifikan. Wisman yang berkunjung ke Bali pada triwulan laporan mengalami perubahan, dari sebelumnya didominasi oleh Australia, bergeser menjadi Tiongkok dengan *share* mencapai 29,42%, selanjutnya diikuti oleh wisman asal Australia dengan *share* sebesar 19%, Tiongkok sebesar 19,44%, dan Jepang 4,31%, India sebesar 3,90% dan Inggris 3,41%. Masuknya India dan Inggris ke dalam lima besar negara asal wisman, tidak terlepas oleh dampak lanjutan dari kebijakan pembebasan visa ke Indonesia untuk 169 negara, sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2016 tentang Bebas Visa Kunjungan. Meskipun demikian, pada triwulan I 2017 pertumbuhan kunjungan wisman dari ke-5 negara utama asal wisman tersebut secara umum mengalami perlambatan, namun beberapa negara lainnya justru menunjukkan peningkatan seperti Korea Selatan dan Singapura. Tiongkok yang merupakan negara dengan *share* wisman terbesar, mencatat perlambatan pertumbuhan dari 74,84% (yoy) pada triwulan IV 2016, menjadi sebesar 58,59% (yoy) pada triwulan I 2017. Meskipun melambat, namun pertumbuhan di triwulan laporan, jauh lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan rata-rata dalam kurun waktu 5 tahun terakhir khususnya di periode triwulan I. masih menguatnya kunjungan wisman Tiongkok di periode

triwulan laporan, mengukuti berlanjutnya tren *outbound tourist* dan didukung dengan gencarnya penawaran paket wisata oleh pelaku usaha travel di Bali, termasuk pengembangan paket wisata Bali *and Beyond*.



Sumber : Dinas Pariwisata Provinsi Bali, diolah

Grafik 1.37 Perkembangan Kunjungan Wisman Berdasarkan Negara



Sumber : Dinas Pariwisata Provinsi Bali, diolah

Grafik 1.38 Asal Wisman yang Berkunjung ke Bali Pada Triwulan I 2017

Memasuki triwulan II 2017, lapangan usaha penyediaan akomodasi makan dan minum diperkirakan mengalami peningkatan, selain sesuai dengan pola musimannya, juga didorong oleh mulai masuknya periode pariwisata di Bali pada triwulan tersebut. Prakiraan peningkatan juga didukung dengan dibukanya rute penerbangan baru yaitu maskapai Air Asia X Indonesia yang akan terbang langsung dari Internasional Ngurah Rai (Denpasar) ke Narita International Airport (Tokyo) mulai 24 Mei 2017 dan maskapai Citilink akan membuka

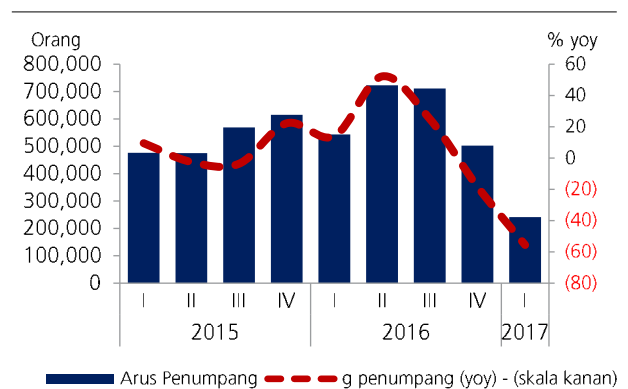
rute penerbangan baru Jakarta-Denpasar-Dili yang telah mulai beroperasi pada pertengahan bulan Mei 2017. Pembukaan *chartered flights* tersebut, sangat berpotensi meningkatkan jumlah kunjungan wisman Jepang dan Timor Leste ke Bali (pengembangan pasar alternatif). Selain itu, hasil survei dan *liaison* mengkonfirmasi potensi peningkatan seiring dengan (i) upaya promosi melalui keikutsertaan dalam kegiatan pameran; (ii) pengembangan produk paket wisata dengan menekankan Bali *and Beyond*; (iii) peningkatan pelayanan; (iv) mulai berkembangnya beberapa segmen pasar baru yaitu Timur Tengah, Rusia dan Finlandia; (v) dampak lanjutan kebijakan bebas visa dan *open sky policy*, (vi) dampak lanjutan kebijakan bebas visa. Survei dan *liaison* yang sama juga mengindikasikan peningkatan frekuensi MICE terutama *wedding* dan *meeting* yang cukup tinggi di periode triwulan II 2017.

1.3.2. Lapangan Usaha Transportasi dan Pergudangan

Lapangan usaha transportasi dan pergudangan ditriwulan I 2017 tumbuh melambat yaitu sebesar 5,21% (yoy), lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya yang sebesar 5,55% (yoy) pada triwulan IV 2016. Kondisi tersebut terutama disebabkan oleh menurunnya pertumbuhan di transportasi udara maupun transportasi laut, seiring telah berakhirnya *peak season* pada triwulan sebelumnya (hari natal dan tahun baru), yang menyebabkan penurunan pertumbuhan penumpang untuk angkutan laut dan udara. Melambatnya kinerja transportasi udara, sejalan dengan perlambatan pertumbuhan kunjungan wisman pada periode triwulan I 2017, dibandingkan triwulan sebelumnya. Kunjungan wisman Tiongkok yang signifikan di triwulan laporan yang tumbuh diatas 50% (yoy), ternyata belum mampu untuk mendorong peningkatan kinerja transportasi udara dan peningkatan pertumbuhan lapangan usaha transportasi dan pergudangan secara keseluruhan.

Transportasi Laut

Pada triwulan I 2017 sub kategori transportasi laut mengalami penurunan pertumbuhan yang signifikan, seiring dengan berakhirnya faktor musiman yang menjadi salah satu pendorong pertumbuhan yaitu natal dan tahun baru (arus mudik). Penurunan tersebut terlihat dari penurunan pertumbuhan arus penumpang transportasi laut dari sebesar -18,25% (yoy) pada triwulan IV 2016 atau dengan jumlah penumpang mencapai 502 ribu orang, turun dengan kontraksi yang makin dalam pada triwulan I 2017 sebesar -55,58% (yoy) atau tercatat dengan jumlah penumpang mencapai 241 ribu orang.



Sumber : BPS Provinsi Bali
Grafik 1.39 Arus Penumpang Laut Provinsi Bali

Transportasi Udara

Sejalan dengan penurunan kinerja sub kategori transportasi laut, perkembangan kinerja sub kategori transportasi udara juga menunjukkan perlambatan pertumbuhan. Kondisi ini sejalan dengan perlambatan yang terjadi pada jumlah kunjungan wisman di triwulan I 2017 dibandingkan triwulan sebelumnya. Selain itu, masuknya masa *low season* pariwisata pada periode triwulan laporan menjadi salah satu penyebab menurunnya kinerja lapangan usaha ini. Perubahan struktur OPD yang baru dilakukan pada awal Januari 2017, juga ikut mendorong perlambatan yang terjadi di lapangan usaha ini sejalan dengan perlambatan belanja pemerintah daerah termasuk perjalanan dinas di triwulan laporan. Pertumbuhan

keberangkatan jumlah penumpang mengalami penurunan dari 21,11% (yoy) atau sejumlah 2,5 juta orang penumpang pada triwulan IV 2016, menjadi tumbuh sebesar 10,43% (yoy) di triwulan I 2017 atau tercatat sejumlah 2,49 juta orang penumpang.



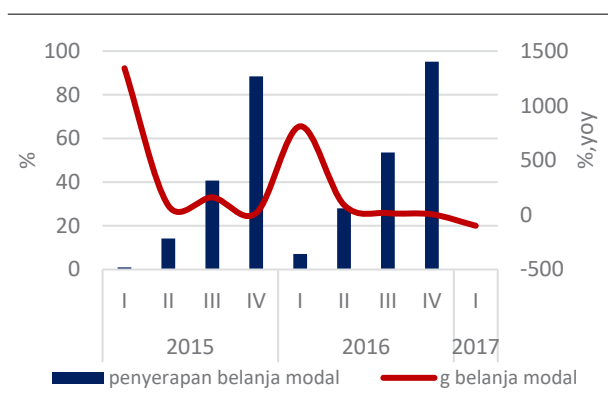
Sumber : Angkasa Pura I

Grafik 1.40 Jumlah Penumpang Pesawat Udara Bandara Ngurah Rai

Kinerja lapangan usaha transportasi dan pergudangan pada triwulan II 2017, diperkirakan akan mengalami peningkatan kinerja baik untuk angkutan udara, angkutan darat maupun angkutan laut. Peningkatan tersebut didorong oleh adanya perayaan hari keagamaan yaitu galungan, kuningan, ramadhan dan idul fitri, sehingga akan mendorong meningkatkannya aktivitas masyarakat untuk bepergian ke luar daerah atau keluar wilayah Provinsi Bali, maupun sebaliknya. Selain itu, masuknya periode pariwisata dan menjelang liburan tahun ajaran baru di triwulan II 2017, diperkirakan juga akan mendorong peningkatan kinerja lapangan usaha transportasi dan pergudangan. Upaya pelaku usaha untuk meningkatkan ketersediaan stok komoditas bahan pokok strategis di gudang, mengantisipasi lonjakan permintaan karena adanya perayaan hari keagamaan di triwulan II 2017, juga ikut mendorong peningkatan kinerja lapangan usaha ini. Adanya pembukaan rute penerbangan baru disepanjang triwulan II 2017 (Batik Air Denpasar - Kuala Lumpur dan Denpasar - Pert; Citilink Denpasar - Dili; Air Asia X Denpasar - Narita) juga merupakan faktor pendorong peningkatan lapangan usaha ini di triwulan II 2017.

1.3.3. Lapangan Usaha Konstruksi

Sejalan dengan perlambatan pertumbuhan komponen investasi dan kontraksi sub kategori Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) Bangunan, lapangan usaha konstruksi turut mengalami perlambatan di periode triwulan laporan. Lapangan usaha konstruksi tumbuh sedikit melambat dari sebesar 6,43% (yoy) pada triwulan IV 2016, menjadi sebesar 6,32% (yoy) pada triwulan I 2017. Perlambatan pertumbuhan ini, diindikasikan oleh perlambatan realisasi belanja modal Pemerintah Daerah Provinsi Bali, yang disebabkan oleh perubahan struktur OPD yang mulai terealisasi pertengahan Januari 2017. Kebijakan ini, menyebabkan tertundanya proses pelelangan proyek dan pengerjaan beberapa proyek infrastruktur untuk anggaran tahun 2017. Selain hal tersebut, perlambatan yang terjadi pada lapangan usaha ini berdasarkan hasil survei dan *liaison*, juga disebabkan oleh sikap *wait and see* dari beberapa pelaku usaha untuk mencermati perkembangan ekonomi dan implementasi beberapa paket kebijakan deregulasi yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah, sehingga cenderung menahan laju investasi bangunan.

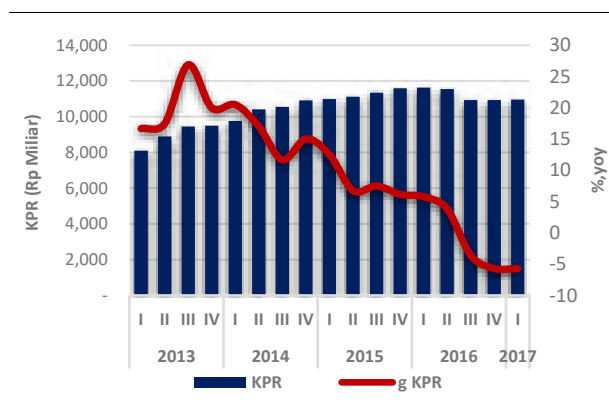


Sumber: BPKAD Prov. Bali

Grafik 1.41 Perkembangan Belanja Modal Provinsi Bali

Perlambatan pertumbuhan konstruksi juga sejalan dengan penurunan pertumbuhan kredit pemilikan rumah (KPR), yang pada triwulan laporan kontraksinya berlanjut lebih dalam mencapai -5,72% (yoy), dibandingkan triwulan sebelumnya yang tercatat

sebesar -5,69% (yoy). Relaksasi ketentuan LTV untuk KPR dan penurunan suku bunga KPR, ternyata belum mampu mendorong peningkatan pertumbuhan KPR ditriwulan I 2017, yang disebabkan masih tertahannya laju permintaan pembelian rumah. Kondisi ini mengakibatkan melambatnya kinerja lapangan usaha konstruksi. Program *tax amnesty* dan paket kebijakan Pemerintah XIII, juga ternyata belum dapat mendorong peningkatan permintaan rumah tinggal. Selain itu, menurunnya pagu anggaran Dinas Pekerjaan Umum Provinsi untuk infrastruktur pada tahun 2017 sebesar Rp 229 miliar, jauh lebih rendah dibandingkan tahun 2016 sebesar Rp 692 miliar, menjadi salah satu faktor yang ikut menahan laju pertumbuhan lapangan usaha konstruksi.



Grafik 1.42 Perkembangan KPR

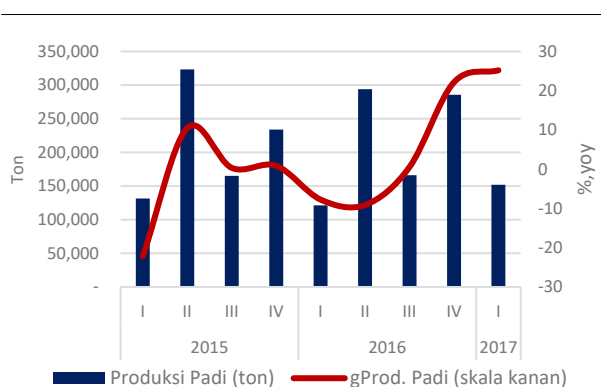
Memasuki triwulan II 2017, lapangan usaha konstruksi diperkirakan akan menunjukkan tendensi peningkatan, sejalan dengan telah selesainya penyesuaian birokrasi terkait dengan perubahan struktur organisasi pemerintah daerah (OPD) di Provinsi maupun kabupaten/kota dan upaya akselerasi maupun percepatan untuk proses pengadaan dan pengerjaan proyek infrastruktur pemerintah, setelah tertunda di triwulan sebelumnya, diperkirakan akan mendorong peningkatan realisasi belanja modal yang pada gilirannya akan mendorong peningkatan kinerja konstruksi. Peningkatan kinerja investasi pada

triwulan II 2017, juga diperkirakan akan didorong oleh peningkatan optimisme pelaku usaha sejalan dengan terus berlanjutnya penurunan tingkat suku bunga kredit perbankan, yang pada gilirannya akan mendorong upaya ekspansi usaha dan permintaan kredit investasi, sehingga pada gilirannya akan mendorong peningkatan kinerja konstruksi.

1.3.4. Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan

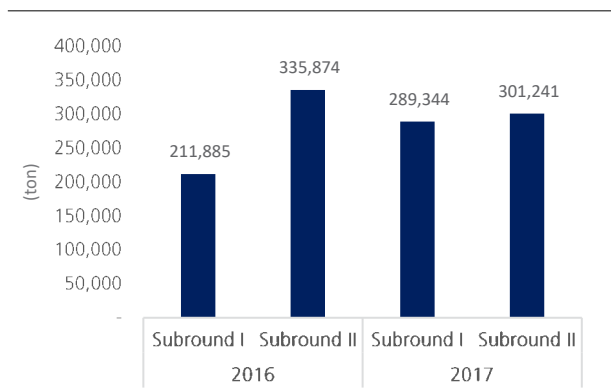
Perkembangan kinerja usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan mengalami peningkatan di triwulan laporan yaitu sebesar 4,34% (yoy) pada triwulan I 2017, lebih tinggi bila dibandingkan dengan 3,78% (yoy) di triwulan sebelumnya. Peningkatan kinerja lapangan usaha ini, terutama didorong oleh membaiknya produksi sub kategori tanaman bahan makanan khususnya padi, seiring dengan ketersediaan air yang cukup pada saat musim tanam di akhir tahun 2016 dan sepanjang proses pada penanaman awal, penambahan luasan areal tanam dan panen serta upaya intensifikasi pertanian yang dilakukan secara berkesinambungan oleh pemerintah daerah melalui Dinas Pertanian dalam program gerakan pengelolaan penerapan tanaman terpadu (GPPTT), antara lain dalam bentuk: 1) penggunaan benih unggul bersertifikasi; 2) penggunaan pupuk organik; 3) pengaturan pola tanam, 4) upaya penanggulangan hama dan penyakit tanaman. Peningkatan produksi padi, juga didorong oleh perbaikan irigasi primer, sekunder dan tersier yang telah dilakukan sebelumnya, mendorong ketersediaan air yang cukup sepanjang periode tanam. Produksi padi pada triwulan I 2017, diperkirakan tumbuh mencapai 25% (yoy), dengan tingkat produksi mencapai 151 ribu ton GKG, lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan produksi di periode yang sama tahun sebelumnya, yang berkontraksi -7,75% (yoy) atau dengan tingkat produksi sebesar 121 ribu ton GKG.

Peningkatan kinerja lapangan usaha pertanian di triwulan laporan, juga didorong oleh peningkatan kinerja produksi sub kategori peternakan, dengan tingkat produksi ternak (daging, telur dan susu) tercatat mencapai 51.914 ton, lebih tinggi dibandingkan dengan tingkat produksi di periode yang sama tahun 2016, yang tercatat sebesar 50.477 ton. Peningkatan kinerja produksi ternak di triwulan laporan tersebut, didorong oleh beberapa faktor meliputi: 1) peningkatan permintaan karena adanya beberapa hari raya keagamaan yaitu imlek, nyepi, persiapan galungan dan kuningan; 2) adanya program peningkatan produksi daging sapi antara lain untuk meningkatkan pasokan ke Jakarta, didorong melalui peningkatan populasi sapi khususnya jantan melalui program inseminasi buatan (bersertifikasi) dan peningkatan persediaan semen beku; 3) adanya program sapi induk wajib bunting (SIWAB) melalui pemberian inseminasi buatan secara gratis di tahun 2017 untuk 128.204 ekor sapi betina; 4) Peningkatan produksi telur, untuk meningkatkan pasokan ke Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), sebagai antisipasi lonjakan permintaan.



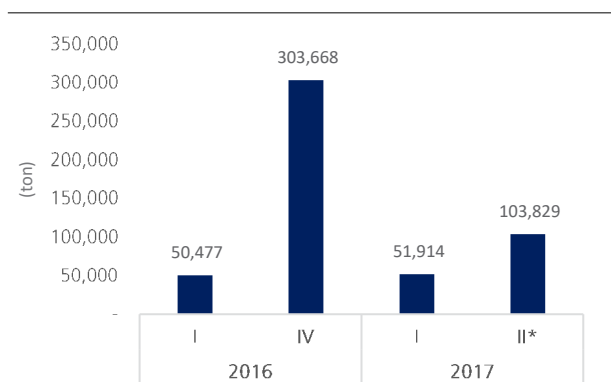
Sumber : Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan Provinsi Bali

Grafik 1.43 Perkembangan Produksi Padi di Bali



Sumber : Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan Provinsi Bali

Grafik 1.44 Prakiraan Perkembangan Produksi Padi di Bali Tahun 2017

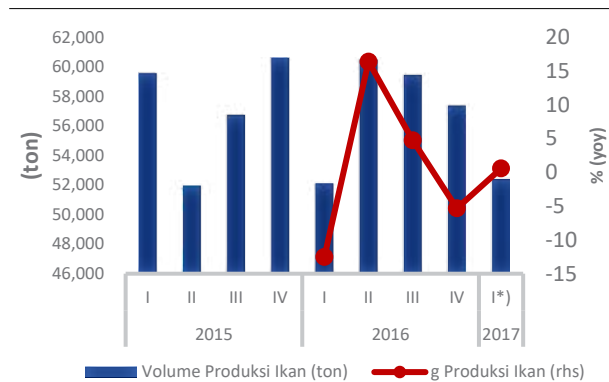


Sumber : Dinas Peternakan Provinsi Bali

Grafik 1.45 Prakiraan Perkembangan Produksi Ternak 2017

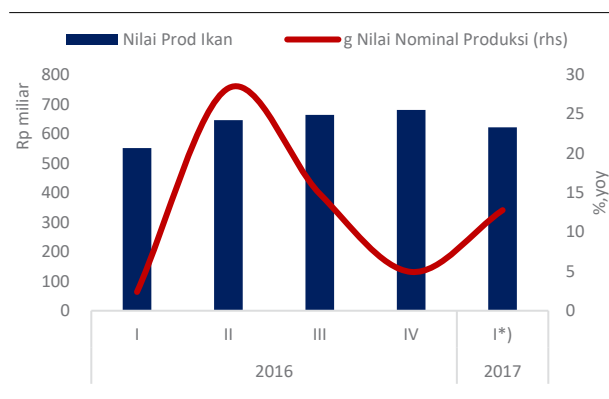
Peningkatan kinerja lapangan usaha pertanian di triwulan laporan, juga sejalan dengan peningkatan kinerja sub kategori perikanan yang pada periode triwulan I 2017 tumbuh lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya. Peningkatan kinerja perikanan, terkonfirmasi oleh meningkatnya nilai produksi ikan (tangkap dan budidaya), yang tumbuh mencapai 0,57% (yoy) atau dengan produksi tercatat sebesar 52 ribu ton, lebih tinggi bila dibandingkan triwulan sebelumnya yang berkontraksi sebesar -5,31% (yoy). Meningkatnya produksi perikanan pada triwulan I 2017, terjadi baik untuk perikanan tangkap sejalan larangan ilegal fishing dan penggunaan kapal eks asing, sehingga menyebabkan daerah fishing ground lebih terjangkau oleh nelayan, maupun juga untuk perikanan budidaya, seiring dengan berbagai upaya

intensifikasi produksi yang dilakukan oleh pelaku usaha. Sejalan dengan peningkatan produksi tersebut, nilai produksi perikanan juga meningkat mencapai Rp 621 miliar di triwulan laporan, atau tumbuh sebesar 12,78% (yoy), lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan nilai produksi di triwulan sebelumnya, yang sebesar 4,93% (yoy).



Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan

Grafik 1.46 Perkembangan Volume Produksi Perikanan

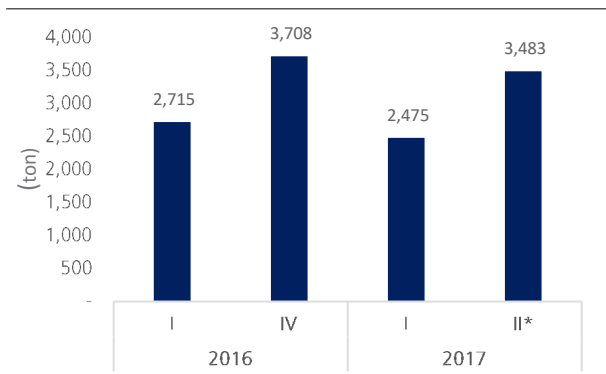


Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan

Grafik 1.47 Perkembangan Nilai Produksi Perikanan

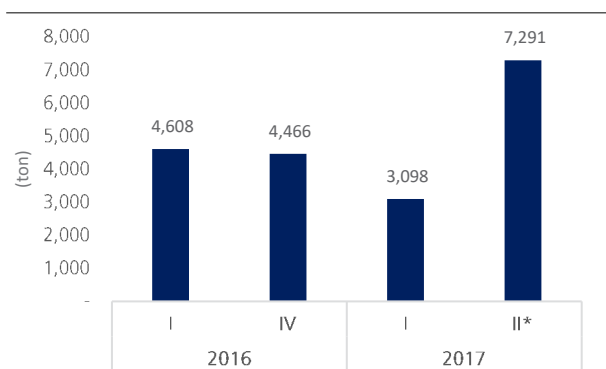
Memasuki triwulan II 2017, kinerja lapangan usaha pertanian menunjukkan tendensi peningkatan yang terutama didorong oleh masuknya musim puncak panen untuk periode tanam pertama di tahun 2017 pada periode April dan Mei untuk komoditas padi. Selain itu, upaya peningkatan intensifikasi pertanian dan perbaikan irigasi, diperkirakan ikut mendorong peningkatan kinerja suba ketagori komoditas padi

di triwulan II 2017. Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan Provinsi Bali memprakirakan, tingkat produksi padi pada periode subround I 2017 (Triwulan I & II), diprakirakan akan mencapai 289 ribu ton GKG, lebih tinggi dari periode yang sama tahun 2016 yang sebesar 212 ribu ton GKG. Sejalan dengan peningkatan produksi padi, komoditas peternakan pada triwulan II 2017, juga diprakirakan akan menunjukkan peningkatan produksi sejalan dengan meningkatnya permintaan didorong oleh adanya perayaan hari keagamaan yaitu galungan, kuningan, ramadhan dan idul fitri. Peningkatan produksi, juga diprakirakan didorong oleh membaiknya harga telur, seiring dengan permintaan yang akan meningkat di triwulan II 2017, sehingga akan meningkatkan gairah peternak untuk meningkatkan produksi. Seiring dengan telah mulai berkurangnya intensitas hujan memasuki periode triwulan II 2017, saat masuknya masa panen produk hortikultura antara lain cabe merah besar dan cabe rawit merah serta komoditas hortikultura lainnya, diprakirakan akan mendorong peningkatan produksi komoditas cabe merah dan cabe rawit serta komoditas hortikultura lainnya di periode triwulan II 2017, setelah anjlok pada triwulan sebelumnya. Kondisi ini merupakan beberapa faktor yang berpotensi akan mendorong peningkatan kinerja lapangan usaha pertanian pada triwulan II 2017. Peningkatan kinerja pertanian juga akan didorong oleh peningkatan produksi perikanan, sejalan dengan telah berakhirnya masa paceklik tangkapan ikan laut pada triwulan I 2017, sehingga di triwulan II 2017 volume produksi ikan diprakirakan akan mengalami peningkatan. Perbaikan kinerja lapangan usaha pertanian di triwulan II 2017, juga terkonfirmasi dari hasil survei kegiatan dunia usaha yang menunjukkan peningkatan nilai SBT dibandingkan triwulan I 2017.



Sumber : Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan Provinsi Bali

Grafik 1.48 Prakiraan Perkembangan Produksi Cabe Merah Besar di Bali Tw II 2017



Sumber : Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan Provinsi Bali

Grafik 1.49 Prakiraan Perkembangan Produksi Cabe Rawit Merah di Bali Tw II 2017



Sumber : Survei Kegiatan Dunia Usaha

Grafik 1.50 Kegiatan Dunia Usaha Sektor Pertanian

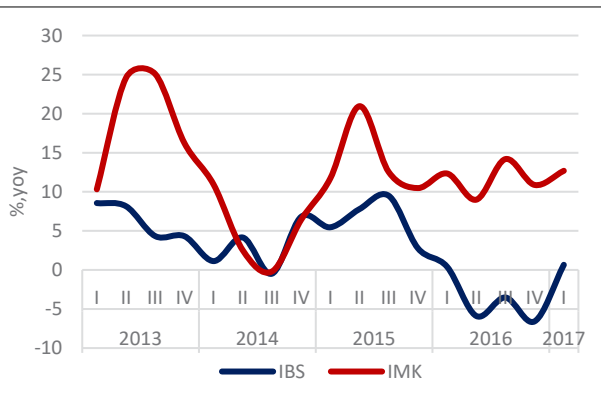
1.3.5. Lapangan Usaha Industri Pengolahan

Pada triwulan I 2017, pertumbuhan lapangan industri pengolahan tercatat sebesar 5,32% (yoy), lebih lambat dibanding pertumbuhan triwulan sebelumnya yang sebesar 2,99%(yoy). Peningkatan kinerja industri pengolahan tersebut, sejalan dengan peningkatan

kinerja ekspor diperiode triwulan laporan, karena produk ekspor barang Bali merupakan hasil produksi industri pengolahan. Membaiknya kinerja industri pengolahan, sejalan dengan membaiknya ekonomi negara mitra dagang Bali yaitu AS dan Tiongkok serta upaya perluasan pasar melalui pengembangan pasar alternatif yang dilakukan oleh pelaku usaha industri pengolahan yang berorientasi ekspor, termasuk dengan mengikuti berbagai kegiatan pameran internasional. Meningkatnya kinerja lapangan usaha ini, terkonfirmasi oleh peningkatan kinerja ekspor khususnya untuk beberapa komoditas yang dihasilkan oleh industri pengolahan meliputi perhiasan, olahan kayu dan furniture yang merupakan komoditas utama ekspor Bali. Peningkatan kinerja lapangan usaha ini, juga didorong oleh tetap berlanjutnya pertumbuhan yang tinggi dari jumlah kunjungan wisman yang berkunjung ke Bali, ditriwulan ini tercatat tumbuh sebesar 22,91% (yoy), sehingga mendorong peningkatan permintaan dari produk yang dihasilkan oleh industri kecil menengah (IKM) yang akan dibeli maupun dikonsumsi oleh wisman. Meningkatnya kinerja lapangan usaha ini, pada triwulan I 2017 juga didorong oleh adanya faktor musiman berupa perayaan hari keagamaan, sehingga mendorong peningkatan permintaan untuk produk industri olahan baik industri kecil menengah, maupun industri sedang dan besar.

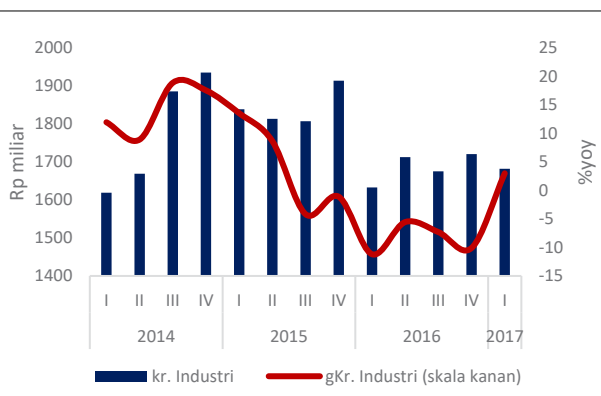
Peningkatan kinerja lapangan usaha industri pengolahan, juga terkonfirmasi oleh peningkatan pertumbuhan Indeks Indikator Industri Besar Sedang (IBS) dan Indeks Manufaktur Mikro Kecil dan Menengah (IMK). IBS mengalami peningkatan dari sebesar -6,58% (yoy) pada triwulan IV 2016, menjadi sebesar 0,66% (yoy) pada triwulan I 2017. Sejalan dengan kondisi tersebut, IMK juga mengalami peningkatan dari sebesar 10,88% (yoy) pada triwulan IV 2016, menjadi sebesar 12,69% (yoy) pada triwulan I 2017. Sejalan dengan perbaikan kinerja industri pengolahan tersebut, pertumbuhan kredit

industri pengolahan juga menunjukkan peningkatan dari kontraksi sebesar -10,1% (yoy) pada triwulan IV 2016, menjadi 3% (yoy) pada triwulan I 2017. Kondisi ini menunjukkan mulai ekspansinya pelaku usaha pada industri pengolahan, sejalan dengan mulai membaiknya ekonomi global dan kondisi ekonomi nasional dan regional yang juga menunjukkan perbaikan.

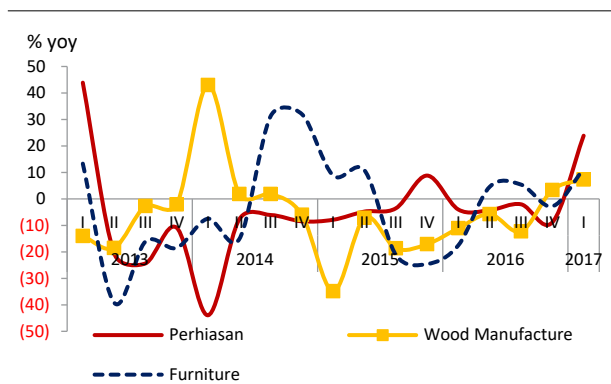


Sumber : BPS Provinsi Bali

Grafik 1.51 Indikator Industri Besar Sedang (IBS) dan Industri Manufaktur Mikro dan Kecil (IMK)



Grafik 1.52 Kredit Kategori Industri



Sumber : Bea dan Cukai

Grafik 1.53 Perkembangan Komoditas Utama Ekspor Bali

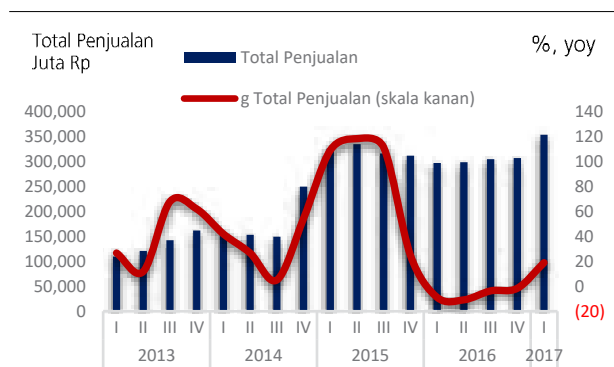
Memasuki triwulan II 2017, kinerja industri pengolahan diperkirakan akan tetap tumbuh secara signifikan, meskipun sedikit melambat dibandingkan triwulan sebelumnya. Berlanjutnya perbaikan ekonomi global dan membaiknya kinerja negara mitra dagang Bali serta terus meningkatnya jumlah kunjungan wisman seiring dengan masuknya periode pariwisata dan adanya faktor musiman berupa perayaan hari keagamaan, menjadi faktor pendorong pertumbuhan lapangan usaha ini di triwulan laporan. Meskipun demikian, semakin meningkatnya tingkat persaingan dengan negara-negara eksportir dari produk industri olahan yang sejenis dengan Bali, seperti Thailand, Vietnam, Kamboja dan Bangladesh serta China tentunya, diperkirakan akan berpotensi menahan laju pertumbuhan lapangan usaha ini. Selain itu, potensi implementasi kebijakan proteksionisme AS berpotensi akan menahan laju kinerja lapangan usaha industri pengolahan.

1.3.6. Lapangan Usaha Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor

Kinerja usaha perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor di triwulan I 2017, mengalami peningkatan, yaitu tumbuh dari sebesar 6,31% (yoy) pada triwulan IV 2016 menjadi 7,37% (yoy) di triwulan laporan. Pertumbuhan tersebut, terkonfirmasi dari hasil Survei Penjualan Eceran (SPE) yang menunjukkan peningkatan pada triwulan I 2017

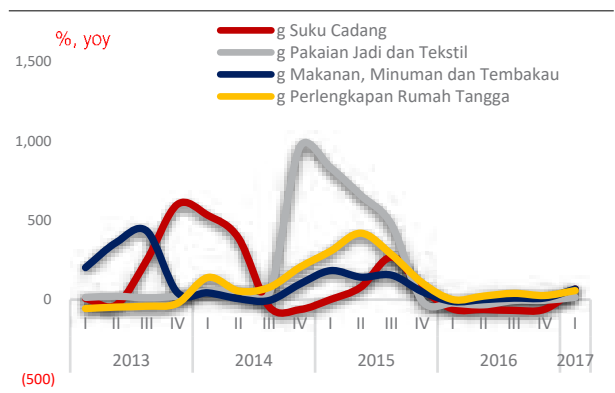
dibandingkan triwulan sebelumnya, yaitu dari sebesar -1,56% (yoy) pada triwulan IV 2016, menjadi tumbuh sebesar 19,04% (yoy) di triwulan I 2017. Berdasarkan hasil SPE, peningkatan penjualan di triwulan laporan terjadi untuk hampir semua kelompok komoditas yang meliputi: suku cadang; perlengkapan rumah tangga; makanan, minuman dan tembakau; dan pakaian jadi-tekstil. Peningkatan kinerja lapangan usaha ini, sejalan dengan adanya peningkatan permintaan domestik didorong oleh adanya faktor musiman, berupa perayaan hari keagamaan di triwulan laporan. Selain itu, peningkatan kinerja lapangan usaha perdagangan, juga didorong oleh adanya kenaikan UMP sebesar 8,25% (yoy) yang mulai terealisasi di awal tahun 2017 pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota, sehingga mendorong peningkatan daya beli konsumen. Peningkatan kinerja lapangan usaha ini, juga didorong oleh jumlah kunjungan wisman yang tetap tumbuh tinggi di triwulan laporan sebesar 22,91% (yoy), sehingga mendorong transaksi perdagangan di Wilayah Bali.

Peningkatan kinerja lapangan usaha perdagangan di triwulan laporan, juga terkonfirmasi oleh peningkatan pertumbuhan kredit konsumsi yang tumbuh dari 8,89% (yoy) di triwulan IV 2016, menjadi 9,14% (yoy) di triwulan I 2017. Peningkatan kredit konsumsi, sejalan dengan terus menurunnya tingkat suku bunga kredit perbankan, termasuk suku bunga kredit konsumsi.



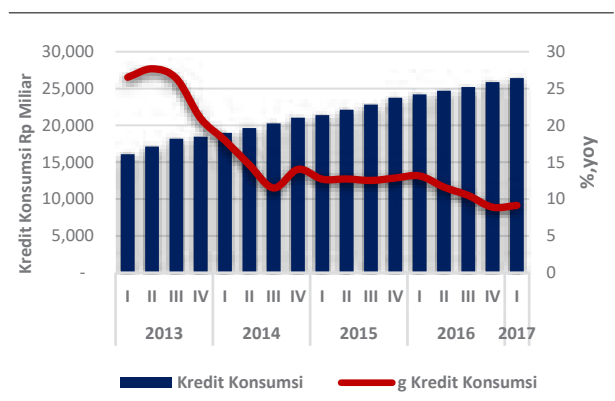
Sumber : Survei Penjualan Eceran

Grafik 1.54 Perkembangan Total Penjualan



Sumber : Survei Penjualan Eceran

Grafik 1.55 Perkembangan Penjualan Kelompok Komoditas



Grafik 1.56 Kredit Konsumsi

Kinerja lapangan usaha perdagangan besar dan eceran triwulan II 2017, diperkirakan menunjukkan tendensi peningkatan, sejalan dengan peningkatan kinerja konsumsi rumah tangga dan peningkatan konsumsi pemerintah. Peningkatan kinerja lapangan usaha ini, diperkirakan akan didorong oleh beberapa faktor meliputi: 1) faktor musiman, berupa perayaan hari keagamaan yaitu galungan, kuningan, ramadhan dan idul fitri; 2) pembayaran gaji ke-13 PNS dan pembayaran THR PNS (gaji ke-14) dan THR untuk pekerja/karyawan lainnya; 3) menjelang liburan sekolah; 4) masuknya tahun ajaran baru; 5) masuknya periode pariwisata, sehingga akan mendorong peningkatan jumlah kunjungan wisman; 5) upaya akselerasi/percepatan realisasi belanja daerah di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Peningkatan

lapangan usaha perdagangan, juga terkonfirmasi hasil SKDU untuk PHR, yang menunjukkan peningkatan dengan nilai SBT di triwulan II 2017 sebesar 4,21%; lebih tinggi bila dibandingkan triwulan I 2017 yang tercatat 3,49%. Terus berlanjutnya penurunan tingkat suku bunga perbankan, juga diperkirakan akan mendorong peningkatan kredit konsumsi, yang pada gilirannya akan mendorong peningkatan transaksi perdagangan di triwulan II 2017.

BOKS A

KETIKA PAKAR SONGKET BALI BERTEMU

Ruang pertemuan kantor Harian Pagi Kompas Biro Bali Nusa terlihat berbeda pada Kamis, 27 April 2017 lalu. Enam orang pakar songket bertemu untuk melaksanakan diskusi panel dengan tema “Membangun (Lagi) Kejayaan Songket Bali”. Acara ini diinisiasi oleh KPwBI Provinsi Bali dan bekerjasama dengan Harian Pagi Kompas Biro Bali Nusa. Acara diskusi tersebut disiarkan pula secara langsung oleh radio Bali FM. Bertindak sebagai moderator seorang budayawan yang juga adalah editor senior The Jakarta Post, I Wayan Juniarta.

Diskusi dimulai dari pemaparan Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali, Causa Iman Karana. Iman menyampaikan bahwa songket Bali merupakan salah satu produk unggulan Provinsi Bali. Industri ini menyerap tenaga kerja yang cukup tinggi dan merupakan komoditas ekspor. Pada tahun 2016, nilai ekspor tenun hanya sebesar 1,86% dari total ekspor dengan volume sebesar 0,35% dari total ekspor.

Beranjak dari keadaan tersebut, KPwBI Provinsi Bali menginisiasi diskusi panel dengan tujuan melestarikan budaya dan adat yang ada di Bali. “Dengan bangkitnya songket Bali, ada sumber pertumbuhan ekonomi baru sehingga bisa berkontribusi terhadap perekonomian secara umum”, jelas Iman.

Kolektor songket Bali sekaligus Budayawan, A.A. Ngurah Anom Mayun K. Tenaya mengakui bahwa saat ini kualitas songket Bali semakin menurun. Pada jaman kerajaan dulu, kain songket Bali mempunyai makna dan fungsi yang berbeda dalam setiap lembarnya. Hal tersebut tidak berlaku lagi sekarang



Pemaparan Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali, Causa Iman Karana

ini. Bahkan pengrajin cenderung membuat songket Bali yang simpel dan praktis dengan harga relatif murah.

Pemerhati songket Bali dari Puri Klungkung, Tjokorda Raka Putra sependapat dengan hal ini. Menurut Tjok Raka, demikian beliau biasa disapa, saat ini jumlah pengrajin telah semakin menurun jumlahnya. Anak muda masa kini jarang yang tertarik untuk belajar menenun songket karena perlu ketelitian dan tingkat kesabaran yang tinggi. Selain itu, terjadi pula perubahan fungsi songket dari yang dulunya dianggap sakral, sekarang sudah banyak dimodifikasi sedemikian rupa menjadi bentuk fashion lainnya. Untuk menjaga sejarah songket, Tjok Raka mempunyai impian untuk membuat Museum Songket di Bali. Dengan adanya museum songket, seluruh songket tua yang ada di masyarakat bisa diinventarisasi untuk menjaga agar songket tersebut tidak lari keluar negeri.



Ketut Widiadnyana, pengrajin songket Putrimas dari Jembrana mengungkapkan awal ketertarikannya pada songket karena ingin melestarikan songket. Kebetulan motif songket Jembrana tidak terlalu banyak. Melalui ekonomi kreatif, Ketut dan istrinya, Luh Gede Sriadi berupaya untuk membuat beberapa desain songket Jembrana yang baru. Kelompok Putrimas merupakan salah satu kelompok UMKM binaan KPwBI Provinsi Bali. Menggunakan bantuan Alat Tenun Bukan Mesin (ATBM) dari KPwBI Provinsi Bali, Ketut membuat songket tanpa sambungan. Selain itu, Ketut juga melakukan inovasi dengan melakukan modifikasi songket dan batik. Hasil karyanya ini mendapat apresiasi dari Kementerian



Koperasi dan UMKM. HAKI pun telah diperoleh dari Kementerian Hukum dan HAM.

Budayawan sekaligus Guru Besar ISI Denpasar, Prof. Dr. I Made Bandem mengangkat mengenai pentingnya membuat database songket Bali. Dari database ini bisa dibuat klasifikasi gaya songket dari setiap sentra songket yang ada di Bali. Perlu juga dibuat digitalisasi mengenai songket Bali agar motifnya lestari.

Pengrajin songket dari Klungkung, Tjok Istri Agung Manik dan I Gusti Ayu Dewi Sribhudami Saraswati menyampaikan bahwa desainer perlu menciptakan motif songket baru yang mendunia. Masalah dari pengerjaan songket ini adalah bahan baku yang susah diperoleh dan mahal. Untuk itu mereka mengharapkan pemerintah ikut serta dalam upaya pelestarian songket Bali melalui penyediaan bahan baku yang relatif lebih terjangkau.

Halaman ini sengaja dikosongkan

KEUANGAN PEMERINTAH



*Tenun Ikat Wisnu Murti (Bali)

BAB II



2.1. GAMBARAN UMUM

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang dimaksud dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). APBD secara garis besar terdiri atas pendapatan daerah dan belanja-transfer daerah. Pendapatan daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Sementara belanja daerah adalah kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Dengan demikian, APBD menggambarkan arah dan skala prioritas serta kebijakan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembangunan di daerahnya. Dalam penyusunan APBD, diharapkan setiap daerah dapat melakukan sinergi dengan kebijakan penganggaran dengan berbagai kebijakan Pemerintah Pusat.

Anggaran keuangan pemerintah daerah di Bali terdiri atas anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota) dan keuangan pemerintah pusat di daerah (APBN di Bali), dengan *share* terbesar adalah anggaran APBD Kabupaten/Kota. Sehubungan dengan adanya perubahan APBN dan APBD untuk tahun anggaran 2016, pagu

anggaran belanja keuangan pemerintah (pusat dan daerah) di Bali mengalami perubahan untuk tahun 2016. Sebelumnya pagu anggaran belanja pemerintah di Bali mencapai Rp 31,43 triliun, yang terbagi atas APBD Provinsi 18,15%, APBD Kabupaten/Kota sebesar 55,03% dan APBN di Bali 26,82%. Setelah perubahan, pagu anggaran belanja tahun 2016 pemerintah menjadi sebesar Rp 32,95 triliun, yang terdiri atas APBD Provinsi dengan pangsa 17,65%, APBD kabupaten/kota sebesar 55,59% dan APBN di Bali sebesar 26,76%. Sementara itu, pagu pendapatan daerah di 2016 juga mengalami perubahan, yaitu dari Rp 21,06 triliun sebelum perubahan, meningkat menjadi Rp 21,62 triliun (setelah perubahan), yang terbagi atas APBD P Provinsi Bali sebesar 24,14% dan APBD P untuk 9 Kabupaten/Kota sebesar 75,86%.

Secara keseluruhan, realisasi belanja pemerintah di tahun 2016 tumbuh sebesar 6,95% (yoy) atau meningkat dari Rp 27,65 triliun di tahun 2015 menjadi sebesar Rp 29,57 triliun di 2016. Secara nominal, porsi terbesar realisasi belanja dikontribusikan oleh APBD tingkat Kab/Kota, kemudian belanja APBN dan APBD Provinsi. Realisasi belanja APBD Kab/Kota di tahun 2016 tercatat sebesar Rp 16,19 triliun atau sebesar 54,75% dari total realisasi belanja Pemerintah di Provinsi Bali, meningkat sebesar

Tabel 2.1 Pagu Belanja Pemerintah di Bali 2015-2016 (Rp Miliar)

URAIAN	PAGU BELANJA PERUBAHAN 2015 (Rp Miliar)	PANGSA	PAGU BELANJA 2016 (Rp Miliar)	PANGSA	PAGU BELANJA PERUBAHAN 2016 (Rp Miliar)	PANGSA
APBN	9.370	30,45%	8.431	26,82%	8.818	26,76%
APBD Provinsi Bali	5.561	18,07%	5.705	18,15%	5.816	17,65%
APBD Kab/Kota	15.840	51,48%	17.299	55,03%	18.315	55,59%
TOTAL	30.771		31.434		32.949	

Sumber: Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, Provinsi Bali
Untuk APBN bersumber dari DJPBN Provinsi Bali

Tabel 2.2 Pagu Pendapatan Pemerintah di Bali 2015-2016 (Rp Miliar)

URAIAN	PAGU PENDAPATAN APBD P 2015 (Rp Miliar)	PANGSA	PAGU PENDAPATAN APBD 2016 (Rp Miliar)	PANGSA	PAGU PENDAPATAN APBD P 2016 (Rp Miliar)	PANGSA
APBD Provinsi Bali	4.901	25,53%	5.376	25,53%	5.218	24,14%
APBD Kab/Kota	14.294	74,47%	15.681	74,47%	16.397	75,86%
TOTAL	19.195		21.057		21.615	

Sumber: Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Prov. Bali

Tabel 2.3 Realisasi Belanja Pemerintah di Bali 2015-2016 (Rp Miliar)

URAIAN	REALISASI BELANJA 2015 (Rp Miliar)	PANGSA	REALISASI BELANJA 2016 *) (Rp Miliar)	PANGSA	GROWTH (yoy)
APBN	8.563	30,97%	7.958	26,91%	-7,06%
APBD Provinsi Bali	4.999	18,08%	5.421	18,33%	8,44%
APBD Kab/Kota	14.086	50,95%	16.190	54,75%	14,94%
TOTAL	27.648		29.570		6,95%

*) angka sementara, belum audit

Sumber: Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Prov. Bali
Untuk APBN bersumber dari DJPBN Provinsi Bali

14,94% (yoy) dibandingkan tahun 2015. Sementara itu, realisasi belanja APBN di Provinsi Bali di sepanjang tahun 2016 mencapai Rp 7,96 triliun atau sebesar 26,91% dari total realisasi belanja pemerintah di Provinsi Bali. Komponen belanja ini mengalami penurunan sebesar -7,06% (yoy) dibandingkan 2015, disebabkan oleh adanya penurunan pagu anggaran yang menyesuaikan dengan perlambatan penerimaan pemerintah. Sedangkan realisasi belanja APBD Provinsi Bali di tahun 2016, tercatat sebesar Rp 5,42 triliun atau sebesar 18,33% dari total realisasi belanja pemerintah, meningkat 8,44% (yoy) dibandingkan tahun 2015.

Secara umum perkembangan realisasi belanja pemerintah di Bali pada tahun 2016, dipengaruhi oleh beberapa faktor, meliputi fokus pemerintah untuk mendorong akselerasi pembangunan proyek infrastruktur dalam upaya meningkatkan konektivitas (berupa peningkatan kapasitas jalan, pembangunan *shortcut* dan perbaikan jembatan) dan pelayanan kepada masyarakat (pembangunan rumah sakit dan fasilitas umum lainnya) serta mendorong peningkatan produksi pertanian (perbaikan/pembangunan irigasi dan bendungan) ikut mendorong peningkatan realisasi belanja modal. Selain itu, adanya penambahan pagu anggaran belanja (dalam anggaran perubahan) di tahun 2016 baik untuk APBN, APBD Provinsi maupun kabupaten/kota, dibandingkan pagu anggaran

sebelum perubahan, ikut mempengaruhi kinerja realisasi anggaran belanja pada tahun 2016. Sementara itu dari sisi pendapatan, kebijakan pemerintah pusat yang sejak September 2016 melakukan penundaan transfer dana alokasi umum (DAU) ke Provinsi Bali dan 3 kabupaten/kota di Bali, ikut mempengaruhi kinerja realisasi pendapatan yang juga mempengaruhi kinerja realisasi belanja pemerintah Provinsi dan kabupaten/kota. Selain itu, adanya penurunan harga BBM bersubsidi dan perlambatan penjualan kendaraan bermotor ikut mempengaruhi kinerja pendapatan pemerintah melalui pajak kendaraan bermotor (PKB) dan pajak atas penggunaan bahan bakar kendaraan bermotor (PBBKB). Selain itu, program pemutihan atau penghapusan denda atau bunga pajak kendaraan bermotor juga menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi realisasi pendapatan pemerintah di tahun 2016.

Sejalan dengan penurunan kinerja pertumbuhan konsumsi pemerintah di tahun 2016, yang tumbuh sebesar -4,47% (yoy), jauh lebih rendah dibandingkan dengan tahun 2015 yang tumbuh sebesar 6,56% (yoy), persentase realisasi belanja pemerintah terhadap pagu anggaran di tahun 2016 juga menunjukkan penurunan dibandingkan 2015. Persentase realisasi anggaran belanja pemerintah di tahun 2016 tercatat sebesar 89,74%, lebih rendah dibandingkan dengan tahun 2015 yang sebesar 89,85%. Penurunan kinerja

Tabel 2.4 Realisasi Pendapatan Pemerintah di Bali 2015-2016 (Rp Miliar)

URAIAN	REALISASI PENDAPATAN 2015 (Rp Miliar)	PANGSA	REALISASI PENDAPATAN 2016 *) (Rp Miliar)	PANGSA	GROWTH (yoy)
APBD Provinsi Bali	4.968	25,38%	5.249	24,92%	5,66%
APBD Kab/Kota	14.603	74,62%	15.813	75,08%	8,29%
TOTAL	19.571		21.062		7,62%

*) angka sementara, belum audit

Sumber: Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Prov. Bali

Tabel 2.5 Persentase Realisasi Belanja Pemerintah Terhadap Pagu di Bali 2015-2016

URAIAN	PERSENTASE REALISASI BELANJA TERHADAP PAGU APBD P 2015 (%)	PERSENTASE REALISASI BELANJA TERHADAP PAGU APBD P 2016* (%)
APBN	91,38	90,25
APBD Provinsi Bali	89,90	93,20
APBD Kab/Kota	88,93	88,40
TOTAL	89,85	89,74

*) angka sementara, belum audit

Sumber: Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Untuk APBN bersumber dari DJPBN Provinsi Bali

realisasi persentase belanja pemerintah di 2016, terutama disebabkan oleh menurunnya persentase realisasi belanja untuk anggaran 9 kabupaten/kota dan APBN yang memiliki pangsa lebih dari 80% terhadap total realisasi belanja pemerintah di Bali tahun 2016. Penurunan persentase realisasi belanja ini, disebabkan oleh penurunan pagu anggaran APBN P tahun 2016 dibandingkan tahun 2015 sejalan dengan perlambatan penerimaan pemerintah, adanya penundaan pencairan DAU untuk provinsi Bali dan 3 kabupaten/kota sejak September 2016 dan melambatnya penerimaan pendapatan asli daerah di 9 kabupaten/kota.

2.2 Realisasi APBD Provinsi Bali Tahun 2016

Realisasi pendapatan pemerintah daerah menunjukkan perlambatan di tahun 2016 dibandingkan realisasi pada tahun 2015. Sementara itu, realisasi belanja justru menunjukkan peningkatan untuk periode yang sama. Serapan pendapatan di 2016 tercatat sebesar

Rp 5,25 triliun atau sebesar 100,59% terhadap pagu APBD P 2016. Capaian ini, lebih rendah bila dibandingkan dengan serapan pendapatan pada 2015 yang tercatat sebesar 101,37%. Sementara itu, realisasi belanja di tahun 2016 tercatat sebesar Rp 5,42 triliun atau sebesar 93,2% dari pagu anggaran, sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan realisasi belanja di tahun 2015 yang terserap sebesar 89,90%.

Secara nominal, jumlah pendapatan yang terserap pada tahun 2016 lebih tinggi dibandingkan dengan tahun 2015. Realisasi pendapatan di 2016 tercatat meningkat sebesar 5,67% (yoy), dibandingkan dengan tahun 2015 yang tercatat sebesar Rp 4,97 triliun. Bila dibandingkan dengan triwulan III-2016 yang berhasil menghimpun pendapatan sebesar Rp 3,72 triliun, serapan pendapatan daerah di akhir tahun 2016 (triwulan IV), mengalami peningkatan sebesar 41,05%.

Tabel 2.6 Pagu & Realisasi APBD Provinsi Bali 2015-2016 (Rp Miliar)

URAIAN	PAGU APBD P 2015	REALISASI APBD TAHUN 2015	%	PAGU APBD 2016	PAGU APBD P 2016	REALISASI APBD TAHUN 2016*)	%
PENDAPATAN DAERAH	4.901	4.968	101,37	5.376	5.218	5.249	100,59
PEND. ASLI DAERAH (PAD)	2.988	3.041	101,78	3.379	3.172	3.041	95,88
PENDAPATAN TRANSFER	1.134	1.070	94,39	1.182	1.752	1.867	106,56
LAIN-LAIN PENDAPATAN YG SAH	779	856	109,95	815	294	341	115,82
BELANJA DAERAH	5.561	4.999	89,90	5.705	5.816	5.421	93,20
BELANJA TIDAK LANGSUNG	3.824	3.483	91,08	4.029	4.143	3.858	93,11
BELANJA LANGSUNG	1.737	1.516	87,28	1.676	1.673	1.563	93,43
SURPLUS/(DEFISIT)	-660	-31		-329	-598	-172	

*) angka sementara, belum audit

Sumber: Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Pemerintah Provinsi Bali tercatat mengalami defisit di 2016, yaitu sebesar Rp 172 miliar. Kondisi yang mencatatkan defisit ini, serupa dengan pola belanja pemerintah tahun 2015 yang juga mengalami defisit. Selama kurun waktu lima tahun terakhir, defisit baru terjadi dalam kurun waktu 2 tahun terakhir (2015 dan 2016). Nilai nominal defisit di 2016 yang sebesar Rp 172 miliar, lebih tinggi dibandingkan tahun 2015 yang tercatat sebesar Rp 31 miliar.

2.2.1. Pagu Pendapatan Tahun 2016

Total pagu Anggaran pendapatan Pemprov Bali tahun 2016 dalam APBD perubahan tercatat sebesar Rp 5,22 triliun atau meningkat sebesar 6,47% (yoy) dibandingkan APBD-P tahun 2015. Peningkatan tertinggi, berasal dari pendapatan transfer (dana perimbangan) yang meningkat 54,54% (yoy), yang terutama didorong oleh peningkatan pagu Dana Alokasi Khusus (DAK), dengan *share* anggaran terbesar dipergunakan untuk anggaran untuk biaya

operasional sekolah (BOS). Peningkatan ini terutama didorong oleh meningkatnya dana alokasi khusus (DAK) untuk Biaya Operasional Sekolah (BOS). Sejak tahun 2016, anggaran BOS untuk SMA/SMK dibawah pengelolaan Dinas Pendidikan Provinsi, setelah sebelumnya dibawah pengelolaan Dinas Pendidikan di tingkat Kabupaten/Kota. Peningkatan juga terjadi untuk komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang meningkat sebesar 6,47% (yoy). Sedangkan, pagu komponen lain-lain pendapatan yang sah pada APBD-P tahun 2016 turun sebesar 62,23%, dibanding APBD 2015, terutama disebabkan oleh turunnya pagu anggaran dana penyesuaian dan otonomi khusus yang dialihkan ke pagu DAK.

2.2.1.1. Penyerapan Pendapatan APBD Provinsi Bali Tahun 2016

Penyerapan pendapatan Provinsi Bali di 2016, tercatat sebesar 100,59% dari pagu pendapatan APBD P. Capaian ini, lebih rendah dibandingkan

Tabel 2.7 Pagu dan Realisasi Pendapatan Daerah Provinsi Bali 2015-2016 (Rp Miliar)

URAIAN	PAGU APBD P 2015	REALISASI APBD TAHUN 2015	PERSENTASE REALISASI (%)	PAGU APBD 2016	PAGU APBD P 2016	REALISASI APBD TAHUN 2016*)	PERSENTASE REALISASI (%)	GROWTH TAHUNAN REALISASI (%)
PENDAPATAN DAERAH	4.901	4.968	101,37	5.376	5.218	5.249	100,59	5,66
PEND. ASLI DAERAH (PAD)	2.988	3.041	101,78	3.379	3.172	3.041	95,88	-
- Pendapatan Pajak Daerah	2.666	2.571	96,42	3.050	2.712	2.593	95,61	0,86
- Retribusi Daerah	46	60	131,30	47	50	64	126,95	6,69
- Hsl Pengelolaan. Kekayaan Daerah yg Dipisahkan	105	105	100,11	108	173	172	99,69	63,59
- Lain-Lain PAD yg Sah	171	305	178,57	174	236	212	89,64	-30,54
PENDAPATAN TRANSFER	1.134	1.070	94,39	1.182	1.752	1.867	106,56	74,45
-Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	168	104	62,07	154	198	172	86,97	65,22
- Dana Alokasi Umum (DAU)	832	832	100,00	850	696	850	122,11	2,23
- Dana Alokasi Khusus (DAK)	134	134	100,00	178	858	845	98,45	528,17
LAIN-LAIN PENDAPATAN YG SAH	779	856	109,95	815	294	341	115,82	-60,21
- Pendapatan Hibah	5	5	100,01	5	5	5	100,00	2,93
- Dana Penyesuaian & otonomi khusus	525	526	100,05	526	5	5	100,00	-99,05
- Bantuan Keuangan dr Prov atau Permda lain	249	326	131,03	284	284	331	116,38	1,47

*) angka sementara, belum audit

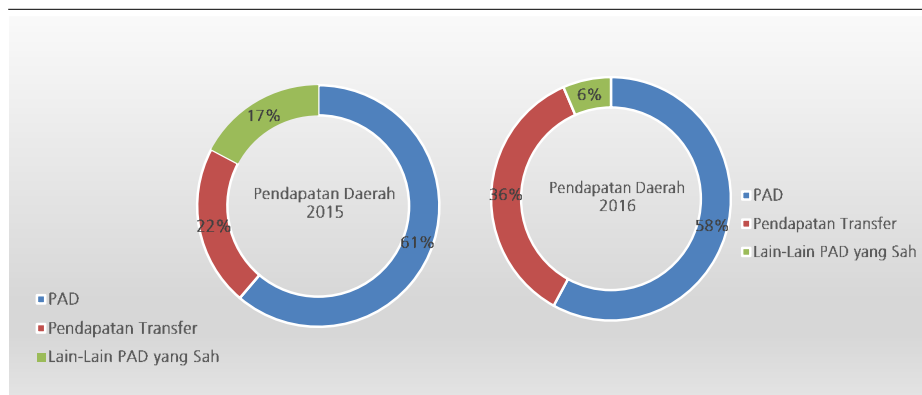
Sumber: Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, Provinsi Bali

dengan penyerapan pendapatan tahun 2015 yang tercatat sebesar 101,37%. Realisasi penyerapan pendapatan di tahun 2016, juga lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata realisasi penyerapan pendapatan dalam kurun waktu lima tahun terakhir yang mencapai 105,25%. Rendahnya persentase pencapaian realisasi pendapatan ini, terutama disebabkan oleh menurunnya persentase realisasi penerimaan khususnya untuk komponen Pendapatan Asli Daerah yang tercatat hanya sebesar 95,88%, lebih rendah dibandingkan tahun 2015 yang sebesar 101,78%. Sementara dua komponen lainnya yaitu pendapatan transfer (dana perimbangan) dan lain-lain pendapatan yang sah tercatat tetap menunjukkan peningkatan realisasi di tahun 2016. Secara nominal, realisasi pendapatan daerah untuk tahun 2016 tetap lebih tinggi dibandingkan 2015, dengan pertumbuhan sebesar 5,67% (yoy). Peningkatan nominal pendapatan daerah, terutama didorong oleh peningkatan realisasi pendapatan dari komponen dana transfer. Sementara itu di sisi yang lain, komponen PAD cenderung tetap sedangkan komponen lain-lain pendapatan yang sah justru mengalami penurunan.

Penurunan persentase realisasi PAD, merupakan penyebab utama menurunnya persentase realisasi penyerapan pendapatan daerah di tahun 2016. Hal tersebut dikarenakan, sumber utama pendapatan daerah untuk Provinsi Bali berasal dari komponen

ini, dengan pangsa mencapai 57,94% terhadap total penerimaan daerah tahun 2016. Pangsa ini lebih rendah, bila dibandingkan periode yang sama tahun 2015 yang sebesar 61,22%. Penurunan pangsa ini, terutama disebabkan oleh penurunan nominal realisasi penerimaan untuk sub komponen lain-lain PAD yang sah. Sementara itu, sub komponen PAD yang lain, tetap menunjukkan peningkatan realisasi penerimaan meskipun cenderung melambat. Peningkatan sub komponen tertinggi untuk PAD, terjadi pada sub komponen hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, yang meningkat sebesar 63,59% (yoy) pada tahun 2016. Peningkatan ini, terutama dikontribusikan oleh adanya peningkatan realisasi pendapatan dari laba atas penyertaan modal Pemerintah Provinsi Bali di perusahaan milik daerah (BUMD).

Komponen kedua yang memiliki pangsa signifikan terhadap pendapatan daerah adalah komponen pendapatan transfer atau dana perimbangan. Pangsa realisasi komponen pendapatan transfer terhadap realisasi total pendapatan daerah di 2016 sebesar 35,57%, lebih tinggi dibandingkan pangsa tahun lalu yang sebesar 21,54%. Peningkatan ini, terutama didorong oleh meningkatnya pagu anggaran DAK dalam rangka pengelolaan BOS yang saat ini menjadi kewenangan pemerintah provinsi. Sementara itu, komponen yang ketiga dari PAD yaitu komponen lain-lain pendapatan yang sah, pangsa realisasinya



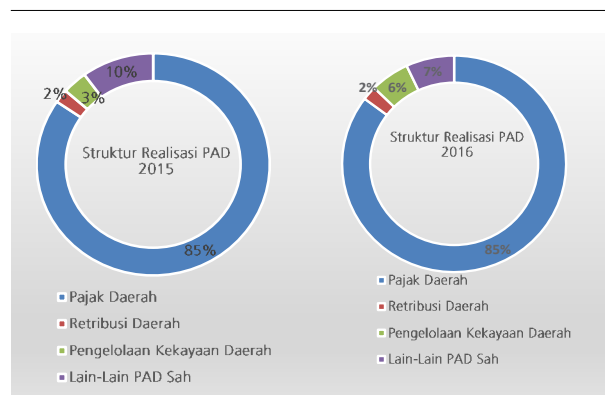
Sumber: Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, Provinsi Bali

Grafik 2.1 Pangsa Realisasi Anggaran Komponen Pendapatan Daerah

terhadap realisasi PAD tercatat sebesar 6,49%, lebih rendah dibandingkan pangsa tahun 2015 yang sebesar 17,24%. Penurunan pangsa ini, terutama disebabkan oleh adanya penurunan alokasi anggaran dana penyesuaian dan otonomi khusus, karena dialihkan untuk DAK di 2016.

Berdasarkan struktur komponen PAD tahun 2016, realisasi pendapatan pajak daerah merupakan sub komponen PAD dengan pangsa terbesar, tercatat 85% terhadap realisasi PAD. Sub komponen terbesar kedua adalah lain-lain PAD yang sah (7%), selanjutnya pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan (6,11%) dan terakhir adalah retribusi daerah (2%). Sepanjang tahun 2016, realisasi penerimaan pajak daerah menunjukkan pertumbuhan yang melambat, tercatat hanya tumbuh sebesar 0,86% (yoy). Pertumbuhan ini jauh lebih rendah bila dibandingkan dengan pertumbuhan tahun 2015 yang tercatat sebesar 2,13% (yoy). Kondisi ini yang menjadi salah satu penyebab realisasi pendapatan daerah di tahun 2016 mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Realisasi pendapatan pajak daerah tercatat sebesar 95,61%, lebih rendah dibandingkan dengan 2015 yang mencapai 96,42%. Menurunnya realisasi pendapatan pajak daerah ini, terutama disebabkan oleh semakin menurunnya penjualan kendaraan baru sebagai kontributor penerimaan dalam bentuk pajak kendaraan baru (PKB). Penjualan kendaraan baru di 2016 berkontraksi sebesar -9,63 (yoy), lebih dalam dibandingkan 2015 yang berkontraksi sebesar -9,25% (yoy). Kontraksi tersebut disebabkan oleh masyarakat yang masih memfokuskan untuk pemenuhan kebutuhan primer; adanya kecenderungan untuk menunda pembelian kendaraan baru; persaingan transportasi wisata yang makin ketat serta moratorium penambangan pasir, menjadi penyebab menurunnya penerimaan pajak kendaraan bermotor (PKB). Selain itu, adanya pembebasan denda untuk PKB dan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) yang berlaku sejak 20 Juni 2016, menjadi penyebab perlambatan realisasi

pendapatan pajak daerah. Seiring dengan kondisi tersebut, turunnya harga bahan bakar minyak (BBM) sepanjang tahun 2016, juga berdampak pada turunnya penerimaan pajak bahan bakar kendaraan bermotor (PBBKB) yang diterima oleh pemerintah daerah. Meskipun demikian, penurunan pajak daerah ini, dapat sedikit tertahan oleh kenaikan sub komponen hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan retribusi daerah.



Sumber: Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, Provinsi Bali

Grafik 2.2 Struktur Realisasi PAD

Komponen Pendapatan Transfer (Dana Perimbangan), penyumbang utama pendapatan di komponen ini adalah DAU, dengan pangsa sebesar 45,54% terhadap pendapatan transfer 2016, diikuti oleh DAK (pangsa 45,25%) dan Dana Bagi Hasil (pangsa 9,21%). Realisasi penyerapan komponen pendapatan transfer pada 2016, tercatat sebesar 106,56% terhadap pagu APBD P 2016. Capaian ini, lebih rendah dibandingkan 2015, yang tercatat sebesar 94,39%. Meskipun demikian, secara nominal realisasi penerimaan komponen pendapatan transfer pada 2016, tetap menunjukkan peningkatan signifikan yaitu tumbuh sebesar 74,45% (yoy). Peningkatan realisasi nominal komponen ini, terutama didorong oleh peningkatan realisasi nominal DAK, yang tercatat tumbuh sebesar 528,17% (yoy). Kondisi ini disebabkan oleh adanya kebijakan penyesuaian pengelolaan dana BOS SMA/SMK yang sebelumnya dikelola oleh pemerintah daerah di kabupaten/kota menjadi pemerintah daerah di tingkat provinsi sejak tahun 2016. Sesuai dengan

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, pengelolaan SMA/SMK saat ini berada dalam kewenangan pemerintah provinsi. Adapun alokasi anggaran dana BOS untuk tahun 2016 di Provinsi Bali tercatat sebesar Rp 759 miliar. Peningkatan realisasi dana perimbangan tahun 2016, juga didorong oleh peningkatan nominal realisasi dana bagi hasil pajak yang tumbuh sebesar 65,22% (yoy). Sementara itu, nominal realisasi DAU meskipun sejak September 2016 mengalami penundaan pembayaran oleh Kementerian Keuangan RI, namun pembayarannya tetap dapat teralisasi di akhir periode tahun 2016, sehingga dapat tumbuh sebesar 2,23% (yoy).

Realisasi komponen lain-lain pendapatan daerah yang sah, secara nominal tercatat mengalami penurunan yang signifikan. Pada tahun 2016, nominal realisasi untuk penerimaan komponen ini tercatat sebesar Rp 341 miliar atau dengan persentase realisasi terhadap pagu APBD P 2016 tercatat sebesar 115,82%. Meskipun realisasi terhadap pagu di 2016 lebih tinggi dibandingkan tahun 2015, namun secara

nominal realisasi justru mengalami penurunan yang signifikan sebesar -60,21% (yoy). Penurunan ini, terutama disebabkan oleh adanya penurunan realisasi pendapatan dana penyesuaian otonomi khusus.

2.2.2. Realisasi Belanja APBD Provinsi Bali Tahun 2016

Pada tahun 2016, pagu anggaran belanja di APBD P Bali tercatat sebesar Rp 5,816 triliun atau meningkat sebesar 4,59% (yoy) dibandingkan pagu anggaran dalam APBD-P tahun 2015 yang tercatat sebesar Rp 5,56 triliun. Peningkatan tertinggi bersumber dari komponen belanja tidak langsung, yang meningkat sebesar 8,34% (yoy) menjadi Rp 4,14 triliun, lebih tinggi dibandingkan pagu APBD P 2015 tercatat sebesar Rp 3,82 triliun. Peningkatan komponen ini, terutama didorong oleh meningkatnya pagu anggaran untuk sub komponen belanja hibah dan sub komponen belanja bantuan keuangan. Sedangkan pagu anggaran untuk sub komponen lainnya dalam belanja langsung justru mengalami penurunan di tahun 2016, dibandingkan tahun 2015.

Tabel 2.8 Pagu dan Realisasi APBD P Provinsi Bali 2015-2016

URAIAN	PAGU APBD P 2015	REALISASI APBD TAHUN 2015	PERSENTASE REALISASI (%)	PAGU APBD 2016	PAGU APBD P 2016	REALISASI APBD TAHUN 2016*	PERSENTASE REALISASI (%)	GROWTH TAHUNAN REALISASI (%)
BELANJA DAERAH	5.561	4.999	89,90	5.705	5.816	5.421	93,20	8,44
BELANJA TIDAK LANGSUNG	3.824	3.483	91,08	4.029	4.143	3.858	93,11	10,75
- Belanja Pegawai	895	734	81,94	941	844	754	89,34	2,79
- Belanja Subsidi	10	10	98,20	10	10	10	99,90	1,73
- Belanja Hibah	831	809	97,37	980	1.166	1.117	95,81	38,00
- Belanja Bantuan Sosial	159	152	95,23	180	158	156	98,33	2,67
- Belanja Bagi Hsl kpd Prov/Kab/Kota & Pemda	1.217	1.088	89,40	1.150	1.159	1.026	88,52	-5,68
- Belanja Bantuan Keuangan kpd Prov/Kab/Kota/Desa dan Partai Politik	700	690	98,69	753	801	795	99,15	15,08
- Belanja Tidak Terduga	12	0	1,60	15	4	0	4,52	1,59
BELANJA LANGSUNG	1.737	1.516	87,28	1.676	1.673	1.563	93,43	3,13
- Belanja Pegawai	91	84	92,36	103	102	97	94,61	15,37
- Belanja Barang dan Jasa	1.010	870	86,11	769	803	736	91,63	-15,41
- Belanja Modal	636	562	88,43	805	768	731	95,16	30,00
SURPLUS/(DEFISIT)	-660	-31		-329	-598	-172		

Sumber: Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, Provinsi Bali

Sementara itu, pagu anggaran belanja langsung justru mengalami penurunan di APBD P 2016 sebesar -3,63% (yoy), dibandingkan pagu anggaran APBD-P tahun 2015. Pagu anggaran belanja langsung APBD P 2016 tercatat sebesar Rp 1,673 triliun, lebih rendah dibandingkan pagu anggaran APBD P 2015 yang sebesar Rp 1,737 triliun. Penurunan ini, terutama disebabkan oleh menurunnya pagu anggaran belanja barang dan jasa di tahun 2016 yang sebesar -20,51% (yoy). Sementara sub komponen lainnya, tetap menunjukkan peningkatan khususnya belanja modal yang tumbuh signifikan sebesar 20,81% (yoy). Peningkatan pagu belanja modal ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk berfokus pada pengembangan infrastruktur untuk tahun 2016, antara lain berupa pembangunan infrastruktur jalan dan pembangunan rumah sakit Indera serta rumah sakit provinsi Bali Mandara.

Selanjutnya, komposisi pagu anggaran belanja tidak jauh berbeda dibandingkan dengan pola historis beberapa tahun terakhir. Pagu anggaran belanja pada APBD P 2016 masih didominasi oleh belanja tidak langsung, dengan pangsa sebesar 71,23%, meningkat dibandingkan APBD P tahun 2015 dengan pangsa 68,77%. Sementara itu, porsi pagu anggaran belanja langsung dalam APBD P tahun 2016 tercatat sebesar 28,77%, lebih rendah dibandingkan pangsa di APBD P tahun 2015 sebesar 31,23%.

Perkembangan realisasi belanja pemerintah Provinsi Bali tahun 2016, dipengaruhi oleh beberapa faktor yang meliputi: penundaan pencairan anggaran DAU dari Kementerian Keuangan sejak periode September-Desember 2016, rendahnya persentase realisasi pendapatan daerah dari pagu anggaran APBD P 2016 dan fokus pemerintah untuk mendorong pengembangan infrastruktur. Realisasi belanja Provinsi Bali di tahun 2016, tercatat sebesar Rp 5,42 triliun atau dengan persentase 93,2% dari pagu APBD P 2016. Pencapaian realisasi belanja ini lebih

tinggi, baik secara persentase maupun secara nominal dibandingkan realisasi tahun 2015. Secara nominal, realisasi belanja pemerintah tumbuh sebesar 8,44% (yoy) di tahun 2016. Sedangkan persentase realisasi tercatat sebesar 93,20%, lebih tinggi dibandingkan dengan 89,90% di tahun 2015. Meningkatnya realisasi belanja ini, terjadi baik pada realisasi belanja langsung maupun realisasi belanja tidak langsung.

Pencapaian realisasi belanja tidak langsung di tahun 2016 mengalami peningkatan, baik secara nominal maupun persentase realisasi terhadap pagu anggaran APBD P 2016, dibanding tahun 2015. Secara nominal, realisasi belanja tidak langsung Pemerintah Daerah Provinsi Bali pada tahun 2016 tercatat sebesar 3,86 triliun atau tumbuh sebesar 10,75% (yoy), dibandingkan tahun 2015. Peningkatan nominal realisasi ini, didorong oleh peningkatan yang signifikan untuk sub komponen belanja hibah dan sub komponen belanja bantuan keuangan yang masing-masing tumbuh sebesar 38% (yoy) dan 15,08% (yoy). Sementara itu, persentase realisasi belanja tidak langsung di 2016 juga tercatat lebih tinggi yaitu sebesar 93,11% dibandingkan tahun 2015 yang sebesar 91,08%. Peningkatan realisasi belanja tidak langsung, didorong oleh peningkatan persentase realisasi sebagian besar sub komponen penyusunnya. Meskipun demikian terdapat dua sub komponen yang realisasi persentasenya lebih rendah di tahun 2016 dibandingkan tahun sebelumnya yaitu sub komponen belanja hibah dan belanja bagi hasil. Apabila ditinjau dari komponen pembentuknya, belanja tidak langsung terutama dipergunakan untuk kegiatan belanja hibah, dan belanja bagi hasil kepada Prov/Kab/Kota dan Pemda dan belanja bantuan keuangan serta belanja pegawai, dengan pangsa masing-masing sebesar 28,95%; 26,60%; 20,60% dan 19,55% dari realisasi komponen belanja tidak langsung 2016.

Belanja hibah merupakan sub komponen yang memiliki pangsa terbesar terhadap realisasi komponen belanja tidak langsung di 2016. Secara nominal, realisasi sub komponen ini tercatat sebesar Rp 1,12 triliun di 2016, lebih tinggi dibandingkan nominal realisasi pada 2015 yang sebesar Rp 809 miliar. Meskipun demikian, persentase realisasi sub komponen ini di 2016 yang mencapai 95,81%, masih lebih rendah dibandingkan dengan persentase realisasi di 2015 yang sebesar 97,37%. Sementara itu, realisasi komponen belanja bagi hasil (dengan pangsa terbesar kedua), secara nominal mengalami penurunan sebesar -5,68% (yoy) dan secara realisasi persentase juga di tahun 2016 lebih rendah dibandingkan 2015.

Perkembangan komponen belanja langsung di tahun 2016, menunjukkan peningkatan nominal realisasi dan penyerapan anggaran belanja dibandingkan tahun 2015. Nominal realisasi belanja langsung tercatat sebesar Rp 1,56 triliun di 2016, lebih tinggi bila dibandingkan dengan Rp 1,52 triliun di tahun 2015. Peningkatan persentase realisasi belanja, terjadi pada semua jenis sub komponen pembentuk belanja langsung, baik belanja pegawai, belanja modal maupun belanja barang dan jasa. Peningkatan juga terjadi pada nominal realisasi dari sub komponen pembentuk belanja langsung, kecuali belanja barang dan jasa yang tetap mengalami penurunan.

Perkembangan realisasi belanja modal, secara nominal di tahun 2016 tercatat sebesar Rp 731 miliar, meningkat sebesar 30% (yoy), dibandingkan nominal realisasi di tahun 2015 yang tercatat sebesar Rp 562 miliar. Persentase realisasi belanja modal juga menunjukkan peningkatan di tahun 2016, yang mencapai 95,16% lebih tinggi dibandingkan tahun 2015 sebesar 88,43%. Peningkatan realisasi belanja modal di tahun 2016, didorong oleh upaya Pemerintah Provinsi untuk mempercepat proses pengadaan di awal tahun; upaya untuk mengejar

realisasi pembangunan beberapa proyek infrastruktur fisik merupakan faktor pendorong meningkatnya serapan anggaran di sub komponen belanja modal. Realisasi belanja modal antara lain dialokasikan untuk pembangunan jalan, jembatan, drainase, gedung termasuk penyelesaian pembangunan rumah sakit Indera dan rumah sakit provinsi Bali Mandara. Sub komponen lainnya yang menunjukkan peningkatan nominal realisasi maupun persentase realisasi belanja adalah belanja pegawai. Realisasi nominal sub komponen ini, tercatat sebesar Rp 97 miliar atau persentase realisasi sebesar 94,61% dari pagu APBD P 2016. Capaian ini, lebih tinggi dibandingkan realisasi penyerapan 2015 yang tercatat sebesar 92,36% atau dengan nominal sebesar Rp 84 miliar.

Realisasi belanja barang dan jasa di 2016 tercatat sebesar Rp 736 miliar atau terealisasi sebesar 91,63% dari pagu anggaran APBD P 2016. Persentase realisasi ini, meningkat dibandingkan periode tahun 2015 yang sebesar 86,11%. Meskipun demikian, nominal realisasi justru menunjukkan penurunan sebesar -15,41% (yoy) dibandingkan tahun 2015 yang tercatat sebesar Rp 870 miliar. Penurunan nominal ini, disebabkan oleh terjadinya penurunan pagu anggaran di 2016 dibandingkan tahun sebelumnya.

2.3. Realisasi APBD Kabupaten/Kota Provinsi Bali Tahun 2016

2.3.1. Realisasi Pendapatan APBD Kabupaten/ Kota Provinsi Bali Tahun 2016

Pagu anggaran pendapatan dalam APBD P untuk 9 kabupaten/kota di Provinsi Bali, di tahun 2016 menunjukkan peningkatan dibandingkan pagu anggaran di APBD P tahun 2015. Seiring dengan telah disetujuinya dan ditetapkan APBD perubahan tahun 2016 untuk 9 kabupaten/kota, mendorong terjadinya peningkatan pagu anggaran pendapatan di tahun 2016 yaitu dari Rp 15,68 triliun sebelum perubahan menjadi menjadi Rp 16,11 triliun dalam APBD-P yang ditetapkan dan disetujui pada 9

Tabel 2.9 Pagu APBD P Untuk 9 Kab/Kota di Wilayah Provinsi Bali 2015-2016

Kabupaten	Pagu APBD P 2015 (Rp Miliar)				Pagu APBD P 2016 (Rp Miliar)				Perubahan 2015-2016 (%)			
	PAD	Pendapatan Transfer	Lain-Lain Pendapatan Yang Sah	Total Pendapatan	PAD	Pendapatan Transfer	Lain-Lain Pendapatan Yang Sah	Total Pendapatan	PAD	Pendapatan Transfer	Lain-Lain Pendapatan Yang Sah	Total Pendapatan
Kota Denpasar	644	710	333	1.687	740	847	296	1.883	14,94	19,28	-11,33	11,58
Kabupaten Tabanan	264	823	511	1.599	305	1.225	385	1.915	15,50	48,79	-24,73	19,77
Kabupaten Klungkung	100	559	220	879	122	715	231	1.068	22,20	27,93	4,93	21,51
Kabupaten Karangasem	232	727	425	1.385	229	930	295	1.455	-1,23	27,88	-30,51	5,07
Kabupaten Gianyar	409	685	340	1.433	507	968	210	1.684	23,89	41,34	-38,19	17,51
Kabupaten Badung	2.832	359	436	3.628	3.195	512	241	3.948	12,83	42,45	-44,83	8,83
Kabupaten Buleleng	265	994	648	1.906	316	1.450	451	2.216	19,24	45,91	-30,41	16,28
Kabupaten Bangli	88	575	218	881	103	849	193	1.144	17,05	47,63	-11,62	29,92
Kabupaten Jemberana	80	583	234	897	101	751	232	1.084	25,93	28,80	-0,78	20,84
Total	4.914	6.015	3.365	14.294	5.618	8.246	2.533	16.397	14,33	37,09	-24,74	14,71

Sumber: Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, Provinsi Bali

kabupaten/kota. Sementara itu, bila dibandingkan dengan APBD P tahun 2015, maka pagu anggaran pendapatan daerah untuk seluruh APBD-P kabupaten/kota tahun 2016 meningkat sebesar 12,72% (yoy). Bila ditinjau dari sisi jenisnya, peningkatan pagu tertinggi adalah untuk komponen pendapatan transfer, yang meningkat sebesar 37,09% (yoy). Sementara pagu PAD meningkat sebesar 14,33% (yoy), sedangkan lain-lain pendapatan yang sah justru mengalami pagu sebesar -24,74% (yoy).

Bila dilihat dari daerahnya, peningkatan pagu anggaran tertinggi dalam APBD Perubahan terjadi Kabupaten Bangli, yang meningkat sebesar 29,92 (yoy), dengan nilai nominal tercatat sebesar Rp 1,14 triliun. Sedangkan peningkatan pagu anggaran pendapatan terendah setelah dilakukan perubahan,

tercatat di Kabupaten Karangasem, yang hanya tumbuh sebesar 5,07% (yoy), dengan nilai nominal sebesar Rp 1,46 triliun. Selanjutnya, daerah dengan pagu anggaran pendapatan tertinggi dalam APBD P di tahun 2016, tercatat adalah Kabupaten Badung sebesar Rp 3,95 triliun, atau dengan pangsa mencapai 24,08% dari total pagu pendapatan APBD P tahun 2016 dari seluruh Kab/Kota di Provinsi Bali. Sementara itu, daerah dengan pagu anggaran pendapatan terendah dalam APBD P 2016 adalah Kabupaten Klungkung, dengan nominal tercatat sebesar Rp 1,07 triliun dan pangsa sebesar 6,51% dari total pagu pendapatan APBD P seluruh kabupaten/kota di 2016.

Perkembangan realisasi pendapatan daerah pada tahun 2016, untuk 9 kabupaten/kota secara nominal menunjukkan peningkatan sebesar 8,29% (yoy)

Tabel 2.10 Realisasi Nominal Pendapatan 9 Kab/Kota di Wilayah Provinsi Bali Tahun 2015-2016

Kabupaten	Realisasi Tahun 2015 (Rp Miliar)				Realisasi Tahun 2016 (Rp Miliar)				Growth Tahunan (yoy) 2015-2016 (%)			
	PAD	Pendapatan Transfer	Lain-Lain Pendapatan Yang Sah	Total Pendapatan	PAD	Pendapatan Transfer	Lain-Lain Pendapatan Yang Sah	Total Pendapatan	PAD	Pendapatan Transfer	Lain-Lain Pendapatan Yang Sah	Total Pendapatan
Kota Denpasar	699	693	336	1.728	834	878	258	1.970	19,40	26,68	-23,23	14,03
Kabupaten Tabanan	301	816	499	1.616	318	1.102	375	1.796	5,73	35,12	-24,85	11,12
Kabupaten Klungkung	120	542	251	913	134	700	177	1.011	12,05	29,06	-29,44	10,73
Kabupaten Karangasem	243	706	418	1.368	233	938	222	1.393	-4,33	32,73	-46,82	1,82
Kabupaten Gianyar	457	674	397	1.528	530	906	193	1.629	15,82	34,50	-51,30	6,61
Kabupaten Badung	3.001	332	401	3.735	3.341	512	157	4.011	11,32	54,25	-60,78	7,39
Kabupaten Buleleng	293	983	661	1.938	282	1.306	376	1.963	-3,78	32,77	-43,20	1,31
Kabupaten Bangli	88	569	216	873	98	713	183	994	11,12	25,23	-15,41	13,74
Kabupaten Jemberana	98	577	228	904	115	707	224	1.046	16,68	22,44	-1,65	15,74
Total	5.300	5.893	3.409	14.603	5.884	7.762	2.167	15.813	11,02	31,70	-36,44	8,29

Sumber: Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, Provinsi Bali

dibandingkan periode tahun 2015 yaitu dari Rp 14,60 triliun (2015) menjadi Rp 15,81 triliun (2016). Adapun daerah dengan realisasi nominal pendapatan tertinggi diraih oleh Kabupaten Badung, yang tercatat sebesar Rp 4,01 triliun meningkat sebesar 7,39% (yoy). Peningkatan ini, terutama didorong oleh tingginya realisasi PAD yang tumbuh mencapai 54,25% (yoy) pada tahun 2016. Sementara itu, daerah dengan nilai nominal realisasi pendapatan terendah adalah Kabupaten Bangli, yang tercatat sebesar Rp 994 miliar, karena terbatasnya sumber pendapatan asli daerah. Seperti pada tahun 2015, Kabupaten Bangli juga menjadi daerah dengan pendapatan nominal terendah di Bali. Meskipun demikian, pertumbuhan nominal realisasi pendapatan Kabupaten Bangli di tahun 2016 masuk dalam tiga besar pertumbuhan pendapatan tertinggi, yaitu tumbuh sebesar 13,74% (yoy).

Apabila ditinjau dari sisi pertumbuhan nominal realisasi pendapatan di tahun 2016, daerah dengan pertumbuhan pendapatan terendah adalah Kabupaten Buleleng yang hanya tumbuh sebesar 1,31% (yoy), dengan nilai nominal pendapatan tercatat sebesar Rp 1,96 triliun. Sementara itu, daerah

dengan pertumbuhan nominal realisasi pendapatan tertinggi adalah Kabupaten Jemberana, dengan pertumbuhan mencapai 15,74% (yoy) dan nilai nominal tercatat sebesar Rp 1,05 triliun.

Selanjutnya, realisasi penyerapan pendapatan seluruh kabupaten/kota di Provinsi Bali terhadap pagu APBD P 2016 menunjukkan penurunan, yaitu dari 102,16% di 2015 menjadi 96,44% pada 2016. Jika memperhatikan realisasi penyerapan pendapatan setiap kabupaten/kota di 2016, hanya kota Denpasar, yang menunjukkan peningkatan persentase realisasi pendapatan dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yaitu dari 102,40% (2015) menjadi 104,65% (2016). Sedangkan 8 daerah kabupaten/kota lainnya, menunjukkan penurunan persentase realisasi penyerapan pendapatan terhadap pagu APBD P 2016.

Daerah dengan persentase realisasi pendapatan tertinggi pada tahun 2016 adalah Kota Denpasar, dengan persentase mencapai 104,65%. Tingginya realisasi di Denpasar, didorong oleh tingginya realisasi PAD yang sebesar 112,69% dan pendapatan transfer yang mencapai 103,69%. Sedangkan daerah dengan persentase realisasi penyerapan pendapatan

Tabel 2.11 Persentase Realisasi Pendapatan Pendapatan 9 Kab/Kota di Wilayah Provinsi Bali Terhadap Pagu APBD P (2015-2016)

Kabupaten	Persentase Realisasi Terhadap Pagu APBD P 2015 (%)				Persentase Realisasi Terhadap Pagu APBD P 2016 (%)			
	PAD	Pendapatan Transfer	Lain-Lain Pendapatan Yang Sah	Total Pendapatan	PAD	Pendapatan Transfer	Lain-Lain Pendapatan Yang Sah	Total Pendapatan
Kota Denpasar	108,48	97,63	100,81	102,40	112,69	103,69	87,28	104,65
Kabupaten Tabanan	113,94	99,10	97,63	101,08	104,30	90,00	97,47	93,78
Kabupaten Klungkung	120,25	97,03	114,06	103,94	110,26	97,89	76,71	94,71
Kabupaten Karangasem	104,71	97,11	98,34	98,76	101,42	100,79	75,26	95,71
Kabupaten Gianyar	111,85	98,39	116,79	106,59	104,57	93,62	92,01	96,71
Kabupaten Badung	105,98	92,43	92,02	102,96	104,57	100,08	65,42	101,60
Kabupaten Buleleng	110,74	98,95	102,13	101,67	89,36	90,04	83,36	88,59
Kabupaten Bangli	99,70	99,06	99,33	99,19	94,66	84,02	95,07	86,84
Kabupaten Jemberana	122,68	98,98	97,68	100,76	113,68	94,10	96,83	96,50
Total	107,87	97,97	101,30	102,16	104,75	94,12	85,55	96,44

Sumber: Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, Provinsi Bali

terendah di 2016 adalah Kabupaten Bangli, dengan persentase 86,84%, yang disebabkan menurunnya realisasi penyerapan pendapatan seluruh komponen pembentuk pendapatan daerah, bila dibandingkan tahun 2015.

2.3.2. Realisasi Belanja APBD Kabupaten/Kota Provinsi Bali Tahun 2016

Pagu anggaran belanja APBD P Kabupaten/Kota di tahun 2016, menunjukkan peningkatan bila dibandingkan dengan tahun 2015. Sehubungan dengan adanya perubahan APBD tahun 2016 yang telah ditetapkan oleh DPRD kabupaten/kota (APBD-P tahun 2016), mendorong peningkatan jumlah pagu anggaran belanja di tahun 2016, dari sebesar Rp 17,30 triliun (sebelum perubahan) menjadi Rp 18,32 triliun. Bila dibandingkan dengan tahun 2015, jumlah pagu anggaran belanja kab/kota untuk tahun 2016 perubahan tercatat meningkat sebesar 15,62% (yoy). Peningkatan pagu anggaran belanja terjadi, baik untuk belanja tidak langsung (5,65% yoy) dan belanja tidak langsung (30,76% yoy). Seluruh kab/kota di Provinsi Bali, menunjukkan peningkatan pagu nominal belanja APBD P di tahun 2016, dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Daerah dengan peningkatan pagu anggaran belanja tertinggi pada APBD P tahun 2016, dicapai oleh Kabupaten Bangli, dengan peningkatan mencapai 21,74% (yoy), sedangkan pertumbuhan

pagu terendah dialami oleh kabupaten Karangasem sebesar 4,39% (yoy).

Selanjutnya, daerah dengan nominal pagu belanja tertinggi di tahun 2016 tercatat dicapai oleh Kabupaten Badung, dengan nilai sebesar Rp 4,63 triliun meningkat dibandingkan tahun 2015 yang tercatat sebesar Rp 4,05 triliun. Sementara itu, daerah dengan nilai nominal pagu belanja terendah di APBD P 2016 adalah Kabupaten Jemberana, yang tercatat sebesar Rp 1,21 triliun, meningkat signifikan (19,18% yoy), dibandingkan tahun 2015 yang tercatat mencapai Rp 1,01 triliun.

Perkembangan realisasi belanja 9 Kabupaten/kota di Bali tahun 2016, menunjukkan peningkatan dibandingkan tahun 2015. Nominal realisasi belanja tahun 2016, untuk seluruh kabupaten/kota di Bali tercatat sebesar Rp 16,19 triliun, meningkat sebesar 14,94% (yoy) dibandingkan tahun 2015 yang tercatat sebesar Rp 14,09 triliun. Peningkatan realisasi belanja ini, terutama didorong oleh peningkatan yang signifikan pada realisasi belanja langsung, yang tumbuh sebesar 22,69% (yoy).

Daerah dengan pertumbuhan tertinggi untuk realisasi belanja di 2016, tercatat adalah Kabupaten Jemberana, yang tumbuh sebesar 22,57%, yaitu dari Rp 886 miliar di 2015 menjadi Rp 1,09 triliun di 2016.

Tabel 2.12 Pagu Belanja APBD P 9 Kab/Kota di Wilayah Provinsi Bali Periode Tahun 2015-2016

Kabupaten	Pagu APBD P 2015 (Rp Miliar)			Pagu APBD P 2016 (Rp Miliar)			Perubahan 2015-2016 (%)		
	Belanja Tidak Langsung	Belanja Langsung	Total Belanja	Belanja Tidak Langsung	Belanja Langsung	Total Belanja	Belanja Tidak Langsung	Belanja Langsung	Total Belanja
Kota Denpasar	1.005	880	1.885	1.088	961	2.048	8,26	9,16	8,68
Kabupaten Tabanan	1.144	570	1.715	1.321	741	2.062	15,46	29,96	20,28
Kabupaten Klungkung	646	371	1.017	620	597	1.217	-3,96	60,74	19,66
Kabupaten Karangasem	953	551	1.503	948	622	1.569	-0,52	12,89	4,39
Kabupaten Gianyar	1.106	555	1.661	1.216	758	1.974	9,95	36,61	18,86
Kabupaten Badung	2.198	1.854	4.052	2.258	2.370	4.628	2,72	27,87	14,23
Kabupaten Buleleng	1.219	768	1.987	1.370	1.005	2.375	12,39	30,84	19,52
Kabupaten Bangli	681	328	1.009	684	545	1.229	0,34	66,17	21,74
Kabupaten Jemberana	595	417	1.012	581	631	1.212	-2,27	51,31	19,81
Total	9.546	6.294	15.840	10.085	8.230	18.315	5,65	30,76	15,62

Sumber: Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, Provinsi Bali

Tabel 2.13 Realisasi Belanja APBD P untuk 9 Kab/Kota di Wilayah Provinsi Bali Periode 2015-2016

Kabupaten	Realisasi Tahun 2015 (Rp Miliar)			Realisasi Tahun 2016 (Rp Miliar)			Growth Tahunan (yoy) 2015-2016 (%)		
	Belanja Tidak Langsung	Belanja Langsung	Total Belanja	Belanja Tidak Langsung	Belanja Langsung	Total Belanja	Belanja Tidak Langsung	Belanja Langsung	Total Belanja
Kota Denpasar	903	745	1.648	1.038	834	1.872	14,87	11,94	13,55
Kabupaten Tabanan	1.050	536	1.586	1.172	700	1.872	11,63	30,55	18,02
Kabupaten Klungkung	573	324	897	587	458	1.046	2,52	41,36	16,56
Kabupaten Karangasem	890	462	1.352	922	459	1.381	3,58	-0,58	2,16
Kabupaten Gianyar	936	568	1.504	1.094	683	1.777	16,84	20,16	18,09
Kabupaten Badung	1.909	1.537	3.447	2.102	1.915	4.017	10,08	24,58	16,55
Kabupaten Buleleng	1.121	745	1.866	1.274	815	2.089	13,68	9,38	11,96
Kabupaten Bangli	616	284	900	634	417	1.052	2,89	47,24	16,86
Kabupaten Jemberana	507	379	886	521	565	1.086	2,73	49,10	22,57
Total	8.506	5.580	14.086	9.344	6.846	16.190	9,85	22,69	14,94

Sumber: Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, Provinsi Bali

Peningkatan ini terutama didorong oleh peningkatan belanja langsung (49,10%) dan belanja tidak langsung (2,73%). Peningkatan tersebut, didorong oleh upaya Pemerintah Kabupaten Jemberana untuk mempercepat penyelesaian pembangunan proyek infrastruktur berupa pembangunan/perbaikan jalan, jembatan dan pembangunan gedung. Upaya yang ditempuh antara lain melalui percepatan kegiatan pengadaan dan lelang proyek sehingga mendorong peningkatan realisasi belanja Pemerintah Daerah Kabupaten Jemberana di tahun 2016. Sementara itu, pertumbuhan realisasi belanja terendah dialami oleh Kabupaten Karangasem, yang mengalami pertumbuhan sebesar 2,16%(yoy) dengan nilai nominal realisasi belanja tercatat sebesar Rp 1,38 triliun di 2016.

Persentase serapan realisasi belanja Pemda kab/kota di 2016, menunjukkan penurunan bila dibanding tahun 2015. Penurunan persentase realisasi belanja tahun 2016, ikut berkontribusi penurunan kinerja konsumsi pemerintah di tahun 2016 yang mengalami kontraksi. Kebijakan penundaan DAU sejak September 2016 untuk 3 kabupaten/kota di Bali dan penurunan realisasi pendapatan daerah, merupakan faktor yang sangat mempengaruhi realisasi belanja kabupaten/kota di tahun 2016. Meskipun demikian, kebijakan beberapa pemerintah daerah untuk mendorong percepatan realisasi belanja, khususnya untuk belanja barang dan belanja modal, dapat menahan laju perlambatan realisasi belanja pemerintah daerah di kabupaten/kota di tahun 2016. Secara umum, persentase penyerapan anggaran belanja kab/kota

Tabel 2.14 Realisasi Persentase Belanja Terhadap Pagu APBD P untuk 9 Kab/Kota di Wilayah Provinsi Bali Periode 2015-2016

Kabupaten	Persentase Realisasi Belanja Terhadap Pagu APBD P Tahun 2015 (%)			Persentase Realisasi Belanja Terhadap Pagu APBD P Tahun 2016 (%)		
	Belanja Tidak Langsung	Belanja Langsung	Total Belanja	Belanja Tidak Langsung	Belanja Langsung	Total Belanja
Kota Denpasar	89,91	84,65	87,46	95,40	86,81	91,37
Kabupaten Tabanan	91,78	93,96	92,51	88,73	94,39	90,77
Kabupaten Klungkung	88,74	87,32	88,22	94,72	76,79	85,93
Kabupaten Karangasem	93,40	83,91	89,92	97,24	73,90	88,00
Kabupaten Gianyar	84,68	102,36	90,58	89,99	90,02	90,00
Kabupaten Badung	86,86	82,94	85,07	93,09	80,80	86,80
Kabupaten Buleleng	92,00	96,98	93,92	93,05	81,07	87,98
Kabupaten Bangli	90,46	86,39	89,14	92,76	76,55	85,57
Kabupaten Jemberana	85,21	90,90	87,56	89,57	89,58	89,58
Total	89,11	88,65	88,93	92,65	83,19	88,40

Sumber: Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, Provinsi Bali

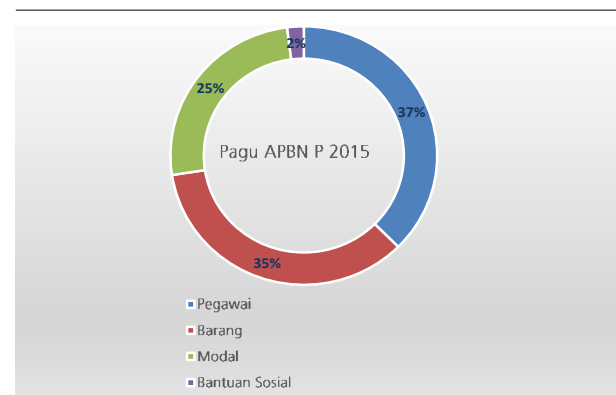
di tahun 2016 mencapai 88,40%, lebih rendah bila dibandingkan tahun 2015 yang sebesar 88,93%. Adapun daerah dengan persentase penyerapan realisasi belanja tertinggi adalah Kota Denpasar, dengan persentase realisasi belanja mencapai 91,37% dari pagu APBD P 2016. Sementara Kab Bangli, merupakan kabupaten dengan persentase penyerapan realisasi belanja terendah, yang hanya mencapai 85,57% di 2016.

2.4. Realisasi APBN Provinsi Bali Tahun 2016

2.4.1. Realisasi Belanja APBN Provinsi Bali Tahun 2016

Perkembangan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di Provinsi Bali di tahun 2016, mengalami penurunan sejalan dengan upaya pemerintah yang melakukan penghematan anggaran mengikuti perlambatan penerimaan negara khususnya dari penerimaan pajak dan cukai. Kebijakan ini ditempuh dalam rangka menekan defisit anggaran di tahun 2016, seiring dengan tidak tercapainya target penerimaan khususnya dari penerimaan pajak dan cukai. Tercatat, terjadi penurunan pagu anggaran dalam APBN P 2016 sebesar -5,90% (yoy), dari sebelumnya tercatat sebesar Rp 9,37 triliun (2015) menjadi Rp 8,82 triliun (2016). Terdapat perubahan pagu anggaran untuk tahun 2016 setelah disetujuinya perubahan pada APBN-P tahun 2016, sehingga terjadi peningkatan pagu anggaran dari sebelumnya sebesar Rp 8,43 triliun.

Pagu anggaran tertinggi dalam APBN perubahan, dialokasikan untuk belanja pegawai untuk kementerian/ lembaga vertikal yang beroperasi di Provinsi Bali. Berdasarkan pagu anggarannya, porsi anggaran terbesar untuk anggaran belanja APBN di Provinsi Bali untuk 2016 tercatat sebesar 43,01%, dengan nominal sebesar Rp 3,74 triliun. Pagu anggaran ini, lebih tinggi dibandingkan 2015 yang tercatat sebesar Rp 3,54 triliun dengan pangsa mencapai 37,49%. Sementara itu, pagu belanja barang memiliki pangsa 37,80% ditahun 2016, dengan nilai nominal tercatat mencapai Rp 3,33 triliun, pangsa dan nominal ini lebih tinggi dibandingkan tahun 2015 sebesar 35,11% dan nominal mencapai Rp 3,29 triliun. Sedangkan pagu anggaran belanja modal untuk tahun 2016 tercatat sebesar Rp 1,69 triliun, dengan pangsa sebesar 19,11%, lebih tinggi secara porsi maupun nominal dibanding 2015 yang

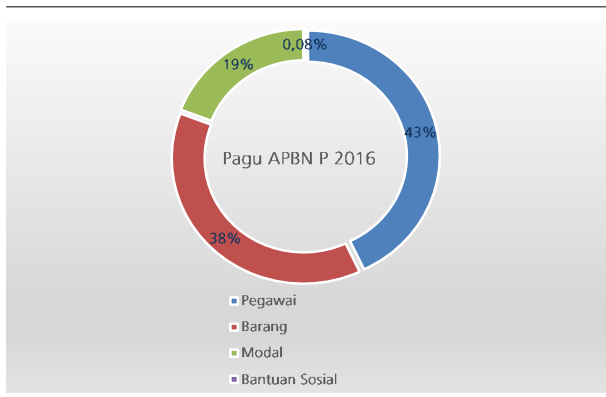


Grafik 2.3 Pangsa Belanja APBN Provinsi Bali 2016

Tabel 2.15 Pagu dan Realisasi APBN P Provinsi Bali Tahun 2015-2016

Jenis Belanja	2015			2016			Growth yoy (%)	
	Pagu APBN P (Rp Miliar)	Realisasi (Rp Miliar)	Persentase Realisasi Terhadap Pagu (%)	Pagu APBN P (Rp Miliar)	Realisasi (Rp Miliar)	Persentase Realisasi Terhadap Pagu (%)	Pagu Anggaran	Realisasi
Pegawai	3.513	3.543	100,86	3.792	3.741	98,65	7,96	5,60
Barang	3.290	2.773	84,29	3.334	2.834	85,01	1,33	2,20
Modal	2.380	2.065	86,78	1.685	1.376	81,67	-29,19	-33,36
Bantuan Sosial	188	182	96,76	7	7	98,28	-96,24	-96,18
Total	9.370	8.563	91,38	8.818	7.958	90,25	-5,90	-7,06

Sumber: Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, Provinsi Bali Untuk APBN bersumber dari DJPBN Provinsi Bali



Grafik 2.4 Pangsa Belanja APBN Provinsi Bali 2015

masing-masing tercatat Rp 2,38 triliun dan 25,39%. Penurunan pagu anggaran juga terjadi untuk komponen bantuan sosial dari sebelumnya sebesar Rp 188,42 miliar (2015), turun menjadi Rp 7,08 miliar (2016).

Perkembangan Realisasi belanja APBN P untuk wilayah Provinsi Bali di 2016, menunjukkan penurunan dibandingkan tahun 2015 baik untuk nominal maupun persentase realisasi terhadap pagu. Adanya perlambatan penerimaan negara khususnya dari pajak dan cukai dan upaya pemerintah untuk mengelola defisit anggaran pada level yang ditetapkan bersama dengan DPR RI (2,7%) merupakan beberapa faktor yang mempengaruhi kinerja realisasi belanja APBN di tahun 2016. Persentase realisasi belanja di tahun 2016 tercatat sebesar 90,25% terhadap pagu APBN 2016, lebih rendah dibandingkan dengan persentase realisasi 2015 yang sebesar 91,38%. Kondisi ini yang menyebabkan penurunan kinerja pertumbuhan konsumsi pemerintah pada tahun 2016 yang mengalami kontraksi dibandingkan tahun 2015 yang tumbuh lebih tinggi.

Secara nominal, serapan realisasi belanja APBN pada 2016 tercatat sebesar Rp 7,96 triliun, menurun sebesar -7,06% (yoy) dibandingkan tahun 2015 yang sebesar Rp 8,56 triliun. Penurunan serapan belanja yang signifikan tersebut, terutama disebabkan oleh

menurunnya realisasi modal dan bantuan sosial masing-masing sebesar -33,36% (yoy) dan -96,18% (yoy), yang mengikuti penurunan pagu anggaran belanja di tahun 2016.

Selanjutnya, realisasi nominal komponen belanja pegawai di 2016 tercatat sebesar Rp 3,74 triliun atau dengan realisasi mencapai 98,65% dari pagu anggaran, lebih tinggi dibandingkan nominal 2015 yang sebesar Rp 3,54 triliun, atau dengan persentase realisasi mencapai 100,86%. Tingginya realisasi nominal belanja pegawai tahun 2016, sebagai dampak akumulasi oleh adanya kebijakan pembayaran THR (gaji ke-14) pada minggu ke- 4 Juni 2016, yang baru dilakukan di 2016.

Sementara itu, nominal realisasi belanja barang juga menunjukkan peningkatan di 2016, dengan nominal tercatat sebesar Rp 2,83 triliun atau meningkat sebesar 2,2% (yoy), dibandingkan nominal realisasi 2015 yang mencapai Rp 2,77 triliun. Persentase realisasi terhadap pagu juga menunjukkan peningkatan untuk komponen ini, yaitu menjadi sebesar 85,01% (2016) dari sebelumnya sebesar 84,29%. Sementara itu, belanja modal sebagai stimulus dalam perekonomian dan merupakan bentuk upaya pemerintah untuk mendorong peningkatan konektivitas antar daerah menunjukkan penurunan realisasi nominal dan persentase di tahun 2016, karena melambatnya pendapatan negara. Realisasi belanja modal APBN 2016, tercatat sebesar Rp 1,34 triliun, turun sebesar 33,36% dibandingkan tahun 2015 yang sebesar Rp 2,07 triliun. Persentase realisasi serapan belanja modal pada tahun 2016 juga mengalami penurunan yang mencapai 81,67% terhadap pagu anggaran, dibandingkan dengan tahun 2015 yang sebesar 86,78%. Sementara belanja bantuan sosial mengalami penurunan pada 2016, dibandingkan 2015, baik dari sisi nominal realisasi maupun persentase realisasi terhadap pagu.

Halaman ini sengaja dikosongkan

PERKEMBANGAN INFLASI DAERAH

Inflasi Bali pada triwulan I 2017 tercatat sebesar 4,4% (yoy), sedikit lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang sebesar 3,59% (yoy). Pencapaian ini juga sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan inflasi triwulan sebelumnya yang sebesar 3,23% (yoy).

BAB III



3.1. PERKEMBANGAN UMUM INFLASI

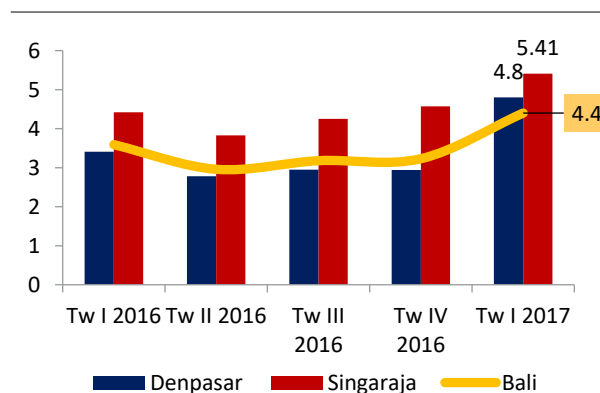
Perkembangan Inflasi Triwulan I – 2017

Berbeda dengan inflasi nasional, Inflasi Provinsi Bali pada triwulan I 2017 tercatat lebih tinggi. Inflasi Bali pada triwulan I 2017 tercatat sebesar 4,4% (yoy), sedikit lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang sebesar 3,59% (yoy). Pencapaian ini juga sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan inflasi triwulan sebelumnya yang sebesar 3,23% (yoy). Inflasi pada periode laporan terutama disumbang oleh komponen *administered prices* dan *volatile food*, sementara inflasi inti tercatat relatif rendah. Inflasi IHK Bali sampai dengan triwulan I 2017 masih sejalan dengan kisaran sasaran inflasi nasional Bank Indonesia serta sasaran inflasi nasional, yaitu sebesar $4 \pm 1\%$ (yoy).

Meningkatnya inflasi Bali pada periode laporan terutama disebabkan oleh komoditas pada kelompok perumahan, air, listrik, gas & bahan bakar dan kelompok transport, komunikasi, dan jasa keuangan. Berdasarkan kota pembentuknya, inflasi tertinggi kembali terjadi di Kota Singaraja yang tercatat mengalami inflasi sebesar 5,41% (yoy) yang berada relatif jauh di atas inflasi nasional dan Kota Denpasar yang tercatat sebesar 4,18% (yoy).

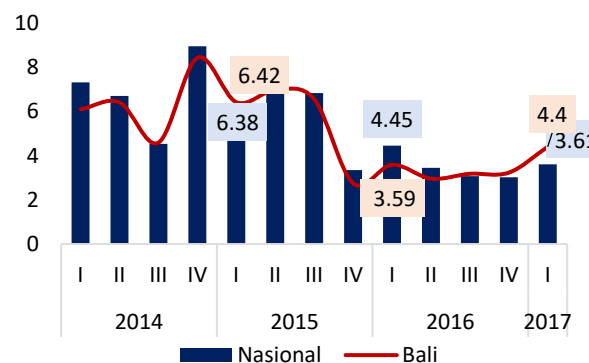
Secara bulanan, inflasi Bali masih searah dengan pola selama 3 tahun terakhir dan tercatat relatif sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan inflasi keseluruhan tahun pada 3 tahun sebelumnya. Inflasi Bali pada Maret 2016 mencatat deflasi sebesar -0,02% (mtm), dengan rincian kota sampel inflasi Denpasar sebesar 0,02% (mtm), dan Singaraja mengalami deflasi sebesar -0,20% (mtm). Berdasarkan realisasi triwulan I 2017 serta *tracking* pergerakan harga di tingkat konsumen baik melalui Survei Pemantauan Harga (SPH) Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali dan PIHPS Provinsi Bali "SiGapura", inflasi Bali triwulan II 2017 diperkirakan meningkat seiring dengan berlangsungnya *peak season* liburan sekolah

dan hari raya keagamaan (Galungan & Kuningan, Ramadhan, dan Idul Fitri). Namun demikian, inflasi Bali diperkirakan masih berada pada level yang moderat seiring dengan masuknya periode panen komoditas pangan strategis serta kesiapan TPID se-Provinsi Bali untuk menjaga kecukupan stok dan kelancaran distribusi.



Sumber : Badan Pusat Statistik, diolah

Grafik 3.1 Inflasi Kota di Bali (%yoy)



Sumber : Badan Pusat Statistik, diolah

Grafik 3.2 Perkembangan Inflasi Nasional dan Provinsi Bali (% yoy)

Tracking inflasi triwulan II 2017

Pada April 2017, Provinsi Bali mengalami deflasi sebesar -0,14% (mtm) atau sebesar 4,44% (yoy). Secara bulanan, pencapaian ini lebih baik dibandingkan dengan nasional yang mengalami inflasi sebesar 0,09% (mtm). Meskipun demikian, secara tahunan pencapaian inflasi Bali masih lebih tinggi dibandingkan dengan kondisi Nasional yang mengalami inflasi sebesar 4,17% (yoy). Deflasi di

Bulan April 2017 disebabkan karena berlangsungnya panen raya yang juga didukung dengan membaiknya kondisi cuaca sehingga mendorong perbaikan kinerja produksi dan selanjutnya menjaga pasokan komoditas pangan.

Secara spasial, tekanan inflasi cukup terjaga di seluruh kota sampel penghitungan Inflasi di Bali, terutama di Kota Singaraja. Kota Singaraja mencatat deflasi sebesar -1,08% (mtm) atau 4,34% (yoy). Sementara tekanan inflasi Kota Denpasar pada April 2017 tercatat sebesar 0,07% (mtm) atau sebesar 4,46% (yoy). Komoditas yang menyumbang terjadinya deflasi di Singaraja adalah cabai rawit (dengan andil inflasi sebesar -1,2), beras (-0,23), buncis (-0,07), bawang merah (-0,07), dan kentang (-0,01). Untuk komoditas yang mengalami peningkatan indeks harga antara lain tarip listrik (dengan andil inflasi sebesar 0,15), pisang (0,06), pembalut wanita (0,04), apel (0,04), dan ikan tongkol/ambu-ambu (0,03). Sementara, komoditas yang mendorong laju inflasi Kota Denpasar pada April 2017 adalah daging ayam ras (dengan andil inflasi sebesar 0,07), tarip listrik (0,07), sepeda motor (0,06), ikan tongkol pindang (0,04), dan rokok kretek filter (0,03). Sementara komoditas yang menahan laju inflasi adalah cabai rawit (dengan andil inflasi sebesar -0,13), cabai merah (-0,03), jeruk (-0,02), air kemasan (-0,02), dan kemeja pendek katun (-0,01).

Dibandingkan dengan kota sampel lain, pencapaian inflasi Kota Denpasar dan Singaraja tercatat berada pada level yang rendah. Kota Singaraja bahkan mencatat deflasi terdalam sebesar -1,08% (mtm) sementara kota dengan inflasi tertinggi adalah Kota Jayapura sebesar 0,73% (mtm).

Meskipun inflasi pada April 2017 cukup terjaga, inflasi Bali pada triwulan II 2017 diperkirakan mengalami peningkatan mencapai 4,54% (yoy) seiring dengan masuknya periode *peak season* pariwisata (libur sekolah) dan hari raya keagamaan

(bulan Ramadhan dan Idul Fitri). Menyikapi adanya risiko dan tantangan tersebut, Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Bali akan terus berupaya melakukan pengendalian harga baik melalui forum koordinasi dan langkah tindak lanjut dengan SKPD terkait. Program kerja TPID akan difokuskan pada aspek produksi, distribusi, serta menjaga ekspektasi masyarakat melalui sosialisasi dan publikasi serta memberikan himbauan (*moral suasion*) kepada masyarakat mengenai hal-hal yang diperlukan dalam upaya menjaga stabilitas harga.

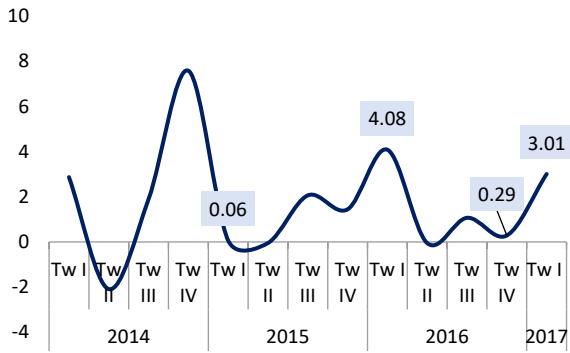
3.2. ANALISIS PERKEMBANGAN INFLASI

3.2.1. Inflasi Menurut Kelompok Barang dan Jasa

Tekanan inflasi Bali pada triwulan I 2017 terutama didorong oleh kelompok pengeluaran makanan jadi 6,80% (yoy), transportasi dan komunikasi 4,78% (yoy), dan bahan makanan 4,35% (yoy). Peningkatan tekanan inflasi terjadi seiring dengan kebijakan Pemerintah untuk meningkatkan tarif sejumlah komoditas serta anomali cuaca yang mengganggu kinerja produksi komoditas pangan hortikultura dan perikanan.

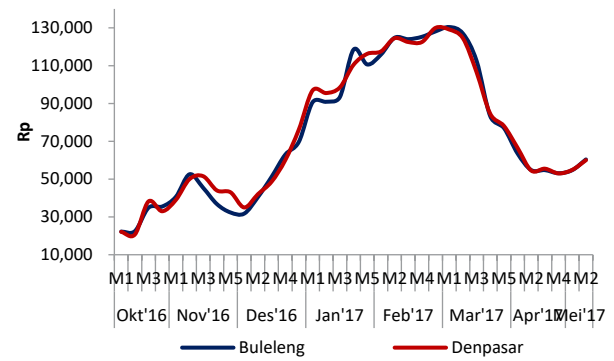
a) Kelompok Bahan Makanan

Kelompok bahan makanan pada triwulan I 2017 mengalami inflasi sebesar 3,01% (qtq), lebih tinggi dibandingkan dengan triwulan lalu yang sebesar 0,29% (qtq). Sementara itu, secara tahunan inflasi kelompok bahan makanan tercatat sebesar 4,35% (yoy). Tekanan inflasi pada kelompok bahan makanan terutama disebabkan anomali cuaca (curah hujan tinggi) yang berdampak pada terganggunya produksi bumbu-bumbuan (cabai rawit dan bawang merah) dan sayuran serta buah-buahan di beberapa daerah penghasil. Selain itu, gelombang tinggi juga menghambat kinerja produksi perikanan tangkap sehingga berdampak pada berkurangnya pasokan ikan.



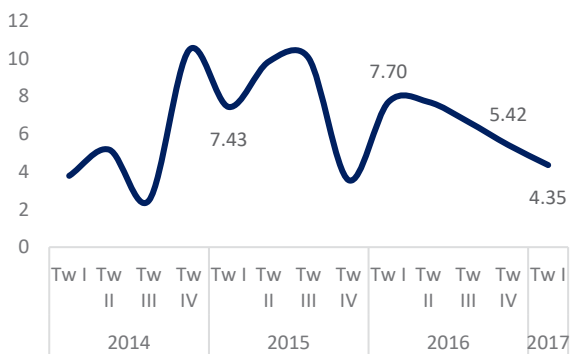
Sumber : Badan Pusat Statistik, diolah

Grafik 3.3 Inflasi Triwulanan Kelompok Bahan Makanan di Prov. Bali



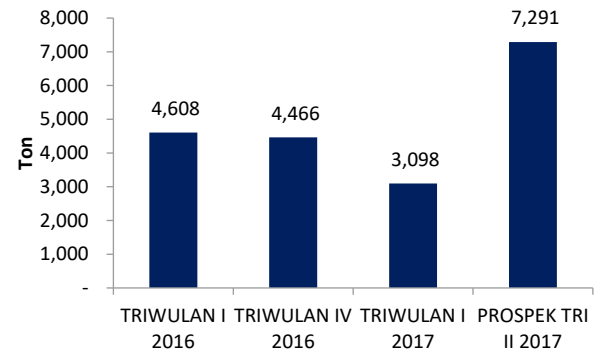
Sumber : www.sigapura.org, diolah

Grafik 3.5 Perkembangan Harga Cabai Rawit Merah (Rp/kg) di Provinsi Bali



Sumber : Badan Pusat Statistik, diolah

Grafik 3.4 Inflasi Tahunan Kelompok Bahan Makanan di Prov. Bali



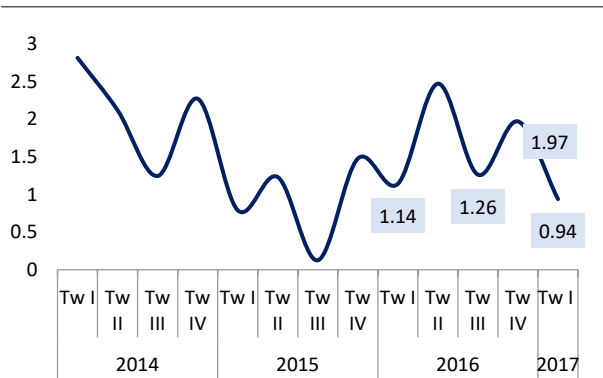
Sumber : Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Provinsi Bali, diolah

Grafik 3.6 Produksi Cabai Rawit Merah di Provinsi Bali

Tren peningkatan harga cabai rawit di Bali mulai terjadi sejak November 2016 hingga mencapai puncaknya pada awal Maret 2017. Berdasarkan pemantauan harga pada SiGapura, rata-rata harga komoditas cabai rawit merah pada Desember 2016 berada kisaran Rp. 52.370/kg di Denpasar dan Rp. 51.200/kg di Singaraja. Kenaikan ini berlanjut hingga Maret 2016 yang rata-ratanya tercatat sebesar Rp. 104.540/kg di Denpasar dan Rp. 106.033/kg. Meskipun demikian, pergerakan harga komoditas tersebut mulai membaik pada April 2017 seiring dengan membaiknya kondisi cuaca dan adanya panen raya di sentra komoditas tersebut. Berdasarkan pantauan SiGapura, rata-rata harga komoditas dimaksud tercatat sebesar Rp. 57.375/kg di Denpasar dan Rp. 56.525/kg di Singaraja. Kondisi tersebut sejalan dengan produksi cabai rawit merah yang mengalami penurunan dari sebesar 4,46 ribu ton pada triwulan IV 2016 menjadi 3,09 ribu ton pada triwulan I 2017.

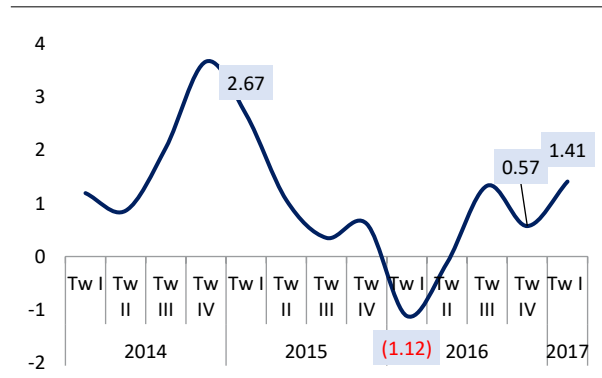
b) Kelompok Makanan Jadi, Minuman, Rokok dan Tembakau

Inflasi kelompok makanan jadi, minuman jadi, rokok dan tembakau pada triwulan I 2017 tercatat sebesar 0,94% (qtq), lebih rendah dibandingkan triwulan lalu yang sebesar 1,97% (qtq). Sejalan dengan kondisi tersebut, secara tahunan inflasi kelompok ini tercatat sebesar 6,8% (yoy), sedikit lebih rendah dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang sebesar 7,10% (yoy). Penurunan tekanan inflasi kelompok makanan jadi, minuman jadi, rokok dan tembakau terutama disumbangkan oleh komoditas ayam goreng seiring dengan penurunan harga daging ayam terkait dengan ketersediaan stok daging ayam yang cukup memadai. Di sisi lain, peningkatan harga komoditas rokok dan tembakau sebagai dampak dari kenaikan cukai rokok melalui Peraturan Menteri Keuangan No 147/PMK.010/2016 menahan laju penurunan inflasi kelompok tersebut lebih dalam.



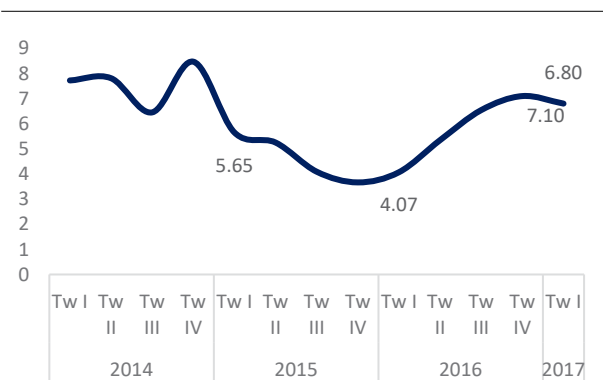
Sumber : Badan Pusat Statistik, diolah

Grafik 3.7 Inflasi Triwulanan Kelompok Makanan Jadi, Minuman, Rokok dan Tembakau di Prov. Bali



Sumber : Badan Pusat Statistik, diolah

Grafik 3.9 Inflasi Triwulanan Kelompok Perumahan, Air, Listrik, Gas dan Bahan Bakar di Prov. Bali



Sumber : Badan Pusat Statistik, diolah

Grafik 3.8 Inflasi Tahunan Kelompok Makanan Jadi, Minuman, Rokok dan Tembakau di Prov. Bali



Sumber : Badan Pusat Statistik, diolah

Grafik 3.10 Inflasi Tahunan Kelompok Perumahan, Air, Listrik, Gas dan Bahan Bakar di Prov. Bali

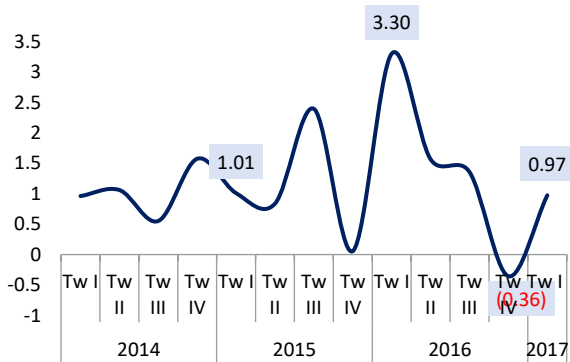
c) Kelompok Perumahan, Air, Listrik, Gas dan Bahan Bakar

Inflasi pada kelompok perumahan, air, listrik dan gas tercatat mengalami peningkatan baik secara triwulanan maupun tahunan dibandingkan dengan triwulan sebelumnya maupun dengan periode yang sama tahun sebelumnya. Pada triwulan I 2017 kelompok ini tercatat mengalami inflasi sebesar 1,41% (qtq) atau lebih tinggi dibandingkan dengan triwulan lalu yang sebesar 0,57% (qtq). Sementara itu secara tahunan inflasi kelompok ini tercatat sebesar 3,22% (yoy), lebih tinggi dibandingkan dengan triwulan sebelumnya sebesar 0,63% (yoy) periode yang sama tahun sebelumnya yang sebesar 4,79% (yoy).

Peningkatan inflasi kelompok ini seiring dengan adanya penyesuaian tarif listrik dan penyesuaian harga BBM. Sesuai Permen ESDM Nomor 28 Tahun 2016, komoditas tarif listrik meningkat seiring dengan pencabutan subsidi golongan tarif untuk keperluan rumah tangga kecil pada tegangan rendah daya 900 VA-RTM (R-1/TR) menjadi sebesar Rp791/kWh per 1 Januari 2017. BBM mengalami peningkatan dua kali kenaikan yang terjadi pada Januari dan Maret 2017. Harga Bahan Bakar Minyak (BBM) Non Subsidi jenis Pertamina, Series, Peralite, dan Dexlite mengalami kenaikan sebesar Rp. 300/liter per tanggal 5 Januari 2017. Sementara pada Maret 2017, harga Peralite mengalami kenaikan Rp. 50/liter sedangkan Pertamina, dan Pertamina Turbo rata-rata mengalami kenaikan masing-masing sebesar Rp. 100/liter.

d) Kelompok Sandang

Secara triwulanan, inflasi pada kelompok sandang tercatat mengalami peningkatan dari sebesar deflasi -0,36% (qtq) pada triwulan IV 2016 menjadi sebesar 0,97% (qtq) pada triwulan I 2017. Peningkatan tersebut seiring dengan tren peningkatan harga emas dunia yang tercatat mengalami inflasi pada Maret 2017 sebesar 1,01% (mtm), jauh lebih tinggi dibandingkan dengan Desember 2016 yang mengalami deflasi sebesar -3,02% (mtm). Meskipun demikian, secara tahunan inflasi kelompok sandang tercatat melandai dari sebesar 5,92%(yoy) pada triwulan IV 2016 menjadi sebesar 3,58% (yoy) pada triwulan I 2017, angka tersebut juga lebih rendah dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu yang tercatat sebesar 6,69% (yoy). Melandainya inflasi kelompok dimaksud seiring dengan pola musimannya mengingat pada triwulan laporan tidak terdapat hari raya yang mendorong permintaan kelompok sandang.



Sumber : Badan Pusat Statistik, diolah

Grafik 3.11 Inflasi Triwulanan Kelompok Sandang di Prov. Bali

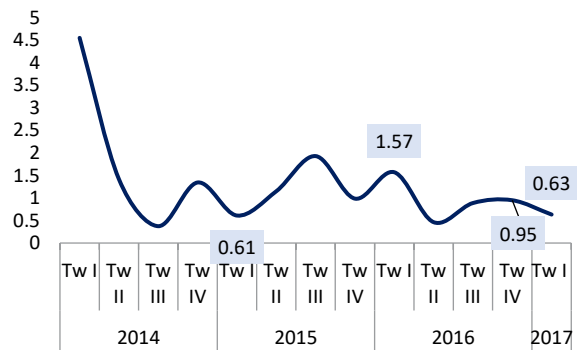


Sumber : Badan Pusat Statistik, diolah

Grafik 3.12 Inflasi Tahunan Kelompok Sandang di Prov. Bali

e) Kelompok Kesehatan

Inflasi pada kelompok kesehatan mengalami penurunan baik secara triwulanan maupun tahunan. Pada triwulan laporan, kelompok ini tercatat mengalami inflasi sebesar 0,63% (qtq) atau sedikit lebih rendah dibandingkan dengan triwulan lalu yang sebesar 0,95% (qtq). Sementara itu secara tahunan, inflasi kelompok ini tercatat sebesar 2,96% (yoy), lebih tinggi dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya yang sebesar 5,71% (yoy) .



Sumber : Badan Pusat Statistik, diolah

Grafik 3.13 Inflasi Triwulanan Kelompok Kesehatan di Prov. Bali



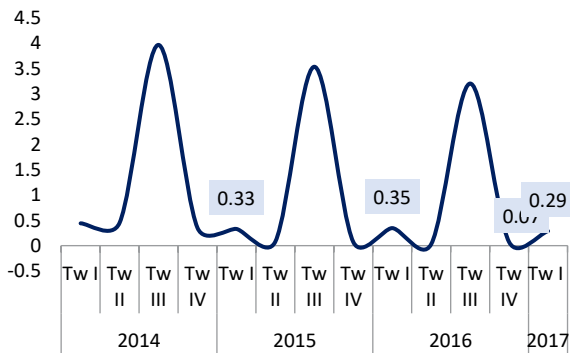
Sumber : Badan Pusat Statistik, diolah

Grafik 3.14 Inflasi Tahunan Kelompok Kesehatan di Prov. Bali

f) Kelompok Pendidikan, Rekreasi dan Olah Raga

Kelompok pendidikan, rekreasi dan olah raga secara triwulanan tercatat mengalami inflasi sebesar 0,29% (qtq) atau lebih tinggi dibandingkan dengan triwulan lalu yang inflasi sebesar 0,07% (qtq). Peningkatan tekanan secara kuartalan ini sejalan dengan peningkatan kunjungan wisatawan sebagai

dampak frekuensi hari libur yang cukup tinggi sehingga mendorong tekanan inflasi terutama untuk rekreasi. Sementara, secara tahunan, inflasi kelompok ini tercatat stabil dibandingkan dengan triwulan sebelumnya sebesar 3,61% (yoy), namun lebih rendah dibandingkan dengan periode triwulan I 2017 yang sebesar 4,05% (yoy).



Sumber : Badan Pusat Statistik, diolah

Grafik 3.15 Inflasi Triwulanan Kelompok Pendidikan, Rekreasi dan Olah Raga di Prov. Bali



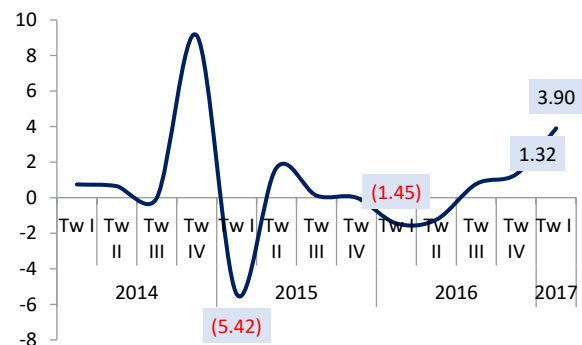
Sumber : Badan Pusat Statistik, diolah

Grafik 3.16 Inflasi Tahunan Kelompok Pendidikan, Rekreasi dan Olah Raga di Prov. Bali

g) Kelompok Transpor, Komunikasi dan Jasa Keuangan

Inflasi pada kelompok transpor, komunikasi dan jasa keuangan mengalami peningkatan baik secara triwulanan maupun tahunan. Pada triwulan I 2017 kelompok ini tercatat mengalami inflasi sebesar 3,90% (qtq) atau lebih tinggi dibandingkan dengan triwulan lalu yang tercatat mengalami sebesar 1,32%

(qtq). Peningkatan tekanan inflasi ini sejalan dengan meningkatnya permintaan menjelang periode libur hari raya Imlek dan Nyepi pada triwulan I 2017. Secara tahunan inflasi kelompok ini tercatat sebesar 4,78% (yoy), lebih tinggi dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya yang sebesar 0,34% (yoy). Kondisi tersebut terutama seiring dengan peningkatan tarif angkutan udara terutama pada periode Imlek dan hari raya Nyepi. Selain itu, kenaikan biaya perpanjangan STNK sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) No. 60 Tahun 2016 tentang jenis dan tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), biaya pengurusan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) untuk roda 2/3 dan Roda 4/lebih baru dan perpanjang, Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor (STCK) R4/lebih, PNBP Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) roda 2/3 roda dan roda 4/lebih, tarif PNBP kendaraan mutasi keluar daerah untuk roda 2/3 dan R4/lebih naik, PNBP BKPb untuk roda 2/3 yang baru dan ganti, turut mendorong peningkatan inflasi kelompok ini.



Sumber : Badan Pusat Statistik, diolah

Grafik 3.17 Inflasi Triwulanan Kelompok Transpor, Komunikasi dan Jasa Keuangan di Prov. Bali

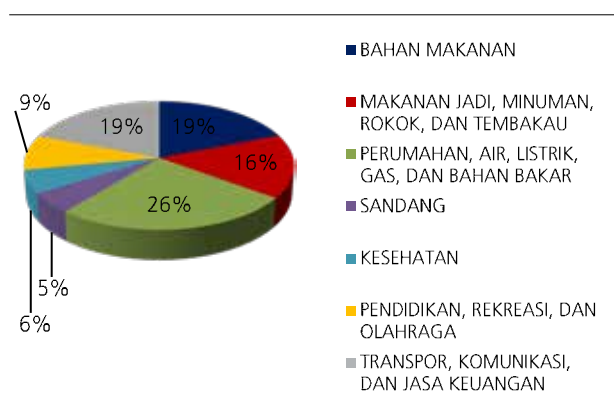


Sumber : Badan Pusat Statistik, diolah

Grafik 3.18 Inflasi Tahunan Kelompok Transpor, Komunikasi dan Jasa Keuangan di Prov. Bali

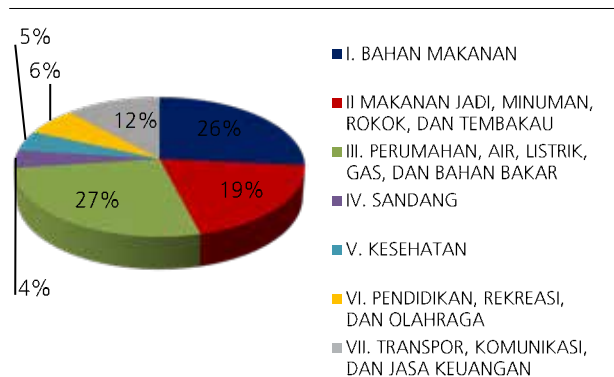
3.2.2. Inflasi Menurut Kota

Mulai 1 Januari 2014 terdapat penambahan cakupan kota perhitungan inflasi di Bali menjadi 2 (dua) kota sampel inflasi, yaitu Denpasar dan Singaraja. Berdasarkan SBH 2012, bobot Kota Denpasar terhadap inflasi nasional adalah sebesar 1,78%, sedangkan bobot Kota Singaraja adalah sebesar 0,58%. Karakteristik inflasi Kota Denpasar maupun Singaraja terutama dipengaruhi oleh kelompok pengeluaran bahan makanan, makanan jadi dan perumahan sebagaimana tercermin pada dominannya bobot kelompok pengeluaran tersebut dalam keranjang IHK Kota Denpasar maupun Singaraja.



Sumber : Bank Indonesia

Grafik 3.19 Bobot Tahun Dasar (2012=100) Kelompok Pengeluaran Kota Denpasar



Sumber : Bank Indonesia

Grafik 3.20 Bobot Tahun Dasar (2012=100) Kelompok Pengeluaran Kota Singaraja

a) Kota Denpasar

Berdasarkan perkembangan inflasi Kota Denpasar, pencapaian pada triwulan I 2017 tercatat sebesar 4,18% (yoy). Perkembangan inflasi Denpasar tercatat relatif rendah dan terjaga di bawah inflasi tertimbang Provinsi Bali. Inflasi Kota Denpasar cenderung dipengaruhi oleh peningkatan permintaan jelang periode *peak season* dan perayaan Hari Besar Keagamaan. Hal ini sejalan dengan kondisi Bali secara keseluruhan mengingat angka inflasi tertimbang Provinsi Bali mayoritas dibentuk oleh Kota Denpasar.

Sepanjang triwulan I 2017, komoditas yang perlu menjadi perhatian berdasarkan penyumbang inflasi di Denpasar masih sering didorong oleh kelompok pada disagregasi *volatile food*. Inflasi terutama disebabkan pada komoditas hortikultura disebabkan karena keterbatasan kapasitas Bali dalam memenuhi kebutuhan pangan masyarakat. Kondisi tersebut diperparah dengan anomali cuaca (curah hujan tinggi) yang terjadi di seluruh wilayah Indonesia pada triwulan I 2017 sehingga menghambat produksi komoditas tersebut termasuk di daerah sentra produksi. Selain itu, kelompok *administered prices* turut memberikan sumbangan terhadap peningkatan inflasi Kota Denpasar pada triwulan I 2017 disebabkan adanya kenaikan biaya perpanjangan STNK dan penyesuaian tariff listrik. Peningkatan kunjungan wisatawan ke Provinsi Bali seiring dengan adanya hari raya imlek dan Nyepi turut mendorong peningkatan tariff angkutan udara di akhir triwulan I 2017.

Tabel 3.1 Perkembangan Inflasi Kota Denpasar Per Kelompok Pengeluaran

No.	Kelompok Barang	2016												2017		
		Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV			Triwulan I		
		mtm	ytd	yoy	mtm	ytd	yoy	mtm	ytd	yoy	mtm	ytd	yoy	mtm	ytd	yoy
1	Bahan Makanan	0.10	3.77	6.93	1.02	3.90	7.15	-0.21	4.77	6.18	0.86	4.51	4.51	-0.97	2.93	3.66
2	Makanan Jadi	0.40	1.25	4.33	0.33	3.81	5.58	0.87	5.18	6.82	0.35	7.70	7.70	0.05	0.84	7.26
3	Perumahan, Air, LGA	-0.29	-1.32	1.07	0.13	-1.48	-0.35	0.22	-0.28	0.54	0.12	0.39	0.39	0.32	1.27	3.02
4	Sandang	0.30	3.51	6.24	0.07	4.88	7.33	1.00	6.43	6.27	-0.41	5.41	5.41	0.71	0.89	2.74
5	Kesehatan	0.68	1.61	6.24	0.02	2.10	5.40	0.14	2.65	3.70	0.40	3.68	3.68	0.32	0.58	2.64
6	Pendidikan, Rekreasi, & OR	0.18	0.21	4.13	-0.06	0.24	4.07	-0.25	2.91	3.01	0.00	3.10	3.10	0.04	0.37	3.26
7	Transportasi & Komunikasi	-0.12	-1.37	0.34	0.54	-2.34	-2.19	0.37	-1.37	-1.36	2.38	-0.03	-0.03	0.31	3.70	5.11
	UMUM	0.06	0.62	3.41	0.39	0.92	2.78	0.26	2.15	2.95	0.69	2.94	2.94	0.02	1.83	4.18

Sumber : Badan Pusat Statistik, diolah

Tabel 3.2 Ranking Komoditas Berdasarkan Andil Inflasi/Deflasi di Kota Denpasar Tw I 2017

No	Komoditas	Kontribusi (% mtm)	(%, mtm)	No	Komoditas	Kontribusi (% mtm)	(%, mtm)
Januari							
<i>Inflasi</i>				<i>Deflasi</i>			
1	Biaya Perpanjangan STNK	0.23	105.76	1	Bawang Merah	-0.07	-9.32
2	Cabai Rawit	0.21	72.32	2	Cabai Merah	-0.05	-14.66
3	Tarip Pulsa Ponsel	0.19	8.56	3	Angkutan Udara	-0.05	-3.31
4	Tarip Listrik	0.16	4.07	4	Semen	-0.02	-3.03
5	Mobil	0.11	4.07	5	Kipas Angin	-0.01	-10.04
Februari							
<i>Inflasi</i>				<i>Deflasi</i>			
1	Cabai Rawit	0.12	24.93	1	Angkutan Udara	-0.05	-3.88
2	Cabai Merah	0.10	37.36	2	Sawi Hijau	-0.04	-19.61
3	Tarip Pulsa Ponsel	0.06	2.43	3	Bawang Merah	-0.02	-3.69
4	Tarip Listrik	0.04	0.93	4	Sabun Mandi	-0.02	-7.35
5	Tongkol/Ambu-ambu	0.02	9.95	5	Jengki	-0.02	-6.76
Maret							
<i>Inflasi</i>				<i>Deflasi</i>			
1	Upah Pembantu RT	0.07	5.18	1	Cabai Rawit	-0.13	-20.63
2	Angkutan Udara	0.07	5.45	2	Cabai Merah	-0.08	-21.30
3	Bawang Merah	0.05	7.44	3	Daging Ayam Ras	-0.07	-4.25
4	Nangka Muda	0.04	27.92	4	Tarip Pulsa Ponsel	-0.04	-1.57
5	Sawi Hijau	0.03	17.03	5	Sprey	-0.02	-28.04

Sumber : Badan Pusat Statistik, diolah

b) Kota Singaraja

Laju inflasi Kota Singaraja pada triwulan I 2017 tercatat sebesar 5,41%(yoy), lebih tinggi dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang tercatat sebesar 4,57% (yoy). Realisasi inflasi Kota Singaraja tersebut masih berada di atas inflasi nasional maupun inflasi Kota Denpasar. Disparitas inflasi antara Kota Singaraja dan Kota Denpasar yang cukup besar tidak lepas dari masih terbatasnya dukungan infrastruktur perhubungan menuju Kota Singaraja di tengah masih tingginya ketergantungan pasokan bahan pokok Kota Singaraja terhadap daerah lainnya. Kondisi inflasi Kota Singaraja secara

bulan tercatat lebih bergejolak dan sedikit berbeda dengan inflasi Denpasar. Faktor pendorong terjadinya inflasi sebagian besar berasal dari kelompok bahan makanan, kelompok sandang, kelompok pendidikan, rekreasi dan olahraga, serta kelompok makanan jadi, minuman, rokok dan tembakau.

Sejak dicacah inflasinya, pergerakan inflasi Kota Singaraja lebih sensitif terhadap gejolak dari sisi suplai dibandingkan dengan inflasi Kota Denpasar. Hal ini tidak lepas dari kondisi jalur perhubungan dan distribusi Denpasar-Singaraja dan Pelabuhan Gilimanuk-Singaraja yang masih perlu diperhatikan.

Tabel 3.3 Perkembangan Inflasi Kota Singaraja Per Kelompok Pengeluaran

No.	Kelompok Barang	2016												2017		
		Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV			Triwulan I		
		mtm	ytd	yoy	mtm	ytd	yoy	mtm	ytd	yoy	mtm	ytd	yoy	mtm	ytd	yoy
1	Bahan Makanan	2.60	5.56	11.56	-0.03	4.63	10.46	-0.29	6.91	8.97	1.98	9.98	9.98	-1.12	3.36	7.69
2	Makanan Jadi	0.12	0.66	2.76	0.29	2.93	4.17	-0.33	3.96	5.14	0.03	4.08	4.08	-0.06	1.35	4.80
3	Perumahan, Air, LGA	-0.12	-0.24	0.10	0.05	-0.14	0.00	0.16	1.67	1.38	0.01	1.83	1.83	0.44	2.05	4.17
4	Sandang	1.26	2.41	8.95	1.48	5.12	8.22	0.33	6.01	7.01	0.10	8.47	8.47	0.57	1.32	7.32
5	Kesehatan	0.42	0.77	3.04	0.08	1.10	3.00	0.22	3.99	5.41	0.04	4.65	4.65	0.32	0.90	4.77
6	Pendidikan, Rekreasi, & OR	0.37	0.74	3.64	0.00	0.74	3.59	2.67	6.71	6.96	0.00	6.24	6.24	-0.07	0.00	5.33
7	Transportasi & Komunikasi	-0.12	-1.89	0.37	0.00	-4.32	-4.23	0.05	-4.58	-4.56	0.52	-3.48	-3.48	0.01	4.89	3.19
	UMUM	0.81	1.56	4.42	0.13	1.65	3.83	0.07	3.44	4.25	0.63	4.57	4.57	-0.20	2.38	5.41

Sumber : Badan Pusat Statistik, diolah

Tabel 3.4 Ranking Komoditas Berdasarkan Andil Inflasi/Deflasi di Kota Singaraja Tw I 2017

No	Komoditas	Kontribusi (% mtm)	(%, mtm)	No	Komoditas	Kontribusi (% mtm)	(%, mtm)
Januari							
<i>Inflasi</i>				<i>Deflasi</i>			
1	Cabai Rawit	0.81	28.82	1	Bawang Merah	-0.15	-11.90
2	Tarip Listrik	0.34	12.21	2	Pisang	-0.03	-4.81
3	Biaya Perpanjangan STNK	0.23	102.87	3	Bahan Bakar Rumah Tangga	-0.02	-1.12
4	Daging Ayam Ras	0.09	4.27	4	Cabai Merah	-0.02	-8.32
5	Bensin	0.09	2.71	5	Salak	-0.01	-10.64
Februari							
<i>Inflasi</i>				<i>Deflasi</i>			
1	Cabai Rawit	0.50	12.52	1	Daging Ayam Ras	-0.10	-4.94
2	Sate	0.18	12.50	2	Telur Ayam Ras	-0.03	-3.14
3	Tarip Listrik	0.10	3.27	3	Mie Kering Instant	-0.02	-1.68
4	Mobil	0.06	5.90	4	Bawang Merah	-0.02	-1.74
5	Sepeda Motor	0.04	2.07	5	Ketimun	-0.02	-7.71
Maret							
<i>Inflasi</i>				<i>Deflasi</i>			
1	Tarip Listrik	0.12	3.94	1	Cabai Rawit	-0.15	-3.69
2	Bawang Merah	0.04	3.33	2	Daging Ayam Ras	-0.10	-5.00
3	Tauge/Kecambah	0.02	5.86	3	Beras	-0.08	-1.05
4	Bensin	0.02	0.49	4	Daging Ayam Kampung	-0.03	-4.35
5	Salak	0.01	15.72	5	Gula Pasir	-0.02	-4.64

Sumber : Badan Pusat Statistik, diolah

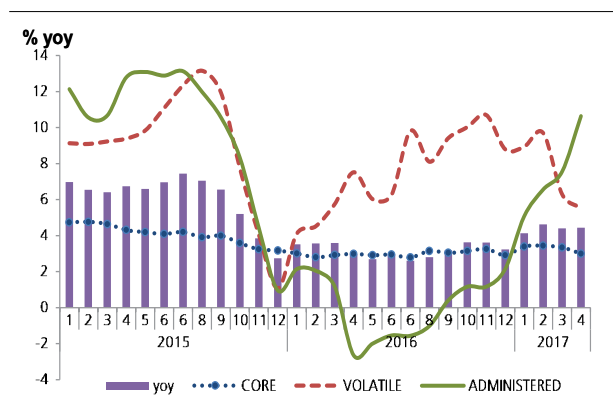
Optimalisasi dan perbaikan infrastruktur perhubungan seperti Pelabuhan Celukan Bawang berpotensi meminimalisir tekanan inflasi di Kota Singaraja. Di samping itu, intensifikasi pemanfaatan teknologi pertanian dalam rangka peningkatan produksi lokal menjadi penting mengingat besarnya potensi pertanian di Kabupaten Buleleng.

Kelompok pengeluaran yang mengalami inflasi tertinggi pada triwulan I 2017 adalah kelompok bahan makanan jadi dan sandang yang masing-masing tercatat sebesar 7,69% (yoy) dan 7,32% (yoy). Peningkatan tekanan inflasi bahan makanan jadi di

Kota Singaraja disebabkan oleh berkurangnya suplai akibat anomali cuaca (terutama untuk komoditas ; peningkatan *demand* seiring dengan perayaan Hari Raya Keagamaan; serta meningkatnya ekspektasi pedagang seiring dengan pergantian tahun dan kenaikan UMR. Apabila ditinjau pergerakannya pada Maret 2017, maka 5 komoditas yang memberikan andil inflasi tertinggi adalah tarif listrik, bawang merah, tauge/kecambah, bensin, dan salak. Peningkatan komoditas bensin seiring dengan adanya penyesuaian harga BBM ke atas.

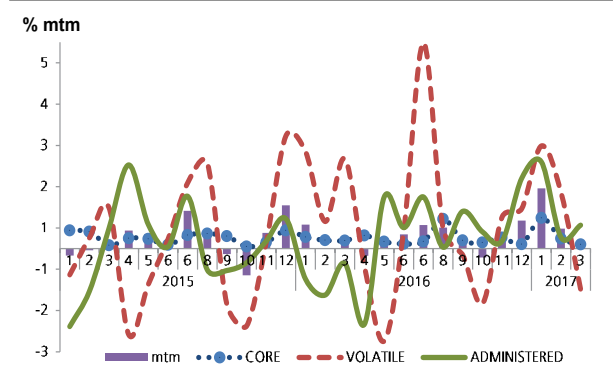
3.3. DISAGREGASI INFLASI

Berdasarkan disagregasi inflasi, peningkatan tekanan inflasi pada triwulan I 2017 terutama bersumber pada kelompok *administered prices* dan *volatile food*. Sementara itu, sumbangan inflasi kelompok inti tercatat relatif stabil.



Sumber : Badan Pusat Statistik, diolah

Grafik 3.21 Perkembangan Inflasi Berdasarkan Penyebabnya (% yoy)



Sumber : Badan Pusat Statistik, diolah

Grafik 3.22 Perkembangan Inflasi Berdasarkan Penyebabnya (% mtm)

a) *Volatile Food*

Tekanan inflasi kelompok *volatile food* pada triwulan I 2017 tercatat melandai meski masih dalam level yang moderat. Pergerakan inflasi kelompok *volatile food* pada triwulan I 2017 di Denpasar dan Singaraja masing-masing tercatat sebesar 3,66% (yoy) dan 7,68% (yoy). Tekanan inflasi pada triwulan laporan bersumber dari peningkatan harga komoditas hortikultura (cabai rawit, cabai merah, dan bawang merah) sebagai dampak curah hujan tinggi yang mengganggu kinerja produksi komoditas tersebut

termasuk di sentra penghasil. selain itu, curah hujan tinggi yang diikuti dengan gelombang tinggi menghambat kinerja perikanan tangkap dan mendorong peningkatan harga ikan laut. Sementara itu, dari sisi *demand*, terjadi peningkatan permintaan seiring dengan peningkatan kunjungan wisatawan periode libur hari raya Imlek dan berlangsungnya hari raya Nyepi serta menjelang Galungan dan Kuningan. Meskipun demikian, perbaikan kondisi cuaca di akhir triwulan I 2017 serta berlangsungnya panen raya untuk komoditas pangan strategis menjaga inflasi pada tingkat yang moderat. Sebagaimana terlihat dari inflasi bulanan kelompok *volatile food* yang mengalami deflasi pada April 2017.

Dalam menyikapi berbagai potensi risiko inflasi, TPID Provinsi Bali senantiasa melaksanakan berbagai upaya pengendalian inflasi yang mengacu pada *roadmap* pengendalian inflasi Provinsi Bali. Pengendalian inflasi pangan diarahkan pada: (i) menjaga ketersediaan pasokan pangan di pasar dalam jumlah yang memadai, (ii) mengkomunikasikan kepada publik tentang kondisi dan prognosa pangan pokok serta langkah-langkah antisipasi yang akan dilakukan pemerintah untuk menjaga stabilitas harga pangan pokok, (iii) memperkuat peran Bulog dalam stabilisasi harga pangan pokok.

b) *Administered Prices*

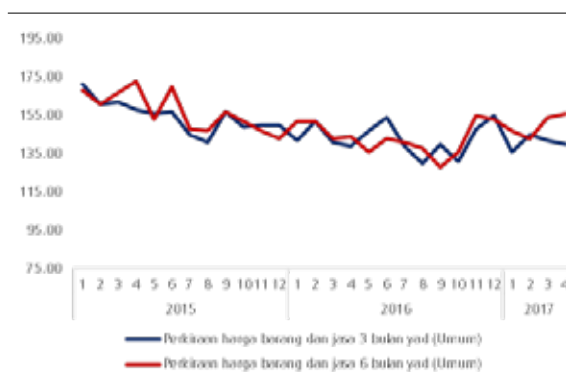
Tekanan inflasi kelompok *administered prices* pada triwulan I 2017 tercatat mengalami peningkatan seiring kebijakan Pemerintah untuk melakukan penyesuaian tarif listrik, bensin, dan biaya perpanjangan STNK. Kenaikan biaya perpanjangan STNK dihitung per tanggal 6 Januari 2017 antara lain biaya pengurusan administrasi kendaraan seperti BPKB (buku pemilik kendaraan bermotor), STNK (surat tanda nomor kendaraan) dan TNKB (tanda nomor kendaraan bermotor) mengalami kenaikan tarif sejalan dengan ditandatanganinya Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2016 tentang Jenis dan

Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Sejalan dengan penetapan ini, inflasi komoditas Biaya Perpanjangan STNK di Provinsi Bali tercatat sebesar 105,28% (yoy) pada Maret 2017. Sementara, kenaikan indeks harga komoditas tarif listrik sejalan dengan adanya pencabutan subsidi golongan tarif untuk keperluan rumah tangga kecil pada tegangan rendah daya 900 VA-RTM (R-1/TR) menjadi sebesar Rp791/kWh per 1 Januari 2017 sesuai Permen ESDM Nomor 28 Tahun 2016, turut mendorong inflasi tarif listrik menjadi sebesar 14,10% (yoy) pada Maret 2017. Selain itu, dua kali penyesuaian harga oleh PT. Pertamina (Persero) terhadap harga Bahan Bakar Minyak (BBM) Non Subsidi jenis Pertamina, Series, Peralite, dan Dexlite sebesar Rp. 300/liter per tanggal 5 Januari 2017 dan kenaikan Peralite sebesar Rp. 50/liter sementara Pertamina, dan Pertamina Turbo rata-rata mengalami kenaikan masing-masing sebesar Rp. 100/liter per 21 Maret 2017 menyebabkan peningkatan indeks harga komoditas bensin dengan tingkat inflasi sebesar 0,42% (mtm) pada Maret 2017. Kenaikan harga bensin non subsidi terjadi seiring dengan kenaikan harga minyak dunia dan pelemahan nilai tukar Rupiah. Selain itu, tekanan inflasi kelompok AP sepanjang triwulan I 2017 di Provinsi Bali juga bersumber dari kenaikan tarif/harga beberapa komoditas seperti angkutan udara dan rokok kretek. Tarif angkutan udara di Provinsi Bali pada periode Maret 2017 mengalami inflasi sebesar 5,45% (mtm) seiring dengan tingginya permintaan untuk hari raya Imlek dan hari raya Nyepi yang mendorong peningkatan kunjungan wisatawan ke Provinsi Bali. Komoditas rokok kretek juga memberikan tekanan inflasi Bali pada periode laporan disebabkan kenaikan batas Harga Jual Eceran (HJE) terendah per batang atau gram dan kenaikan tarif cukai per batang atau gram sesuai Permen Keuangan No.147/PMK.010/2016.

c) Core Inflation

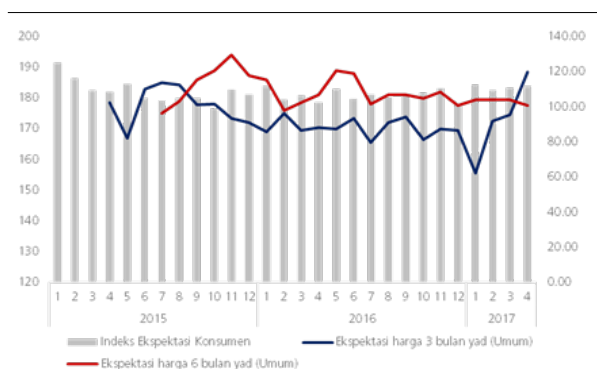
Secara fundamental tekanan inflasi kelompok inti tercatat cukup stabil dan masih berada dalam tren

menurun. Laju inflasi kelompok inti cukup stabil didukung oleh masih memadainya sisi *supply* dan terjaganya ekspektasi inflasi. Inflasi kelompok inti pada triwulan I 2017 di Denpasar dan Singaraja masing-masing tercatat sebesar 3,26% (yoy) dan 3,86% (yoy). Terkendalnya inflasi inti tersebut seiring dengan konsistensi kebijakan Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas nilai tukar dan dalam mengarahkan ekspektasi inflasi. Selain itu, ekspektasi inflasi masyarakat Bali yang masih terjaga turut menjaga pergerakan inflasi inti dalam tingkat wajar. Berdasarkan hasil Survei Konsumen (SK) dan Survei Penjualan Eceran (SPE) Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali, ekspektasi harga pada triwulan laporan cenderung terjaga. Meskipun demikian masih terdapat tendensi peningkatan seiring dengan tendensi peningkatan permintaan menjelang hari



Sumber : Survei Penjualan Eceran, Bank Indonesia

Grafik 3.23 Interaksi Permintaan dan Penawaran



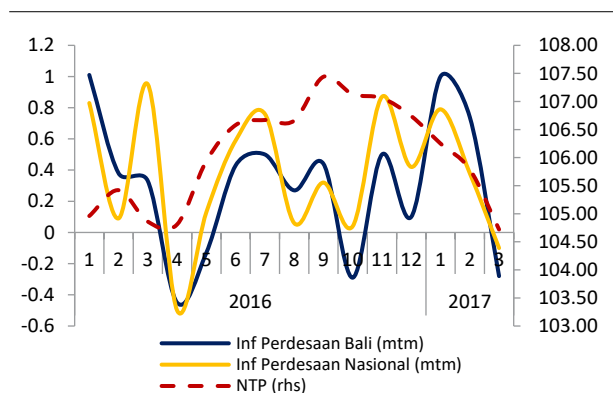
Sumber : Survei Konsumen, Bank Indonesia

Grafik 3.24 Ekspektasi Konsumen

raya Galungan dan Kuningan di awal triwulan II 2017. Selain itu, adanya bulan Ramadhan dan Idul Fitri di akhir triwulan II 2017 mendorong perkiraan peningkatan tekanan inflasi pada triwulan II 2017.

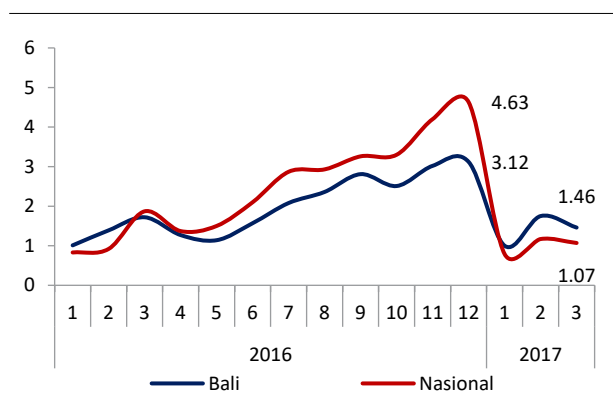
3.4. INFLASI PERDESAAN

Sama halnya dengan IHK sampel inflasi, IHK Perdesaan terdiri dari 7 (tujuh) kelompok pengeluaran yaitu kelompok bahan makanan, kelompok makanan jadi, kelompok perumahan, kelompok sandang, kelompok kesehatan, kelompok pendidikan, rekreasi dan olahraga, serta kelompok transportasi dan komunikasi. Tekanan inflasi perdesaan Bali di triwulan I 2017 secara bulanan menunjukkan pergerakan melandai dibawah inflasi perdesaan Nasional. Dengan dukungan TPID Kabupaten/Kota di seluruh Provinsi Bali, tingkat inflasi perdesaan Provinsi Bali secara kumulatif sampai



Sumber : BPS, diolah

Grafik 3.25 Perkembangan Inflasi Perdesaan (mtm) dan Nilai Tukar Petani (NTP)



Sumber : BPS, diolah

Grafik 3.26 Perkembangan Inflasi Perdesaan (ytd)

dengan triwulan I 2017 tercatat sebesar 1,46% (ytd), lebih tinggi dibandingkan dengan inflasi perdesaan nasional yang sebesar 1,07% (ytd).

Pada triwulan laporan rata-rata Nilai Tukar Petani (NTP) mengalami penurunan dari 106,98 pada triwulan IV 2016 menjadi 105,59 pada triwulan I 2017. Kondisi tersebut mencerminkan kesejahteraan petani yang sedikit menurun seiring dengan penurunan pendapatan petani sejalan dengan kondisi inflasi perdesaan yang relatif rendah.

3.5. KOORDINASI PENGENDALIAN INFLASI

TPID Provinsi Bali dan TPID Kabupaten/Kota terus meningkatkan koordinasi secara intensif dalam rangka pengendalian inflasi di Provinsi Bali. Selama Januari hingga Mei 2017, terdapat beberapa kegiatan yang dimaksudkan untuk pemantauan harga, penguatan kerjasama dan koordinasi baik di TPID Provinsi maupun TPID Kabupaten/Kota se-Provinsi Bali.

Optimalisasi forum strategis TPID baik pada tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota dalam pemeliharaan ekspektasi inflasi masyarakat perlu terus dilanjutkan dan ditingkatkan untuk dapat menjadi salah satu alternatif solusi. Pemerintah Provinsi Bali secara konsisten bersinergi dengan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali dalam rangka pengendalian inflasi di Bali. Forum koordinasi TPID baik tingkat Kabupaten/Kota dan tingkat Provinsi terus diperkuat melalui koordinasi rutin. Untuk komoditas beras, upaya stabilisasi harga secara langsung dilakukan oleh Perum Bulog Divre Bali melalui penyerapan gabah/beras serta melalui rangkaian Pasar Murah dan Operasi Pasar bekerjasama dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota. Selain beras, stabilisasi harga pangan dan langkah pengendalian juga difokuskan terhadap komoditas pangan strategis lainnya antara lain cabai rawit, cabai merah, bawang merah, bawang putih, gula, telur ayam ras, dan minyak goreng. Bentuk intervensi

secara tidak langsung yang telah dilakukan oleh TPID Provinsi Bali antara lain melalui pemantauan dan penyampaian harga barang kebutuhan pokok melalui PIHPS Provinsi Bali dengan sebutan SiGapura “Sistem Harga Pangan Utama dan Komoditas Strategis”

sebagai salah satu upaya pemantauan harga dan dalam rangka memberikan informasi baik pada tingkat produsen dan konsumen untuk menghindari informasi yang asimetris

Tabel 3.5 Kegiatan TPID Hingga Mei 2017

NO	TPID	KEGIATAN / TEMPAT	TANGGAL	KETERANGAN
<i>Focus Group Discussion</i>				
1	Provinsi Bali	Bank Indonesia	11 Januari 2017	FGD Optimalisasi Rumah Pangan Kita Diskusi bersama Bulog dan BNI
2	Provinsi Bali dan Kabupaten Klungkung	Kabupaten Klungkung	23 Februari 2017	FGD Pemanfaatan Subsidi Ongkos Angkut
<i>Rapat Koordinasi</i>				
3	Kabupaten Klungkung	Kabupaten Klungkung	10 Maret 2017	Rapat Koordinasi LPG 3 kg di Nusa Penida
4	Se-Provinsi Bali	Bank Indonesia	13 April 2017	Rapat Koordinasi Identifikasi Barang Kebutuhan Pokok Menjelang Hari Besar Keagamaan bersama Kementerian Perdagangan
<i>High Level Meeting</i>				
5	Kabupaten Buleleng	Kabupaten Buleleng	19 Januari 2017	<i>High Level Meeting</i>
6	Se-Provinsi Bali	Bank Indonesia	6 Maret 2017	<i>High Level Meeting</i>
7	Se-Provinsi Bali	Bank Indonesia	18 Mei 2017	<i>High Level Meeting</i>
<i>Rapat Teknis</i>				
8	Provinsi Bali	Kantor Pemerintah Provinsi Bali	20 Januari 2017	Rapat Teknis TPID
9	Provinsi Bali	Kantor Pemerintah Provinsi Bali	17 Mei 2017	Rapat Teknis TPID
<i>Pasar Murah</i>				
10	Denpasar dan Karangasem	Denpasar dan Karangasem	Januari 2017	10 kali pelaksanaan
11	Denpasar	Denpasar	Februari 2017	2 kali pelaksanaan
12	Denpasar, Buleleng, Gianyar, Badung, Tabanan, Bangli	Denpasar, Buleleng, Gianyar, Badung, Tabanan, Bangli	Maret 2017	22 kali pelaksanaan
13	Buleleng, Klungkung, Denpasar, Tabanan	Buleleng, Klungkung, Denpasar, Tabanan	April 2017	6 kali pelaksanaan

Sumber : Badan Pusat Statistik, diolah

BOKS B

MEMBANGUN PARIWISATA BERBASIS DESA

Berkembangnya destinasi wisata di daerah lain merupakan tantangan bagi pariwisata Bali. Menurunnya kualitas wisman juga mengindikasikan tendensi penurunan daya saing pariwisata di Provinsi Bali. Sepanjang tahun 2016 tingkat pengeluaran wisman hanya sebesar \$143,35/hari per orang. Hal ini menunjukkan penurunan jika dibandingkan dengan tahun 2015 sebesar \$143,92/hari per orang. Disamping itu, fokus pengembangan pariwisata yang berlokasi di Bali bagian selatan berdampak pada masalah kemacetan dan sampah.

Dengan kondisi tersebut, Provinsi Bali membutuhkan inovasi untuk mendorong perkembangan industri pariwisata. Salah satunya adalah dengan pengembangan desa wisata. Mengingat budaya merupakan daya tarik utama wisata Bali, menjadikan desa wisata berbasis budaya merupakan inovasi yang tepat.



Narasumber Seminar Desa Wisata

Oleh karena itu, pada tanggal 27 April 2017 KPwBI Provinsi Bali menggelar seminar Desa Wisata dengan tema “Membangun Daya Saing Pariwisata Berbasis Potensi Lokal”. Acara tersebut bekerja sama dengan Forum Komunikasi Desa Wisata Provinsi Bali (Forkom Dewi Bali). Bertempat di Grha Tirta Gangga, Gd KPwBI Provinsi Bali Lt. 2, seminar diikuti oleh sekitar 150 orang dari berbagai kalangan. Mulai dari asosiasi pariwisata, pelaku desa wisata hingga akademisi terlihat antusias mengikuti seminar tersebut.

Seminar Desa Wisata menghadirkan narasumber yang kompeten di bidangnya, antara lain Prof. Dr. Darma Putra (Kajian Pariwisata Unud) yang menyampaikan materi Desa Wisata sebagai Pariwisata Berbasis Masyarakat Model Bali. Narasumber lainnya I Ketut Budarma, Phd menyampaikan materi *Green Tourism* dalam Desa Wisata dan kaitannya dengan Pariwisata Berkelanjutan. Materi Peranan ASITA Bali dalam Pemasaran Desa Wisata di Bali disampaikan oleh Bagus Sudibya (Dewan Pembina DPD ASITA Bali). Selain itu ada I Gusti Agung Prana yang menyampaikan materi *Best Practice* Pengembangan Desa Wisata.

Kepala Divisi Advisory dan Pengembangan Ekonomi KPwBI Provinsi Bali, Azka Subhan A. menyampaikan bahwa pengembangan desa wisata bertumpu pada lembaga tradisional Bali, khususnya desa adat. “Dukungan dan partisipasi dari desa adat dalam upaya pengembangan desa wisata tersebut diharapkan dapat menjadikan sumber pertumbuhan

baru perekonomian khususnya dari industri pariwisata yang berasal dari desa serta dapat membangun kemandirian desa untuk dapat mengembangkan wilayahnya”, jelas Azka.



Sambutan Kepala Divisi Advisory Ekonomi dan Keuangan, Azka Subhan A.

Sementara itu, Kepala Bidang Strategi Pemasaran Kementerian Pariwisata Indonesia, Dadang Jatmika mengungkapkan desa wisata adalah suatu bentuk integrasi yang disajikan dalam suatu struktur kehidupan masyarakat yang menyatu dengan tata cara dan tradisi yang berlaku. “Melalui program desa wisata, masyarakat bisa dilibatkan secara aktif dalam penyediaan akomodasi berupa *homestay* atau *guesthouse*, kebutuhan konsumsi untuk wisatawan, pemandu wisata, penyediaan transportasi lokal, pertunjukan hiburan dan kesenian tradisional”, ujarnya.



Peserta Seminar Desa Wisata

Lebih lanjut Dadang menjelaskan pengembangan desa wisata di Indonesia dilakukan dengan prinsip pariwisata global yaitu *sustainable tourism development* atau pembangunan pariwisata yang berkelanjutan. “Oleh karena itu perlu partisipasi aktif pelaku pariwisata Indonesia dalam mensukseskan program pemerintah melalui sinergi yang harmonis dalam memajukan sektor pariwisata Indonesia”, ujarnya.

Halaman ini sengaja dikosongkan

STABILITAS KEUANGAN DAERAH, PENGEMBANGAN AKSES KEUANGAN DAN UMKM



BAB IV

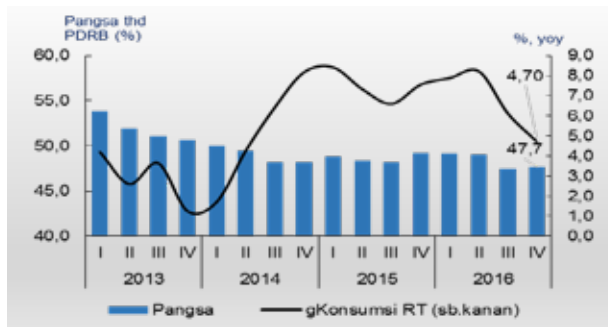
*Tenun Ikat Artha Dharma (Bali)



4.1. ASESMEN SEKTOR RUMAH TANGGA

4.1.1. Sumber Kerentanan dan Kondisi Sektor Rumah Tangga

Dalam sebuah sistem keuangan, rumah tangga merupakan obyek yang memiliki 2 (dua) fungsi yaitu sebagai penyedia dana dan sebagai penerima pendanaan dari institusi keuangan. Beberapa faktor yang mempengaruhi kondisi keuangan rumah tangga adalah tingkat pendapatan, tingkat pengangguran, tingkat konsumsi, dan kondisi pembiayaan/kredit oleh rumah tangga.



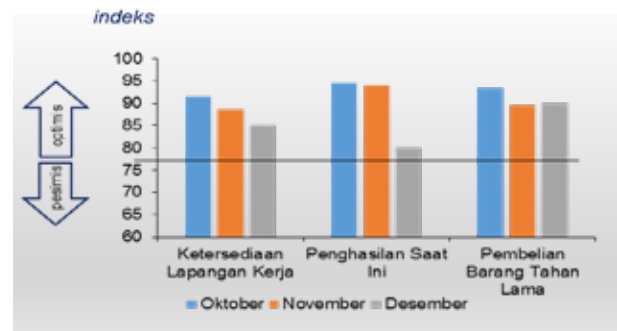
Sumber: BPS Provinsi Bali, diolah

Grafik 4.1 Kontribusi Konsumsi Rumah Tangga Terhadap PDRB Bali

Pada triwulan IV 2016, kinerja konsumsi rumah tangga yang melambat, turut menjadi faktor penyebab perlambatan ekonomi Bali. Dengan pangsa yang sedikit meningkat dari triwulan sebelumnya (naik dari 47,5% menjadi 47,7%), konsumsi rumah tangga tercatat mengalami perlambatan dari sebesar 6,11% (yoy) pada triwulan III 2016 menjadi sebesar 4,70% (yoy) di triwulan IV 2016. Perlambatan tersebut seiring dengan terjadinya kenaikan harga (inflasi) yang signifikan di sepanjang triwulan IV 2016, didorong oleh faktor musiman berupa perayaan hari raya keagamaan dan adanya penyesuaian tarif listrik di bulan Oktober 2016 pada ke-12 golongan tarif), sehingga membatasi kemampuan belanja masyarakat.

Perlambatan konsumsi rumah tangga tersebut, sejalan dengan menurunnya optimisme rumah tangga dalam melakukan kegiatan konsumsi. Hal ini tercermin dari rata-rata Indeks Keyakinan Konsumen

(IKK) selama triwulan IV 2016 yang tercatat sebesar 98,03, lebih rendah dibandingkan triwulan III 2016 yang sebesar 100,06. Sejalan dengan kondisi tersebut, dalam rentang waktu Oktober-Desember 2016, terjadi pelemahan keyakinan konsumen, sejalan dengan pendapatan masyarakat yang lebih rendah dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Meskipun demikian, konsumen rumah tangga masih menunjukkan optimisme terhadap potensi perbaikan ekonomi di masa yang akan datang, sebagaimana ditunjukkan oleh indeks ekspektasi konsumen (IEK) yang meningkat di triwulan IV 2016.



Sumber: Survei Konsumen KPw BI Bali, diolah

Grafik 4.2 Persepsi Rumah Tangga Bali Terhadap Ekonomi Saat Ini

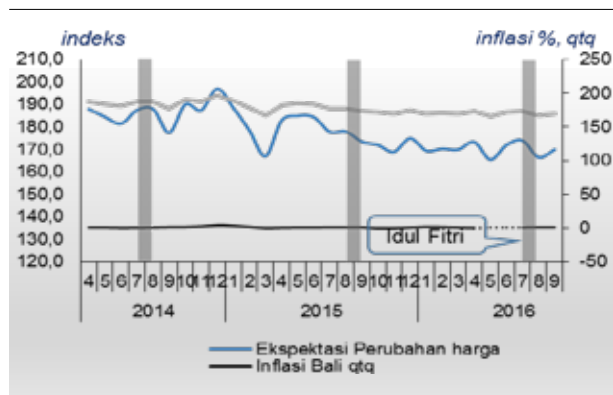
Optimisme konsumen rumah tangga di Bali pada triwulan IV 2016 terhadap kondisi penghasilan, menunjukkan sedikit penurunan jika dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Begitu pula untuk perkiraan 6 bulan ke depan, rumah tangga masih melihat adanya sedikit penurunan pendapatan/penghasilan. Sejalan dengan hal ini, optimisme rumah tangga terhadap ketersediaan lapangan kerja saat ini juga mengalami penurunan. Meskipun optimisme konsumen terhadap kondisi ekonomi dan ketenagakerjaan saat ini menurun, namun tingkat kepercayaan konsumen terhadap kondisi ekonomi dan ketersediaan lapangan kerja untuk 6 bulan mendatang sedikit membaik.

Sumber kerentanan lainnya adalah terkait dengan adanya potensi tekanan harga. Pada triwulan I 2017, diperkirakan rumah tangga masih akan menghadapi

tekanan harga bahan pangan dan makanan jadi, dikarenakan kondisi anomali cuaca yang masih akan berlanjut hingga akhir periode tersebut.

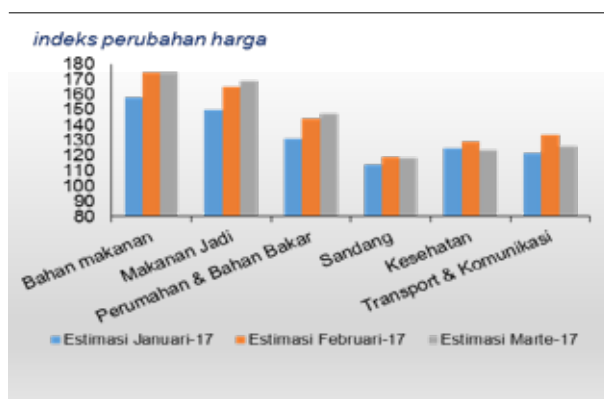
4.1.2. Kinerja Keuangan Rumah Tangga

Pada triwulan IV 2016, penggunaan keuangan rumah tangga masih didominasi oleh konsumsi sebesar 67%. Kondisi tersebut sejalan dengan perlambatan konsumsi rumah tangga pada triwulan IV 2016 yang turut menjadi faktor penyebab perlambatan ekonomi Bali secara keseluruhan. Perlambatan tersebut disebabkan oleh tendensi kenaikan harga (TTL) dan peningkatan harga sejumlah komoditas terkait faktor cuaca. Meskipun demikian, keyakinan rumah tangga untuk melakukan konsumsi serta dapat menutupi pembayaran cicilan hutang sedikit meningkat dari 19,7% pada triwulan III 2016, menjadi sebesar 20,7% pada triwulan IV 2016. Namun demikian, sebagai konsekuensinya, dana yang disisihkan untuk menabung cenderung menurun dari 15,7% menjadi 12,3% pada periode yang sama.



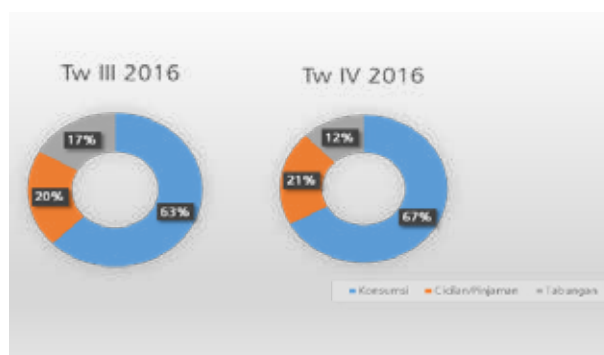
Sumber: Survei Konsumen KPw BI Bali, diolah

Grafik 4.3 Ekspektasi Perubahan Harga Oleh Rumah Tangga 3 Bulan Mendatang



Sumber: Survei Konsumen KPw BI Bali, diolah

Grafik 4.4 Ekspektasi Perubahan Harga 3 Bulan Mendatang Berdasarkan Komoditi



Sumber: Survei Konsumen KPw BI Bali, diolah

Grafik 4.5 Komposisi Pengeluaran Rumah Tangga Bali

Apabila dilihat berdasarkan pendapatannya, tingkat pengeluaran konsumsi yang tertinggi dilakukan oleh kelompok rumah tangga berpendapatan rendah (Rp 1-2 juta). Di lain sisi, semakin tinggi tingkat pendapatannya cenderung semakin kecil tingkat pengeluarannya untuk konsumsi.

Tabel 4.1 Komposisi Pengeluaran Rumah Tangga Berdasarkan Kategori Pengeluarannya Per Bulan

Penggunaan	Pengeluaran/bulan					
	Rp1 - 2 jt	Rp2,1 - 3 jt	Rp3,1 - 4 jt	Rp4,1 - 5 jt	>Rp5 jt	Rata-rata
Konsumsi	69,7%	68,9%	65,8%	66,1%	64,8%	67,0%
Cicilan/Pinjaman	21,0%	18,0%	21,3%	19,8%	23,5%	20,7%
Tabungan	9,4%	13,2%	12,9%	14,1%	11,7%	12,3%
Total	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

Tabel 4.2 Dana Rumah Tangga Untuk Membayar Cicilan dan Perubahannya Berdasarkan Pendapatan

Pengeluaran/ bln	Triwulan IV 2016			
	Debt Service Ratio (DSR)			
	0-10%	10%-20%	20%-30%	>30%
Rp1 - 2 jt	2,2%	4,0%	1,2%	1,8%
Rp2,1 - 3 jt	13,3%	10,4%	6,7%	5,7%
Rp3,1 - 4 jt	12,8%	6,7%	8,2%	4,7%
Rp4,1 - 5 jt	4,7%	2,2%	3,7%	3,5%
>Rp5 jt	3,2%	0,8%	1,8%	2,2%
Total	36,1%	24,2%	21,7%	18,0%

Pengeluaran/ bln	Perubahan Debt Service Ratio (DSR)*			
	0-10%	10%-20%	20%-30%	>30%
Rp1 - 2 jt	-0,8%	-9,1%	155,0%	-27,9%
Rp2,1 - 3 jt	-47,3%	-157,6%	244,6%	-47,5%
Rp3,1 - 4 jt	-33,5%	-204,1%	205,6%	55,8%
Rp4,1 - 5 jt	-0,8%	-252,6%	296,7%	-29,2%
>Rp5 jt	-53,0%	-238,8%	332,7%	-16,1%
Total	-34,0%	-157%	241,3%	-11,0%

TMP = Tidak Memiliki Pinjaman/Cicilan

* Perubahan triwulan IV 2016 dibandingkan triwulan III 2016

Sumber: Survei Konsumen KPw BI Bali, diolah

Tabel 4.3 Dana Rumah Tangga Untuk Menabung dan Perubahannya Berdasarkan Pendapatan

Pengeluaran/ bln	Triwulan IV 2016				
	Tabungan				TBM
	0-10%	10%-20%	20%-30%	>30%	
Rp1 - 2 jt	4,5%	2,2%	0,8%	0,2%	1,5%
Rp2,1 - 3 jt	17,1%	7,2%	3,4%	1,8%	6,6%
Rp3,1 - 4 jt	15,8%	8,1%	3,9%	1,2%	3,5%
Rp4,1 - 5 jt	6,4%	3,7%	1,8%	1,2%	1,0%
>Rp5 jt	4,2%	2,2%	0,7%	0,3%	0,7%
Total	48,1%	23,4%	10,6%	4,7%	13,3%

Pengeluaran/ bln	Perubahan Tabungan*				TBM
	0-10%	10%-20%	20%-30%	>30%	
Rp1 - 2 jt	46,9%	-8,5%	-60,3%	98,3%	-44,9%
Rp2,1 - 3 jt	-18,3%	-293,7%	554,5%	-18,9%	-44,1%
Rp3,1 - 4 jt	8,7%	-312,8%	663,2%	-0,8%	-5,6%
Rp4,1 - 5 jt	38,3%	-338,9%	756,4%	-43,3%	98,3%
>Rp5 jt	23,0%	-336,5%	1238,8%	-100,0%	73,5%
Total	7,8%	-284,8%	624,1%	-22,1%	-17,2%

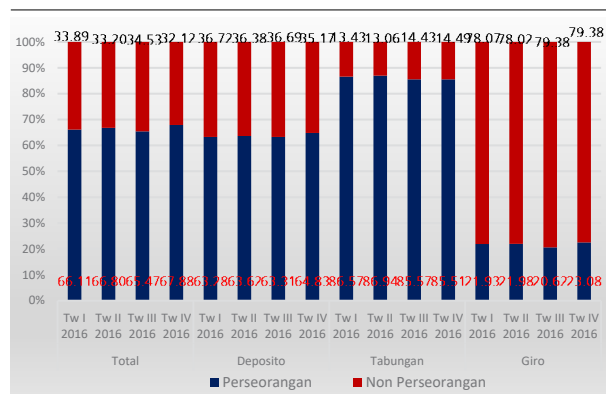
TMB = Tidak Menabung

* Perubahan triwulan IV 2016 dibandingkan triwulan III 2016

Sumber: Survei Konsumen KPw BI Bali, diolah

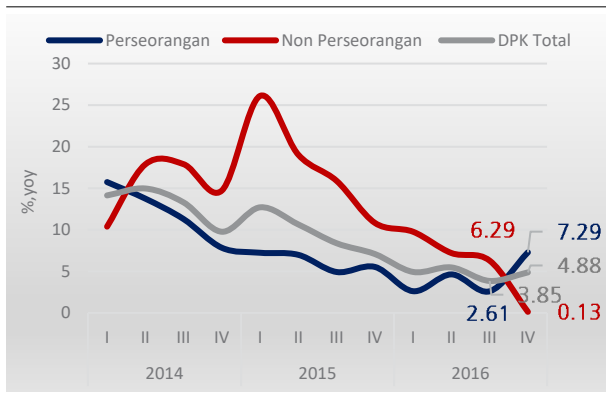
Jika ditilik dari perilaku berutang, terdapat penurunan risiko dari sisi kredit, karena secara agregat terjadi penurunan jumlah rumah tangga yang memiliki *debt service ratio* lebih dari 30% pendapatannya (DSR>30%). Pada triwulan IV 2016, jumlah rumah tangga dengan DSR>30% turun sebesar 11%, dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Institusi keuangan menilai bahwa rumah tangga dengan DSR>30%, memiliki risiko yang tinggi dan dapat menjadi penyebab kredit yang kurang lancar. Meskipun mengalami penurunan, terdapat peningkatan potensi risiko pada kelompok pendapatan tertinggi (Rp 3,1 – 4 juta). Pada kelompok pendapatan tersebut, peningkatan rumah tangga dengan DSR>30% mencapai 55,8%.

Di sisi lain, meskipun tidak terlalu tinggi, namun masih terdapat peningkatan risiko pada perilaku menabung. Hal ini, terlihat dari bertambahnya jumlah rumah tangga yang tidak dapat menabung sebesar 17,2%, jika dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Rumah tangga yang paling besar peningkatannya dalam hal tidak dapat menabung, berada pada kelompok pendapatan Rp 1-2 juta. Rumah tangga yang tidak dapat menabung ini, merupakan sumber risiko pada stabilitas sistem keuangan, karena dapat mengganggu likuiditas institusi keuangan dari sisi sumber dana. Meskipun demikian, pada kelompok tersebut juga terjadi penambahan rumah tangga yang menabung di atas 30% pendapatannya (tabungan>30%).



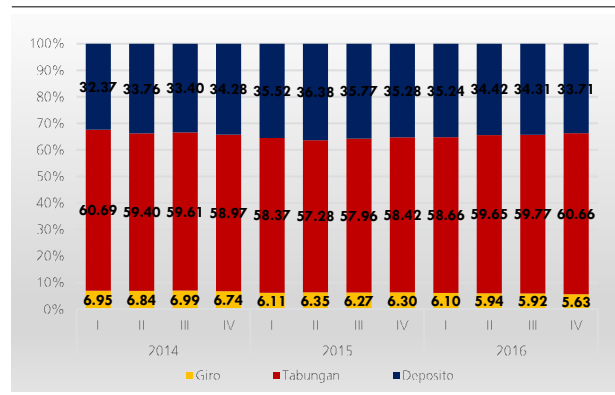
Sumber: LBU Bank Indonesia, diolah

Grafik 4.6 Komposisi DPK Bali



Sumber: LBU Bank Indonesia, diolah

Grafik 4.7 Pertumbuhan Dana Pihak Ketiga Perseorangan Bali



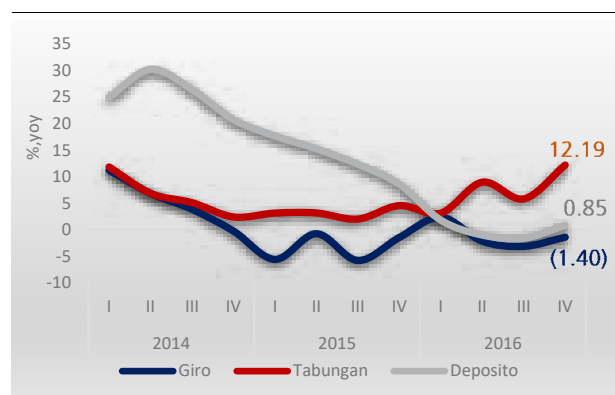
Sumber: LBU Bank Indonesia, diolah

Grafik 4.8 Komposisi DPK Perseorangan di Bali

4.1.3. Dana Pihak Ketiga Perseorangan Di Perbankan

Sektor rumah tangga masih mendominasi dana pihak ketiga (DPK) yang berada di perbankan Bali. Hal ini, tercermin dari pangsa DPK perseorangan pada triwulan IV 2016 yang mencapai 67,88% dari keseluruhan DPK di Bali. Seiring dengan perlambatan kinerja konsumsi RT, pertumbuhan DPK perseorangan di perbankan dalam bentuk tabungan mengalami peningkatan dari sebesar 5,81% (yoy) di triwulan III 2016, menjadi sebesar 12,19% (yoy) pada triwulan IV 2016. Hal ini menunjukkan kecenderungan preferensi rumah tangga dalam melakukan penempatan masih didominasi pada fasilitas tabungan.

Pada triwulan IV 2016, porsi DPK dalam bentuk deposito yang dilakukan oleh nasabah perseorangan mencapai 33,71%, sedikit lebih rendah dibandingkan dengan triwulan III 2016 yang sebesar 34,31%. Semetara itu, porsi tabungan perseorangan pada perbankan Bali mencapai 60,66% dibandingkan dengan total keseluruhan DPK perseorangan. Kondisi ini, sejalan dengan penurunan kinerja konsumsi masyarakat sehingga masyarakat cenderung menyimpan dana dalam bentuk yang mudah dicairkan yaitu tabungan. Sementara itu, giro memiliki porsi sebesar 5,63% pada triwulan IV 2016, sedikit lebih rendah dibandingkan dengan triwulan III 2016 yang sebesar 5,92%.



Sumber: LBU Bank Indonesia, diolah

Grafik 4.9 Pertumbuhan DPK Perseorangan Bali Tiap Jenis Penempatan

Dilihat dari jumlah rekening DPK perseorangan, pada triwulan IV 2016 terdapat penambahan jumlah rekening sebesar 5,20% dibandingkan triwulan sebelumnya. Penambahan rekening tersebut, terjadi pada hampir seluruh kategori kecuali simpanan bernilai sedang (>100 juta – 500 juta) yang terkontraksi lebih dalam sebesar 2,01%, dibandingkan triwulan sebelumnya yang hanya terkontraksi sebesar 0,71%. Kondisi ini terjadi hampir di seluruh kota/kabupaten yang ada di Bali. Adapun penambahan rekening simpanan terbesar, terjadi di Kota Denpasar (bertambah sebesar 8,68%) dan penambahan rekening terendah terjadi di Kabupaten Gianyar (kontraksi 1,15%).

Tabel 4.4 Komposisi Jumlah Rekening Perseorangan Per Nilai Penempatan di Bali

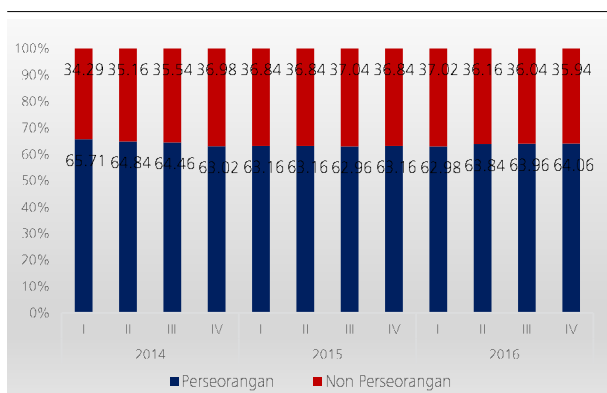
DAERAH		Jumlah	<10 JT	>10 JT - 100 JT	>100JT - 500JT	>500JT - 1 M	>1 M - 2 M	>2 M - 5M	>5M - 10M	>10M -15M	>15M - 20M	>20M
Kab. Buleleng	Rek	311.388	269.397	36.674	4.751	260	134	60	8	3	2	2
	Δ%	2,48	1,79	8,97	-1,23	7,00	26,42	42,86	60,00		0,00	-33,33
Kab. Jembrana	Rek	153.487	135.051	16.751	1.630	26	15	13	1	0	0	0
	Δ%	1,28	0,81	4,39	7,80	13,04	0,00	44,44	-66,67			
Kab. Tabanan	Rek	183.737	151.541	28.794	3.236	77	65	24	0	0	0	0
	Δ%	0,85	-0,10	5,46	6,55	-3,75	32,65	20,00				
Kab. Badung	Rek	428.545	344.290	68.071	11.731	1.359	653	325	35	17	6	6
	Δ%	0,78	0,32	2,97	2,03	2,80	8,47	3,17	-36,36	21,43	20,00	100,00
Kab. Gianyar	Rek	182.310	150.375	27.747	3.904	139	108	35	0	1	0	0
	Δ%	-1,15	-1,93	2,56	3,55	3,73	25,58	-18,60		0,00		
Kab. Klungkung	Rek	80.892	66.489	12.748	1.524	78	48	5	0	0	0	0
	Δ%	0,38	-1,74	11,54	11,49	2,63	6,67	-16,67		-100,00		
Kab. Bangli	Rek	72.365,00	60.864,00	10.430,00	1.035,00	19,00	16,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Δ%	-0,54	-0,91	0,41	13,24	46,15	-5,88	0,00				
Kab. Karangasem	Rek	138.292,00	115.138,00	20.807,00	2.254,00	40,00	46,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Δ%	1,31	0,27	6,74	6,98	37,93	17,95	-22,22				
Kota Denpasar	Rek	2.061.188,00	1.740.267,00	246.719,00	55.746,00	5.146,00	2.733,00	1.692,00	184,00	24,00	14,00	12,00
	Δ%	8,68	9,88	3,62	-4,81	2,29	12,10	7,84	30,50	0,00	40,00	9,09
PROVINSI BALI	Rek	3.612.204,00	3.033.412,00	468.741,00	85.811,00	7.144,00	3.818,00	2.162,00	228,00	45,00	22,00	20,00
	Δ%	5,20	5,53	4,27	-2,01	2,78	12,39	7,35	11,76	12,50	29,41	17,65

Rek = Jumlah rekening; D % = Perubahan jumlah rekening pada triwulan III 2016 dibandingkan dengan triwulan II 2016

Sumber: LBU Bank Indonesia, diolah

4.1.4. Kredit Perbankan Pada Sektor Rumah Tangga

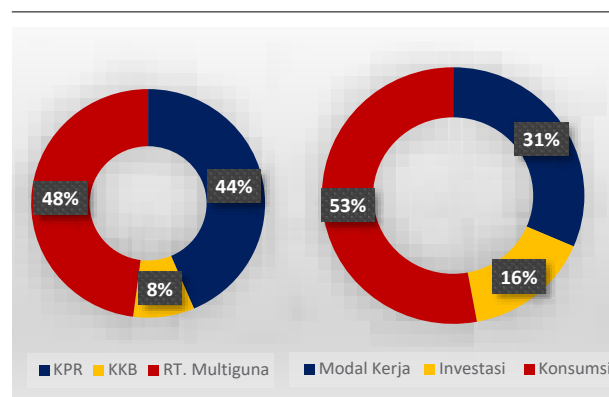
Dari sisi kredit perbankan, rumah tangga di Bali mendominasi penyaluran kredit. Hal ini terlihat dari pangsa kredit untuk perseorangan yang mencapai 64,06% dari keseluruhan kredit yang direalisasikan untuk daerah ini pada triwulan IV 2016. Sebagian besar kredit perseorangan tersebut digunakan untuk konsumsi yaitu sebesar 53%, sedangkan sisanya digunakan untuk kegiatan produktif seperti untuk modal kerja dan investasi sebesar masing-masing 31% dan 16%.



Sumber: LBU Bank Indonesia, diolah

Grafik 4.10 Komposisi Kredit Perseorangan dan Non Perseorangan

Kredit konsumsi oleh perseorangan digunakan untuk berbagai keperluan. Paling besar adalah kredit kepemilikan rumah (KPR) yang mencapai pangsa sebesar 44% dari keseluruhan kredit konsumsi perseorangan. Penggunaan kedua terbesar adalah kredit multiguna yang mencapai pangsa 48%. Sementara itu kredit kepemilikan kendaraan bermotor (KKB) masih relatif kecil sebesar 8%.



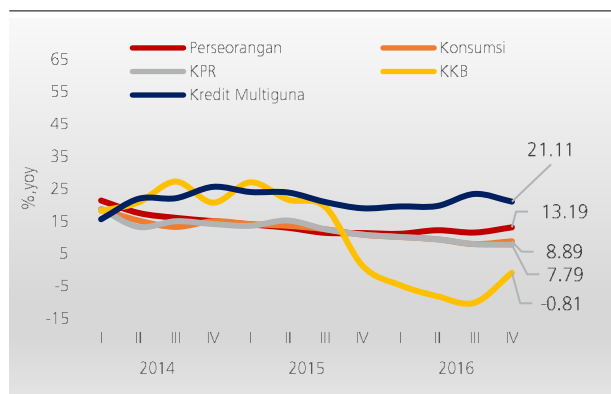
Sumber: LBU Bank Indonesia, diolah

Grafik 4.11 Komposisi Kredit Konsumsi dan Komposisi Kredit

Dari sisi pertumbuhan kreditnya, kredit perseorangan tumbuh sebesar 13,19% (yoy) pada triwulan IV 2016, lebih tinggi daripada periode sebelumnya yang tumbuh 11,57% (yoy). Peningkatan kredit

perseorangan tersebut masih didorong oleh peningkatan kredit multiguna. Sementara itu, kredit kepemilikan kendaraan bermotor masih mengalami kontraksi sebesar -0,81% (yoy). Kontraksi tersebut sedikit menurun dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang tercatat sebesar -10,07% (yoy). Sejalan dengan perkembangan tersebut, kredit kepemilikan rumah (KPR) turut menunjukkan tren melambat sejak awal tahun 2014. Pada triwulan III 2016, KPR hanya tumbuh sebesar 8,01% (yoy).

Dilihat dari sisi tingkat suku bunga, perkembangan suku bunga kredit perseorangan menunjukkan arah yang relatif stabil dan mulai mengarah ke level yang lebih rendah. Pada periode triwulan IV 2016, suku bunga tertimbang kredit perseorangan di Bali mencapai 12,49% per tahun, lebih rendah daripada triwulan sebelumnya yang mencapai 12,68% per tahun.



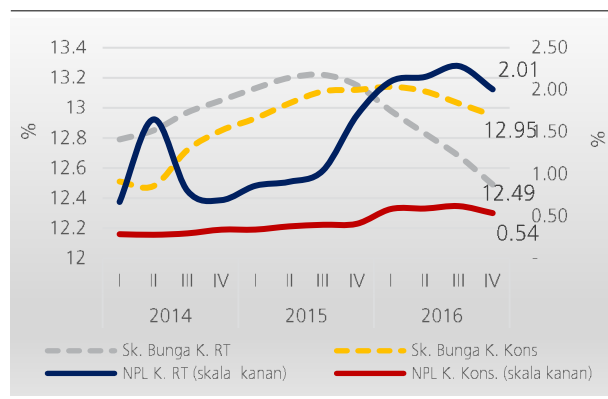
Sumber: LBU Bank Indonesia, diolah

Grafik 4.12 Pertumbuhan Kredit Perseorangan di Bali

Tabel 4.5 Penyaluran Kredit Perseorangan Secara Spasial Posisi Triwulan IV 2016

Daerah	Kredit (Rp Miliar)	Pangsa %	JUMLAH REKENING			
			KPR	KKB	Peralatan	Multiguna
Kab. Buleleng	6.178	10,88	3.630	3.879	1.353	19.283
Kab. Jembrana	2.459	4,33	5.643	1.710	648	5.231
Kab. Tabanan	5.583	9,83	5.962	3.377	759	16.750
Kab. Badung	9.794	17,24	6.539	4.925	989	22.921
Kab. Gianyar	4.844	8,53	3.320	4.895	249	11.444
Kab. Klungkung	1.797	3,16	299	759	82	6.963
Kab. Bangli	1.795	3,16	4.339	829	77	2.946
Kab. Karangasem	2.866	5,05	1.618	1.328	129	9.441
Kota Denpasar	21.484	37,82	22.316	21.720	1.803	42.369
PROVINSI BALI	56.800	100,00	53.666	43.422	6.089	137.348

Sumber: LBU Bank Indonesia, diolah



Sumber: LBU Bank Indonesia, diolah

Grafik 4.13 NPL dan Suku Bunga Kredit Rumah Tangga & Kredit Konsumsi di Bali

Dari sisi risikonya, risiko kredit rumah tangga di triwulan IV 2016 masih menunjukkan tekanan yang minimal. Hal ini tercermin dari NPL kredit perseorangan yang berada pada level 2,01%, lebih rendah dari triwulan sebelumnya yang mencapai 2,28%. Bahkan NPL pada kredit konsumsi perseorangan hanya berada pada level 0,54%. Secara spasial, kredit perseorangan masih terkonsentrasi di daerah Bali Selatan, yaitu Kota Denpasar, dengan pangsa sebesar 37,82%, diikuti oleh penyaluran di Kabupaten Badung dengan pangsa sebesar 17,24%.

Kredit Kepemilikan Rumah

Masih berlanjutnya perlambatan pertumbuhan KPR di Bali, menambah tekanan risiko pada pelaku usaha di bidang konstruksi perumahan dan penjualan *real estate*. Penjualan rumah baru yang masih rendah, dapat menyebabkan tekanan pada kondisi keuangan

Tabel 4.6 Pertumbuhan dan NPL KPR di Bali

Jenis KPR	Pangsa %	Growth (%.yoy)			NPL(%)		
		TW II-16	TW III-16	TW IV-16	TW II-16	TW III-16	TW IV-16
RT. KPR sd 21	22,33	-5,43	-17,41	-21,87	0,24	0,37	0,25
RT. KPR sd 70	32,33	6,79	-0,10	-1,22	1,24	1,30	1,35
RT. KPR 70+	38,96	6,52	0,09	-0,80	2,01	2,45	1,86
RT. KPA sd 21	0,35	-5,07	-5,92	-12,39	0,00	0,00	0,00
RT. KPA sd 70	0,92	-0,52	-5,43	-9,64	19,06	16,73	20,53
RT. KPA 70+	0,41	-27,11	-27,44	-26,13	4,04	4,86	4,07
RT. Ruko	4,71	11,06	19,88	14,11	0,89	0,82	1,12
KPR	100	3,30	-3,99	-5,92	1,45	1,67	1,49

*Lokasi Proyek

Sumber: LBU Bank Indonesia, diolah

pelaku usaha konstruksi dan *real estate*. Hal ini juga tercermin dari melambatnya kinerja lapangan usaha *real estate* (PDRB) pada triwulan IV 2016, yang hanya tumbuh sebesar 2,77% (yoy) dari triwulan sebelumnya yang sebesar 4,52% (yoy). Dari jenis KPR-nya, perlambatan pertumbuhan di triwulan IV 2016 terjadi pada hampir semua jenis KPR, terutama KPA dengan tipe kecil (s.d.T.21) dan tipe besar (>T.70). Selain itu, permintaan untuk KP Ruko, meskipun tumbuh positif namun sedikit melambat dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Tercatat permintaan ruko pada triwulan IV sebesar 24,53%, lebih lambat dari triwulan sebelumnya yang mencapai 27,01% (yoy). Perlambatan permintaan KP Ruko, salah satunya dipengaruhi oleh penurunan optimisme konsumen dalam hal ini pelaku usaha, terhadap perkiraan perkembangan kegiatan usaha.

Darisisi risiko, perilaku rumah tangga dalam melakukan pembayaran cicilan pemilikan rumah masih terjaga, meskipun terdapat potensi peningkatan tekanan. Pada triwulan IV 2016, NPL gross KPR mencapai 1,37% sedikit menurun dari triwulan sebelumnya yang mencapai 1,62%. Risiko kredit yang perlu mendapatkan perhatian adalah pada penyaluran KPA tipe sedang (T.22 s.d. T.70) yang telah melampaui *threshold* 5%, tercatat sebesar 31,38%.

Kredit Kepemilikan Kendaraan Bermotor

Pertumbuhan Kredit kendaraan bermotor (KKB) di Bali pada triwulan IV 2016 masih berkontraksi sebesar

0,81% (yoy), sedikit meningkat triwulan sebelumnya berkontraksi 10,07% (yoy). Dilihat dari jenis kendaraan yang dibeli, kendaraan roda enam mengalami kontraksi terbesar yaitu mencapai 33,72% (yoy) dari triwulan sebelumnya yang tumbuh positif sebesar 5,52% (yoy). Selain itu, pertumbuhan kredit kendaraan roda dua juga masih mengalami kontraksi di triwulan IV 2016 sebesar 9,13% (yoy), sedikit meningkat dari triwulan sebelumnya yang berkontraksi hingga 15,51% (yoy). Sementara itu, pembiayaan pembelian kendaraan roda empat (mobil) tumbuh positif sebesar 0,52% (yoy) dari triwulan sebelumnya yang berkontraksi sebesar 10,21% (yoy).

Penurunan kredit kepemilikan kendaraan bermotor tersebut sejalan dengan penurunan pertumbuhan pendaftaran kendaraan baru di triwulan IV 2016. Pada periode laporan tercatat pendaftaran pertumbuhan kendaraan baru berkontraksi sebesar 14,11% (yoy) dari 12,83% (yoy) pada triwulan sebelumnya.

Dari sisi risiko kredit, meskipun pertumbuhan KKB mengalami kontraksi namun NPL gross kredit ini relatif rendah yaitu pada kisaran 0,51%, cenderung stabil dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang tercatat sebesar 0,57%. KKB mobil mencatat NPL yang sangat rendah yaitu sebesar 0,44%. Sementara NPL tertinggi dicatat oleh kendaraan roda dua (motor) yang tercatat sebesar 1,73%, lebih rendah dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang sebesar 2,34% dan masih di bawah *threshold* 5%.

Tabel 4.7 Pertumbuhan dan NPL KKB di Bali

Jenis KKB	Pangsa %	Growth (% yoy)			NPL (%)		
		TW II-16	TW III-16	TW IV-16	TW II-16	TW III-16	TW IV-16
Mobil	91,95	-6,96	-10,21	0,52	0,51	0,47	0,44
Sepeda Motor	4,97	-12,83	-15,51	-9,13	2,74	2,34	1,73
Truk	2,00	-46,14	5,52	-33,72	1,62	1,13	1,35
lainnya	1,08	-4,01	6,04	-1,11	0,13	0,14	0,04
KKB	100	-8,08	-10,07	-0,81	0,64	0,57	0,51

*Lokasi Proyek

Sumber: LBU Bank Indonesia, diolah

Kredit Multiguna

Besarnya penggunaan kredit konsumsi perseorangan secara multiguna menunjukkan bahwa kebutuhan pembiayaan rumah tangga masih cukup besar, di luar kebutuhan untuk memiliki rumah dan kendaraan bermotor maupun peralatan rumah tangga. Hal ini terjadi karena pengajuan kredit multiguna relatif mudah dengan menggunakan jaminan/agunan yang dimiliki oleh rumah tangga. Selain itu penggunaan dana yang diterima dapat secara leluasa digunakan oleh rumah tangga dalam melakukan aktivitas konsumsi seperti merenovasi rumah, biaya pernikahan, biaya pendidikan, biaya pengobatan, maupun pembelian barang berharga/elektronik, dan bahkan dapat digunakan untuk modal usaha.

Pada triwulan IV 2016, kredit multiguna tumbuh sebesar 21,11% (yoy), sedikit melambat dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 13,49% (yoy). Jika dilihat dari pangsa berdasarkan kelompok besar pinjaman dan jangka waktu kreditnya, kredit multiguna didominasi oleh kredit kelompok pinjaman > Rp 100 juta s.d Rp 500 juta dengan jangka waktu lebih dari 10 tahun yang mencapai 64,02% dari keseluruhan nominal kredit multiguna. Selain itu, dari jumlah rekening pada kelompok pinjaman >10 tahun, kelompok pinjaman >Rp100 juta s.d Rp500 juta juga memiliki pangsa terbesar yaitu sebesar 47,54%.

Dari sisi risiko kredit, kredit rumah tangga untuk fasilitas multiguna berada dalam kondisi dengan risiko yang minimal. Di triwulan IV 2016, NPL kredit

Tabel 4.8 Komposisi Kredit Multiguna Posisi Triwulan IV 2016

Besarnya Pinjaman	Berdasarkan Nominal (% pangsa)						Berdasarkan Jumlah Rekening (%)					
	Jangka Waktu						Jangka Waktu					
	<1 tahun	1-3 tahun	>3-4 tahun	>4-10	>10 tahun	Jumlah	<1 tahun	1-3 tahun	>3-4 tahun	>4-10	>10 tahun	Jumlah
<10 JT	10,16	4,26	1,78	3,86	0,35	0,59	58,97	29,40	10,92	23,04	5,16	10,15
>10 JT - 50 JT	33,14	34,74	29,60	36,64	3,62	7,12	34,07	55,75	61,70	67,14	17,64	32,62
>50 JT - 100 JT	13,94	18,98	34,05	19,37	15,40	15,64	4,54	10,64	20,24	6,11	27,99	21,97
>100JT - 500JT	17,89	18,44	27,96	31,63	64,02	60,32	2,07	3,76	6,94	3,65	47,54	34,03
>500JT - 1 M	3,96	2,64	3,13	0,95	5,43	5,18	0,23	0,12	0,14	0,03	1,03	0,75
>1 M	20,91	20,95	3,49	7,54	11,19	11,15	0,13	0,33	0,07	0,03	0,65	0,48
Jumlah	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber: LBU Bank Indonesia, diolah

Tabel 4.9 NPL Kredit Multiguna

Besarnya Pinjaman	Jangka Waktu					
	<1 tahun	1-3 tahun	>3-4 tahun	>4-10	>10 tahun	Jumlah
<10 JT	0,35	5,27	4,02	2,56	14,28	9,23
>10 JT - 50 JT	0,19	0,82	1,49	1,70	1,90	1,22
>50 JT - 100 JT	0,00	0,68	0,32	0,03	0,08	0,11
>100JT - 500JT	0,00	0,74	0,00	0,00	0,19	0,19
>500JT - 1 M	0,00	0,00	0,00	0,00	1,65	1,59
>1 M	0,00	0,00	0,00	0,00	2,02	1,86
Jumlah	0,10	0,77	0,62	0,73	0,57	0,57

Sumber: LBU Bank Indonesia, diolah

multiguna tercatat hanya sebesar 0,57% dan NPL pada konsentrasi kelompok terbesar hanya sebesar 0,19%. Adapun kredit multiguna dengan risiko kredit terbesar, berada pada pembiayaan dengan nominal di bawah Rp10 juta, NPL tercatat sebesar 9,23%.

Meskipun secara jumlah rekening, pangsa hanya sebesar 10,15% dari keseluruhan rekening multiguna, namun karena jumlah nominalnya hanya sebesar 0,59%, maka risiko kredit tersebut masih berdampak minor pada institusi keuangan di Bali. Kondisi ini menunjukkan bahwa eksposur keuangan rumah tangga masih berdampak minimal pada institusi keuangan secara keseluruhan.

4.2. ASESMEN SEKTOR KORPORASI

4.2.1. Sumber Kerentanan dan Kondisi Sektor Korporasi

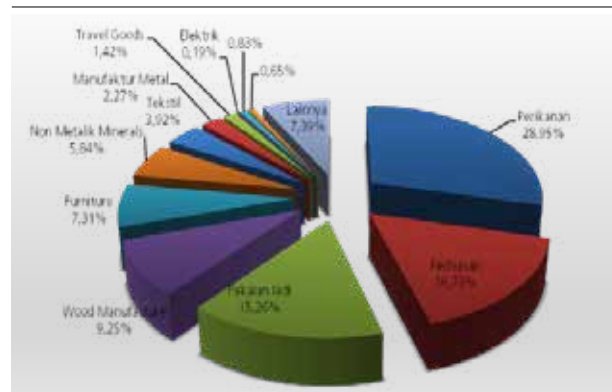
Sejalan dengan perlambatan ekonomi Bali di triwulan IV 2016, beberapa kinerja lapangan usaha utama di Provinsi Bali juga mengalami perlambatan. Berdasarkan rilis data BPS, tercatat kinerja sejumlah lapangan usaha utama seperti akmamin, Pertanian, kehutanan dan perikanan, konstruksi, transportasi dan pergudangan serta industri pengolahan tumbuh melambat di triwulan laporan dibandingkan triwulan sebelumnya.

Bila ditinjau dari sisi penggunaan, pertumbuhan ekonomi Bali ditriwulan laporan, terutama didorong oleh peningkatan kinerja ekspor luar negeri, sedangkan komponen lainnya seperti konsumsi rumah tangga tumbuh melambat, bila dibandingkan dengan triwulan sebelumnya.

Dari sisi ekspor, peningkatan kinerja ekspor terutama didorong oleh komoditas perikanan yang masih mendominasi ekspor Provinsi Bali dengan pangsa sebesar 28,95%. Komoditas perikanan, masih mencatat pertumbuhan nilai ekspor yang meningkat sejak awal tahun 2016, meskipun menghadapi tantangan untuk dapat tumbuh lebih tinggi. Serupa

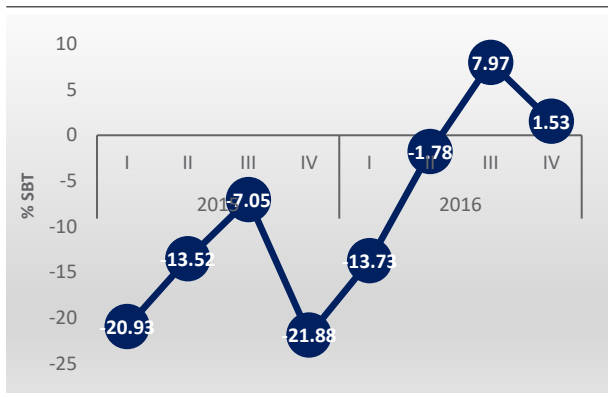
dengan kondisi triwulan sebelumnya, tantangan pada sektor perikanan datang dari penerapan regulasi larangan *transshipment* atau larangan pemindahan muatan di tengah laut serta moratorium penggunaan kapal ikan eks-asing.

Sementara itu, ekspor jasa pada triwulan IV 2016 mengalami perlambatan. Ekspor jasa luar negeri tumbuh sebesar 17,94% (yoy), sedikit lebih rendah



Grafik 4.14 Komposisi Ekspor Bali IV 2016

dibandingkan dengan triwulan III 2016 yang tercatat sebesar 18,23% (yoy). Perlambatan kinerja ekspor jasa luar negeri, juga tercermin oleh menurunnya TPK baik dari hotel berbintang maupun tidak berbintang berdasarkan hasil FGD dengan pelaku pariwisata. Penurunan TPK ini, terjadi akibat terus bertambahnya jumlah kamar hotel berbintang, sementara dari sisi wisman yang berkunjung mengalami penurunan kualitas, sehingga tingkat TPK cenderung menurun. Tercatat pada triwulan IV 2016, TPK bintang menurun dari sebesar 70,43% pada triwulan III 2016, menjadi sebesar 60,66% di triwulan IV 2016. Sementara itu, TPK non bintang menurun dari sebesar 39,02% di triwulan III 2016, menjadi sebesar 32,71% pada triwulan IV 2016. Kondisi ini membawa risiko terhadap perkembangan perhotelan di Bali, yang kemudian dapat membawa dampak *spillover* terhadap sektor lain yang berhubungan dengan industri pariwisata seperti akmamin, perdagangan besar dan eceran serta transportasi.



Sumber: SKDU KPw BI Bali, diolah

Grafik 4.15 Kondisi Kegiatan Usaha di Bali

4.2.2. Kinerja Korporasi

Meskipun perekonomian Bali tumbuh melambat pada triwulan IV 2016, namun tidak semua lapangan usaha menunjukkan perlambatan kinerja pada periode tersebut. Berdasarkan hasil *liaison* kepada pelaku usaha korporasi di Bali pada triwulan IV 2016, perlambatan terjadi hanya pada sektor industri pengolahan.

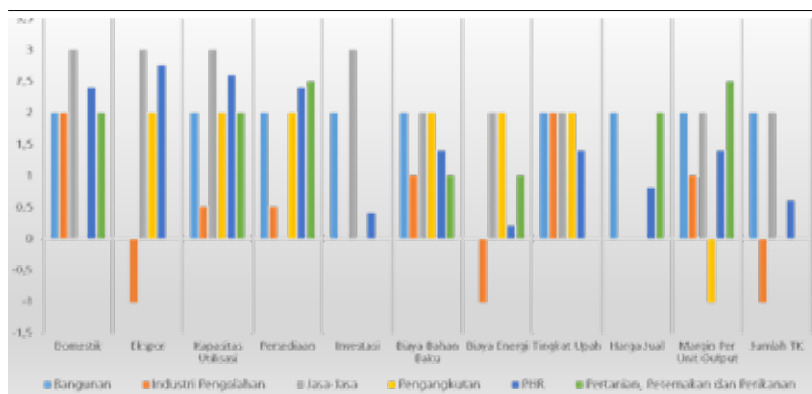
Selain kinerja industri pengolahan, perlambatan juga terlihat pada aktivitas investasi korporasi. Perlambatan investasi tercermin dari nilai *likert* sebesar 0,58 poin di triwulan IV 2016, lebih rendah dibanding triwulan III 2016 yang tercatat sebesar 1,06 poin. Perlambatan tersebut terjadi, karena sebagian besar korporasi mengkonfirmasi tidak melakukan investasi di tahun berjalan, mengingat kapasitas yang tersedia masih mampu untuk mendukung produksi ataupun

mengakomodir peningkatan permintaan. Selain itu, terdapat korporasi pada subsektor perhotelan yang mengkonfirmasi nilai investasi yang lebih rendah dibanding tahun sebelumnya.

Biaya

Kenaikan biaya perusahaan mampu diminimalkan pada triwulan IV 2016, dibanding triwulan sebelumnya. Biaya energi dan tenaga kerja cenderung menurun, tercermin dari nilai *likert* sebesar 0,42 poin dan 1,42 poin di triwulan berjalan, lebih rendah dibanding triwulan III 2016 yang tercatat sebesar 1,18 poin dan 1,76 poin. Pada sebagian besar responden, penurunan biaya energi terjadi sebagai dampak dari upaya perusahaan untuk melakukan efisiensi energi dari tahun ke tahun. Selain itu, penurunan biaya energi juga terjadi sebagai dampak penurunan tarif listrik oleh pemerintah.

Sementara itu, penurunan biaya tenaga kerja terjadi seiring dengan upaya perusahaan untuk melakukan efisiensi tenaga kerja. Strategi yang ditempuh perusahaan adalah dengan menawarkan pensiun dini kepada pegawai perusahaan, dan tidak melakukan penggantian bagi pegawai yang keluar karena pensiun ataupun karena *resign*. Dengan demikian, perusahaan dapat menekan kenaikan biaya tenaga kerja yang disebabkan oleh kenaikan UMK setiap tahun.



Sumber: Liaison KPw BI Bali diolah

Grafik 4.16 Kinerja Korporasi di Bali Berdasarkan Liaison Triwulan IV 2016

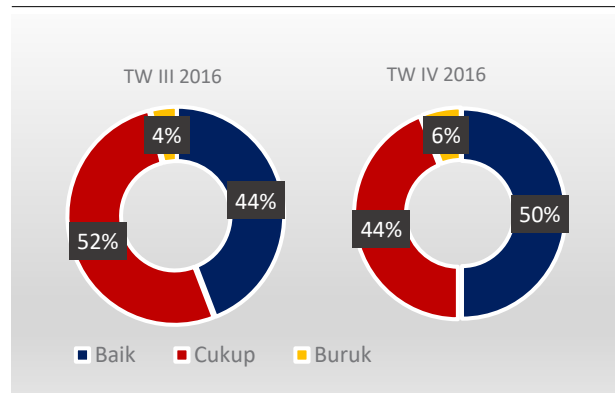
Di sisi lain, hanya biaya bahan baku yang terkonfirmasi mengalami kenaikan pada triwulan IV 2016, dibanding triwulan III 2016. Kenaikan ini tercermin dari nilai *likert* sebesar 1,42 poin di triwulan IV 2016, lebih tinggi dibanding triwulan sebelumnya yang tercatat sebesar 1,24 poin. Kenaikan biaya bahan baku, dikonfirmasi oleh seluruh sektor ekonomi *liaison* pada triwulan IV 2016. Meskipun mengalami kenaikan, seluruh responden mengkonfirmasi kenaikan tersebut masih dalam level normal atau wajar. Peningkatan biaya bahan baku pada sebagian besar responden secara umum terjadi seiring dengan peningkatan harga dari supplier perusahaan. Pada sektor PHR, industri pengolahan, dan jasa-jasa, peningkatan biaya bahan baku secara umum didorong oleh peningkatan biaya bahan baku F&B dan amenities dan nilai kontrak dari supplier/rekanan perusahaan.

Tendensi peningkatan biaya bahan baku turut terkonfirmasi dari peningkatan growth harga daging Sapi berdasarkan hasil Survei Pemantauan Harga (SPH) KPw BI Provinsi Bali, yaitu dari 12,10%(yoy) di triwulan III 2016 menjadi 19%(yoy) pada triwulan IV 2016 (grafik 20). Kenaikan biaya bahan baku sulit ditekan oleh perusahaan seiring dengan upaya responden untuk tetap menjaga kualitas produk barang ataupun jasa. Sebagai contoh, daging sapi impor tidak mungkin digantikan oleh daging sapi lokal untuk F&B di hotel. Contoh lainnya adalah lokasi-lokasi pariwisata yang terkenal di Bali tidak mungkin digantikan oleh lokasi lain oleh perusahaan *travel agent* sehingga perusahaan akan tetap melakukan kerjasama meskipun terdapat kenaikan harga dari rekanan.

Kondisi likuiditas keuangan korporasi

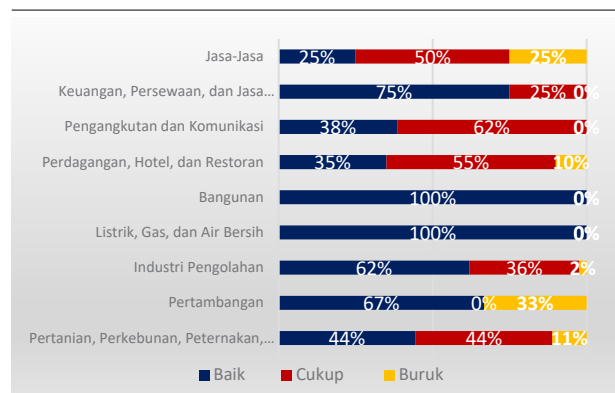
Secara umum, dari hasil SKDU, kondisi keuangan korporasi dari sisi likuiditas menunjukkan posisi yang lebih likuid. Pada triwulan IV 2016, pangsa korporasi yang memiliki kondisi likuiditas baik mencapai 50%, meningkat daripada triwulan sebelumnya yang hanya sebanyak 44% dari total responden korporasi di

Bali. Meskipun demikian, pangsa korporasi dengan kondisi likuiditas yang buruk mengalami kenaikan dari sebesar dari 4% menjadi 6%.



Sumber: SKDU KPw BI Bali, diolah

Grafik 4.17 Perkembangan Kondisi Likuiditas Keuangan Korporasi di Bali



Sumber: SKDU KPw BI Bali, diolah

Grafik 4.18 Kondisi Likuiditas Keuangan Korporasi Berdasarkan Sektoral

Jika dilihat secara sektoralnya, korporasi yang memiliki kondisi likuiditas yang baik adalah korporasi yang bergerak di sektor Bangunan, dan Listrik, Gas dan Air Bersih. Jumlah korporasi yang memiliki likuiditas keuangan yang baik di sektor tersebut mencapai 100%.

Beban Angsuran Hutang Korporasi

Dari sisi kemampuan membayar hutang, korporasi di Bali secara umum memiliki risiko yang relatif terjaga. Kondisi ini tercermin dari SKDU pada triwulan IV 2016 yang menunjukkan hanya terdapat 14% korporasi yang menyatakan bahwa beban angsuran perbankan ke depan akan semakin berat. Persepsi tersebut terutama berasal dari korporasi pertanian dikarenakan

Tabel 4.10 Perkiraan Beban Angsuran Terhadap Pendapatan Korporasi 6 Bulan Mendatang

Sektor	Memiliki Kredit Bank (% thd total responden)	Perkiraan Beban Angsuran (% Responden thd Responden Kredit)		
		Bertambah berat	Tetap	Bertambah ringan
Pertanian, Perkebunan, Peternakan, Kehutanan, dan Perikanan	33%	100%	0%	0%
Pertambangan	67%	0%	100%	0%
Industri Pengolahan	57%	8%	75%	17%
Listrik, Gas, dan Air Bersih	0%	0%	0%	0%
Bangunan	0%	0%	0%	0%
Perdagangan, Hotel, dan Restoran	63%	37%	53%	11%
Pengangkutan dan Komunikasi	38%	20%	60%	20%
Keuangan, Persewaan, dan Jasa Perusahaan	42%	40%	60%	0%
Jasa-Jasa	100%	0%	75%	25%
All Sektor	49%	14%	80%	7%

Sumber: SKDU KPw BI Bali, diolah

tingginya alih fungsi lahan pertanian serta anomali cuaca yang berdampak pada penurunan kualitas dan kuantitas produksi pertanian.

Sementara itu terdapat 7% korporasi yang sedang memiliki kredit perbankan menyatakan bahwa beban angsuran kredit ke depan akan semakin ringan terhadap pendapatan perusahaan. Jumlah responden SKDU yang masih memiliki hutang ke perbankan hanya sebesar 49% dari keseluruhan responden.

4.2.3. Eksposur Perbankan Pada Korporasi

Untuk menjaga stabilitas sistem keuangan, kerentanan yang terjadi pada sektor korporasi tetap perlu diwaspadai meskipun eskposur kredit perbankan pada sektor ini hanya sebesar 31,7% dari total kredit di Bali. Hal tersebut mengingatkan, kondisi keuangan sektor rumah tangga yang menjadi eksposur dominan kredit perbankan di Bali juga dipengaruhi oleh kinerja sektor korporasi, terutama dari sisi penghasilan dan penyerapan tenaga kerja.

Kredit perbankan pada sektor korporasi di Bali pada triwulan IV 2016 mencapai Rp 28,1 triliun, tumbuh sebesar 5,61% (yoy). Kondisi tersebut lebih rendah daripada triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 8,94% (yoy). Perlambatan tersebut disebabkan terutama oleh kontraksi modal kerja.

Kredit investasi korporasi mengalami peningkatan pertumbuhan dari sebesar 8,46% (yoy) pada triwulan III 2016 menjadi sebesar 9,54% (yoy) pada triwulan IV

2016. Selain itu, kredit konsumsi juga pada triwulan IV 2016 mampu tumbuh positif sebesar 9,44% (yoy) dari sebelumnya terkontraksi sebesar 1% (yoy). Di sisi lain, kredit modal kerja mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 0,35% (yoy) pada triwulan IV 2016 dari triwulan sebelumnya tumbuh 9,73% (yoy).

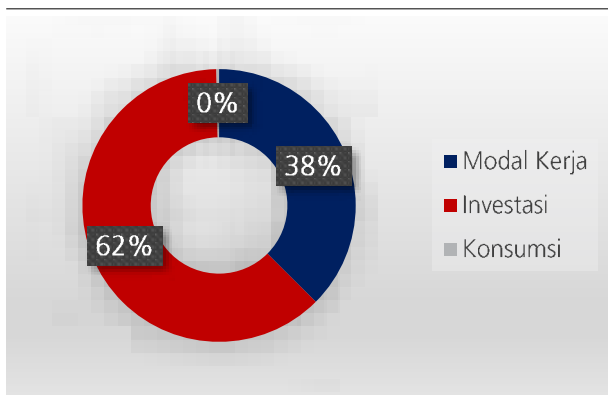
Sementara itu, kualitas kredit terjadi perbaikan seiring dengan NPL yang mengalami penurunan dari sebesar 5,85% pada triwulan III 2016 menjadi 4,93% pada triwulan IV 2016.

Kredit Modal Kerja Korporasi

Posisi kredit modal kerja korporasi pada triwulan IV 2016 mencapai Rp10,5 triliun, menurun dari triwulan sebelumnya yang mencapai Rp11,4 triliun. Seiring dengan penurunan kredit modal kerja, risiko kredit tersebut juga mengalami penurunan pada triwulan IV. Hal ini terlihat dari NPL yang menurun menjadi 7,47% dari sebelumnya 8,18% pada triwulan III 2016.

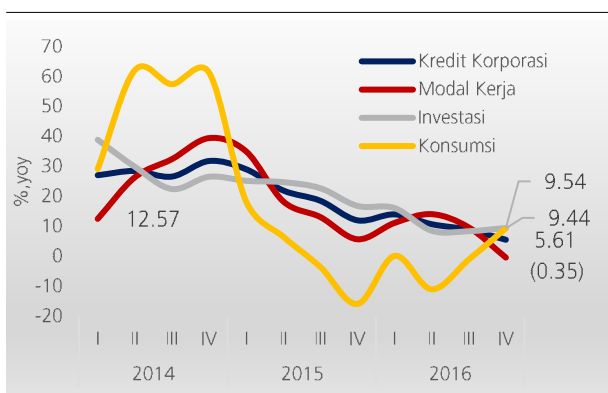
Kredit Investasi Korporasi

Posisi kredit investasi korporasi pada triwulan IV 2016 mencapai Rp 17,5 triliun. Sementara itu, meskipun risiko kredit mengalami peningkatan, NPL kredit investasi korporasi masih memiliki risiko yang terjaga di bawah *threshold* 5%. Pada triwulan IV 2016, NPL kredit ini turun menjadi 3,43% dari 4,26% pada triwulan III 2016.



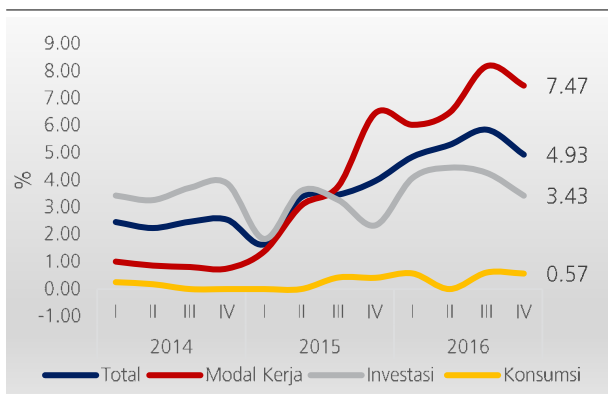
Sumber: LBU, diolah

Grafik 4.19 Pangsa Penggunaan Kredit Korporasi



Sumber: LBU, diolah

Grafik 4.20 Pertumbuhan Kredit Korporasi



Sumber: LBU, diolah

Grafik 4.21 NPL Kredit Korporasi

4.3. ASESMEN INSTITUSI KEUANGAN (PERBANKAN)

4.3.1. Jaringan Kantor dan Aset

Pada triwulan IV 2016, jumlah bank umum di Bali mengalami pertambahan menjadi sebanyak 53 bank, sementara jumlah BPR masih tetap sama yaitu sebanyak 137 BPR.

Total aset perbankan Bali pada triwulan IV 2016 mengalami peningkatan dibandingkan triwulan sebelumnya. Sejalan dengan peningkatan aset secara nominal, pertumbuhan aset perbankan juga meningkat menjadi 7,85% (yoy) dari 6,31% (yoy) pada triwulan III 2016.

4.3.2. Kondisi Umum Perbankan Bali

Secara umum, perkembangan kinerja bank umum di Bali pada triwulan IV 2016 hampir sama dengan kondisi pada triwulan III 2016 dimana sejumlah indikator seperti posisi kredit dan dana pihak ketiga (DPK) serta aset masih mampu tumbuh positif meskipun ketiga indikator tersebut menunjukkan pertumbuhan yang melambat.

Perkembangan resiko kredit (rasio NPL) masih relatif terjaga. Rasio NPL pada triwulan IV ini menurun menjadi sebesar 2,09% dari 2,67% pada triwulan III 2016.

Intermediasi Perbankan Bali

Dana Pihak Ketiga

Dana Pihak Ketiga (DPK) yang berhasil dihimpun oleh bank umum pada triwulan IV 2016 mengalami peningkatan pertumbuhan jika dibandingkan dengan periode sebelumnya, yaitu dari 3,72% (yoy) di triwulan III 2016 menjadi 5,33% (yoy) di triwulan IV 2016. Peningkatan kinerja tersebut terjadi terutama di deposito disusul oleh giro dan tabungan.

Pada triwulan IV 2016, pertumbuhan deposito mencapai 5,76% (yoy), tabungan tumbuh sebesar 6,68% (yoy) dan giro tumbuh sebesar 0,75% (yoy). Sejalan dengan hal tersebut, secara nominal jumlah dana yang berhasil dihimpun tersebut mengalami sedikit peningkatan dari Rp 79,4 triliun di triwulan III 2016 menjadi Rp 79,5 triliun di triwulan IV 2016.

Kredit

Meskipun kinerja penghimpunan dana mengalami peningkatan pertumbuhan, fungsi penyaluran kredit perbankan oleh bank umum secara keseluruhan

Tabel 4.11 Perkembangan Jumlah Bank dan Jaringan Kantor Bank di Bali

KATEGORI	2012	2013	2014	2015	2016
Bank Umum				42	53
Jumlah Kantor	656	652	657	704	697
BPR	137	137	138	137	137
Jumlah Kantor	170	286	286	286	321
Total Bank Umum & BPR	137	137	138	179	190
Total Jumlah Kantor	826	938	943	990	1018

Sumber: LBU dan LBBR Bank Indonesia, diolah

Tabel 4.12 Penghimpunan Dana dan Penyaluran Kredit Bank Umum di Bali

Indikator Bank Umum	2015			2016			
	Jun	Sep	Dec	Mar	Jun	Sep	Des
Aset (Rp milyar)	88.520	92.288	92.842	91.469	94.376	98.107	100.131
g Aset (% , yoy)	11,34	10,09	8,23	7,12	6,62	6,31	7,85
Kredit Umum (Rp milyar)	59.777	60.972	62.855	63.074	65.603	67.039	68.918
g Kredit Umum (% , yoy)	13,16	10,68	9,87	8,81	9,75	9,95	9,65
Modal Kerja (Rp milyar)	23.765	24.012	24.504	24.416	25.852	26.288	26.861
g Modal Kerja (% , yoy)	11,62	7,89	7,72	6,43	8,78	9,48	9,62
Investasi (Rp milyar)	13.876	14.141	14.588	14.446	15.042	15.539	16.181
g Investasi (% , yoy)	16,62	12,66	8,83	6,01	8,41	9,89	10,92
Konsumsi (Rp milyar)	22.137	22.819	23.764	24.213	24.709	25.212	25.877
g Konsumsi (% , yoy)	12,73	12,53	12,86	13,14	11,62	10,49	8,89
Dana Pihak Ketiga (Rp milyar)	73.580	76.545	75.507	75.567	77.610	79.393	79.530
g DPK (% , yoy)	10,65	8,52	7,09	4,93	5,48	3,72	5,33
Deposito (Rp milyar)	27.514	27.445	26.544	27.819	28.044	28.167	28.072
g Deposito (% , yoy)	26,73	16,63	7,36	4,23	1,93	2,63	5,76
Giro (Rp milyar)	13.709	15.002	13.065	13.898	13.999	14.923	13.163
g Giro (% , yoy)	-0,87	6,32	9,19	8,06	2,12	-0,52	0,75
Tabungan (Rp milyar)	32.357	34.098	35.898	33.850	35.567	36.303	38.295
g Tabungan (% , yoy)	4,51	3,66	6,14	4,27	9,92	6,46	6,68
NPL (Gross)	1,91	1,89	2,06	2,38	2,35	2,67	2,09
LDR	81,24	79,66	83,24	83,47	84,53	84,44	86,66

Sumber: LBU dan LBBR Bank Indonesia, diolah

mengalami perlambatan pertumbuhan dibanding kinerja di periode triwulan sebelumnya. Pada triwulan IV 2016, kredit perbankan tumbuh sebesar 9,65% (yoy), tumbuh melambat dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang sebesar 9,95% (yoy). Secara nominal, kredit perbankan yang disalurkan sampai dengan triwulan IV 2016 mencapai Rp 68,9 triliun.

Peningkatan penyaluran kredit tersebut lebih didorong adanya perbaikan pada penyaluran kredit modal kerja dan kredit investasi. Pada periode laporan, kredit modal kerja mengalami pertumbuhan sebesar 9,62% (yoy) setelah pada triwulan sebelumnya tumbuh

sebesar 9,48% (yoy). Sedangkan untuk kredit investasi pada triwulan IV 2016 tercatat sebesar Rp 16,1 triliun atau tumbuh sebesar 10,92% (yoy), lebih tinggi dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang tercatat sebesar 9,89% (yoy). Sementara itu, kredit konsumsi pada triwulan IV 2016 tercatat sebesar Rp25,9 triliun atau tumbuh 8,89% (yoy), tumbuh melambat dibandingkan triwulan sebelumnya yang sebesar 10,49% (yoy).

LDR dan NPL

Kondisi intermediasi perbankan yang diindikasikan dengan indikator *Loan to Deposit Ratio* (LDR) menunjukkan sedikit peningkatan bila dibandingkan

kinerja di periode sebelumnya. Pada triwulan IV 2016 LDR bank umum di Bali mencapai 86,66%, sedikit lebih tinggi daripada triwulan sebelumnya yang mencapai 84,44%.

Sejalan dengan perkembangan tersebut, kualitas kredit perbankan menunjukkan perkembangan yang baik, tercermin dari indikator *Non Performing Loans* (NPLs) *Gross* yang menurun dari 2,67% pada triwulan III 2016 menjadi 2,09% pada triwulan IV 2016.

4.3.4. Bank Perkreditan Rakyat

Di triwulan IV 2016, kinerja BPR tetap tumbuh tinggi namun mengalami tren yang melambat. Aset BPR tumbuh sebesar 15,56% (yoy), lebih rendah dari triwulan sebelumnya sebesar 18,11% (yoy) dengan nominal asetnya mencapai Rp 13 triliun. Perlambatan aset BPR di Bali juga diikuti oleh melambatnya kinerja penghimpunan dana maupun penyaluran kredit perbankan ke masyarakat. Penyaluran kredit BPR tumbuh melambat dari 9,72% (yoy) pada triwulan III 2016 menjadi 9,09% (yoy) dengan nominal kredit sebesar Rp9,03 triliun. Sejalan dengan penyaluran kredit, penghimpunan DPK juga mengalami perlambatan pertumbuhan menjadi sebesar 19,23% (yoy) dari triwulan sebelumnya sebesar 22,54% (yoy) dengan nominal sebesar Rp 7,5 triliun. Kondisi

tersebut menyebabkan tingkat intermediasi BPR mengalami penurunan meskipun kualitas risiko kredit pada periode laporan masih cukup terjaga.

4.4. AKSES KEUANGAN

4.4.1. Akses Keuangan Kepada UMKM

Kredit

Meskipun nominal kredit UMKM menunjukkan peningkatan, namun pertumbuhannya melambat. Pada triwulan IV 2016, kredit UMKM tercatat tumbuh sebesar 12,36% (yoy), dari 12,91% (yoy) di triwulan sebelumnya. Perlambatan pertumbuhan tersebut, dipengaruhi oleh peningkatan penyaluran kredit di kategori perdagangan, hotel dan restoran (PHR) dengan pangsa kredit terbesar (69,52%). Pada triwulan III 2016, kredit di kategori PHR ini tercatat tumbuh sebesar 18,7% (yoy), sementara di triwulan IV 2016 meningkat menjadi sebesar 18,5% (yoy). Perlambatan realisasi kredit di sektor tersebut, diiringi dengan tingkat kualitas kredit yang sedikit mengalami penurunan. Hal ini terlihat dari rasio NPL kredit UMKM yang meningkat, yaitu dari 1,92% (Tw III 2016) menjadi sebesar 1,94% (Tw IV 2016).

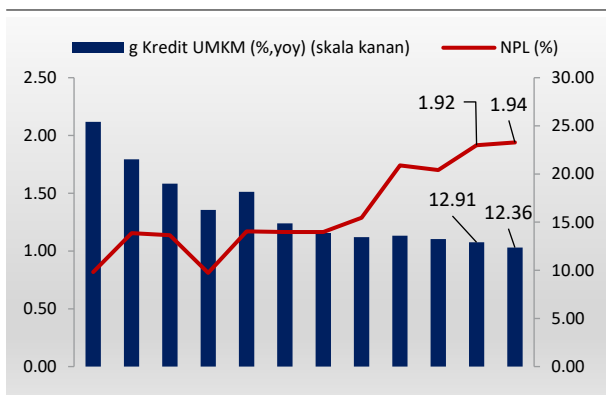
Berdasarkan data yang ada, pangsa kredit UMKM di periode triwulan tercatat mengalami sedikit peningkatan sebesar 35,9% dari total kredit,

Tabel 4.13 Perkembangan Indikator BPR di Bali

Indikator BPR	2015			2016			
	Jun	Sep	Dec	Mar	Jun	Sep	Dec
Aset (Rp milyar)	10.001	10.534	11.313	11.595	11.994	12.442	13.074
g Aset (% , yoy)	21,22	20,82	20,61	20,74	19,93	18,11	15,56
Kredit Umum (Rp milyar)	7.744	7.952	8.279	8.367	8.566	8.725	9.032
g Kredit Umum (% , yoy)	18,77	16,81	16,28	14,18	10,61	9,72	9,09
Modal Kerja (Rp milyar)	3.919	4.058	4.263	4.299	4.330	4.363	4.489
g Modal Kerja (% , yoy)	17,70	17,07	18,17	15,88	10,49	7,53	5,31
Investasi (Rp milyar)	968	985	1.034	1.068	1.088	1.107	1.183
g Investasi (% , yoy)	30,16	20,51	18,97	17,59	12,45	12,38	14,41
Konsumsi (Rp milyar)	2.857	2.909	2.983	3.001	3.147	3.254	3.360
g Konsumsi (% , yoy)	16,75	15,26	12,86	10,72	10,15	11,87	12,65
Dana Pihak Ketiga (Rp milyar)	6.248	6.478	7.007	7.256	7.571	7.938	8.354
g DPK (% , yoy)	18,67	17,76	18,66	19,87	21,17	22,54	19,23
Deposito (Rp milyar)	4.444	4.644	5.054	5.354	5.628	5.931	6.192
g Deposito (% , yoy)	26,58	32,11	33,92	32,58	26,66	27,71	22,53
Tabungan (Rp milyar)	1.805	1.834	1.953	1.902	1.943	2.007	2.162
g Tabungan(% , yoy)	2,83	-7,64	-8,37	-5,61	7,67	9,47	10,72
NPL (Gross)	3,10	3,03	2,69	4,27	4,75	5,75	4,92
LDR	81,67	80,54	76,33	76,98	76,24	74,94	72,19

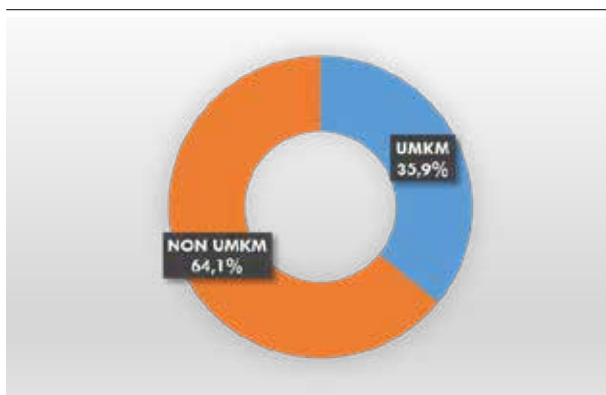
Sumber: LBU dan LBBR Bank Indonesia, diolah

dibandingkan pangsa di triwulan sebelumnya yang sebesar 35,31%. Hal tersebut menunjukkan bahwa perbankan memiliki perhatian yang besar dan kontribusi positif dalam rangka pengembangan UMKM di Bali. Sementara itu, berdasarkan nominal kreditnya, maka pangsa realisasi kredit UMKM terbesar berada pada rentang nominal Rp 1- 2 miliar rupiah, yakni sebesar 14,8% dari total kredit UMKM yang ada di Bali.



Sumber: LBU Bank Indonesia, diolah

Grafik 4.22 Pertumbuhan Kredit UMKM



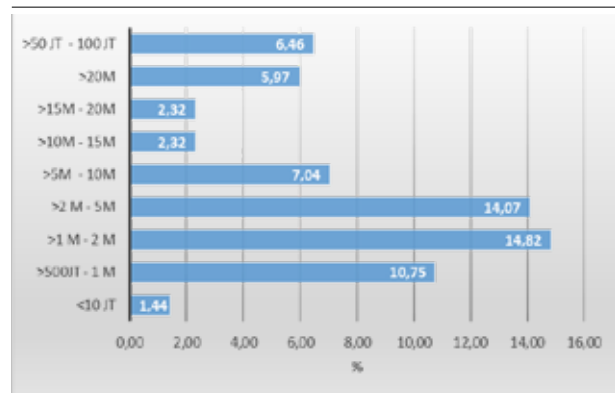
Sumber: LBU Bank Indonesia, diolah

Grafik 4.23 Pangsa Kredit UMKM terhadap Total Kredit

Di sisi lain, berdasarkan sebaran wilayahnya, konsentrasi realisasi kredit UMKM terbesar berada di Kota Denpasar yakni dengan pangsa sebesar 33%, diikuti oleh Kabupaten Badung sebesar 18% dan Kabupaten Gianyar sebesar 12%.

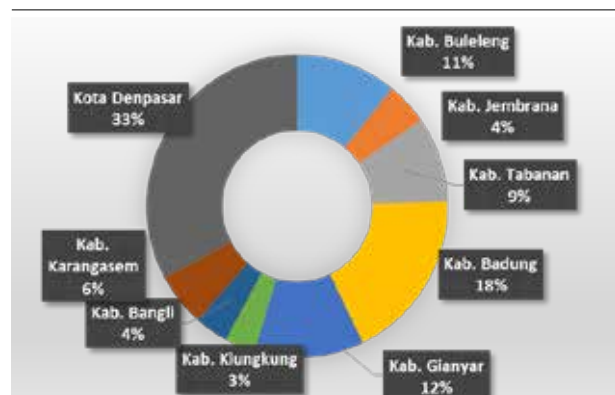
Sementara itu berdasarkan sektor ekonominya, realisasi kredit UMKM masih terkonsentrasi di sektor PHR dengan pangsa sebesar 69,52%, diikuti oleh

sektor pertanian dengan pangsa sebesar 5,63%, dan sektor ekonomi lainnya memiliki pangsa relatif rendah di bawah 5%.



Sumber: LBU Bank Indonesia, diolah

Grafik 4.24 Pangsa Nominal Kredit UMKM



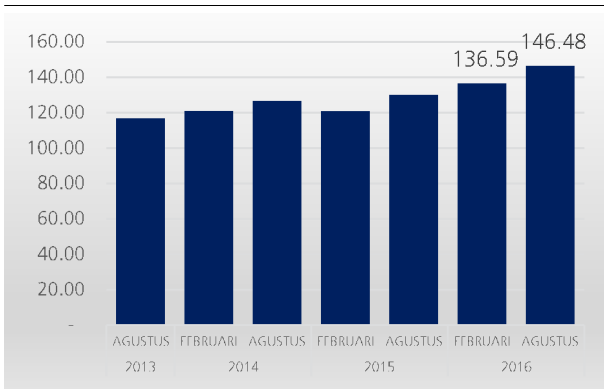
Sumber: LBU Bank Indonesia, diolah

Grafik 4.25 Pangsa Kredit UMKM Berdasarkan Kota/Kabupaten

4.4.2. Akses Keuangan Kepada Penduduk

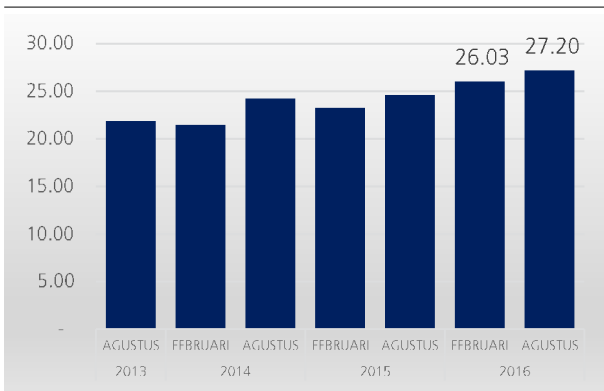
Indikator akses keuangan di Bali terutama dari sisi penghimpunan dana mengalami peningkatan, begitu juga dari sisi kredit. Rasio jumlah rekening DPK terhadap penduduk angkatan kerja di Bali tetap menunjukkan tren peningkatan, di mana pada bulan Agustus rasio tersebut tercatat sebesar 146,48%. Rasio yang lebih besar dari 100% menunjukkan bahwa terdapat penduduk angkatan kerja di Bali yang memiliki rekening simpanan lebih dari satu. Selain itu rasio lebih dari 100% juga mengindikasikan adanya penduduk bukan angkatan kerja yang juga memiliki rekening seperti siswa sekolah maupun mahasiswa. Sementara itu, rasio jumlah rekening kredit terhadap

penduduk angkatan kerja di Bali menunjukkan sedikit peningkatan menjadi 27,20% di bulan Agustus 2016. Masih rendahnya rasio rekening kredit menunjukkan bahwa fasilitas pembiayaan masih sedikit digunakan oleh masyarakat di provinsi ini dan masih terdapat ruang untuk meningkatkan penyaluran kredit di masa yang akan datang.



Sumber: LBU Bank Indonesia, BPS, diolah

Grafik 4.26 Rasio Rekening DPK per Penduduk Bekerja



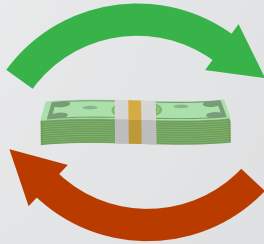
Sumber: LBU Bank Indonesia, BPS, diolah

Grafik 4.27 Rasio Rekening Kredit per Penduduk Bekerja

BOKS C

Peran Bank Indonesia dalam Mendukung Industri Kupva BB

I. Penjelasan Mengenai Peran KUPVA BB dalam Perekonomian



Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan Bank (KUPVA BB), sebagai penunjang sektor keuangan memiliki peranan strategis dalam mendukung pencapaian stabilitas nilai Rupiah, antara lain peran KUPVA dalam memfasilitasi penggunaan Rupiah sebagai alat pembayaran yang sah di wilayah NKRI, melalui jasa penukaran mata uang asing ke dalam mata uang rupiah. Bank Indonesia senantiasa memberikan dukungan dalam rangka mewujudkan usaha KUPVA BB yang sehat dan profesional sehingga pada akhirnya industri KUPVA BB di Bali akan menunjang sektor keuangan dan kegiatan perekonomian daerah. Sehubungan dengan itu, Bank Indonesia perlu mengatur tata kelola dan penguatan KUPVA BB agar dapat mencegah dimanfaatkannya KUPVA BB sebagai sarana pencucian uang dan pendanaan terorisme, sehingga KUPVA BB dapat lebih mendukung pencapaian stabilisasi nilai Rupiah, dan di sisi lain dapat memberikan kepastian maupun perlindungan hukum kepada masyarakat. Pengaturan KUPVA BB tersebut pada gilirannya akan menciptakan iklim usaha yang sehat dalam mendukung pertumbuhan industri penukaran valuta asing dan meningkatkan efektifitas pengawasan sistem pembayaran yang

dilakukan oleh Bank Indonesia.

II. Upaya Bank Indonesia Dalam Melakukan Pembinaan KUPVA BB

Bank Indonesia telah mengeluarkan Peraturan Bank Indonesia No. 18/20/PBI/2016 tanggal 3 Oktober 2016 dan juga menerbitkan Surat Edaran No.18/42/DKSP tanggal 30 Desember 2016 tentang KUPVA Bukan Bank. Tujuan penerbitan PBI ini adalah untuk memberikan panduan yang lebih jelas dalam penyelenggaraan kegiatan usaha penukaran valuta asing oleh lembaga bukan bank. Penyempurnaan ketentuan ini diharapkan dapat meningkatkan tata kelola yang baik serta mendorong perkembangan industri KUPVA BB menjadi lebih sehat dan efisien. Penyempurnaan yang dilakukan antara lain terhadap: 1) cakupan kegiatan usaha, 2) *underlying* transaksi, 3) prosedur dan persyaratan perizinan, 4) tata kelola dan perlindungan konsumen, dan 5) kegiatan jual beli UKA di wilayah perbatasan dan kerjasama dengan Hotel. Sebagai wujud kepedulian Bank Indonesia dalam mendukung pengembangan KUPVA BB di Provinsi Bali, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali telah melakukan berbagai upaya sebagai berikut:

- a. Penyebaran *leaflet* Himbuan Penggunaan KUPVA BB Berizin dan Daftar KUPVA BB Berizin



di Provinsi Bali dalam 3 (tiga) bahasa (Indonesia, Inggris dan Cina);

- b. Penyebaran *leaflet* Modus Penipuan KUPVA dalam 3 (tiga) bahasa (Indonesia, Inggris dan Cina);
- c. Pengawasan Langsung/Sidak terhadap Kewajiban Penggunaan Rupiah dan Keberadaan KUPVA BB tidak berizin di wilayah Seminyak, Kuta, Amed, Tulamben, Bena dan Canggu;
- d. Penyampaian surat himbauan kepada hotel, villa, butik/spa, restoran, *art shop*, dan *dive resort* untuk bertransaksi hanya dalam Rupiah dan bekerjasama dengan KUPVA BB berizin dalam rangka mendukung Kewajiban Penggunaan Rupiah di Wilayah NKRI;
- e. Pembuatan Aplikasi Edukasi Rupiah yang memuat daftar KUPVA BB Berizin di Provinsi Bali per Kabupaten/Kota;
- f. Kerjasama dengan Kepolisian Daerah Bali terkait Tata cara pelaksanaan penanganan dugaan tindak pidana di bidang Sistem Pembayaran dan Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing (KUPVA); dan
- g. Kerjasama dengan Desa Adat Kuta dalam upaya penertiban KUPVA BB di wilayah Desa Adat Kuta.
- h. Selain itu juga, sejak bulan November 2016 telah diluncurkan aplikasi SIKUPVA: Sistem Informasi Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing, yaitu suatu inovasi berupa sistem berbasis web yang dapat memberikan informasi kepada pengguna jasa layanan Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing (KUPVA) BB mengenai lokasi KUPVA BB Berizin di Provinsi Bali. SIKUPVA dapat diakses melalui alamat website www.balimoneychanger.com. Website ini menggunakan fitur Google Maps dan terdapat menu "*Find Authorized Money Changer Near You*" yang memungkinkan

pengguna mendeteksi KUPVA BB Berizin terdekat dari lokasi orang tersebut berada.

III. Perkembangan Industri KUPVA BB di Bali

Perkembangan jumlah KUPVA BB di Bali menunjukkan tren yang positif mengingat perekonomian Bali sebagian besar ditopang oleh industri pariwisata. Sebagai gambaran umum, sampai dengan Januari 2017, total Penyelenggara KUPVA BB yang tercatat dalam database Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali berjumlah 689 kantor, terdiri dari 142 Kantor Pusat (KP) dan 547 Kantor Cabang (KC), meningkat 78 kantor atau 13% dibandingkan akhir tahun 2015 sebanyak 611 kantor, dengan masing-masing peningkatan sebanyak 10 KP dan 68 KC. Dominasi sebaran terbesar berada di Kabupaten Badung, Kota Denpasar, dan Kabupaten Gianyar, dengan masing-masing pangsa sebesar 70%, 12 %, 10%, sisanya 5 % tersebar di Kabupaten Buleleng, Karangasem serta Tabanan dan 3% diluar Bali. Ditinjau dari nilai transaksi, total nilai transaksi seluruh KUPVA BB di Bali di sepanjang tahun 2015 mencapai Rp29,4 triliun, yang terdiri dari transaksi pembelian sebesar Rp14,7 triliun dan transaksi penjualan sebesar Rp14,7 triliun, Sedangkan pada tahun 2016, total transaksi jual – beli valas mencapai Rp31,3 triliun, dengan total pembelian dan penjualan masing-masing sebesar Rp15,5 dan Rp15,8 triliun atau meningkat 6,7%, sementara itu perkembangan terbaru hingga Februari 2017 total transaksi jual – beli valas mencapai Rp 5,2 triliun yang terdiri dari transaksi pembelian sebesar Rp2,6 triliun dan transaksi penjualan sebesar Rp2,6 triliun, atau meningkat 9,0% (yoy). Kedepan, prospek KUPVA BB diperkirakan akan tumbuh melambat, yang disebabkan antara lain semakin berkembangnya sarana pembayaran non tunai dan banyak wisman yang melakukan penarikan Rupiah melalui mesin ATM.

Industri KUPVA BB sangat rentan untuk dijadikan sebagai sarana dalam berbagai modus kejahatan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme. Oleh sebab itu, Penyelenggara KUPVA BB agar selalu menerapkan CDD (*Customer Due Diligence*) dan EDD (*Enhanced Due Diligence*) dalam setiap transaksinya, salah satunya dengan melakukan pencatatan identitas nasabah serta menyampaikan Laporan Transaksi Keuangan Tunai (TKT) dan Transaksi Keuangan Mencurigakan (TKM) secara benar dan akurat kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Melalui pemahaman dan penerapan CDD dan EDD dalam kegiatan sehari-hari, diharapkan Penyelenggara KUPVA BB ikut berperan aktif dan berpartisipasi dalam rangka mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme.

IV. Upaya Bank Indonesia Untuk Menjaga Perkembangan Industri KUPVA BB

Melalui Peraturan Bank Indonesia No.18/20/PBI/2016 tanggal 7 Oktober 2016 tentang Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan Bank, Bank Indonesia menegaskan adanya kewajiban bagi penyelenggara Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan Bank (KUPVA BB) atau money changer untuk memperoleh izin usaha. Berdasarkan peraturan Bank Indonesia dimaksud, KUPVA BB yang belum memperoleh izin dari Bank Indonesia memiliki kesempatan untuk segera mengajukan izin paling lambat tanggal 7 April 2017. Dengan berakhirnya waktu relaksasi yang diberikan Bank Indonesia, apabila masih terdapat KUPVA BB yang tidak berizin hingga batas waktu yang diberikan, Bank Indonesia bekerjasama dengan Kepolisian RI akan menghentikan/menutup KUPVA tersebut.

Berdasarkan hasil identifikasi yang dilakukan oleh Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali pada awal Februari 2017 di beberapa lokasi pariwisata

seperti Kuta, Seminyak, Tanjung Benoa, Sanur, Ubud, Celuk, Amed dan Lovina, ada sekitar 70 KUPVA yang belum mengantongi izin hingga saat ini. Sebanyak 70 KUPVA yang telah teridentifikasi tersebut telah diberikan surat dan *leaflet* pengajuan izin KUPVA BB, bahkan 42 diantaranya telah menandatangani surat pernyataan bersedia mengurus perizinan KUPVA. Namun dari sekian banyak KUPVA BB yang teridentifikasi belum memiliki perizinan tersebut, belum ada satupun yang mengajukan perizinan ke Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali. Untuk itu, sebagai langkah nyata keseriusan Bank Indonesia untuk melakukan penertiban terhadap KUPVA BB Tidak Berizin, pada tanggal 10 hingga 13 April, Bank Indonesia bersama Kepolisian RI telah melakukan penertiban KUPVA yang tidak memiliki perizinan secara serentak di 3 kota besar yaitu Bali, Jakarta dan Medan. Tim Penertiban dari DKSP BI Pusat, Bareskrim, Polda, dan KPwBI Provinsi Bali, telah melakukan penertiban terhadap KUPVA-KUPVA yang belum berizin sebagaimana yang telah diidentifikasi oleh pengawas KUPVA BB Provinsi Bali. Penegakan hukum di bidang penukaran valuta asing sangatlah penting untuk mencegah penyalahgunaan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Menjamurnya KUPVA liar bukan hanya merugikan wisatawan dan merusak citra pariwisata Bali, namun juga rawan digunakan sebagai sarana pencucian uang dan pendanaan teroris, perdagangan narkotik, hingga penyelundupan yang disamarkan seolah-olah bersumber dari bisnis tukar menukar valuta asing.



PENYELENGGARAAN SISTEM PEMBAYARAN DAN PENGELOLAAN UANG RUPIAH

Secara nominal, perputaran kliring mencapai Rp16,7 triliun, berkontraksi lebih dalam dari -0,19% (yoy) pada triwulan IV 2016 menjadi -16,0% (yoy) pada triwulan I 2017.

Sejalan dengan pola musimannya, aliran uang kartal antara Bank Indonesia dengan perbankan di Provinsi Bali pada triwulan I 2017 mengalami *net inflow*.

BAB V



5.1. PERKEMBANGAN SISTEM PEMBAYARAN

5.1.1. Transaksi Kliring

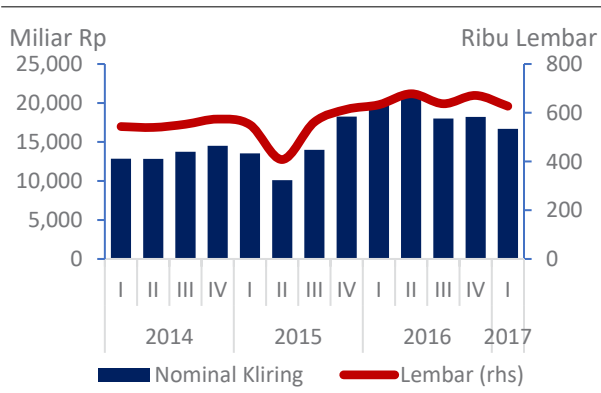
Tabel 5.1 Perkembangan Perputaran Kliring

Indikator	2014				2015				2016				2017
	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I
PERPUTARAN KLIRING													
Lembar (ribu lembar)	543	540	553	574	551	408	562	614	633	678	637	671	627
- Rata-rata lembar per hari (ribu lembar)	8,91	9,47	9,06	9,11	8,89	6,69	9,37	9,75	10,74	10,78	10,80	10,65	10,45
Nominal Kliring (Rp Miliar)	12.853	12.833	13.753	14.507	13.548	10.096	14.002	18.258	19.865	21.429	18.005	18.223	16.687
- Rata-rata nominal per hari (Rp Miliar)	211	225	225	230	219	166	233	290	337	335	305	289	278
TOLAKAN CEK/BG KOSONG													
Lembar (ribu lembar)	8,06	9,09	8,56	7,60	8,05	7,95	8,4	7,6	8,3	7,9	7,3	7,4	7,9
- Rata-rata lembar per hari (ribu lembar)	0,13	0,16	0,14	0,12	0,13	0,13	0,14	0,12	0,14	0,13	0,12	0,12	0,4
Nominal Cek/BG Kosong (Rp Miliar)	321	314	522	640	356	354	343,0	310,0	430,0	422,0	268,0	269,0	421,0
- Rata-rata nominal per hari (Rp miliar)	5,26	5,51	8,56	10,15	5,74	5,80	5,72	4,92	7,3	6,7	4,5	4,3	20,8
PERTUMBUHAN PERPUTARAN KLIRING													
- Lembar (yoy, %)	2,61	-0,23	5,30	3,76	1,39	-24,41	1,6	7,0	14,9	66,2	13,3	9,3	-0,9
- Nominal Kliring (yoy, %)	9,08	2,94	5,73	6,54	5,41	-21,33	1,81	25,86	46,62	112,25	28,59	-0,19	-16,0
PERTUMBUHAN TOLAKAN CEK/BG KOSONG													
- Lembar (yoy, %)	-1,33	8,07	10,44	-9,37	-0,08	-12,58	-2,3	-0,4	2,5	-1,1	-12,5	-1,9	-4,3
- Nominal Kliring (yoy, %)	-0,50	-8,77	59,99	56,13	10,80	12,81	-34,33	-51,53	20,88	19,21	-21,87	-13,23	-2,1

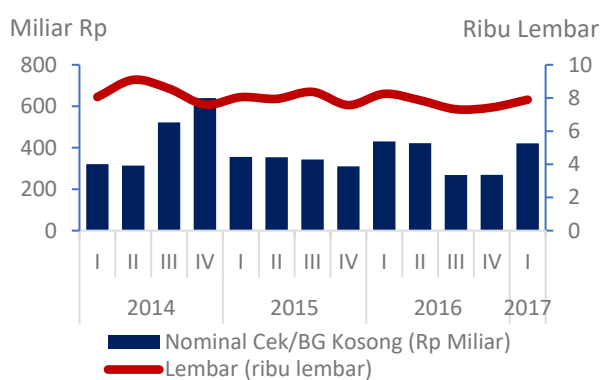
Penggunaan sistem pembayaran non tunai melalui Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI) pada triwulan I 2017 tumbuh melambat, baik secara nominal maupun volume. Secara nominal, perputaran kliring mencapai Rp16,7 triliun, terkontraksi lebih dalam dari -0,19% (yoy) pada triwulan IV 2016 menjadi -16,0% (yoy) pada triwulan I 2017. Perlambatan tersebut merupakan dampak lanjutan dari kebijakan penurunan batas minimal nilai transaksi melalui BI-RTGS dari Rp500 juta kembali menjadi Rp100 juta sejak Juli 2016. Selain itu, dikeluarkannya PBI 18/43/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/29/PBI/2006 tentang Daftar Hitam Nasional Penarik Cek dan/atau Bilyet Giro Kosong pada Desember 2016 diperkirakan ikut mempengaruhi kegiatan transaksi kliring debit (Cek dan/atau Bilyet Giro), dimana transaksi kliring debit menjadi lebih ketat. Hal ini tercermin dari nominal transaksi kliring debit sepanjang triwulan I 2017 yang tercatat sebesar Rp9,8 triliun atau terkontraksi sebesar -9,9% (yoy) dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang mencapai Rp10,8 triliun. Sejalan dengan nominal transaksi, volume transaksi

kliring juga melambat dari 9,28% (yoy) pada triwulan IV 2016 menjadi kontraksi 0,95% (yoy) pada triwulan I 2017 atau dari 671 ribu lembar menjadi 627 ribu lembar.

Sejalan dengan penurunan transaksi kliring debit, pada triwulan I 2017 jumlah tolakan cek/bilyet giro kosong juga mengalami penurunan jika dibandingkan dengan triwulan I 2016. Pada triwulan I 2017, jumlah tolakan cek/bilyet giro kosong tercatat sebesar 7,9 ribu lembar dengan nominal sebesar Rp 421 miliar atau turun sebesar -4,27% (yoy) dibanding triwulan sebelumnya. Secara nominal, tolakan cek/bilyet giro kosong mengalami penurunan sebesar -2,09% (yoy) dibanding triwulan sebelumnya. Dari segi porsi, total nominal tolakan cek/bilyet giro kosong pada triwulan I 2017 mencapai 2,5% dari total lembar kliring yang ditransaksikan pada periode tersebut, meningkat dari triwulan I 2016 maupun triwulan IV 2016 yang masing-masing mencapai 2,2% dan 2,5%.



Grafik 5.1 Perkembangan Kliring



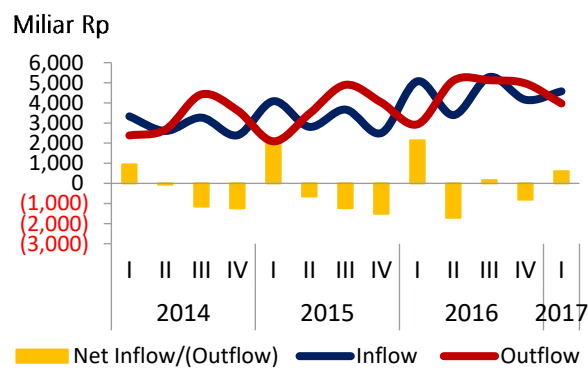
Grafik 5.2 Perkembangan Tolakan Cek/BG kosong

5.1.2. Perkembangan Aliran Uang Kartal (Inflow dan Outflow)

Sejalan dengan pola musimannya, aliran uang kartal antara Bank Indonesia dengan perbankan di Provinsi Bali pada triwulan I 2017 mengalami *net inflow*. Uang kartal keluar dari Bank Indonesia ke masyarakat (*outflow*) menurun setelah pada triwulan sebelumnya

terjadi *outflow* terkait dengan musim libur akhir tahun 2016. Sebagai akibatnya, aliran uang keluar yang tinggi pada triwulan sebelumnya diperkirakan kembali masuk ke perbankan dan bermuara ke Bank Indonesia (*inflow*) sehingga menyebabkan *net inflow* sebesar Rp 601 miliar, berbanding terbalik dengan kondisi triwulan sebelumnya yang *net outflow* sebesar Rp 812 miliar.

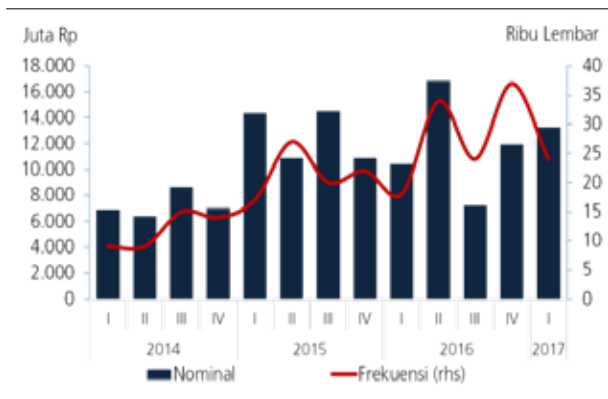
Pada triwulan I 2017 *inflow* yang berasal dari setoran bank mencapai Rp 4,6 triliun, terkontraksi sebesar -9,86% (yoy) dibanding transaksi pada periode yang sama tahun 2016 dan meningkat 10% dibanding triwulan sebelumnya. Sementara *outflow* tercatat sebesar Rp3,9 triliun atau meningkat sebesar 20,9% dibanding triwulan I 2016 namun mengalami kontraksi sebesar 20% dibanding triwulan sebelumnya.



Grafik 5.3 Perkembangan Uang Kartal di Bali

Tabel 5.2 Perkembangan Transaksi Uang Kartal di Bali

Indikator	2014				2015				2016				2017
	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I
<i>inflow</i> (Miliar Rp)	3.331	2.607	3.269	2.392	4.086	2.810	3.669	2.507	5.076	3.395	5.287	4.157	4.575
<i>Outflow</i> (Miliar Rp)	2.382	2.669	4.422	3.630	2.089	3.464	4.899	4.018	2.937	5.107	5.127	4.969	3.974
<i>Net Inflow/(Outflow)</i>	949	(62)	(1.153)	(1.238)	1.996	(654)	(1.230)	(1.512)	2.138	(1.712)	160	(812)	601
Penukaran (Miliar Rp)	84	81	93,7	93	64,29	16	17	18	21	21	19	30	20
Temuan Uang Palsu (lembar)	1.155	1.001	986	1591	1.477	882	1.013	1.372	1.934	1.409	1.029	1.222	1.055
Frekuensi Kas Keliling	9	9	15	14	17	27	20	22	18	26	22	34	24
Nominal Kas keliling (Juta Rp)	6.906	6.375	8.647	7.005	14.342	10.865	14.489	10.877	10.393	16.663	7.234	11.943	13.261



Grafik 5.4 Perkembangan Kegiatan Kas Keliling

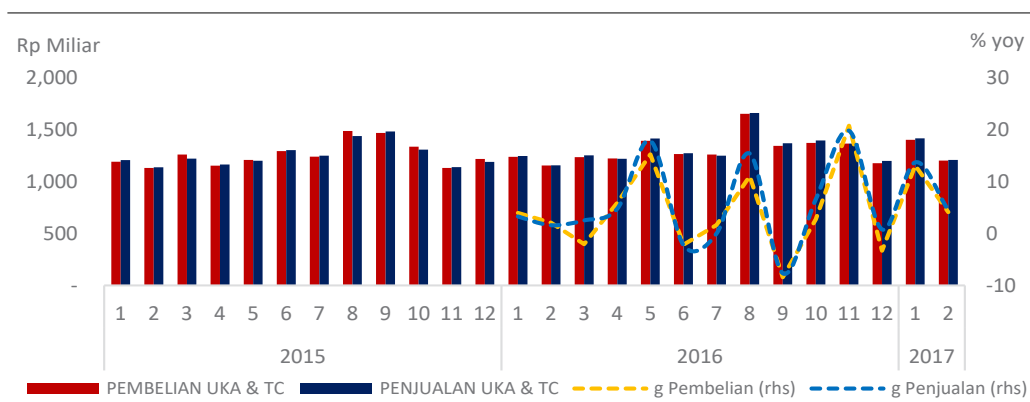
5.1.3. Temuan Uang Palsu dan Penyediaan Uang Layak Edar

Keberadaan uang palsu di masyarakat merupakan hal yang sangat merugikan. Jumlah uang palsu yang teridentifikasi pada triwulan I 2017 mencapai 1.222 lembar, meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya yang sebesar 1.055 lembar. KPw BI Provinsi Bali secara konsisten berupaya menekan peredaran uang palsu melalui kerja sama dengan Kepolisian Daerah Bali. Selain itu, KPw BI Provinsi Bali secara rutin melakukan sosialisasi ciri-ciri keaslian uang Rupiah kepada masyarakat umum dan pelaku usaha di Bali untuk meminimalisir dampak negatif peredaran uang palsu. Bank Indonesia juga terus berkomitmen untuk meningkatkan kualitas uang layak edar di masyarakat (*clean money policy*), dengan cara menarik uang lusuh/rusak dari aliran uang yang masuk ke Bank Indonesia (*inflow*). Penyediaan uang layak edar tersebut dilakukan dengan kegiatan penukaran uang dan kegiatan kas keliling. Di Provinsi

Bali, kegiatan kas keliling dilakukan hingga ke Nusa Penida (Kabupaten Klungkung) yang merupakan salah satu daerah terpencil di Provinsi Bali. Frekuensi layanan kas keliling pada triwulan I 2017 mencapai 24 kali dengan nominal mencapai Rp 13,3 miliar.

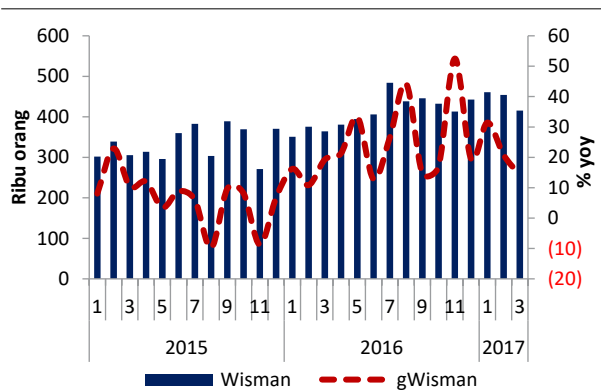
5.1.4. Perkembangan KUPVA BB di Provinsi Bali
Berdasarkan data transaksi Penyelenggara KUPVA BB di Provinsi Bali, total transaksi jual-beli valas pada Januari-Februari 2017 mencapai Rp 5,2 triliun, tumbuh 9,0% (yoy) dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang mencapai Rp 4,8 triliun. Dari total transaksi valas pada Januari-Februari 2017 tersebut, transaksi pembelian dan penjualan valas masing-masing tercatat sebesar Rp 2,6 triliun. Sementara itu, secara bulanan, total transaksi valas pada Februari 2017 mencapai Rp 2,4 triliun atau tumbuh 4,3% (yoy), lebih tinggi dari total transaksi pada akhir periode triwulan IV 2016 (Desember 2016) yang tercatat sebesar Rp 2,3 triliun atau berkontraksi 1,3% (yoy).

Peningkatan jumlah transaksi Kupva pada Januari-Februari 2017 diperkirakan dipicu oleh peningkatan jumlah wisman yang berkunjung ke Bali pada periode yang sama. Berdasarkan data Dinas Pariwisata Provinsi Bali, jumlah wisman pada periode tersebut mencapai 914.809 orang atau tumbuh 25,9% (yoy), lebih tinggi dari periode yang sama tahun sebelumnya yang tercatat sebesar 726.336 orang atau tumbuh 13,36% (yoy).



Grafik 5.5 Perkembangan Transaksi Jual – Beli Valas di Provinsi Bali

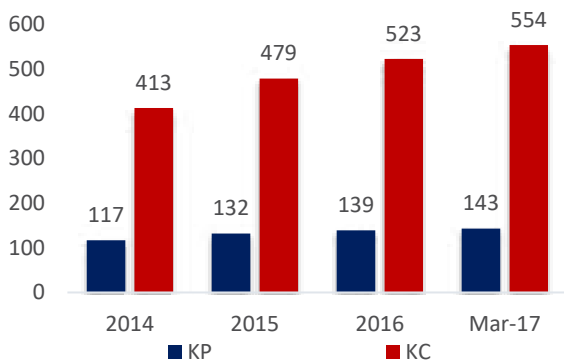
Sumber: LKPBUv2, diolah



Sumber: Dinas Pariwisata Provinsi Bali, diolah

Grafik 5.6 Perkembangan Jumlah Kunjungan Wisman di Provinsi Bali

Selain faktor jumlah kunjungan wisman, peningkatan transaksi jual-beli valas juga didorong oleh bertambahnya jumlah KUPVA BB Berizin di Provinsi Bali. Berdasarkan jumlah kantornya, sampai dengan Maret 2017, terdapat 697 Kantor KUPVA BB Berizin yang terdiri dari 143 Kantor Pusat (KP) dan 554 Kantor Cabang (KC). Dibandingkan dengan akhir tahun 2016, jumlah tersebut meningkat sebanyak 35 kantor, dengan masing-masing peningkatan sebanyak 4 KP dan 31 KC.



Sumber: BISKOMVA, diolah

Grafik 5.7 Jumlah KUPVA BB Berizin di Provinsi Bali

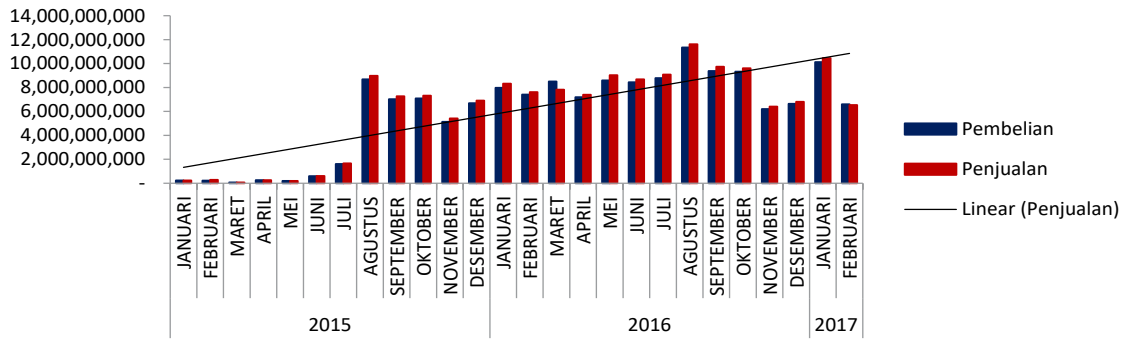
Bertambahnya jumlah KUPVA BB Berizin di Provinsi Bali juga didorong oleh berbagai upaya yang dilakukan KPwBI Provinsi Bali diantaranya:

- Sosialisasi dan edukasi kepada asosiasi, pelaku usaha, aparat penegak hukum, dan pihak media terkait kewajiban bagi seluruh KUPVA BB untuk

memperoleh izin dari Bank Indonesia;

- Pemasangan *advetorial* di media cetak lokal di Provinsi Bali terkait proses perizinan KUPVA BB (\pm 15 media cetak); dan
- Penyampaian surat teguran kepada KUPVA BB Tidak Berizin agar mengajukan izin kepada Bank Indonesia.

Selain itu, implementasi Kewajiban Penggunaan Rupiah di Provinsi Bali juga ikut mendorong peningkatan jumlah KUPVA BB Berizin di Provinsi Bali, khususnya KUPVA BB yang bekerjasama dengan hotel-hotel yang berlokasi di Provinsi Bali. Hal tersebut terkonfirmasi dari total transaksi salah satu KUPVA BB yang memiliki 63 (enam puluh tiga) Kantor Cabang yang berlokasi di hotel di Provinsi Bali. Berdasarkan data yang disampaikan ke KPwBI Provinsi Bali, jumlah transaksi KUPVA tersebut pada Januari-Februari 2017 mencapai Rp 33,7 miliar, meningkat sebesar 7,6% (yoy) dibandingkan jumlah transaksi pada periode yang sama tahun sebelumnya yang tercatat sebesar Rp 31,3 miliar.



Sumber: LKPBUv2, diolah

Grafik 5.8 Perkembangan Transaksi Penyelenggara KUPVA BB yang Berlokasi di Hotel

5.1.5. Pengembangan Layanan Keuangan Non Tunai dan Elektronifikasi

Bank Indonesia selaku otoritas Sistem Pembayaran memandang perlunya upaya untuk mewujudkan suatu komunitas atau masyarakat yang bertransaksi nontunai dengan menggunakan instrumen nontunai (*Less Cash Society/LCS*) dalam kegiatan ekonominya LCS. Hal tersebut terlihat dari komitmen Bank Indonesia untuk mendorong elektronifikasi terhadap transaksi pembayaran dan penerimaan yang dilakukan oleh pemerintah, pelaku bisnis atau masyarakat. Beberapa program telah dilaksanakan seperti elektronifikasi terhadap moda transportasi, retribusi parkir hingga penyaluran bantuan sosial secara non tunai kepada penerima.

Sesuai dengan arahan Presiden mengenai transformasi penyaluran bansos secara non tunai, Bank Indonesia telah menerjemahkan hal tersebut ke dalam suatu model bisnis, berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait. Kebijakan penyaluran bansos non tunai baik dalam bentuk PKH, PIP, Bantuan Pangan, pupuk, dan dana desa dinilai lebih efisien dibandingkan dengan bansos tunai. Oleh karena itu, Bank Indonesia sangat mendukung kebijakan tersebut karena dapat diterima tepat waktu, tepat sasaran, tepat jumlah, tepat kualitas, tepat harga, dan tepat administrasi (6T). Melalui kebijakan ini, sedikitnya terdapat percepatan manfaat yang diterima

oleh setiap penerima bansos sekaligus berkontribusi terhadap peningkatan keuangan inklusif yang telah dicanangkan oleh Pemerintah melalui Nawa Cita, yaitu mewujudkan kedaulatan keuangan melalui kebijakan inklusif keuangan mencapai 50% penduduk sampai tahun 2019.

Inisiasi penyaluran bansos secara nontunai ini ditandai dengan penandatanganan Nota Kesepahaman tentang Koordinasi Pelaksanaan Elektronifikasi Penyaluran Bantuan Sosial (Bansos) oleh Bank Indonesia dan lima kementerian pada tanggal 26 Mei 2016. Keseriusan Bank Indonesia mendukung kebijakan Pemerintah dalam penyaluran bantuan sosial secara non tunai selaras dengan salah satu pilar dalam Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI), yaitu "Pelayanan Keuangan pada Sektor Pemerintah".

Dalam menyalurkan bansos non tunai tersebut, Bank Indonesia mendukung Himpunan Bank Negara (Himbara) untuk menyediakan LKD sebagai agen bank dan menggunakan instrumen kartu kombo atau dikenal sebagai Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) yang diterbitkan oleh Himbara. Kartu kombo adalah instrumen pembayaran yang memiliki fitur uang elektronik dan tabungan yang dapat digunakan sebagai media penyaluran berbagai bansos baik PKH, PIP, bantuan pangan, dan lain-lain.

Sebagaimana telah disampaikan sebelumnya, penyaluran bantuan sosial dalam bentuk non tunai/

elektronik dapat dilakukan melalui mekanisme LKD, agen bank, atau e-warung. LKD merupakan pembayaran dan jasa keuangan yang bekerjasama dengan pihak ketiga (agen) dan menggunakan teknologi *mobile* dan berbasis *daring* (dalam jaringan *online*). Layanan ini mendukung perkembangan keuangan inklusif dan distribusi yang efektif dari dana bantuan pemerintah ke masyarakat (G2P). Mulai pertengahan 2016, atau tepatnya pada penyaluran PKH tahap III, LKD digunakan sebagai salah satu sistem distribusi bantuan untuk Program Keluarga Harapan (PKH) kepada KPM. Hal ini juga ditujukan sebagai bagian dari usaha untuk mendukung program Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT), dan juga untuk mendorong efisiensi distribusi bantuan dan juga meminimalisir kebocoran atau kecurangan. Elektronik warung gotong royong (e-warung) adalah agen bank, pedagang dan/atau pihak lain yang telah bekerja sama dengan Bank Penyalur dan ditentukan sebagai tempat penarikan/pembelian Bantuan Sosial oleh Penerima Bantuan Sosial bersama Bank Penyalur.

Menindaklanjuti hal tersebut dan sebagai salah satu upaya dalam mengembangkan layanan keuangan non tunai dan elektronifikasi di Provinsi Bali, KPwBI Provinsi Bali telah melakukan telah melakukan *monitoring* kesiapan agen Layanan Keuangan Digital (LKD) dalam penyaluran bantuan sosial (bansos) secara non tunai dan edukasi kepada agen LKD dan Sahabat Rumah Pangan Kita (RPK) terkait mekanisme penyaluran bansos secara non tunai,

bekerjasama dengan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk., PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk., dan BULOG Divre Bali. *Monitoring* kesiapan agen LKD telah dilakukan kepada 20 agen LKD PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. dan PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. sebagai calon agen penyalur bansos non tunai. Sedangkan edukasi telah dilakukan kepada 108 agen LKD dan Sahabat RPK di Provinsi Bali. Selanjutnya, dalam rangka mengetahui pelaksanaan penyaluran bantuan sosial non tunai di tahun 2017 untuk bantuan PKH dan juga pangan, hingga Maret 2017 ini, BI beserta *stakeholder* terkait telah melakukan *Monitoring* Penyaluran Bantuan Sosial Non Tunai sebanyak dua kali di kota Denpasar .

Selain mendukung penyaluran bansos secara nontunai, upaya mendorong perluasan elektronifikasi juga dilakukan melalui kerja sama dengan beberapa *stakeholder* dalam menjajaki beberapa program elektronifikasi seperti Elektronifikasi Pembayaran Layanan Publik Parkir Kendaraan Bermotor di Bandara I Gusti Ngurah Rai Bali, program sejenis "Bali Card" yakni kartu uang elektronik bagi wisatawan yang dapat digunakan untuk berbagai keperluan seperti pembayaran transportasi dan tiket masuk lokasi wisata, peningkatan Elektronifikasi Pembayaran Jalan Tol I Gusti Ngurah Rai Bali, elektronifikasi pembayaran penyeberangan di Pelabuhan Gilimanuk Bali, program Elektronifikasi Pembayaran Pajak/Retribusi Daerah dan program elektronifikasi pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

KETENAGAKERJAAN DAN KESEJAHTERAAN



Pada Februari 2017, penduduk usia kerja di Bali tercatat sebanyak 3,21 juta orang, atau meningkat 1,5% (yoy) dibanding Februari 2016 dan 0,7% dibanding Agustus 2016. Tingkat kemiskinan Bali pada September 2016 tercatat sebesar 4,15% atau terdapat 174,94 ribu orang di Bali yang merupakan penduduk miskin. Jumlah ini menurun dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu maupun dibandingkan Maret 2016 yang masing-masing tercatat sebesar 5,25% (terdapat 218,79 ribu penduduk miskin) dan 4,25% (terdapat 178,18 ribu penduduk miskin).

BAB VI



6.1. KONDISI KETENAGAKERJAAN

Kondisi ketenagakerjaan Provinsi Bali pada triwulan I 2017 (periode Februari 2017) menunjukkan peningkatan dibanding periode sebelumnya. Berdasarkan hasil Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Februari 2017, potensi pasokan tenaga kerja di Bali mengalami peningkatan baik secara tahunan maupun dibanding Agustus 2017. Pada Februari 2017, penduduk usia kerja di Bali tercatat sebanyak 3,21 juta orang, atau meningkat 1,5% (yoy) dibanding Februari 2016 dan 0,7% dibanding Agustus 2016. Seiring dengan peningkatan penduduk usia kerja, jumlah angkatan kerja di Bali pada Februari 2017 juga mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya maupun Agustus 2016. Jumlah angkatan kerja pada Februari 2017 tercatat sebanyak 2,47 juta orang, meningkat 3,64% (yoy) dari Februari 2016 dan 0,25% dari Agustus 2016.

Peningkatan angkatan kerja pada periode Februari 2017 ini juga disertai dengan peningkatan penyerapan tenaga kerja yang tercermin dari peningkatan angkatan kerja yang bekerja dan penurunan tingkat pengangguran terbuka (TPT). Jumlah angkatan kerja yang bekerja pada Februari 2017 tercatat sebesar 2,47 juta orang, atau meningkat 4,5% (yoy) dibandingkan Februari 2016 dan 0,9% dibandingkan Agustus 2016. Sementara itu, TPT Bali pada Februari 2017 tercatat sebesar 1,28%, lebih rendah dari Februari 2016 dan

Agustus 2016 yang masing-masing mencapai 2,12% dan 1,89%. TPT Bali Februari 2017 sebesar 1,28% yang artinya dari 100 orang angkatan kerja, sekitar 1 orang diantaranya tidak bekerja atau sedang mencari pekerjaan atau sedang mempersiapkan usaha. Berdasarkan jenjang pendidikannya, TPT tertinggi terdapat pada penduduk yang berpendidikan Universitas. Sementara itu, TPT terendah terdapat pada penduduk yang berpendidikan SD ke bawah. Jika dilihat berdasarkan polanya, secara umum TPT jenjang pendidikan menengah dan tinggi (SMA, SMK, Diploma, dan Universitas) cenderung lebih tinggi pada periode Agustus dibandingkan Februari. Hal tersebut dikarenakan periode Agustus umumnya berdekatan dengan periode kelulusan sehingga pada periode tersebut, penduduk dengan jenjang pendidikan menengah dan tinggi masih memasuki periode pencarian pekerjaan.

Tingkat Partisipasi Angkatan kerja (TPAK) Februari 2017 juga menunjukkan peningkatan dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. TPak yang mencerminkan besarnya persentase penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi, mengalami peningkatan dibanding Februari 2016. TPak pada Februari 2017 tercatat sebesar 76,87%, lebih tinggi dibanding Februari 2016 yang sebesar 75,28% namun lebih rendah jika dibandingkan Agustus 2016 yang mencapai 77,24%.

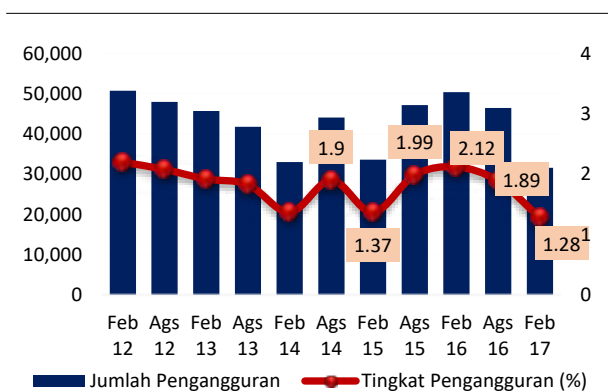
Tabel 6.1 TPT menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan

Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan	2014		2015		2016		2017
	Februari	Agustus	Februari	Agustus	Februari	Agustus	Februari
< SD KE BAWAH	0,18	0,56	0,89	0,83	1,64	0,30	0,43
SMP	0,28	1,78	1,39	0,79	2,15	0,65	2,47
SMA	2,85	2,29	3,18	2,87	2,65	2,17	1,28
SMK	3,92	4,51	0,24	3,62	3,01	3,96	1,06
Diploma I / II / III	3,86	3,26	2,51	5,25	2,06	4,44	1,34
UNIVERSITAS	0,89	2,71	0,93	3,05	1,81	4,35	2,78
TOTAL	1,37	1,90	1,37	1,99	2,12	1,89	1,28

Tabel 6.2 Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas Menurut Jenis Kegiatan Utama (Ribu Orang)

KEGIATAN UTAMA	2013		2014		2015		2016		2017
	FEBRUARI	AGUSTUS	FEBRUARI	AGUSTUS	FEBRUARI	AGUSTUS	FEBRUARI	AGUSTUS	FEBRUARI
PENDUDUK USIA 15+	3.030,04	3.047,92	3.066,50	3.092,88	3.118,04	3.141,29	3.164,65	3.189,02	3.212,21
ANGKATAN KERJA	2.383,46	2.283,90	2.410,42	2.316,76	2.458,78	2.372,02	2.382,47	2.463,04	2.469,10
BEKERJA	2.337,71	2.242,08	2.377,39	2.272,63	2.425,17	2.324,81	2.332,06	2.416,56	2.437,49
PENGGANGGURAN	45,75	41,82	33,03	44,13	33,61	47,21	50,40	46,48	31,61
BUKAN ANKATAN KERJA	646,58	764,03	656,08	776,12	659,25	769,27	782,19	725,98	743,10
TINGKAT PARTISIPASI ANKATAN KERJA (%)	78,66	74,93	78,61	74,91	78,86	75,51	75,28	77,24	76,87
TINGKAT PENGGANGGURAN TERBUKA (%)	1,92	1,83	1,37	1,90	1,37	1,99	2,12	1,89	1,28

Sumber: BPS Provinsi Bali



Sumber: BPS Provinsi Bali

Grafik 6.1 Perkembangan Tingkat Pengangguran di Provinsi Bali

Secara umum, penduduk usia kerja yang bekerja di Bali masih didominasi oleh pekerja yang berpendidikan SD ke bawah. Hampir tiap periode kelompok pekerja berpendidikan SD ke bawah ini selalu memiliki pangsa paling besar di antara kelompok pendidikan lainnya, namun dengan proporsi yang cenderung menurun. Sementara itu, jenjang pendidikan menengah (SMA dan SMK) cenderung mengalami peningkatan proporsi di tiap periodenya. Pada Februari 2017,

kelompok pekerja yang berpendidikan menengah tercatat sebesar 814 ribu orang, meningkat dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya yang sebesar 694 ribu orang atau tumbuh 17,2% (yoy). Meskipun demikian, jika dibandingkan dengan Agustus 2016, jumlah kelompok pekerja yang berpendidikan menengah sedikit menurun atau terkontraksi 1,3%.

Berdasarkan jumlah jam kerja per minggu, jumlah pekerja penuh waktu (35 jam atau lebih per minggu) di Bali pada Februari 2017 tercatat sebanyak 1,8 juta orang, tumbuh sebesar 32,3% (yoy) dibandingkan dengan Februari 2016 namun mengalami kontraksi sebesar -5,3% jika dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Dari keseluruhan penduduk usia 15 tahun ke atas yang bekerja, tercatat 74% merupakan pekerja penuh waktu sementara sisanya 26% merupakan pekerja tidak penuh (1-34 Jam per minggu).

Tabel 6.3 Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan

Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan	2013		2014		2015		2016		2017
	Februari	Agustus	Februari	Agustus	Februari	Agustus	Februari	Agustus	Februari
< SD KE BAWAH	989.101	886.342	1.002.707	875.729	942.764	930.013	858.390	856.765	890.927
SMP	360.642	330.310	360.432	337.080	365.809	334.988	369.220	365.427	392.097
SMA	416.742	452.607	476.634	482.680	432.128	457.522	400.619	494.948	469.762
SMK	266.404	258.412	274.374	264.750	342.283	274.841	294.369	329.935	344.514
Diploma I / II / III	117.972	109.748	84.420	99.321	106.837	107.783	129.394	104.804	108.491
UNIVERSITAS	186.848	204.657	178.827	213.072	235.352	219.658	280.072	264.676	231.703
TOTAL	2.337.709	2.242.076	2.377.394	2.272.632	2.425.173	2.324.805	2.332.064	2.416.555	2.437.494

Sumber: BPS Provinsi Bali

Tabel 6.4 Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Menurut Jumlah Jam Kerja

PENDUDUK YANG BEKERJA	2014		2015		2016		2017
	FEBRUARI	AGUSTUS	FEBRUARI	AGUSTUS	FEBRUARI	AGUSTUS	FEBRUARI
PEKERJA TIDAK PENUH							
JUMLAH	545.757	513.334	560.330	479.037	970.346	512.816	635.294
%	23	23	23	21	42	21	26
PEKERJA PENUH							
JUMLAH	1.831.637	1.759.298	1.864.843	1.845.768	1.361.718	1.903.739	1.802.200
%	77	77	77	79	58	79	74
TOTAL	2.377.394	2.272.632	2.425.173	2.324.805	2.332.064	2.416.555	2.437.494

Sumber: BPS Provinsi Bali

Struktur lapangan pekerjaan secara umum tidak mengalami perubahan. Sektor perdagangan, rumah makan, dan akomodasi (PHR) yang menggambarkan kinerja sektor pariwisata masih menjadi penyumbang terbesar penyerapan tenaga kerja di Bali. Pada Februari 2017, lapangan usaha tersebut menyerap tenaga kerja terbanyak yaitu sebesar 749 ribu orang, atau 30,7% dari total penduduk yang bekerja di Bali, lebih besar dari periode yang sama tahun sebelumnya maupun Agustus 2016 yang masing-masing tercatat sebesar 708 ribu orang (pangsa 30,3%) dan 728 ribu orang (pangsa 30,1%). Lapangan usaha pertanian kemudian menempati posisi kedua dengan menyerap 467 ribu atau sebesar 19,2% dari total penduduk yang bekerja di Bali. Jumlah ini menurun jika dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya maupun Agustus 2016 yang masing-masing tercatat sebesar 511 ribu orang (pangsa 21,9%) dan 506 ribu orang (pangsa 20,9%). Sementara lapangan usaha jasa kemasyarakatan menempati posisi ketiga dengan menyerap 451 ribu orang atau 18,5% dari penduduk yang bekerja di

Bali. Jumlah ini meningkat jika dibandingkan dengan Februari 2016 maupun Agustus 2016 yang masing-masing tercatat sebesar 419 ribu orang (pangsa 17,9%) dan 433 ribu orang (pangsa 17,9%).

Sebaran tenaga kerja di Bali secara umum sejalan dengan distribusi PDRB berdasarkan lapangan usaha. Berdasarkan data PDRB triwulan I 2017, lapangan usaha Perdagangan Hotel dan Restoran (PHR) masih menjadi kontributor utama terhadap perekonomian Bali dengan pangsa sebesar 32,1%. Sementara kontributor terbesar kedua adalah lapangan usaha Pertanian dengan pangsa sebesar 14,3%. Jika melihat jenjang pendidikan yang ditamatkan penduduk usia kerja, yang bekerja mayoritas adalah lulusan SD ke bawah dan pendidikan menengah (SMA dan SMK). Dapat diperkirakan bahwa penduduk yang bekerja dan mengenyam pendidikan SD ke bawah terserap ke lapangan usaha pertanian sementara penduduk dengan pendidikan menengah terserap ke lapangan usaha PHR.

Tabel 6.5 Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Menurut Lapangan Usaha

LAPANGAN PEKERJAAN UTAMA	2014		2015		2016		2017
	FEBRUARI	AGUSTUS	FEBRUARI	AGUSTUS	FEBRUARI	AGUSTUS	FEBRUARI
Pertanian	590.169	528.506	569.493	520.775	511.861	506.251	467.696
Industri	337.080	316.598	398.873	287.534	329.478	370.531	388.633
Konstruksi	230.524	205.470	177.619	196.696	168.845	171.097	194.535
PHR	674.595	658.312	721.776	768.075	708.012	728.757	749.959
Transportasi, Perdagangan, dan Komunikasi	71.982	70.658	66.368	75.472	90.360	90.611	82.829
Keuangan	73.168	82.431	107.945	92.546	97.228	109.977	95.434
Jasa Kemasyarakatan	381.219	393.056	371.973	368.535	418.862	433.377	451.223
Lainnya	18.657	17.601	11.126	15.172	7.418	5.954	7.185

Sumber: BPS Provinsi Bali

Selanjutnya, sejalan dengan kontribusi lapangan usaha pertanian terhadap PDRB yang terus menurun dan kontribusi lapangan usaha PHR terhadap PDRB yang terus meningkat, porsi penyerapan tenaga kerja pada lapangan usaha pertanian juga cenderung mengalami tren penurunan sementara lapangan usaha PHR cenderung mengalami tren peningkatan. Hal ini mengindikasikan bahwa peran sektor pertanian dari periode ke periode mulai mengalami penurunan dan beralih ke sektor PHR. Dengan kondisi seperti ini, agar tidak terdapat ketidaksesuaian antara jenis pendidikan dan lapangan pekerjaan yang tersedia, jenis pendidikan yang perlu dikembangkan di Bali dalam rangka pemenuhan sumber daya manusia harus memperhatikan jenis atau tipe pekerjaan yang paling banyak tersedia di wilayah tersebut atau dalam hal ini adalah lapangan usaha yang terkait dengan pariwisata yaitu PHR.

Jenis pekerjaan yang dominan pada Februari 2017 adalah kelompok orang yang bekerja pada kegiatan informal. Penduduk yang bekerja pada kegiatan informal tercatat sebanyak 1,27 juta jiwa atau sebesar 52,39% dari total penduduk yang bekerja.

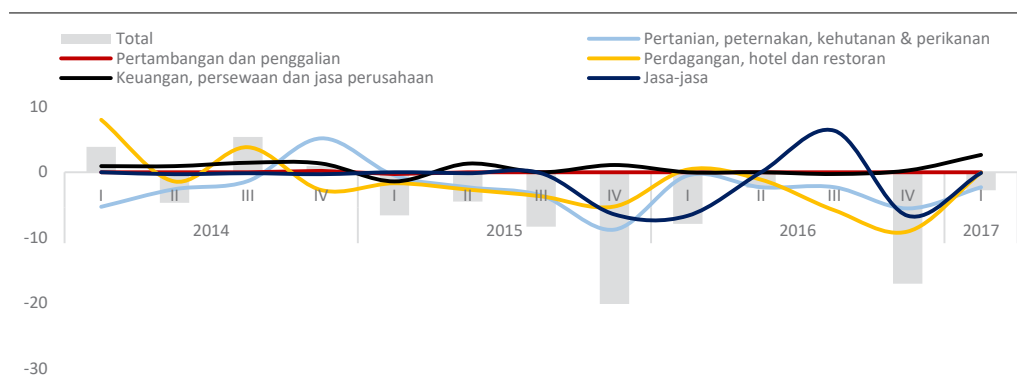
Sedangkan orang yang bekerja pada kegiatan formal tercatat sebanyak 1,09 juta jiwa atau sebesar 46,93% pada periode yang sama. Komposisi tersebut relatif meningkat jika dibandingkan dengan kondisi pada Februari 2016 dan Agustus 2016. Hal ini mengindikasikan bahwa kondisi ketenagakerjaan semakin membaik karena terjadi peningkatan pekerja pada sektor formal yang cenderung memiliki jaminan kelangsungan pekerjaan.

Perbaikan kondisi ketenagakerjaan di Provinsi Bali pada periode laporan turut dikonfirmasi oleh Survei Kegiatan Dunia Usaha (SKDU) dan Survei Konsumen (SK) Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPw BI) Provinsi Bali. Berdasarkan hasil SKDU, penggunaan tenaga kerja secara umum menunjukkan perbaikan pada triwulan I 2017 dibanding triwulan IV 2016 dan triwulan I 2016. Hal ini tercermin dari nilai Saldo Bersih Tertimbang (SBT) penggunaan tenaga kerja pada triwulan I 2017 tercatat sebesar -2,75%, lebih tinggi dibanding triwulan IV 2016 dan triwulan I 2016 yang masing-masing sebesar -17,02% dan -7,89%. Perbaikan penggunaan tenaga kerja paling besar terjadi di sektor PHR yang pada triwulan I 2017

Tabel 6.6 Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Menurut Status Pekerjaan Utama

STATUS PEKERJAAN UTAMA	2014		2015		2016		2017
	FEBRUARI	AGUSTUS	FEBRUARI	AGUSTUS	FEBRUARI	AGUSTUS	FEBRUARI
PEKERJA INFORMAL	1.380.917	1.189.010	1.277.450	1.227.424	1.237.564	1.312.701	1.277.039
PEKERJA FORMAL	996.477	1.083.622	1.147.723	1.097.381	1.094.500	1.103.854	1.160.455
TOTAL	2.377.394	2.272.632	2.425.173	2.324.805	2.332.064	2.416.555	2.437.494

Sumber: BPS Provinsi Bali

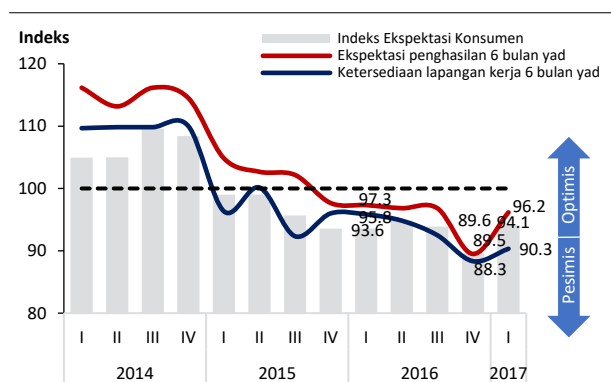


Sumber: SKDU KPw BI Provinsi Bali

Grafik 6.2 Penambahan Tenaga Kerja (Hasil SKDU)

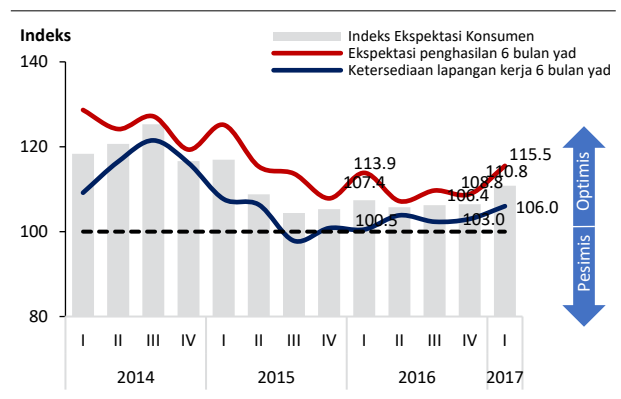
tercatat sebesar -0,05%, meningkat cukup besar dibandingkan dengan triwulan IV 2016 yang sebesar -9,06%. Perbaikan penggunaan tenaga kerja di sektor PHR ini sejalan dengan peningkatan kinerja lapangan usaha PHR di triwulan I 2017 (berdasarkan dari PDRB Bali). Meskipun secara umum kondisi penggunaan tenaga kerja menunjukkan perbaikan, namun nilai minus pada SBT menunjukkan jumlah responden (pelaku usaha) yang mengkonfirmasi pengurangan penggunaan tenaga kerja lebih banyak dari yang menambah jumlah tenaga kerja.

Sejalan dengan hasil SKDU, Survei Konsumen (SK) triwulan I 2017 juga menunjukkan tendensi perbaikan terkait kondisi tenaga kerja. Berdasarkan hasil SK, terlihat bahwa tingkat keyakinan konsumen terhadap indikator ketersediaan lapangan kerja saat ini yaitu sebesar 90,3. Nilai ini lebih tinggi dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang sebesar 88,3, namun lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya (95,8). Peningkatan indikator ini, juga sejalan dengan peningkatan ekspektasi konsumen terhadap perekonomian ke depan yang diperkirakan tumbuh lebih baik.



Sumber: Badan Pusat Statistik

Grafik 6.3 Perkembangan Indikator Survei Konsumen

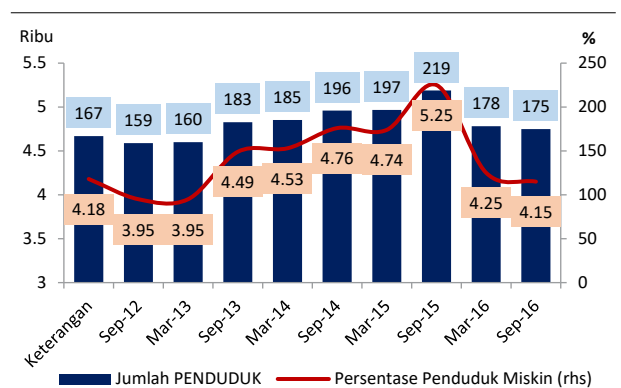


Sumber: Badan Pusat Statistik

Grafik 6.4 Indikator Ekspektasi Survei Konsumen

6.2. PERKEMBANGAN KESEJAHTERAAN

Tingkat kemiskinan Bali pada September 2016 tercatat sebesar 4,15% atau terdapat 174,94 ribu orang di Bali yang merupakan penduduk miskin. Jumlah ini menurun dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu maupun dibandingkan Maret 2016 yang masing-masing tercatat sebesar 5,25% (terdapat 218,79 ribu penduduk miskin) dan 4,25% (terdapat 178,18 ribu penduduk miskin). Penurunan jumlah penduduk miskin tersebut terutama didorong oleh penurunan jumlah penduduk miskin yang berada di wilayah perkotaan. Jumlah penduduk miskin pada wilayah perkotaan pada September 2016 tercatat sebesar 93,74 ribu orang, menurun dari Maret 2016 yang tercatat sebesar 96,98 ribu orang.

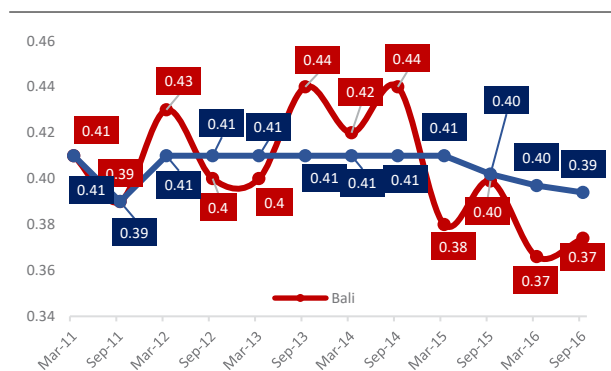


Sumber: BPS Provinsi Bali

Grafik 6.5 Perkembangan Kemiskinan di Provinsi Bali

Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan kemiskinan (P2) pada September 2016 menurun jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya. Pada september 2016, P1 dan P2 menurun masing-masing dari 1,13 dan 0,35 menjadi 0,53 dan 0,11. Penurunan kedua indeks ini mengindikasikan bahwa pengeluaran penduduk miskin cenderung mendekat dari garis kemiskinan dan ketimpangan antarpenduduk miskin semakin menyempit. Meskipun demikian, jika dibandingkan dengan periode Maret 2016, nilai P1 dan P2 September 2016 sedikit meningkat.

Dari sisi pemerataan pendapatan, disparitas pendapatan di Provinsi Bali pada September 2016 yang digambarkan melalui Gini Ratio menurun menjadi 0,374 dari 0,399 pada periode yang sama tahun sebelumnya. Namun demikian, seiring dengan peningkatan P1 dan P2 dari periode Maret 2016 ke



Sumber: BPS Provinsi Bali

Grafik 6.6 Perkembangan Gini Ratio di Provinsi Bali

September 2016, pergerakan Gini Ratio Bali pada periode tersebut juga cenderung mengalami sedikit peningkatan. Gini Ratio Maret 2016 yang tercatat sebesar 0,366, lebih rendah dari Gini Ratio Bali pada September 2016 yang sebesar 0,374.

6.3. KESEJAHTERAAN MASYARAKAT PEDESAAN

Nilai Tukar Petani (NTP) Bali pada triwulan I 2017 tercatat sebesar 105,6, menurun dibandingkan dengan triwulan IV 2016 yang sebesar 107. Penurunan NTP ini terjadi seiring dengan peningkatan Indeks Harga yang Dibayarkan Petani (IB) yang lebih tinggi daripada peningkatan Indeks Harga yang Diterima Petani (IT). Hampir semua subsektor pertanian mengalami penurunan NTP kecuali NTP Perikanan. Meskipun demikian, NTP Bali pada triwulan I 2017 tersebut masih lebih tinggi dari NTP Nasional.

Penurunan NTP tertinggi pada triwulan I 2017 terjadi pada subsektor hortikultura yang berkontraksi sebesar -1,88% (qtq) diikuti subsektor tanaman pangan yang berkontraksi sebesar -1,64% (qtq), subsektor Peternakan yang berkontraksi sebesar -1,12% (qtq) dan subsektor Perkebunan Rakyat -0,68% (qtq). Penurunan NTP pada keempat subsektor ini terjadi karena laju kenaikan Indeks Yang Dibayar Petani (IB) lebih tinggi dibanding Indeks Yang Diterima Petani (IT). Melambatnya laju pertumbuhan IT pada subsektor hortikultura yang mengalami kontraksi NTP paling besar dipengaruhi oleh penurunan harga

Tabel 6.7 Jumlah Penduduk Miskin

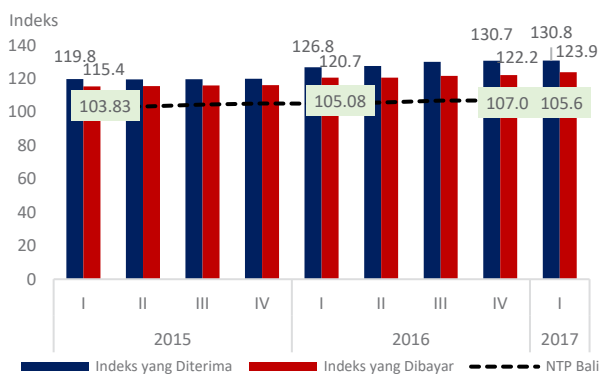
	2012		2013		2014		2015		2016	
	Mar	Sep	Mar	Sep	Mar	Sep	Mar	Sep	Mar	Sep
Jumlah Penduduk Miskin	160,95	161,00	182,77	186,53	185,20	195,95	196,71	218,79	178,18	174,94
Persentase Penduduk Miskin (rts)	4,18	3,95	3,95	4,49	4,53	4,76	4,74	5,25	4,25	4,15
- Kota	3,81	3,81	3,90	4,17	4,01	4,35	4,31	4,52	3,68	3,53
- Desa	4,17	4,17	4,04	5,00	5,34	5,39	5,44	6,42	5,23	5,21
Garis Kemiskinan (Rp)	254.221	254.221	284.009	284.009	295.210	301.747	321.834	331.028	338.967	346.398
Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)	0,39	0,39	0,70	0,71	0,42	0,87	0,66	1,13	0,51	0,53
Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)	0,17	0,07	0,16	0,17	0,06	0,26	0,14	0,35	0,09	0,11

*) angka periode Maret

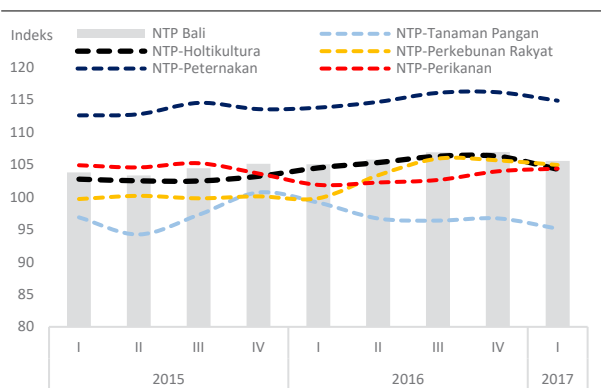
Sumber : Badan Pusat Statistik

komoditas buah-buahan seperti salak, pisang, tomat, dan semangka. Sementara itu, melambatnya laju pertumbuhan IT pada subsektor tanaman pangan dipengaruhi oleh penurunan harga komoditas padi.

Penurunan NTP pada ke empat subsektor ini sejalan dengan tekanan inflasi di Bali yang mulai menurun sejak Februari 2017, bahkan pada Maret 2017, Bali tercatat mengalami deflasi sebesar -0,02% (mtm). Deflasi terjadi dikarenakan mulai masuknya periode panen raya yang juga didukung dengan membaiknya kondisi cuaca sehingga mendorong perbaikan kinerja produksi dan selanjutnya mendorong tersedianya pasokan komoditas pangan. Kondisi tersebut kemudian mendorong terjadinya penurunan inflasi kelompok *volatile food* yang merupakan komoditas pertanian secara luas seperti cabai rawit, cabai merah, daging ayam ras, dan beras.



Grafik 6.7 NTP Bali, Indeks yang Diterima (IT), dan Indeks yang Dibayar (IB)
Sumber : Badan Pusat Statistik

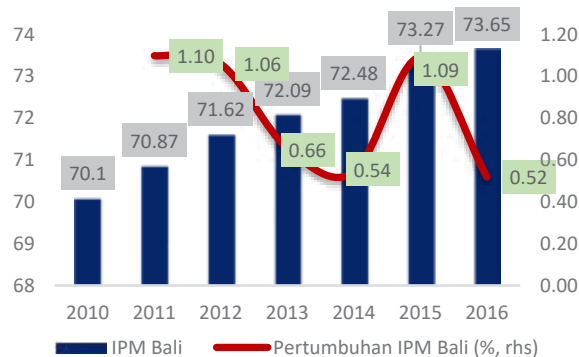


Grafik 6.8 Perbandingan NTP Bali dan Nasional
Sumber : Badan Pusat Statistik

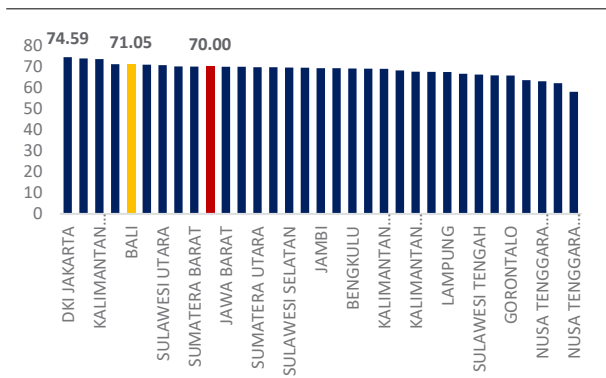
Berbeda dengan keempat subsektor yang mengalami penurunan, NTP subsektor perikanan menunjukkan peningkatan sebesar 0,40% (qtq), yaitu dari 103,99 di triwulan IV 2016 menjadi 104,41 pada triwulan I 2017. Peningkatan NTP pada subsektor ini terjadi karena laju kenaikan Indeks Yang Diterima Petani (IT) lebih tinggi dibanding Indeks Yang Dibayar Petani (IB). Peningkatan pertumbuhan IT dipengaruhi oleh peningkatan sejumlah komoditas perikanan seperti lemuru, cumi-cumi, tongkol, udang, dan cakalang.

6.4. INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA

Pembangunan manusia di Bali kembali mengalami perbaikan yang ditandai dengan nilai IPM yang tinggi dan menunjukkan tren peningkatan serta berada di atas IPM nasional. Data terakhir menyebutkan IPM Provinsi Bali di tahun 2016 sebesar 73,65, meningkat dibanding IPM Bali tahun 2015 yang tercatat sebesar 73,27, dan lebih tinggi dibanding IPM nasional tahun 2016 yang sebesar 70,18. IPM Bali juga tercatat sebagai IPM tertinggi ke 5 di Indonesia. Meskipun demikian, pertumbuhan IPM Bali di tahun 2016 ini merupakan pertumbuhan terendah dalam enam tahun terakhir.



Grafik 6.9 Perkembangan IPM Provinsi Bali
Sumber : Badan Pusat Statistik



Sumber : Badan Pusat Statistik

Grafik 6.10 Perbandingan IPM Bali dan Nasional

Meningkatnya IPM Bali pada tahun 2016 dipengaruhi oleh peningkatan komponen pembentuk IPM yaitu Angka Harapan Hidup saat Lahir (AHH), Harapan Lama Sekolah (EYS), Rata-rata Lama Sekolah (MYS), dan Pengeluaran Per Kapita/tahun disesuaikan. Di tahun 2016 AHH Provinsi Bali tercatat mencapai 71,41 tahun atau dengan kata lain bayi yang lahir di tahun 2016 memiliki peluang untuk hidup hingga 71,41 tahun. Nilai ini meningkat 0,06 tahun dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang sebesar 71,35 tahun. Sementara itu, dimensi pengetahuan EYS dan MYS pada tahun 2016 mencapai 13,04 tahun dan 8,36 tahun atau dengan kata lain anak-anak usia tujuh tahun memiliki peluang untuk bersekolah selama 13,04 tahun dan penduduk usia 25 tahun ke atas secara rata-rata menempuh pendidikan selama 8,36 tahun. Nilai EYS dan MYS ini meningkat masing-masing sebesar 0,07 tahun dan 0,10 tahun dibandingkan tahun 2015. Komponen pembentuk IPM lain yang mengalami peningkatan adalah Pengeluaran Per Kapita/tahun Disesuaikan yang menggambarkan kelayakan standar hidup. Pada tahun 2016, pengeluaran per kapita penduduk Provinsi Bali mencapai Rp 13,28 juta per tahun atau meningkat Rp 201 ribu dibandingkan tahun 2015.

PROSPEK PEREKONOMIAN DAERAH



Pertumbuhan ekonomi Provinsi Bali pada triwulan III 2017, diperkirakan mengalami akan peningkatan dalam kisaran 6,19%-6,59% (yoy).

Inflasi Bali triwulan III 2017 diperkirakan melandai pada kisaran $3,3\% \pm 1\%$ (yoy).

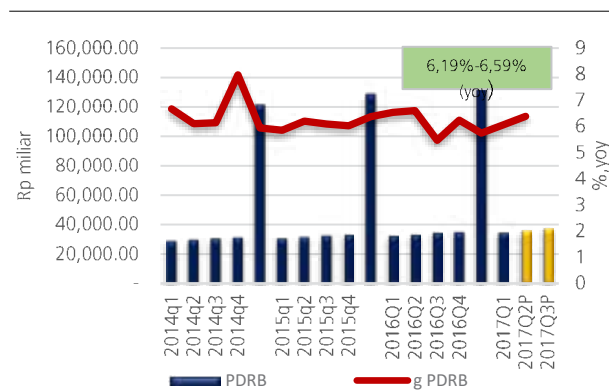
inflasi Bali tahun 2017 diperkirakan akan berada dalam kisaran $4\% \pm 1\%$ (yoy), lebih tinggi dibandingkan dengan inflasi Bali tahun 2016 yang sebesar 3,23% (yoy).

BAB VII



7.1. MAKRO EKONOMI REGIONAL

Ekonomi Provinsi Bali pada triwulan III 2017, diprakirakan akan mengalami peningkatan dalam kisaran 6,19%-6,59% (yoy). Dari sisi permintaan, peningkatan terutama didorong oleh sebagian besar komponen, terutama konsumsi, investasi dan ekspor luar negeri. Sementara itu dari sisi penawaran, peningkatan didorong oleh peningkatan kinerja sebagian besar lapangan usaha utama yaitu lapangan usaha penyediaan konstruksi, akomodasi makan dan minum, perdagangan besar dan eceran, serta transportasi dan pergudangan.



Sumber : Badan Pusat Statistik, diolah

Keterangan : p) Angka Proyeksi Bank Indonesia

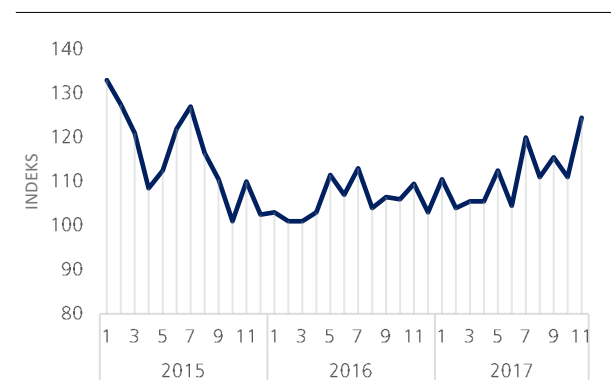
Grafik 7.1 Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Bali Triwulanan

Sisi permintaan

Dari sisi permintaan, pertumbuhan ekonomi Bali pada triwulan III 2017 didorong oleh perkiraan peningkatan kinerja konsumsi pemerintah, investasi (PMTB) dan ekspor. Peningkatan kinerja konsumsi pemerintah, baik untuk APBD (provinsi maupun kabupaten/kota) maupun untuk APBN (kementerian dan lembaga vertikal), didorong oleh upaya percepatan realisasi belanja barang dan jasa, pegawai maupun belanja modal untuk mengejar target realisasi anggaran belanja. Khusus untuk APBD, percepatan dilakukan melalui pelaksanaan evaluasi dan monitoring secara kontinyu dan berkelanjutan, setelah pada triwulan I 2017 cenderung melambat sebagai dampak dari penataan organisasi dan perangkat daerah (OPD)

yang baru. Adapun rencana pembangunan proyek infrastruktur yang akan berlangsung pada tahun 2017 antara lain adalah peningkatan kapasitas jalan (pembangunan *short cut*), jembatan, irigasi (pembangunan waduk) dan pembangunan sistem penyediaan air minum (SPAM), yang diprakirakan akan dikerjakan pada triwulan II 2017.

Peningkatan realisasi pembangunan proyek infrastruktur oleh pemerintah daerah pada triwulan III 2017, akan mendorong peningkatan kinerja investasi, yang dikontribusikan oleh peningkatan pengerjaan proyek Pemerintah dan swasta. Peningkatan tersebut sejalan dengan semakin tingginya optimisme pelaku usaha ke depan terhadap perkembangan kondisi ekonomi makro regional dan global. Selain itu, optimisme pelaku usaha juga didorong oleh tendensi tetap melandainya tingkat suku bunga kredit perbankan (investasi dan modal kerja) di Provinsi Bali, sebagai respon terhadap implementasi *BI 7 day Reverse Repo rate*.



Sumber : Survei Konsumen

Grafik 7.2 Ekspektasi Penghasilan

Seiring dengan prakiraan berlanjutnya perbaikan kinerja ekonomi negara tujuan ekspor Bali, yaitu Amerika Serikat dan pengembangan pasar alternatif (diversifikasi) negara tujuan ekspor, antara lain Timur Tengah, kinerja komponen ekspor pada triwulan III 2017 diprakirakan akan meningkat. Sejalan dengan itu, upaya eksportir untuk terus melakukan diversifikasi produk dan peningkatan kualitas produk agar dapat bersaing di tengah semakin ketatnya persaingan, juga diprakirakan menjadi pendorong peningkatan kinerja ekonomi Bali di triwulan III 2017. Seiring dengan kondisi tersebut dan masuknya periode *peak* pariwisata di triwulan III 2017, kinerja ekspor jasa diperkirakan juga turut menunjukkan peningkatan. Peningkatan ekspor jasa, juga didorong oleh peningkatan upaya promosi dan penjualan melalui *online booking*, *sales call*, dan program diskon. Keikutsertaan pelaku usaha dalam kegiatan pameran internasional dan pengembangan pasar alternatif yaitu India, Timur Tengah dan Rusia, juga merupakan faktor pendorong peningkatan kinerja ekspor jasa di triwulan III 2017.

Sisi Penawaran

Dari sisi penawaran, optimisme peningkatan pertumbuhan ekonomi pada triwulan III 2017, didorong oleh prakiraan peningkatan kinerja sebagian besar lapangan usaha utama, yang meliputi antara lain lapangan usaha perdagangan besar dan eceran, penyediaan akomodasi makan dan minum, serta transportasi dan pergudangan, konstruksi serta industri pengolahan. Prakiraan peningkatan kinerja perdagangan besar dan eceran serta penyediaan akomodasi makan dan minum, didorong oleh masuknya periode *peak season* pariwisata dan periode masuknya tahun ajaran baru, sehingga mendorong peningkatan kinerja kedua lapangan usaha tersebut. Tetap terjaga daya beli konsumen, seiring dengan inflasi yang terjaga dan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) dalam level rendah yang stabil,

mendukung kuatnya permintaan konsumsi di triwulan III 2017. Potensi peningkatan penghasilan konsumen di periode triwulan III 2017 (berdasarkan hasil survei konsumen), juga menjadi salah satu pendorong peningkatan kinerja perdagangan. Prakiraan terus meningkatnya aktivitas MICE, seiring dengan persiapan kegiatan *International Monetary Fund (IMF)* dan *World Bank annual meeting* dan MICE dari pihak swasta, juga ikut mendorong peningkatan kinerja lapangan usaha penyediaan akomodasi makan minum. Peningkatan kinerja lapangan usaha transportasi dan pergudangan di triwulan III 2017 akan didorong oleh peningkatan jumlah kunjungan wisman, sejalan dengan masuknya periode *peak season* pariwisata di Bali pada triwulan laporan dan dampak lanjutan pembukaan rute baru penerbangan di sepanjang triwulan II dan III tahun 2017. Tingginya mobilitas dan aktivitas MICE pemerintah dan swasta ke Bali di periode triwulan III 2017, juga menjadi salah satu faktor pendorong peningkatan kinerja lapangan usaha ini.

Upaya percepatan pengerjaan proyek infrastruktur milik pemerintah untuk mengejar penyelesaian proyek dan target realisasi belanja serta peningkatan investasi fisik yang dilakukan oleh pelaku usaha sejalan dengan meningkatnya optimisme terhadap prospek ekonomi ke depan, ikut mendorong peningkatan kinerja lapangan usaha ini. Berlanjutnya penurunan suku bunga kredit, khususnya kredit pemilikan rumah (KPR) dan mulai berdampak relaksasi ketentuan *loan to value* (LTV) terhadap pasar properti, diprakirakan ikut mendorong peningkatan kinerja lapangan usaha ini. Peningkatan kinerja industri pengolahan, sejalan dengan terus meningkatnya kinerja ekonomi negara mitra dagang Bali yaitu AS dan Australia, serta sejalan dengan pola musimannya yaitu meningkatnya permintaan khususnya untuk memenuhi permintaan perayaan natal dan tahun baru, yang telah dilakukan pada triwulan III.

Perkembangan ekonomi Bali ke depan, masih menghadapi tantangan dan risiko perlambatan di triwulan III 2017, yaitu bersumber dari potensi pemangkasan anggaran belanja baik untuk APBD (dana transfer) maupun APBN, akibat tidak tercapainya penerimaan pajak dan cukai pemerintah. Sementara itu, potensi terjadinya kenaikan harga minyak akibat instabilitas geopolitik di Timur Tengah dan Semenanjung Korea, terhambatnya kinerja ekspor Bali, disebabkan oleh potensi terjadinya implementasi penerapan kebijakan proteksionisme oleh Pemerintah Amerika Serikat, juga menjadi tantangan ke depan.

Perkiraan Ekonomi Provinsi Bali Tahun 2017

Dengan mencermati perkembangan ekonomi, *prompt indicators* dan hasil suvei serta liaison terakhir, perekonomian Provinsi Bali untuk keseluruhan tahun 2017, diperkirakan akan mengalami perlambatan dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi Bali tahun 2016, yang akan berada dalam kisaran 6,10%-6,50% (yoy). Dari sisi permintaan, prakiraan perlambatan kinerja disebabkan oleh melambatnya kinerja beberapa komponen yaitu konsumsi rumah tangga dan investasi.

Perlambatan kinerja konsumsi rumah tangga pada tahun 2017, terutama disebabkan oleh kenaikan tarif listrik untuk golongan subsidi 900vA dari sebesar Rp 605, menjadi Rp 791 per Januari 2017 dan akan dinaikkan kembali secara bertahap di Maret, Mei dan Juli 2017. Kondisi ini berpotensi menahan daya beli masyarakat, sehingga berpotensi menahan laju pertumbuhan konsumsi rumah tangga di tahun 2017. Selain itu, seiring dengan adanya kenaikan biaya pendidikan, mendorong konsumen untuk memprioritaskan pemenuhan alokasi pendapatan untuk kebutuhan pendidikan dibanding dengan alokasi untuk konsumsi lainnya. Faktor ini, ikut menjadi penahan laju pertumbuhan konsumsi di tahun 2017.

Perlambatan kinerja investasi di tahun 2017, terutama disebabkan oleh melambatnya investasi bangunan

khususnya yang bersumber investasi pemerintah. Kebijakan Pembaharuan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota di Bali pada awal Januari 2017 berpotensi menahan laju pertumbuhan ekonomi Bali. Akibat dari reorganisasi tersebut, di beberapa daerah, persetujuan pengadaan/proyek sedikit terlambat (baru disetujui/terrealisasi di akhir Januari 2017). Kondisi ini menyebabkan terjadinya penundaan tahapan khususnya pengadaan dan pengerjaan proyek infrastruktur dan belanja modal pemerintah, karena belum adanya penyesuaian personil baru dan beberapa akun anggaran. Akibatnya, realisasi belanja modal pun terhambat. Perlambatan kinerja komponen ini, juga disebabkan adanya penurunan pagu anggaran untuk infrastruktur (Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bali) untuk 2017 yang tercatat hanya sebesar Rp 229 miliar, jauh lebih rendah dibandingkan tahun 2016 yang sebesar Rp 692. Sejalan dengan itu, pagu anggaran belanja modal Provinsi Bali juga menurun dari Rp 768 miliar di tahun 2016, menjadi Rp 706 miliar di 2017. Perlambatan kinerja investasi di tahun 2017, juga disebabkan oleh penurunan pagu anggaran belanja modal untuk anggaran APBN di Provinsi Bali, tercatat sebesar Rp 1,38 triliun tahun 2017, lebih rendah bila dibandingkan 2016 yang sebesar Rp 1,69 triliun.

Dari sisi penawaran, prakiraan perlambatan ekonomi bersumber dari perlambatan kinerja lapangan usaha konstruksi, transportasi dan pergudangan serta jasa keuangan. Melambatnya kinerja konstruksi disebabkan oleh tertundanya realisasi pengerjaan proyek infrastruktur pemerintah pada tahun 2017, antara lain akibat penataan dan perubahan struktur OPD. Sejalan dengan hal tersebut, penurunan pagu anggaran untuk belanja modal di APBD yang dikelola oleh Pemerintah Provinsi Bali dan APBN di Bali yang dikelola oleh Kementerian dan Lembaga di Bali, diperkirakan menjadi penyebab terhambatnya kinerja lapangan usaha ini. Kondisi pasar properti yang belum

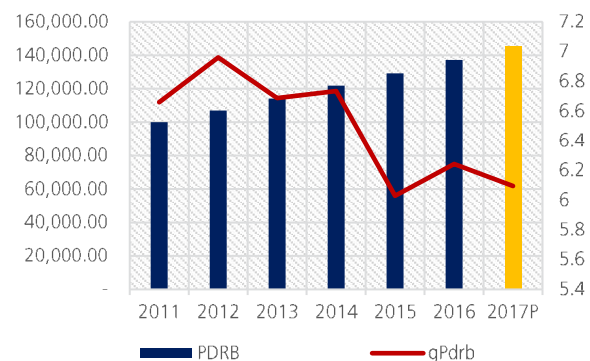
sepenuhnya bergairah pada tahun 2017 (berdasarkan hasil survei dan liaison), juga menjadi penyebab tertahannya kinerja lapangan usaha ini.

Perlambatan kinerja transportasi dan pergudangan di tahun 2017, disebabkan oleh kapasitas bandara I Gusti Ngurah Rai yang telah mendekati titik optimum, bahkan telah memberlakukan kebijakan operasional 24 jam setiap hari di triwulan II 2017 untuk memenuhi peningkatan frekuensi penerbangan. Namun peningkatan tersebut, tidak dapat setinggi tahun-tahun sebelumnya dengan kondisi run way yang hanya 1 dan daya tampung parkir pesawat di uproan yang terbatas. Sementara itu, kinerja lapangan usaha jasa keuangan yang tertahan di 2017, disebabkan oleh sikap *wait and see* beberapa pelaku usaha untuk menambah investasi menanti implementasi kebijakan paket deregulasi pemerintah yang sebelumnya telah diberlakukan. Tertahannya laju lapangan usaha ini juga disebabkan oleh peningkatan kehati-hatian dari perbankan dalam penyaluran kredit, sebagai upaya mitigasi resiko untuk menjaga tingkat kualitas kredit, berkaca pada akhir tahun 2016-awal tahun 2017 dengan tingkat NPL menunjukkan peningkatan.

Dari sisi perdagangan internasional, rencana implementasi kebijakan proteksionisme oleh presiden terpilih AS (Trump), berpotensi berdampak pada kinerja ekspor Provinsi Bali. Selain itu, rencana untuk menaikkan bunga surat utang Amerika juga dapat mempengaruhi perkembangan investasi di Provinsi Bali. Risiko terhambatnya kinerja ekspor juga terjadi seiring dengan proyeksi perlambatan kinerja ekonomi di tahun 2017, yang dialami oleh Tiongkok sebagai salah satu negara tujuan utama ekspor Bali.

Meskipun demikian, masih terdapat potensi terjadinya potensi peningkatan pertumbuhan ekonomi di tahun 2017, didorong oleh peningkatan produksi perikanan, sejalan dengan kondisi cuaca yang diperkirakan lebih baik pada tahun 2017. Program intensifikasi pertanian

dengan GPPTT disinergikan dengan penambahan luasan tanam serta perbaikan irigasi berpotensi mendorong peningkatan produksi pertanian. Selain itu, upaya untuk meningkatkan produksi ternak antara lain melalui program inseminasi buatan, menjadi faktor pendorong peningkatan produksi pertanian di 2017. Selanjutnya, terus meningkatnya jumlah kunjungan wisman, terutama dari Tiongkok berpotensi memberikan efek multiplier terhadap peningkatan kinerja beberapa lapangan usaha yang terkait. Potensi peningkatan kinerja ekonomi Bali juga didorong oleh peningkatan kinerja industri pariwisata, seiring dengan upaya pemerintah dalam *me-rebranding* dan mempromosikan Provinsi Bali sebagai destinasi pariwisata serta didukung upaya pelaku usaha untuk diversifikasi pasar negara asal wisman serta melakukan sinergi program Bali and Beyond. Sementara itu, industri pengolahan dan ekspor diperkirakan meningkat, sejalan dengan terus membaiknya kinerja ekonomi negara mitra dagang Bali (AS dan Australia) dan didorong oleh upaya pelaku usaha dalam meningkatkan akses pasar dengan mengembangkan alternatif segmen pasar baru.



Sumber : Badan Pusat Statistik, diolah
Keterangan : p) Angka Proyeksi Bank Indonesia
Grafik 7.3 Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Bali Tahunan

Tabel 7.1 Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Negara Tujuan Ekspor Utama Bali

Negara	Pangsa Ekspor Bali	Pertumbuhan Ekonomi			
		2015	2016**	2017**	2018**
USA	28	2.6	1.6	2.3	2.5
Japan	7	1.2	1	1.3	0.6
Australia	10	2.4	2.5	3.1	3
Singapore	7	1.9	2	2.3	2.6
Hongkong	4	2.4	1.9	2.4	2.5
Tiongkok	4	6.9	6.7	6.6	6.2
World Output		3.4	3.1	3.5	3.6

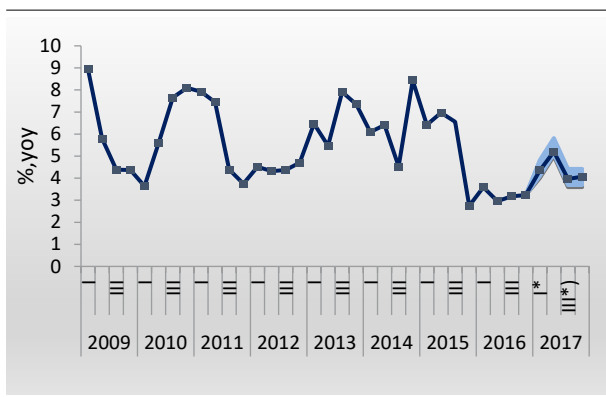
Sumber : World Economic Outlook, International Monetary Fund (IMF) April 2017

Keterangan :

**) angka proyeksi IMF

7.2. INFLASI BALI TAHUN 2017

Inflasi Bali triwulan III 2017 diperkirakan melandai pada kisaran $3,3\% \pm 1\%$ (yoy). Optimisme terjaganya inflasi pada periode tersebut seiring dengan relatif minimnya hari raya keagamaan pada triwulan III 2017. Meskipun demikian, masih terdapat potensi tekanan inflasi yang bersumber dari potensi peningkatan permintaan mengingat triwulan III 2017 merupakan periode *peak season* pariwisata. Dengan demikian, inflasi Bali tahun 2017 diperkirakan akan berada dalam kisaran $4\% \pm 1\%$ (yoy), lebih tinggi dibandingkan dengan inflasi Bali tahun 2016 yang sebesar 3,23% (yoy). Perkiraan tersebut diharapkan dapat mendukung tercapainya target inflasi nasional yang sebesar $4 \pm 1\%$ (yoy) sebagaimana tercantum dalam PMK No.93/PMK.011/2014 tentang Sasaran Inflasi. Berdasarkan disagregasinya, secara tahunan meningkatnya inflasi pada tahun 2017 terutama



Sumber : Badan Pusat Statistik, diolah
Keterangan : *) Angka Proyeksi BI

Grafik 7.4 Proyeksi Inflasi Bali

bersumber dari kelompok *administered prices* dan *volatile food*. Sementara itu tekanan kelompok *core inflation* diperkirakan masih stabil.

Tekanan inflasi kelompok *administered prices* bersumber dari potensi kenaikan harga BBM dan tarif listrik mengikuti pergerakan harga minyak dunia & kebijakan restrukturisasi subsidi energi. Sementara itu, terkait dengan perkiraan peningkatan kinerja industri pariwisata di tahun 2017, maka terdapat potensi tendensi kenaikan inflasi di tahun 2017 seiring dengan peningkatan permintaan. Namun demikian, seiring dengan komitmen & koordinasi TPID dlm menjaga ketersediaan pangan antara lain : 1) potensi peningkatan produksi tabama seiring dgn upaya intensifikasi produk pangan; 2) upaya TPID dlm menjaga ketersediaan komoditi pangan di seluruh wilayah Provinsi Bali melalui operasi pasar (beras) dan pasar murah; 3) penyediaan data harga di tingkat produsen sebagai *early warning system* diperkirakan dapat menahan volatilitas inflasi kelompok *volatile food*. Tekanan inflasi kelompok inti diperkirakan stabil, seiring dengan mulai membaiknya nilai tukar Rupiah serta ekspektasi inflasi yang terjaga. Terkendalinya tekanan inflasi inti didukung oleh terjaganya ekspektasi masyarakat dan masih kuatnya sisi penawaran dalam merespon permintaan.

6.3. UPAYA PENGENDALIAN INFLASI BALI

Sebagai upaya nyata menjaga laju inflasi Bali agar tetap stabil, Wakil Gubernur Bali selaku Ketua TPID

Provinsi Bali beserta seluruh jajaran secara rutin forum koordinasi *High Level Meeting* guna menetapkan langkah strategis pengendalian inflasi di seluruh Kabupaten/Kota di Bali. Upaya-upaya pengendalian inflasi secara intensif dilakukan oleh Pemerintah Daerah, Bank Indonesia, dan instansi terkait lainnya dalam wadah Tim Pengendalian Inflasi Daerah baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota untuk menjaga kestabilan harga di Provinsi Bali. Berbagai langkah kegiatan pengendalian inflasi yang telah dilakukan tersebut, yaitu:

1. Melakukan pertemuan rutin melalui forum koordinasi pengendalian inflasi daerah untuk tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota maupun se-Provinsi Bali, baik rapat tim teknis maupun rapat tim kebijakan dalam menyusun langkah – langkah responsif menyikapi gejolak harga.
2. Mengelola ekspektasi masyarakat melalui *talkshow* dan *press release* dan media lainnya mengenai kecukupan dan upaya menjaga ketersediaan barang terutama menjelang Hari Raya Keagamaan dan periode *peak season*.
3. Optimalisasi penyampaian informasi harga dan ketersediaan stok melalui Sistem Harga Pangan

Utama Komoditas Strategis (SiGapura) dalam rangka menjaga ekspektasi inflasi masyarakat dan mendukung integrasi PIHPS nasional.

Adapun langkah pengendalian inflasi ke depan yang akan dilakukan sebagaimana disampaikan dalam *High Level Meeting* TPID se-Provinsi Bali periode Mei 2017 adalah sebagai berikut :

- a. Peningkatan sinergi dan koordinasi antara SKPD dan *stakeholder* terkait dalam upaya pengendalian inflasi daerah.
- b. Optimalisasi pemanfaatan PIHPS SiGapura dalam rangka meminimalisir *asymmetric information* dan pemantauan pergerakan harga di pasar.
- c. Pelaksanaan pasar murah dan operasi pasar sesuai dengan perkembangan pasar.
- d. Identifikasi kecukupan stok komoditas pangan strategis secara berkala untuk menghindari kelangkaan barang
- e. Sosialisasi dan edukasi untuk menjaga ekspektasi masyarakat terhadap pergerakan harga barang dan jasa.
- f. Upaya menjaga kelancaran distribusi dan efisiensi alur distribusi di Provinsi Bali.

Daftar Singkatan

<i>Administered price</i>	Salah satu disagregasi inflasi, yaitu untuk komoditas yang perkembangan harganya diatur oleh pemerintah.
Andil inflasi	Sumbangan perkembangan harga suatu komoditas/kelompok barang/kota terhadap tingkat inflasi secara keseluruhan.
APBD	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
Bobot inflasi	Besaran yang menunjukkan pengaruh suatu komoditas terhadap tingkat inflasi secara keseluruhan, yang diperhitungkan dengan melihat tingkat konsumsi masyarakat terhadap komoditas tersebut.
Dana Perimbangan	Sumber pendapatan daerah yang berasal dari APBN untuk mendukung pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah dalam mencapai tujuan pemberian otonomi daerah.
Dana Pihak Ketiga (DPK)	Dana masyarakat (berupa tabungan, deposito, giro, dll) yang disimpan di suatu bank.
Faktor Fundamental	Faktor fundamental adalah faktor pendorong inflasi yang dapat dipengaruhi oleh kebijakan <i>moneter</i> , yakni interaksi permintaan-penawaran atau output gap, eksternal, serta ekspektasi inflasi masyarakat
Faktor Non Fundamental	Faktor non fundamental adalah faktor pendorong inflasi yang berada di luar kewenangan otoritas <i>moneter</i> , yakni produksi maupun distribusi bahan pangan (<i>volatile foods</i>), serta harga barang/jasa yang ditentukan oleh pemerintah (<i>administered price</i>)
Feronikel	Hasil olahan nikel mentah (<i>ore nickel</i>) dengan kadar antara 20-30% Ni dan digunakan sebagai bahan baku pembuatan baja dan <i>stainless steel</i>
<i>Imported inflation</i>	Salah satu disagregasi inflasi, yaitu inflasi yang berasal dari pengaruh perkembangan harga di luar negeri (eksternal)
Indeks Ekspektasi Konsumen	Salah satu pembentuk IKK. Indeks yang menunjukkan level keyakinan konsumen terhadap ekspektasi kondisi ekonomi 6 bulan mendatang, dengan skala 1–100.
Indeks Harga Konsumen (IHK)	Sebuah indeks yang merupakan ukuran perubahan rata-rata harga barang dan jasa yang dikonsumsi masyarakat pada suatu periode tertentu.
Indeks Kondisi Ekonomi	Salah satu pembentuk IKK. Indeks yang menunjukkan level keyakinan konsumen terhadap kondisi ekonomi saat ini, dengan skala 1–100.
Indeks Keyakinan Konsumen (IKK)	Indeks yang menunjukkan level keyakinan konsumen terhadap

	kondisi ekonomi saat ini dan ekspektasi kondisi ekonomi enam bulan mendatang, dengan skala 1–100.
Investasi	Kegiatan meningkatkan nilai tambah suatu kegiatan produksi melalui peningkatan modal.
Inflasi inti	Inflasi inti adalah inflasi yang dipengaruhi oleh faktor fundamental
<i>Liaison</i>	Kegiatan pengumpulan data/statistik dan informasi yang bersifat kualitatif dan kuantitatif yang dilakukan secara periodik melalui wawancara langsung kepada pelaku ekonomi mengenai perkembangan dan arah kegiatan ekonomi dengan cara yang sistematis dan didokumentasikan dalam bentuk laporan
<i>Loan to Deposit Ratio (LDR)</i>	Ratio yang menunjukkan perbandingan antara jumlah pinjaman yang disalurkan dengan dana pihak ke tiga yang dihimpun pada suatu waktu tertentu.
Migas	Minyak dan gas. Merupakan kelompok sektor industri yang mencakup industri minyak dan gas.
Mtm	<i>Month to month</i> . Perbandingan antara data satu bulan dengan bulan sebelumnya.
NPI	<i>Nickel Pig Iron</i> . Hasil olahan ore nickel dengan kandungan 5-10% Ni.
<i>Non Performing Loan (NPL)</i>	Besarnya jumlah kredit bermasalah pada suatu Bank dibanding dengan total keseluruhan kreditnya
Omzet	Nilai penjualan bruto yang diperoleh dari satu kali proses produksi.
PDRB	Produk Domestik Regional Bruto. Pendapatan suatu daerah yang mencerminkan hasil kegiatan ekonomi yang ada di suatu wilayah tertentu.
Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Pendapatan yang diperoleh dari aktivitas ekonomi suatu daerah seperti hasil pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah.
<i>Perceived risk</i>	Persepsi risiko yang dimiliki oleh investor terhadap kondisi perekonomian sebuah negara
Qtq	<i>Quarter to quarter</i> . Perbandingan antara data satu triwulan dengan triwulan sebelumnya.
Saldo Bersih	Selisih antara persentase jumlah responden yang memberikan jawaban “meningkat” dengan persentase jumlah responden yang memberikan jawaban “menurun” dan mengabaikan jawaban “sama”.
SBT	Saldo Bersih Tertimbang. Nilai yang diperoleh dari hasil perkalian saldo bersih sektor/subsektor yang bersangkutan dengan bobot sektor/subsektor yang bersangkutan sebagai penimbangannya.
Sektor ekonomi dominan	Sektor ekonomi yang mempunyai nilai tambah besar sehingga mempunyai pengaruh dominan pada pembentukan PDRB secara keseluruhan.

Volatile food

Salah satu disagregasi inflasi, yaitu untuk komoditas yang perkembangan harganya sangat bergejolak karena faktor-faktor tertentu.

West Texas Intermediate

Jenis minyak bumi yang menjadi acuan untuk transaksi perdagangan minyak dunia.

Yoy

Year on year. Perbandingan antara data satu tahun dengan tahun sebelumnya.

Tim Penyusun

Penanggung Jawab

Causa Iman Karana

Koordinator Penyusun

Azka Subhan A.

Editor

Teguh Setiadi

Tim Penulis

Umran Usman

Dea Woro Rinujit

Putriana Nurman

Ni Luh Sukesi

Kontributor

Tim Advisory Ekonomi dan Keuangan

Tim Pemberdayaan Ekonomi

Divisi Sistem Pembayaran dan Pengelolaan Uang Rupiah

Produksi dan Distribusi

Trio Puji Ardhiansyah

Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali

Divisi Advisory dan Pengembangan Ekonomi

Jl. Letda Tantular No. 4

Denpasar – Bali, 80234

Tel. (0361) 248982

Fax. (0361) 222988



KANTOR PERWAKILAN BANK INDONESIA PROVINSI BALI

Jl. Letda Tantular No. 4, Denpasar - 80234

Telp : 62-361-248982, Fax : 62-361-248993 - 222988,

Website : <http://www.bi.go.id>